



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021**



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Memangku :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 200);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program OPD dan lintas OPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra OPD.
- (2) Pengendalian evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

- (3) Tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi dapat menjadi masukan untuk perbaikan atau perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan RPJMD yang tidak merubah target indikator sasaran terakhir periode dan nomenklatur Program Prioritas, dilakukan melalui Peraturan Bupati yang mengatur tentang RKPD.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 05

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05/1185/LTM/2021**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah strategis itu kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan dari sistem Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, merujuk Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk pembangunan 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke-4 (tahap akhir) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Timur, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi RPJPD yaitu Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 selanjutnya akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, serta menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dan kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 05

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kebijakan Kewilayahan RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031	I – 22
Tabel 1.2	Hasil Telaahan Struktur Ruag Kab Lam Tim	I – 23
Tabel 1.3	Hasil Telaahan Pola Ruang Kab Lam Tim	I – 27
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur Dirinci per Kecamatan	II – 3
Tabel 2.2	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan pada Beberapa Wilayah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019	II – 4
Tabel 2.3	Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng di Kabupaten Lampung Timur	II – 7
Tabel 2.4	Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur	II – 7
Tabel 2.5	Potensi Luas Bahaya Bencana di Kabupaten Lampung Timur	II – 19
Tabel 2.6	Luas Kawasan Lindung	II – 19
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur 2015-2020	II – 21
Tabel 2.8	Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur per kilometer persegi .	II – 22
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II – 23
Tabel 2.10	Jumlah Keluarga per Kecamatan Tahun 2015-2020	II – 24
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut	II – 25
Tabel 2.12	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II – 26
Tabel 2.13	PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	II – 27
Tabel 2.14	PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020	II – 27
Tabel 2.15	PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	II – 28
Tabel 2.16	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kab.Lam Tim Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020	II – 29
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	II – 31
Tabel 2.18	PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	II – 32
Tabel 2.19	PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	II – 32
Tabel 2.20	PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2015-2020	II – 33

Tabel 2.21	PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2015-2020	II – 33
Tabel 2.22	Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2020	II – 36
Tabel 2.23	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2020	II – 36
Tabel 2.24	Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Timur	II – 36
Tabel 2.25	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020	II – 37
Tabel 2.26	APK dan APM PAUD, SD dan SLTP Kabupaten Lampung Timur	II – 40
Tabel 2.27	APK Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	II – 41
Tabel 2.28	APM Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	II – 39
Tabel 2.29	Penduduk Usia Lebih dari 10 Tahun Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2020	II – 42
Tabel 2.30	Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Lampung Timur, 2019-2020	II – 48
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah di Kabupaten Lampung Timur 2020	II – 49
Tabel 2.32	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Kabupaten Lampung Timur	II – 5
Tabel 2.33	Rasio Guru dan Murid Kabupaten Lampung Timur	II – 50
Tabel 2.34	Akreditasi Sekolah Kab. Lam Tim Tahun 2020	II – 50
Tabel 2.35	Jumlah Guru PNS yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	II – 51
Tabel 2.36	Jumlah Guru Non PNS yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	II – 51
Tabel 2.37	Kecamatan/Desa di Kabupaten Lampung Timur dengan Prevalensi Stunting Tertinggi	II – 69
Tabel 2.38	Panjang Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan di Lampung Timur	II – 72
Tabel 2.39	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan	II – 73
Tabel 2.40	Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II – 73
Tabel 2.41	Panjang Jalan Desa dan Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019	II – 74
Tabel 2.42	Kondisi Jembatan di Kab.Lampung Timur Tahun 2021	II – 74
Tabel 2.43	Areal Terdampak Kondisi Jarigan Irigasi Permukaan Tahun 2021	II – 75
Tabel 2.44	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	II – 76
Tabel 2.45	Persentase rumah tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Tahun 2020	II – 77
Tabel 2.46	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Memasak/ Mandi/Cuci/dll Tahun 2020	II – 78
Tabel 2.47	Jumlah Pelanggan dan Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2020	II – 79

Tabel 2.48	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2015-2020	II – 80
Tabel 2.49	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan Tahun 2015-2020	II – 80
Tabel 2.50	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga di Provinsi Lampung Tahun 2020	II – 80
Tabel 2.51	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2015-2019	II – 81
Tabel 2.52	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2020	II – 81
Tabel 2.53	Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh	II – 82
Tabel 2.54	Fasilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana Tahun 2020	II – 82
Tabel 2.55	Jumlah Kejadian Kriminalitas di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020 (kasus)	II – 83
Tabel 2.56	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Kab/Kota Tahun 2017-2019	II – 82
Tabel 2.57	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.00 Penduduk Menurut Tingkat Kepolisian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018-2020	II – 85
Tabel 2.58	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018-2020	II – 86
Tabel 2.59	Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurut Jenis Kasus Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018-2020	II – 87
Tabel 2.60	Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2019	II – 88
Tabel 2.61	Rincian Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 ...	II – 88
Tabel 2.62	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima Tahun 2020	II – 89
Tabel 2.63	Jumlah Penerima Bantuan Sembako Masyarakat Terdampak COVID-19 per Kecamatan Tahun 2020	II – 90
Tabel 2.64	Pelayanan Sosial di Luar Panti Kabupaten Lampung Timur	II - 91
Tabel 2.65	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Karakteristik, Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 2020	II – 89
Tabel 2.66	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II – 92
Tabel 2.67	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019-2020	II – 93
Tabel 2.68	Jumlah Pekerja Buruh/Pekerja yang Menjadi Peserta Jamsostek	II – 93
Tabel 2.69	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	II – 91
Tabel 2.70	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur	II - 94
Tabel 2.71	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Timur	II - 95
Tabel 2.72	Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Lampung Timur	II - 96

Tabel 2.73	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Tahun 2020	II - 97
Tabel 2.74	Laju Pertumbuhan Penduduk Kab/Kota Provinsi Lampung	II - 98
Tabel 2.75	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Sektor	II - 100
Tabel 2.76	Jumlah <i>Base Transceiver Station</i> per Kecamatan	II - 101
Tabel 2.77	Perkembangan Jumlah Koperasi Berbadan Hukum 2015-2020	II - 102
Tabel 2.78	Jumlah UMKM per Kecamatan Tahun 2020	II - 104
Tabel 2.79	Jumlah Unit Usaha dan Nilai Investasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020	II - 105
Tabel 2.80	Jumlah Pemuda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II - 106
Tabel 2.81	Organisasi Kepemudaan Aktif Kab. Lam Tim	II - 106
Tabel 2.82	Hasil Perolehan Medali Porprov Lampung Tahun 2014 dan 2017	II - 107
Tabel 2.83	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah	II - 108
Tabel 2.84	Grup Seni dan Budaya Teregistrasi Menurut Kecamatan Tahun 2018-2020	II - 109
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2020	II - 111
Tabel 2.86	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Kab. Lampung Timur Tahun 2020	II - 112
Tabel 2.87	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Tahun 2020	II - 114
Tabel 2.88	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu Kab. Lampung Timur Tahun 2020	II - 115
Tabel 2.89	Produksi Pertanian Tanaman Buah-Buahan Kab. Lampung Timur	II - 116
Tabel 2.90	Produksi Pertanian Tanaman Biofarma Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 (ton)	II - 118
Tabel 2.91	Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Kabupaten Lampung Timur, 2015-2020	II - 124
Tabel 2.92	Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kecamatan dan Kualifikasi Industri di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II - 124
Tabel 2.93	Direktori Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II - 125
Tabel 2.94	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan, 2020	II - 126
Tabel 2.95	Kerjasama Pemkab Lampung Timur dengan Instansi	II - 128
Tabel 2.96	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020	II - 129
Tabel 2.97	Jumlah PNS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021	II - 130
Tabel 2.98	PNS Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021	II - 130
Tabel 2.99	Jumlah Pejabat Berdasarkan Tingkat Eselon Tahun 2021	II - 131
Tabel 2.100	Pejabat Eselon/Struktural yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan ..	II - 131

Tabel 2.101	Capaian/Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II - 132
Tabel 2.102	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	II - 133
Tabel 2.103	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	II - 134
Tabel 2.104	Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2016-2020 (persen)	II - 135
Tabel 2.105	PDRB per-Kapita Kabupaten Lampung Timur	II - 135
Tabel 2.106	Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II - 137
Tabel 2.107	Perkembangan Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020	II - 138
Tabel 2.108	Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Lampung Timur	II - 139
Tabel 2.109	Jumlah Kapasitas Telepon dan Saluran tersambung Lokasi STO Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II - 139
Tabel 2.110	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lampung Timur	II - 141
Tabel 2.111	Indeks Komponen IPM Kabupaten Lampung Timur	II - 142
Tabel 2.112	Tabel Jenis Layanan SPM Kabupaten Lampung Timur	II - 147
Tabel 2.113	Daya Dukung Lahan Kab Lam Tim	II - 152
Tabel 2.114	Daya Tampung Lahan Kab Lam Tim Tahun 2020	II - 154
Tabel 2.115	Integrasi Indikator SDG's ke Dalam RPJMD Kab. Lampung Timur	II - 155
Tabel 2.116	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020	II - 157
Tabel 3.1	Struktur Pendapatan Daerah Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 64 Tahun 2020	III - 3
Tabel 3.2	Struktur Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 64 Tahun 2020	III - 5
Tabel 3.3	Struktur Pembiayaan Daerah Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 64 Tahun 2020	III - 6
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Lampung Timur	III - 7
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III - 9
Tabel 3.6	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur T.A. 2015-2020	III - 10
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015-2020	III - 11
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III - 12
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III - 12

Tabel 3.10	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 13
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 14
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Dana Transfer Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 15
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 16
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kab. Lam Tim, 2015-2020	III – 16
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III - 17
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 18
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 18
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Bagi Hasil Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 19
Tabel 3.19	Target dan Realisasi lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 20
Tabel 3.20	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 20
Tabel 3.21	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 21
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 21
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 22
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 23
Tabel 3.25	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 24
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 25
Tabel 3.27	Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 25
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 26
Tabel 3.29	Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 27
Tabel 3.30	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 28
Tabel 3.31	Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 29
Tabel 3.32	Target dan Realisasi Bagi Hasil Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 30

Tabel 3.33	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kab. Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 30
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kab. Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 31
Tabel 3.35	Target dan Realisasi SiLPA Kabupaten Lampung Timur, 2015-2020	III – 32
Tabel 3.36	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah	III – 33
Tabel 3.37	Analisis Rasio Keuangan Daerah	III – 34
Tabel 3.38	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III – 38
Tabel 3.39	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III – 38
Tabel 3.40	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	III – 39
Tabel 3.41	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Timur	III – 39
Tabel 3.42	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran	III – 40
Tabel 3.43	Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	III – 40
Tabel 3.44	Proyeksi Pendapatan Daerah	III – 41
Tabel 3.45	Proyeksi Pendapatan setelah disesuaikan dengan APBD T.A. 2021	III – 42
Tabel 3.46	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026 Kabupaten Lampung Timur	III – 42
Tabel 3.47	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Lam Tim	III – 43
Tabel 3.48	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	III – 45
Tabel 4.1	Rekomendasi KLHS Terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Timur	III – 11
Tabel 4.2	Identifikasi Isu Strategis/Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar	IV - 17
Tabel 5.1	Keterkaitan Misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur	V - 22
Tabel 5.2	Sinergitas RPJMN dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur	V - 23
Tabel 5.3	Sinergitas RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026	V - 24
Tabel 5.5	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026	V - 25
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026	VI - 2
Tabel 6.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026	VI - 3
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur	VI – 5
Tabel 6.4	Agenda Kerja Utama Tahun 2022 – 2026	VI – 5
Tabel 6.5	Prioritas Pembangunan Jangka Menengah	VI – 7
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif	VI - 14
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026	VII - 2

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan VII - 3

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2021-2026 VIII – 2

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Per urusan Pemerintah Daerah VIII – 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Periode 2021-2026 I – 3

Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah I – 9

Gambar 1.3 Tahapan Pembangunan I – 21

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur II – 2

Gambar 2.2 Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur II – 9

Gambar 2.3 Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur II – 10

Gambar 2.4 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Timur II – 18

Gambar 2.5 Peta Infrastruktur Kabupaten Lampung Timur II – 75

Gambar 2.6 Target dan Realisasi Indikator Makro Daerah Tahun 2020 II – 124

Gambar 2.7 Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Timur II – 145

Gambar 2.8 Peta Daya Tampung Air Kabupaten Lampung Timur II – 147

Gambar 5.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah V – 25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Piramida Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	II – 23
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2020 (Persen)	II – 20
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020	II – 34
Grafik 2.4	Laju Inflasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010-2018	II – 35
Grafik 2.5	Presentase Penduduk Miskin Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2007-2020	II – 38
Grafik 2.6	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020	II – 39
Grafik 2.7	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020	II – 39
Grafik 2.8	Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020	II – 42
Grafik 2.9	Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014-2020 ..	II – 43
Grafik 2.10	Kasus Gizi Buruk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014-2019	II – 44
Grafik 2.11	<i>Insiden Rate (IR)</i> dan <i>Case Fatality Rate (CFR)</i> DBD di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020	II – 46
Grafik 2.12	Persentase Penemuan dan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020	II – 47
Grafik 2.13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur	II – 48
Grafik 2.14	Persentase Desa Siaga Berdasarkan Strata Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II – 52
Grafik 2.15	Persentase Indikator Keluarga Sehat Lampung Timur Tahun 2020	II – 53
Grafik 2.16	Trend Persentase Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020	II – 54
Grafik 2.17	Trend Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 – 2020	II – 55
Grafik 2.18	Trend Cakupan Persalinan di Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 57
Grafik 2.19	Trend Pelayanan Pada Bayi Baru Lahir Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 58
Grafik 2.20	Trend Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 59

Grafik 2.21	Trend Capaian SPM Pelayanan KesehatanUsia Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 60
Grafik 2.22	Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 61
Grafik 2.23	Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Usila Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 63
Grafik 2.24	Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 64
Grafik 2.25	Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 66
Grafik 2.26	Capaian Terduga TB Mendapat Pelayanan Sesuai Standar Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 67
Grafik 2.27	Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan pada Orang Beresiko HIV Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020	II – 68
Grafik 2.28	Sebaran Kasus COVID-19 di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020	II – 71
Grafik 2.29	Perkembangan Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten 2015-2020	II – 73
Grafik 2.30	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Konstruksi Tersertifikasi	II – 76
Grafik 2.31	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup Tahun 2016-2020	II – 85
Grafik 2.32	Persentase Status Pekerjaan Utama Masyarakat	II – 90
Grafik 2.33	Capaian Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2019	II – 93
Grafik 2.34	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020	II – 96
Grafik 2.35	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Timur	II – 97
Grafik 2.36	Perkembangan Desa Ramah Anak Kabupaten Lampung Timur	II – 97
Grafik 2.37	Perekembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Sektor, 2015-2020	II – 98
Grafik 2.38	Perkembangan Koperasi Aktif Tahun 2015-2020	II – 101
Grafik 2.39	Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2016-2020	II – 101
Grafik 2.40	Perkembangan Jumlah Unit Usaha dan Nilai Investasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020	II – 103
Grafik 2.41	Koleksi Judul Buku dan Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah	II – 106
Grafik 2.42	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan (Nilai Mutu)	II – 106
Grafik 2.43	Perkembangan Perpustakaan Desa	II – 107
Grafik 2.44	Perkembangan Produksi Padi KLampung Timur Tahun 2015-2020	II – 109
Grafik 2.45	Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2015-2020	II – 110

Grafik 2.46	Perkembangan Produksi Ubi Kayu Tahun 2015-2020	II – 112
Grafik 2.47	Produksi Tanaman Perkebunan Lampung Timur Tahun 2015-2020	II – 114
Grafik 2.48	Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2015-2020 (ekor)	II – 116
Grafik 2.49	Produksi Daging (Kg) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020	II – 116
Grafik 2.50	Perkembangan Populasi Unggas (ekor) Tahun 2015-2020	II – 117
Grafik 2.51	Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas Tahun 2015-2020	II – 117
Grafik 2.52	Produksi Telur Tahun 2016-2020	II – 118
Grafik 2.53	Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Timur 2015-2020 (ton)	II – 118
Grafik 2.54	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun 2015-2020	II – 119
Grafik 2.55	Jumlah Pengunjung Event dan Destinasi Wisata 2015-2020	II – 123
Grafik 2.56	Kinerja Propemperda 2016-2020	II – 128
Grafik 2.57	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur	II – 131
Grafik 2.58	Persepsi Masyarakat Menurut Jenis Permasalahan Izin Usaha Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 (persen)	II – 135
Grafik 2.59	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020	II – 136
Grafik 2.60	Perbandingan Nilai dan Rangking IPM di Provinsi Lampung, 2020	II – 138
Grafik 2.61	Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2020	II – 139
Grafik 2.62	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020	II – 139
Grafik 2.63	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020	II – 140
Grafik 2.64	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2016-2020	II – 141
Grafik 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 9
Grafik 3.2	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur T.A. 2015-2020	III – 10
Grafik 3.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Lam Tim Tahun Anggaran 2015-2020	III – 11
Grafik 3.4	Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 12
Grafik 3.5	Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 13
Grafik 3.6	Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 13
Grafik 3.7	Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 14

Grafik 3.8	Perkembangan Realisasi Dana Transfer Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 15
Grafik 3.9	Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 16
Grafik 3.10	Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 17
Grafik 3.11	Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 17
Grafik 3.12	Perkembangan Realisasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 19
Grafik 3.13	Perkembangan Realisasi Bagi Hasil Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 19
Grafik 3.14	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 22
Grafik 3.15	Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 23
Grafik 3.16	Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 24
Grafik 3.17	Perkembangan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 24
Grafik 3.18	Perkembangan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 26
Grafik 3.19	Perkembangan Realisasi Belanja Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 27
Grafik 3.20	Perkembangan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 27
Grafik 3.21	Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 28
Grafik 3.22	Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 29
Grafik 3.23	Perkembangan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 30
Grafik 3.24	Perkembangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 31
Grafik 3.25	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020	III – 32
Grafik 3.26	Proyeksi Pendapatan Daerah	III – 42
Grafik 3.27	Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah	III – 44

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ii

Sambutan Bupati Lampung Timur vi

Daftar Isi vii

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang I - 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I - 5

1.3 Hubungan Antar Dokumen I - 8

1.4 Maksud dan Tujuan I - 36

1.5 Sistematika Penulisan I - 36

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II - 1

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II - 26

2.3 Aspek Pelayanan Umum II - 49

2.4 Aspek Daya Saing Daerah II - 128

2.5 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II - 141

2.6 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II - 145

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III - 1

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III - 2

3.1.2 Neraca Daerah III - 32

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III - 35

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III - 37

3.2.2 Analisis Pembiayaan III - 38

3.3 Kerangka Pendanaan III - 41

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III - 41

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan III - 43

Bab IV. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

4.1 Permasalahan Pembangunan IV - 1

4.2 Isu Strategis IV - 7

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi V - 14

5.2 Misi V - 16

5.3 Tujuan dan Sasaran V - 24

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

6.1 Strategi VI – 1

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan VI – 3

6.3 Program Pembangunan Daerah VI – 5

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab IX. Penutup

9.1 Kaidah Pelaksanaan IX – 1

9.2 Pedoman Transisi IX – 2

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah penyusunan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah. Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan RPJPD Kabupaten Lampung Timur 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah visi daerah : ***Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan***, yang terdiri atas 7 misi yang didalamnya memuat indikator dan target capaian. Pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020), Tahap IV (2021-2025).

Memperhatikan tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 tersebut, diamanatkan bahwa tahapan pembangunan Tahun 2021-2026 ditujukan pada upaya mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai dan

memantapkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tercermin pada tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang baik, serta terwujudnya rasa nyaman. Perekonomian daerah semakin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang, serta produktivitas yang tinggi dan berdaya saing di tingkat nasional dan global. Infrastruktur semakin mantap dengan daya dukung yang tinggi, serta kualitas sumberdaya manusia yang tinggi. Keanekaragaman hayati dan ekosistem dapat dilestarikan dan berkembang menjadi keunikan daerah, ikon pariwisata, dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya air dikelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi. Pemerintahan daerah semakin dapat dipercaya oleh masyarakat karena memiliki kinerja baik dan bersih. Birokrasi dikembangkan untuk tujuan pelayanan publik secara prima, serta didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas, dan disiplin tinggi. Penegakan hukum semakin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Berdasarkan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 harus diintegrasikan juga dengan dokumen RTRW Kabupaten Lampung Timur (yang saat ini sedang dalam proses revisi), Internalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan pemerintah provinsi, serta penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta tinjauan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berkenaan dengan amanat tersebut, dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur masa bakti 2021-2026, pada tanggal

26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Lampung, dan memperhatikan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Gambar 1.1
Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Periode 2021-2026



Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Kepala Daerah dilantik, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan, telah dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD pada tahun 2020 lalu. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur serta hasil konsultasi ke Pemerintah Provinsi Lampung. Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra PD menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2024.

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2021-2026, dan menjadi instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Lebih lanjut, periodisasi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, jika berpedoman pada periodisasi RPJMD sesuai tahapan yang diatur dalam RPJPD 2005-2025, maka masuk dalam Tahap IV pembangunan jangka panjang daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. **Pendekatan Politis**, pendekatan ini bermaksud bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun dalam rancangan RPJMD;
2. **Pendekatan Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. **Pendekatan Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. **Pendekatan Atas-Bawah** (*top-down*) **dan Bawah Atas** (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Sedangkan secara substansi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan menggunakan:

1. **Pendekatan Holistik-Tematik:** substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema pembangunan atau tiap tema pembangunan disusun secara holistik (komprehensif) dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, peluang dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. **Pendekatan Integratif:** substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. **Pendekatan Spasial:** substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 ini disusun dengan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 200);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

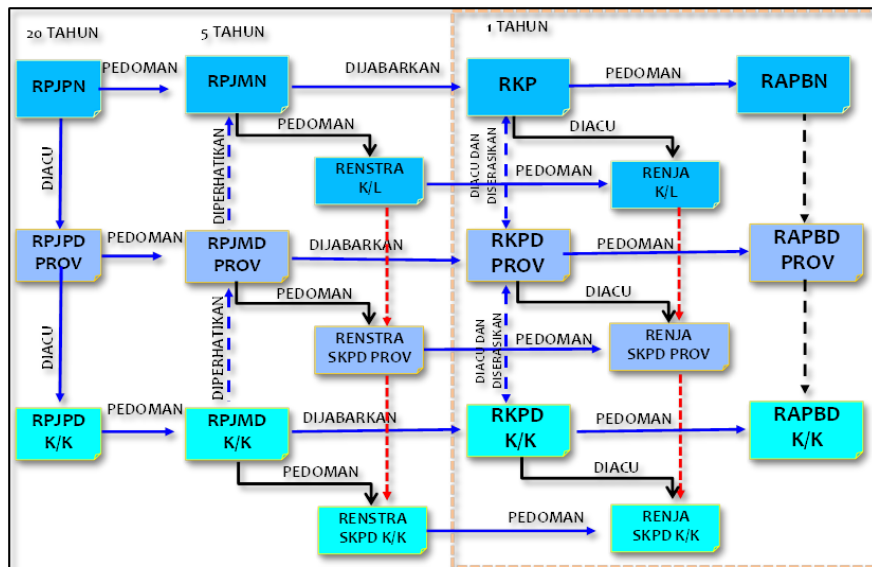
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



1.3.1 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui **9 (sembilan) Misi** yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya jika memperhatikan arah prioritas pembangunan wilayah khususnya Wilayah Sumatera, pembangunan wilayah Sumatera Tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan wilayah Sumatera Tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

1.3.2. RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJMD Provinsi Lampung

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi Lampung. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 tidak lepas

dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, visi daerah Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan adalah “**Rakyat Lampung Berjaya**”, yang akan diwujudkan melalui misi dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan misi meliputi :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Komitmen :

- a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
- b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
- c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
- d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
- e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
- f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah;

2. Misi-2: Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Komitmen :

- a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;

- a. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
 - b. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
 - c. Mengembangkan peran BUMD untuk membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan;
 - d. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
 - e. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.

Komitmen :

- a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
 - b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
 - c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
 - d. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
 - e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
 - f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
 - g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
 - h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

Komitmen :

- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
- b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga,

- kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar
- c. komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
 - a. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
 - b. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
 - c. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
 - d. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
 - e. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;
 - f. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- Komitmen :
- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
 - b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
 - c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
 - d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
 - e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
 - f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
 - g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.

6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.
- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
 - c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
 - e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
 - f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
 - g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
 - i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

Selanjutnya dalam pencapaian misi dibarengi komitmen tersebut akan dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama yang akan dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama tersebut dengan disandingkan dengan Agenda Kerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini :



Tabel 1.1
Sinkronisasi Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan
Agenda Kerja Utama Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

No	AGENDA KERJA UTAMA PROVINSI LAMPUNG	AGENDA KERJA UTAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
1	Lampung merawat Indonesia	Program Petani Berjaya : peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan berbasis pemanfaatan Sistem Aplikasi Petani Berjaya
2	Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama	Infrastruktur Lampung Timur Berjaya : pemantapan infrastruktur konektivitas, permukiman, dan pengelolaan sumber daya air pertanian
3	Lampung mengaji	
4	Lampung Kaya Festival	Lampung Timur Jaya : Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
5	Lampung Menuju Bebas Narkoba	
6	Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah	Rakyat Lampung Timur Berdaya Saing
7	APBD Rakyat Berjaya	
8	Smart Village	Pemuda Lampung Timur Berjaya
9	Pendampingan program pembangunan desa	
10	Perempuan Berjaya	Rakyat Lampung Timur Sehat
11	Lampung Ramah Perempuan dan Anak	
12	Anak Muda Berjaya	Lampung Timur Religius dan Berakhlak Mulia
13	Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga	
14	Lampung Sehat	Lampung Timur Ramah Anak
15	Smart School	
16	Revitalisasi SMK	Ekonomi Lampung Timur Berjaya
17	Infrastruktur Lampung Berjaya	
18	Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur	Lampung Timur Aman
19	Lampung Terang Berjaya	
20	Kartu Petani Berjaya	Aparatur Profesional
21	Bea-mahasiswa Pertanian	
22	Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu	APBD Lampung Timur Tepat
23	Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper)	
24	Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional	Pelayanan Publik Berjaya (Mall Pelayanan Publik, LENGKAP, Gaji Berkala Otomatis, dll)
25	Program Nelayan Berjaya	
26	Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Lampung Timur Berjaya (Smart Village)
27	Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia	
28	Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan	Lampung Timur Ramah Investasi
29	Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi	Lampung Timur Siaga
30	Lampung Ramah Usaha	
31	Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia	Lampung Timur Menuju Bebas Narkoba
32	Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat	
33	Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara	Lampung Timur Berkelanjutan

1.3.3 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJPD Kabupaten Lampung Timur

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2021-2026, juga berpedoman pada visi misi Kabupaten Lampung Timur serta arah pembangunannya. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, diamanatkan bahwa pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Lampung Timur sejahtera, berke-Tuhanan, dan berwawasan lingkungan, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Arah dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur sampai Tahun 2025 adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, arah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku, arah untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, arah untuk mewujudkan pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan, arah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum, arah untuk mewujudkan masyarakat yang religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta mampu melestarikan dan mengembangkan budaya daerah, dan arah untuk mengoptimalkan sumber daya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

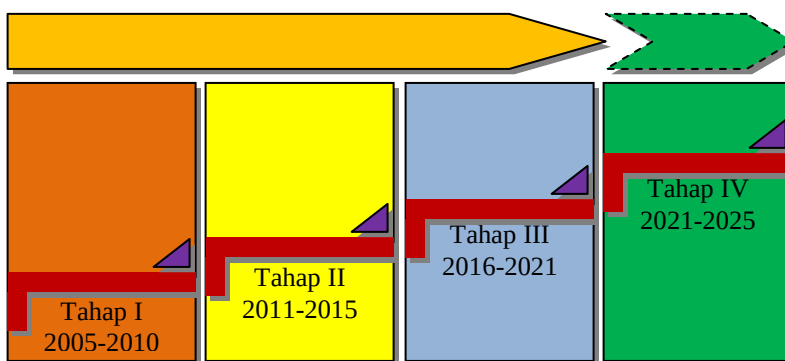
Pembangunan jangka panjang tahap keempat berdasarkan Perda RPJPD Kabupaten Lampung Timur dirancang untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tercermin pada tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang baik, serta terwujudnya rasa nyaman.

Sekolah tersebar dengan merata dan berklasifikasi nasional, dengan beberapa sekolah berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan akses yang mudah. Kehidupan sosial dinamis dan stabil, yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas, dan seni budaya. Perekonomian daerah semakin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang, serta produktivitas yang tinggi dan berdaya saing di tingkat nasional dan global. Infrastruktur semakin mantap dengan daya dukung yang tinggi, serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

Pemerintahan daerah semakin dapat dipercaya oleh masyarakat karena memiliki kinerja baik dan bersih. Birokrasi dikembangkan untuk tujuan pelayanan publik secara prima, serta didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas, dan disiplin tinggi. Penegakan hukum semakin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam menjaga momentum kemajuan yang telah diperoleh, maka hal yang sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya harus juga disempurnakan sejalan dengan kemajuan yang dicapai, agar kemajuan yang telah dicapai dapat dijaga kelangsungannya. Penyegaran metode dan pendekatan pembangunan merupakan semangat yang harus dikedepankan dalam rangka menjaga momentum pembangunan pada jangka panjang berikutnya. Tahapan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur sejak Tahun 2005-2025 sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJPD digambarkan dalam tahapan di bawah ini

Tahapan RPJPD Kabupaten Lampung Timur
Telah Akan
Dilaksanakan Dilaksanakan



1.3.4 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, diamanatkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata.

Guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari peningkatan perkembangan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan sektor pertanian, perikanan,



pariwisata, industri dan jasa; perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; perwujudan pembangunan yang merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur ini berpedoman pada RTRW Kabupaten Lampung Timur yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, sebagaimana di tampilkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Kebijakan Kewilayahan RTRW Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011-2031

HIRARKI	PERKOTAAN	FUNGSI UTAMA	KETERANGAN
PKWp	Sukadana	Pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan	Perkotaan Sukadana berdasarkan Perda Provinsi Lampung No 12/2019 ttg Perubahan Peda No 1/2010 ttg RTRW Prov Lampung 2009-2029, ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal. Ketetapan fungsi tersebut akan ditindaklanjuti dalam raperda perubahan RTRW Lam Tim Tahun 2011-2031
PKL	Way Jepara	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura	
	Labuhan Maringgai	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan	
PKLp	Pekalongan	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan	Berdasarkan PP 13/2017 ttg Perubahan PP 26/2008 ttg RTRWN, istilah PKLp telah dihapus, sehingga melalui Raperda revisi RTRW Lam Tim 2011-2031 akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan tersebut
	Sekampung Udik	Pusat perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman	
	Bandar Sribhawono		
PPK	Jabung	Pusat pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung	
	Purbolinggo	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi	
	Marga Tiga	Pusat pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan	
	Pasir Sakti	Pusat pertanian, permukiman dan	



		pertambangan	
	Sekampung	Pusat pertanian lahan basah dan permukiman	
	Raman Utara	Pusat pertanian lahan basah, permukiman dan lindung	
	Melinting	Pusat pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata	
	Gunung Pelindung	Pusat pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung	
	Marga Sekampung	Pusat pertanian, perkebunan, permukiman, dan lindung	
	Batanghari		
	Metro Kibang	Pusat permukiman, dan perkebunan campur	
	Batanghari Nuban	Pusat pertanian, dan permukiman	
	Bumi Agung		
	Labuhan Ratu	Pusat pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, dan agrowisata	
	Mataram Baru	Pusat pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata	
PPL	Waway Karya	Pusat pertanian, peternakan, dan permukiman	
	Braja Selehah		
	Way Bungur		

Selanjutnya, berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Lampung Timur hasil telaahan struktur ruang sesuai dengan indikasi program utama sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Lampung Timur

No	Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
I	Perwujudan Struktur Ruang									
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan									
	1.1 Penguatan Kota Sukadana									
	a. Penyusunan RDTR	Kota Sukadana								
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi	Kota Sukadana								
	c. Penyusunan RP4D	Kota Sukadana								
	d. Penyusunan RTBL Kawasan Pemerintahan	Kota Sukadana								
	e. Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan	Kota Sukadana								
	f. Penyusunan Rencana RTH Kota	Kota Sukadana								
	g. Penyusunan Masterplan Terminal Type B	Kota Sukadana								
	1.2 Penguatan Kota Way Jepara Sebagai PKL									
	a. Penyusunan RDTR	Way Jepara								
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi	Way Jepara								
	c. Penyusunan RP4D	Way Jepara								
	d. Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan	Way Jepara								
	e. Penyusunan Masterplan Kawasan	Way Jepara								
	f. Penyusunan Rencana RTH Kota	Way Jepara								
	g. Penyusunan Masterplan Kawasan Pendidikan	Way Jepara								
	h. Penyusunan Masterplan Kegiatan Industri	Way Jepara								
	1.3 Penguatan Kota Labuhan Maringgai Sebagai PKL									
	a. Penyusunan RDTR	Labuhan Maringgai								
	b. Penyusunan Peraturan Zonasi	Labuhan Maringgai								
	c. Penyusunan RP4D	Labuhan Maringgai								
	d. Penyusunan RTBL Kawasan	Labuhan Maringgai								
	e. Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan	Labuhan Maringgai								



No	Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	f. Penyusunan Rencana RTH Kota	Labuhan Maringgai								
	1.4 Penguatan Kota Pekalongan Sebagai PKL									
	a. Penyusunan RDTR	Pekalongan								
	b. Penyusunan RTBL Kawasan	Pekalongan								
	c. Penyusunan Rencana RTH Kota	Pekalongan								
	1.5 Penguatan Kota Sekampung Udik Sebagai PKL									
	a. Penyusunan RDTR	Sekampung Udik								
	b. Penyusunan RTBL Kawasan	Sekampung Udik								
	c. Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Budaya dan Pariwisata	Sekampung Udik								
	d. Penyusunan Rencana RTH Kota	Sekampung Udik								
	1.6 Penguatan Kota Bandar Sribhawono PKL									
	a. Penyusunan RDTR	Bandar Sribhawono								
	b. Penyusunan RTBL Kawasan	Bandar Sribhawono								
	c. Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Budaya dan Pariwisata	Bandar Sribhawono								
	d. Penyusunan Rencana RTH Kota	Bandar Sribhawono								
	e. Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan	Bandar Sribhawono								
	1.7 Penguatan Pusat Pelayanan Kawasan									
	a. Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur	Jabung, Purbolinggo, Marga Tiga, Pasir Sakti, Sekampung, Raman Utara, Gunung Pelindung, Marga Sekampung, Batanghari, Metro Kibang, Batanghari Nuban, Bumi Agung, Labuan Ratu, Mataram Baru, Waway Karya, Braja Seleh, Way Bungur.								
	b. Penyusunan Rencana RTH skala kawasan	Jabung, Purbolinggo, Marga Tiga, Pasir Sakti, Sekampung, Raman Utara, Gunung Pelindung, Marga Sekampung, Batanghari, Metro Kibang, Batanghari Nuban, Bumi Agung, Labuan Ratu, Mataram Baru,								
	1.7 Penguatan Pusat Pelayanan Lingkungan	Waway Karya, Braja Seleh, Way Bungur.								
2.	Perwujudan Sistem Prasarana									
	2.1 Sistem Prasarana Utama									
	a. Jaringan Transportasi Darat									
	a.1 Jaringan Jalan									
	– Pemeliharaan Kolektor Primer K1 yang ada di Kabupaten Lampung Timur	ruas jalan : – Kab. Lamteng/Kab. Lamtim – KabLamtim/KabLa msel; – Gedong Dalam – Kota Sukadana, Jalan Sukarno-Hatta (Sukadana); dan – Metro – Gedong Dalam.								
	– Perbaikan, peningkatan status dan pemeliharaan jalan kolektor primer K2 dan K3 yang ada di Kabupaten Lampung Timur	ruas jalan : - Gunung Sugih – Gedong Dalam. - SP Sribhawono –								



No	Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Sribawono. - Pugung Raharjo – Bandar Sribhawono - Sukadana – Jabung - Simpang Maringgai – Jabung - Bumi Jawa - Purbolinggo.								
	- Perbaikan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer K4 yang ada di Kabupaten Lampung Timur .	ruas jalan : - Sribhawono–Wana–Tanjung Aji. - Raman Raya – Raman Utara, Bumi Jaya – Purbolinggo. - Kibang – Batas Kota Metro; - kota sukadana mataram marga – kantor pemda – jalan lintas pantai timur								
	- Lokal Primer, yaitu jalur yang melayani pergerakan lokal, terutama untuk memberikan akses bagi sentra produksi sektor primer ke pusat kegiatan sekunder dan tersier	Tersebar di Seluruh Kabupaten Lampung Timur								
	a.2 Terminal									
	- peningkatan fungsi terminal tipe C menjadi terminal Tipe B , pembenahan sarana pendukung dan infrastruktur terminal sehingga dapat memenuhi kriteria terminal tipe B.	Sukadana								
	- Pembangunan terminal tipe C	- Labuhan Maringgai. - Purbolinggo. - Sekampung. - Way Jepara. - Sekampung Udik.								
	- Pengembangan Terminal Tipe C	- Mataram Baru								
	b. Jaringan Perkeretaapian									
	- jalur Pringsewu – Rejosari Tegineneng - Metro – Sukadana									
	- pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Sukadana									
	c. Jaringan Transportasi Udara									
	- Peningkatan bandara di Kecamatan Labuhan Ratu	Bandar Udara Khusus Nusantara Tropical Fruit								
	2.2. Sistem Prasarana Wilayah Lainnya:									
	a. Sistem Prasarana Energi dan Kelistrikan									
	- Penyediaan sambungan baru PLN	Desa-desa yang belum teraliri listrik								
	- Pemanfaatan Energi Tenaga Surya dan Mikrohidro untuk kawasan yang tidak teraliri listrik	Kecamatan Waway Karya, Way Bungur, Labuhan Ratu, Braja Sebah.,								
	b. Sistem Jaringan prasarana telekomunikasi									
	- Mengembangkan dan meningkatkan Sambungan Telepon Otomat (STO) dan menambah Rumah Kabel (RK)	Semua kecamatan								
	- Pembangunan menara BTS	Semua kecamatan								
	c. Sistem Prasarana Sumber Daya Air									
	c.1. Sistem Prasarana Irigasi									
	- Penjaminan ketersediaan air irigasi, terutama untuk mengairi areal persawahan	- DI Kewenangan Nasional lintas								



No	Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Kabupaten: DI Way Sekampung. DI Kewenangan Nasional di Kabupaten: DI Way Jepara. DI Way Curuk. DI Batanghari DI Pekalongan DI Purbolinggo. DI Laman Utara. DI Rantau Fajar. DI Way Sekampung. DI Kewenangan Kabupaten: DI Way Bekarang Atas. DI Way Kemit. DI Way Lehan. DI Way Kawat. DI Way Ramayana. DI Way Bekarang Bawah DI Way Tangkit DI Way Rawa Mangun DI Way Tulang Pies DI Way Napal I DI Way Karang Anyar DI Way Rawa Sukoharjo DI Way Donomulyo DI Way Sumbu Sari DI Way Handak DI Way Rawa Tulung Sunting DI Way Bali DI Way Rawa Kelinting DI Way Pugung Raharjo DI Way Rawa Perbatasan DI Way Kerikil DI Way Rawa Ganefo DI Way Tulung Braja DI Way Tambak Luhur II DI Way Tambak Luhur I DI Way Tanjung Kesuma DI Way Tegal Ombo DI Way Tegal Yoso DI Way Batu Keting DI Way Andak II								
	— Mempertahankan debit aliran sungai dan volume danau	Kecamatan Way Jepara; Seluruh								



No	Struktur Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		kecamatan yang dilewati oleh Sungai Way Sekampung								
	– Optimalisasi pemanfaatan daerah-daerah irigasi untuk pengembangan budidaya pertanian	Kawasan Pertanian								
	– Mengembangkan sistem irigasi interkoneksi untuk membentuk satu sistem irigasi terpadu	Kawasan Pertanian								
	d. Sarana Jaringan Prasarana Lingkungan									
	d.1. Sistem Jaringan Prasarana Persampahan									
	– Penyusunan Masterplan Pengelolaan Persampahan Kabupaten	Kabupaten Lampung Timur								
	– Pemerataan jumlah TPS	Kecamatan Sekampung Udik, Sribawono; Sekampung, Pekalongan, Melinting, Jabung, Batanghari, Way Bungur, Gunung Pelindung, Mataram Baru, Batanghari Nuban, Raman Utara, Labuhan Maringgai, Braja Selebih, dan Labuhan Ratu.								
	– Studi kelayakan penentuan lokasi TPA baru	Kabupaten Lampung Timur/ Zona layak TPA								
	– Pembangunan TPA baru	Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting								
	– Pemanfaatan TPA	Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Sukadana								
	– Penyusunan Masterplan Pengelolaan Limbah Perkotaan	Kawasan Perkotaan dan Kawasan Industri								
	– Pembangunan IPAL/IPLT kawasan Industri terpadu	Bandar Sribawono								
	d.2. Sarana Jaringan Prasarana Air Baku									
	– Pengembangan pelayanan air minum melalui pengembangan kapasitas dan jaringan terutama di Kota-kota PKWp dan PKL	Kota Sukadana, Labuhan Maringgai, Way Jepara.								
	– Pengadaan sistem penyediaan air minum regional	Sukadana, Labuhan Maringgai, Sekampung Udik, Pekalongan, Bandar Sribowono.								

Lebih lanjut, terkait dengan arahan kebijakan pola ruang sesuai dengan indikasi program utama RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Hasil Telahaan Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur

No	Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
1	Perwujudan Kawasan Lindung									
	1.1 Hutan Lindung									
	– Penetapan regulasi yang jelas dan tegas dalam upaya penghijauan kembali kawasan Hutan Lindung Gunung Balak (Reg.38) dan Muara Sekampung (Reg. 15)	Kecamatan Marga Sekampung, Sekampung Udik, Bandar Sribhawono,								



No	Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Melinting, Way Jepara , Jabung, Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai.								
	1.2 Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya									
	a. Kawasan Bergambut									
	– Perlindungan terhadap kawasan bergambut dengan menghindari pengembangan perkebunan pada kawasan ini.	Kecamatan Braja Selebah, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Way Bungur, Way Jepara								
	b. Kawasan Resapan Air									
	– Perlindungan terhadap kawasan resapan air bergambut dengan menghindari pengembangan perkebunan pada kawasan ini.	Kecamatan Bandar Sribhawono, Jabung, Marga Sekampung, Melinting, Pasir sakti, Sekampung Udik, Way Jepara Labuhan Maringgai,								
	1.3 Kawasan Perlindungan Setempat									
	a. Kawasan Sempadan Pantai									
	– Penetapan garis 100 meter dari titik pasang tertinggi ke darat, sebagai kawasan limitasi yang harus diatur pemanfaatannya agar tidak merusak ekosistem pantai	Kecamatan Labuhan Maringgai, Pasir Sakti								
	b. Sempadan sungai									
	– Pemantapan garis sempadan sungai	Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selebah, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Metro Kibang, Pasir Sakti, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Bungur, Way Jepara.								
	– Penerapan prosedur perijinan dan pengendalian lingkungan untuk pemanfaatan kawasan yang berada pada sempadan sungai	Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selebah, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Metro Kibang, Pasir Sakti, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung,								



No	Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Bungur, Way Jepara.								
	c. Kawasan sekitar danau/situ/waduk									
	– Penetapan daerah 50 meter dari titik pasang tertinggi ke darat, sebagai kawasan yang tidak boleh terganggu oleh aktivitas manusia.	Kecamatan Way Jepara, Sukadana								
	– Pemantapan sempadan danau	Kecamatan Way Jepara, Sukadana								
	d. Kawasan sekitar Mata air									
	– Penetapan daerah 200 meter dari titik mata air, sebagai kawasan yang tidak boleh terganggu oleh aktivitas manusia.	Kecamatan Sribhowono, Jabung, Way Jepara.								
	– Pemantapan sempadan Mata Air	Kecamatan Sribhowono, Jabung, Way Jepara.								
	e. Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
	– Penetapan daerah yang telah ditetapkan menjadi RTH.	Semua kecamatan.								
	1.4 Kawasan Suaka Alam									
	a. Taman Nasional									
	– Perlindungan terhadap kawasan konservasi Penyu Sisik.	Taman Nasional Way Kambas, Pulau Segama								
	– Pengelolaan TNWK sebagai kawasan pelestarian alam dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.	Taman Nasional Way Kambas								
	b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau									
	– Pemanfaatan hutan bakau yang sudah ditebang berdasarkan sistem silvikultur hutan.	Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti.								
	– Penanaman kembali hutan mangrove guna mengurangi resiko abrasi pantai serta melestarikan ekosistem pantai.	Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti.								
	– Pengelolaan hutan bakau yang memiliki panorama indah sebagai kawasan wisata alam yang ramah lingkungan.	Desa Margasari, Kec Labuhan Maringgai								
	c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan									
	– Pelestarian desa Adat Wana, rumah tradisional di Sukadana, Keratun Melinting, Keratun Pugung dan situs purba di Pugung Raharjo	Sukadana, Pugung Raharjo								
	– Peningkatan promosi dan pembenahan sarana pendukung pariwisata taman purbakala Pugung Raharjo	Desa Pugung Raharjo, Kec Sekampung Udi								
	1.5 Kawasan rawan bencana alam									
	– Perbaikan saluran drainase untuk mencegah tergenangnya daerah-daerah bertopografi rawa. (Kawasan rawan tanah longsor)	Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti.								
	– Penanaman hutan bakau Kawasan rawan abrasi.	Labuhan								



No	Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Maringgai										
	– Perbaikan saluran drainase untuk mencegah kawasan rawan banjir	Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.										
	– Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Kabupaten Lampung Timur (rawan longsor, abrasi, banjir, rawan gelombang tinggi, puting beliung)	Kabupaten Lampung Timur terumatan										
2	Perwujudan Kawasan Budidaya											
	2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi											
	– Pengembangan hutan produksi yang berfungsi lindung	Way Kibang, Gedung Wani.										
	– Pengembangan hutan rakyat	Gunung Pelindung, Marga Sekampung, Way Bungur, Purbolinggo, Braja Selehah, Way Jepara, Pekalongan, Metro Kibang, Waway Karya.										
	2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian											
	– Pengembangan pertanian tanaman pangan	Semua Kecamatan										
	– membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Semua Kecamatan										
	– mengatur pola penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pertanian lahan basah pada kawasan pertanian	Semua Kecamatan										
	– memperluas daerah tangkapan hujan pada DAS sehingga dapat menjaga ketersediaan air	Semua Kecamatan										
	– meningkatkan pelayanan irigasi teknis dengan jaminan pasokan air yang mencukupi	Semua Kecamatan										
	– pemberian insentif berupa keringanan pajak, retribusi dan subsidi guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani	Semua Kecamatan										
	– penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan irigasi, pengadaan produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.	Semua Kecamatan										
	– membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan;	Semua Kecamatan										
	– Pengembangan kawasan sentra hortikultura	Pekalongan										
	– Pengembangan sentra pembibitan padi di Purbolinggo	Purbolinggo										
	– Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak besar kerbau	Way Jepara,										
	– Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil kambing	Batanghari Nuban										



No	Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
	– Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil domba	Pekalongan									
	– Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil babi	Raman Utara									
	– Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil ayam buras	Batanghari									
	– Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil ayam ras pedaging.	Metro Kibang									
	– Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil ayam ras petelor	Purbolinggo									
	– Pengembangan peternakan dengan mendayagunakan bibit unggul untuk ternak kecil itik	Way Jepara									
	– Pengembangan sentra komoditas hasil perkebunan	Di seluruh kabupaten Lampung Timur									
	– Pengintegrasian kegiatan industri dengan kegiatan perkebunan	Di seluruh kabupaten Lampung Timur									
	2.3 Kawasan Peruntukan Perikanan										
	– Pengembangan Kawasan pengolahan ikan berupa pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)	Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Way Penet, Pelabuhan Way Sekampung, Pelabuhan Kuala Seputih.									
	– Pengembangan Kawasan peruntukan Minapolitan yang memiliki potensi udang dan bandeng..	Labuhan Maringgai, Kawasan Way Penet dan kawasan Kuala Seputih									
	– Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan budidaya Komoditas ikan bandeng.	Kecamatan Pasir Sakti									
	– Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan budidaya Komoditas ikan udang .	Kecamatan Labuhan Maringgai.									
	– Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan	Labuhan Maringgai									
	2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan										
	– Pengendalian eksploitasi galian sumberdaya mineral pasir kuarsa, basalt, pasir bangunan, lempung.	Kabupaten Lampung Timur									
	– Penyusunan Studi potensi pertambangan Kabupaten Lampung timur	Kabupaten Lampung Timur									
	– Pembatasan dan penghentian aktivitas penambangan yang dapat merusak lingkungan.	Labuhan Maringgai, Pasir Sakti									
	– inventarisasi jenis bahan tambang yang dimiliki, serta menyusun profil potensi sumber daya mineral, batubara, dan minyak bumi;	Kabupaten Lampung Timur									
	– melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk pengusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi;	Kabupaten Lampung Timur									
	– merencanakan satuan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam;	Kabupaten Lampung Timur									
	– merencanakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral non logam dan batuan;	Kabupaten Lampung Timur									
	– merencanakan dan menetapkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral non-logam dan batuan;	Kabupaten Lampung Timur									
	– merencanakan dan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);	Kabupaten Lampung Timur									
	– inventarisasi jenis bahan tambang yang dimiliki, serta menyusun profil potensi sumber daya mineral, batubara,	Kabupaten Lampung Timur									



No	Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	dan minyak bumi;											
	– melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk pengusahaan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi.	Kabupaten Lampung Timur										
	– merencanakan satuan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam;	Kabupaten Lampung Timur										
	– merencanakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral non logam dan batuan;	Kabupaten Lampung Timur										
	– merencanakan dan menetapkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral non-logam dan batuan; dan	Kabupaten Lampung Timur										
	– merencanakan dan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);	Kabupaten Lampung Timur										
	2.5 Kawasan Peruntukan Industri											
	– Pengembangan industri Kecil dan Rumah Tangga	Kabupaten Lampung Timur										
	– Penataan kawasan industri besar dan sedang	Sribhawono, Sekampung Udik.										
	– penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;	Sribhawono, Sekampung Udik.										
	– pengembangan industri pengolahan hasil tanaman perkebunan.	Pekalongan, Purbolinggo										
	2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata											
	– Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata	Sukadana, Way Jepara										
	– Pengembangan potensi pariwisata situs purbakala Pugung Raharjo	Sekampung Udik										
	– Pengembangan potensi agrowisata	Pekalongan										
	– Mengintegrasikan pengembangan wisata budaya sejarah dengan wisata alam di Lampung Timur	Sekampung Udik										
	– membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah;	Kabupaten Lampung Timur										
	– meningkatkan promosi dan investasi kepariwisataan; dan	Kabupaten Lampung Timur										
	– melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.	Kabupaten Lampung Timur										
	2.7 Kawasan Peruntukan Permukiman											
	– Arahkan pengembangan kawasan pemukiman berkepadatan tinggi	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai										
	– Arahkan pengembangan kawasan pemukiman berkepadatan Sedang	Pekalongan, sekampung Udik, Bandar Sribhawono										
	– Arahkan pengembangan kawasan pemukiman berkepadatan Rendah	Jabung, Purbolinggo, Marga Tiga, Pasir Sakti										
	– Pengembangan Permukiman Pedesaan	Menyebar di seluruh Kabupaten Lampung Timur										
	– pemetakan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun;	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai Pekalongan, sekampung Udik, Bandar Sribhawono										
	– identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok;	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai Pekalongan, sekampung Udik,										



No	Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
		Bandar Sribhawono								
	– peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai Pekalongan, sekampung Udik, Bandar Sribhawono								
	– pengembangan prasarana dan sarana di kawasan perkotaan;	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai Pekalongan, sekampung Udik, Bandar Sribhawono								
	– menyediakan fasilitas dan utilitas perkotaan yang proporsional dan efektif terhadap kemampuan pelayanan, tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan kota serta sesuai dengan rencana pengembangannya;	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai Pekalongan, sekampung Udik, Bandar Sribhawono								
	– meningkatkan aksesibilitas pergerakan antara kawasan perkotaan dengan wilayah pelayanan sekitarnya;	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai APBD Kabupaten Pekalongan, sekampung Udik, Bandar Sribhawono								
	– menetapkan 30 (tiga puluh) persen dari kawasan perkotaan sebagai RTH	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai Pekalongan, sekampung Udik, Bandar Sribhawono								
	– relokasi kelompok permukiman perdesaan dalam kawasan lindung;	Menyebar di seluruh Kabupaten Lampung Timur								
	– identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;	Menyebar di seluruh Kabupaten Lampung Timur								
	– klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budi daya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah;	Menyebar di seluruh Kabupaten Lampung Timur								
	– identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya; dan	Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai Pekalongan, sekampung Udik, Bandar Sribhawono								
	– penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, efesiensi dan efektivitas.	Menyebar di seluruh Kabupaten Lampung Timur								
	2.8 Kawasan Peruntukan Lainnya									
	– Penyusunan Masterplan dan Aturan Zonasi Preservasi dan konservasi kawasan HANKAM Lampung Timur	Kabupaten Lampung Timur								
	– Menyiapkan kawasan titik evakuasi Bencana	Kabupaten Lampung Timur								



No	Rencana Pola Ruang/Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									
			PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
			1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
III	Perwujudan Kawasan Strategis											
1	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup											
	1.1 Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak											
	– Penyusunan Rencana Rinci Pengelolaan Kawasan Gunung Balak	Kaw. Hutan Lindung Gunung Balak										
	– Penyusunan Rencana Rinci Pengelolaan Kawasan jalur hijau dan kawasan hutan mangrove	Kecamatan Labuhan Maringgai, Pasir Sakti; dan										
	– Penyusunan Rencana Rinci Pengelolaan Kawasan kawasan hutan kota	Kecamatan Sukadana.										
2	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut Kepentingan ekonomi											
	2.1 Kawasan Minapolitan											
	– Penyusunan Rencana Rinci Pengelolaan Kawasan Minapolitan	Labuhan Maringgai, Pasir Sakti.										
	– Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kabupaten Lampung timur										
	– Penyusunan Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kabupaten Lampung timur										
	2.2 Kawasan Industri Terpadu (KIT)											
	– Penyusunan Masterplan KIT	Bandar Sribhawono										
	– Pembangunan Infrastruktur KIT	Bandar Sribhawono										
	2.3 Kawasan Pusat Agribisnis/Agropolitan											
	– Penyusunan Masterplan Agropolitan	Bandar Sribhawono										
	– Pembangunan terminal agribisnis di Kecamatan Pekalongan	Pekalongan										
2	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut Kepentingan Sosial Budaya											
	– Penyusunan Masterplan dan Aturan Zonasi Preservasi dan konservasi kawasan pugung raharjo	Pugung Raharjo										
	– Penyusunan Masterplan dan Aturan Zonasi Preservasi dan konservasi kawasan pugung raharjo dan rumah adat lampung melinting.	Desa Wana										

Selanjutnya, berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, dinyatakan bahwa perda tersebut perlu direvisi. Revisi tersebut perlu dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian dengan adanya dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Lampung, serta adanya perubahan kebijakan strategis pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. Saat ini proses revisi Perda RTRW sedang dalam tahap persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, dalam rangka konsistensi pengembangan wilayah kedepan sejalan dengan rencana revisi Perda RTRW perlu dimuat arahan pemanfaatan ruang berpedoman pada revisi materi teknis. Berdasarkan dokumen revisi materi teknis RTRW Tahun 2011-2031, diatur arahan pemanfaatan ruang sebagaimana di bawah ini:

A. Konsep Pengembangan

Sejalan dengan konsep tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur, konsep pengembangan wilayah adalah konsep agro-wisata-mina-politan. Konsep ini mengandung arti yaitu kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya, melalui pengembangan kawasan agropolitan diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan dengan wilayah produksi pertanian dan perikanan.

Konsep pengembangan agropolitan di atas, didasari oleh pertimbangan berikut ini:

- 1) Pengusulan adanya outlet di Waway Karya, Sekampung Udik, Metro Kibang
- 2) Pengusulan adanya outlet di Sukadana, Way Jepara, Labuhan Maringgai
Pengusulan kota kecil/ industri menengah di Pekalongan, Purbolinggo, Labuhan Ratu, Bandar Sribhawono
- 3) Kecamatan-kecamatan lain yang diusulkan sebagai sentra produksi/industri kecil dengan pertimbangan karena di wilayah tersebut saat ini telah berdiri industri kecil dan rumah tangga dimana ke depannya diharapkan dapat dibina untuk dikembangkan dan diperkuat sebagai industri penunjang sektor pertanian dan perkebunan dalam rangka mendukung agropolitan secara umum.
- 4) Kecamatan Jabung diusulkan sebagai pengumpul bahan baku dari desa-desa pusat pertumbuhan karena saat ini belum ada jenis industri tertentu sehingga perannya adalah sebagai pengumpul bahan baku pertanian dan perkebunan untuk diolah lebih lanjut di Kecamatan Marga Sekampung dan dikirim ke outlet Waway Karya.
- 5) Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Lampung Timur, fungsi agrowisata ditetapkan di Kecamatan Pekalongan, Purbolinggo, Labuhan Ratu, dan Sekampung Udik.
- 6) Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, fungsi minapolitan diarahkan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti, yang memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan.

B. Konsep Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis Kabupaten Lampung Timur terdiri dari beberapa aspek, yaitu sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; sudut kepentingan ekonomi; sudut kepentingan sosial budaya; serta sudut pandang pertahanan dan keamanan, masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a) Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Jabung. Untuk itu, perlu disusun secara rinci rencana yang mengatur pengelolaan blok-blok peruntukan.
 - b) Jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti.
 - c) Kawasan hutan kota di Kecamatan Sukadana.
- 2) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi
- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari: kawasan minapolitan; kawasan pembibitan dan agrobisnis; kawasan industri terpadu; serta kawasan perdagangan, jasa dan agroindustri. Masing-masing dijabarkan sebagai berikut:
- a) Kawasan Minapolitan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti
 - b) Kawasan Pembibitan dan Agrobisnis di Kecamatan Pekalongan
 - c) Kawasan Industri Terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono
 - d) Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Agroindustri di Perkotaan Sekampung Udik
- 3) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri dari Kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo dan Desa Tradisional Wana. Masing-masing dijabarkan sebagai berikut:
- a) Kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo
 - b) Desa Tradisional Wana Kecamatan Melinting
- 4) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a) Pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - b) Markas polisi air dan udara di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - c) Kodim di Kecamatan Sukadana.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih masa bakti 2021-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renstra PD periode 2021-2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026.
5. Menetapkan indikator kinerja PD dan Indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini Membahas gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Lampung Timur dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJMD 2016-2021, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011-2031, data-data pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyalarsan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta hasil-hasil rekomendasi dalam KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan

daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan 5 (lima) tahun mendatang disertai dengan program prioritas perangkat daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada Tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif.

Pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu ***Bumei Tuwah Bepadan***, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

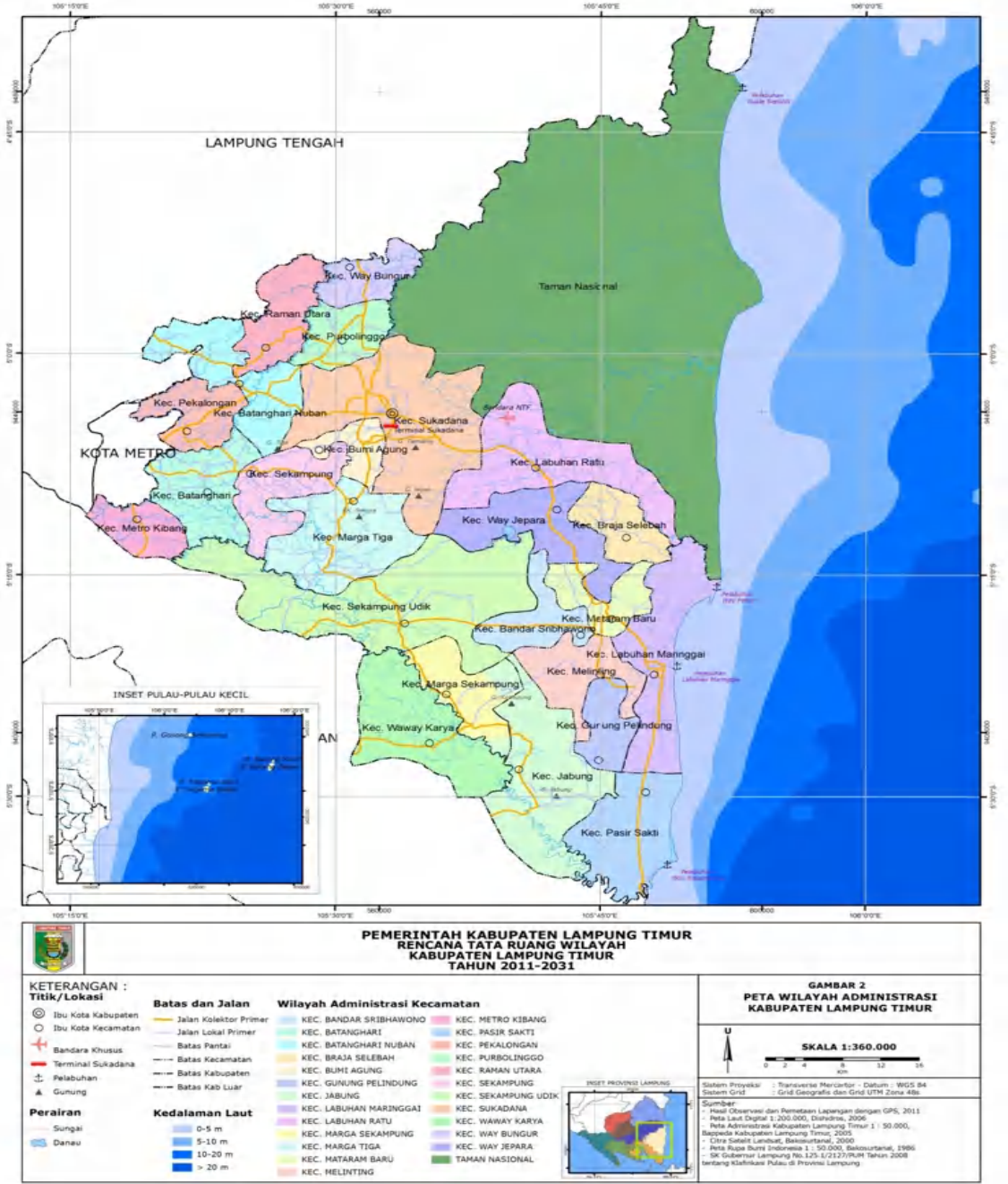
2.1.1 Aspek Geografi

Dari sisi geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105°15' BT-106°20'BT dan 4°37'LS -5°37' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau

sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa (wilayah laut Provinsi Banten dan DKI Jakarta).
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011 - 2031

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur Dirinci per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas Area (Ha)
			Desa	Kel.	
1	Metro Kibang	Margototo	7	-	7.677,83
2	Batanghari	Banar Joyo	17	-	14.887,95
3	Sekampung	Sumber Gede	17	-	14.834,39
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	-	25.072,94
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	-	33.912,45
6	Jabung	Negara Batin	15	-	26.784,54
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	-	19.393,83
8	Waway Karya	Sumberrejo	11	-	21.107,32
9	Marga Sekampung	Peniangan	8	-	17.732,34
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	-	19.498,73
11	Mataram Baru	Mataram Baru	7	-	7.956,11
12	Bandar Sribhawono	Saribhawono	7	-	18.570,67
13	Melinting	Wana	6	-	13.929,74
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	-	7.852,25
15	Way Jepara	Braja Sakti	15	-	22.926,92
16	Braja Selehah	Braja Hajosari	7	-	24.760,68
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	-	48.551,22
18	Sukadana	Sukadana	20	-	75.675,50
19	Bumi Agung	Donomulyo	8	-	7.317,47
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	-	18.068,84
21	Pekalongan	Pekalongan	12	-	10.012,81
22	Raman Utara	Kota Raman	11	-	16.136,91
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	-	22.203,37
24	Way Bungur	Tambah Subur	8	-	37.638,19
Jumlah			264	-	532.503,00

Sumber: SIPD Kabupaten Lampung Timur, 2020

Secara administratif wilayah perencanaan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

- a) Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur yang terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
- b) Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*), yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas, serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilahan penguasaan terhadap ruang udara, maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara, yang pada akhirnya berdampak kepada keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1. Iklim

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C.

Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan pada Beberapa Wilayah di
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Bulan/Month	Sukadana	Sekampung Udik	Jabung	Bendungan Garongan	Gantiwarno (Pekalongan)	Rata - Rata Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	232,6	204,5	294,0	488,0	338,8	304,8
Februari/Februari	333,1	-	187,5	280,0	377,0	235,5
Maret/March	278,9	447	343,0	365,0	345,6	355,9
April/April	143,0	101,0	80,5	362,0	271,6	171,6
Mei/May	48,3	-	135,5	73,0	123,7	76,1
Juni/June	39,4	96	55,0	45,0	58,7	58,8
Juli/July	52,6	52	46,0	59,0	135,3	69,0
Agustus/August	26,5	-	3,5	45,0	35,5	22,1
September/September	-	-	-	-	-	-
Oktober/October	0,5	31,0	-	70,0	27,3	32,1
November/November	9,2	67,0	14,5	60,0	65,0	43,1
Desember/December	88,1	207,5	258,5	276,0	301,0	226,2

Sumber : SIPD Kabupaten Lampung Timur, 2020

2. Hidrologi

a. Sungai

Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih – Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar, yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu, sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Di Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat banyak aliran sungai yang bermuara di Way Sekampung. Aliran sungai tersebut antara lain Way Ngisen, Way Capang, Way Curup, Way Nibung, Way Buyut, Way Sipin, Way Bekarang, Way Kandis Besar, Way Ulan, Way Bakun, Way Rupuyuh, Way Samping, Way Kenali dan Way Galih. Way Sekampung berhulu sungai di kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa, dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 km.

Way Sekampung mempunyai karakteristik fisik bentuk sungai berkelok-kelok (*meandering*), dengan jumlah cabang sungai sebanyak 12 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memiliki lebar berkisar 50-60 meter, kedalaman bervariasi 3,2 – 4,5 meter, kecepatan aliran rata-rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik.

Adapun di bagian hilir hingga muara sungai memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 meter, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 1.285 meter.

b. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selehah, dan Labuhan Ratu.

Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/ Way Kawat, yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan
- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa.
- Adanya kawasan perikanan darat.

c. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah.

Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selehah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting dan Gunung Pelindung.

Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-rata.

d. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumberdaya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar. Produktifitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batumannya kini mampu untuk bertindak sebagai akuifer.

Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20m-30m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8m-14m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7m-13m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7m-3m. Pada musim kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8m-7m, dengan muka air tanah bebas (TKA/static water level) berkisar antara 0,2m-4m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pola penggunaan lahan seperti permukiman di perkotaan yang tidak memperhatikan arah gerakan air tanah dan jaraknya dalam penempatan *septictank*. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

3. Topografi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter diatas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti, Braja Seleh, dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut.



Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3- 8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar, dan kelas lereng berbukit (15-40%) yaitu seluas 16.039 hektar. Adapun data selengkapnya untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng di Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Kelerengan				Jumlah
		0-3 %	0-8 %	8-15 %	15-30 %	
1	Metro Kibang	-	987,17	6.690,83		7.678
2	Batanghari	1.459,82	8.297,18	5.131,00		14.888
3	Sekampung	1.410,08	4.443,04	8.980,88	-	14.834
4	Marga Tiga	1.677,69	8.946,66	13.638,79	809,86	25.073
5	Sekampung Udik	3.227,24	20.813,20	6.979,62	2.891,94	33.912
6	Jabung	13.422,29	10.506,23	2.779,30	77,18	26.785
7	Pasir Sakti	19.394,00	-	-	-	19.394
8	Waway Karya	5.004,34	12.916,44	3.186,22	-	21.107
9	Marga Sekampung	1.950,94	6.324,17	7.672,52	1.784,37	17.732
10	Labuhan Maringgai	15.376,42	1.055,45	1.783,33	1.283,80	19.499
11	Mataram Baru	4.139,34	1.947,73	1.835,46	33,47	7.956
12	Bandar Sribhawono	1.767,59	1.090,58	12.031,67	3.681,16	18.571
13	Melinting	1.681,87	1.065,54	9.740,65	1.441,94	13.930
14	Gunung Pelindung	3.430,54	585,86	3.835,60	-	7.852
15	Way Jepara	6.551,00	3.637,90	12.738,10		22.927
16	Braja Selehah	8.290,69	83,15	16.387,16	-	24.761
17	Labuhan Ratu	-	3.955,15	44.582,64	13,21	48.551
18	Sukadana		36.978,82	35.069,35	3.627,83	75.676
19	Bumi Agung		5.627,97	1.689,03	-	7.317
20	Batanghari Nuban		11.940,17	5.734,27	394,57	18.069
21	Pekalongan		6.917,30	3.095,70	-	10.013
22	Raman Utara	120,54	15.642,22	374,24		16.137
23	Purbolinggo	-	22.137,20	65,8	-	22.203
24	Way Bungur	7.722,59	13.335,99	16.579,42	-	37.638
	Jumlah	96.626,99	198.247,95	213.910,74	16.039,32	532.503

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

4. Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan aluvium Kuarter. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang, dengan bukit bukit bulat menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang berumur tersier dan kuarter.Pada tabel berikut memperlihatkan susunan stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.4
Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

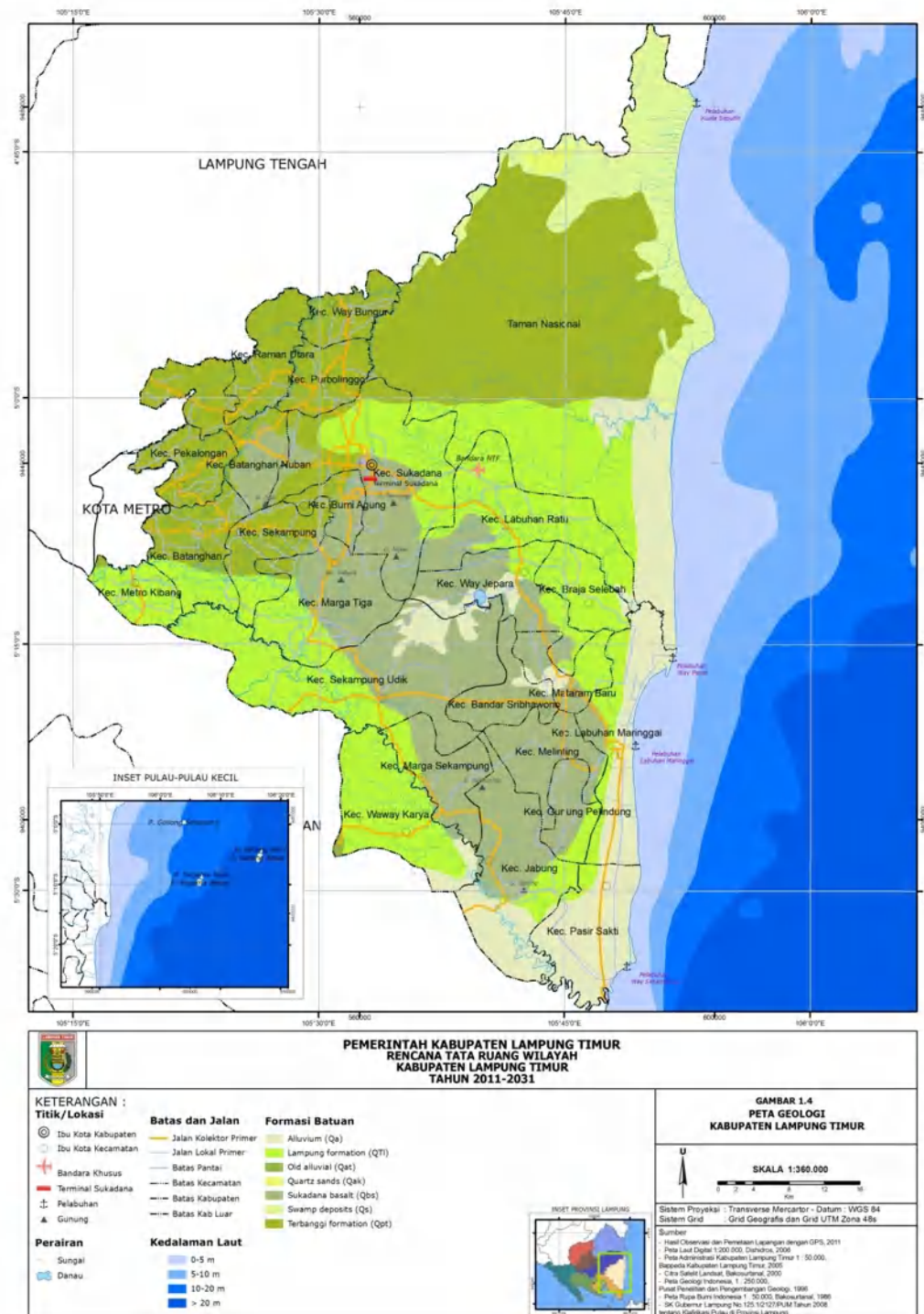
Batuan Kwarter	
(Qal)	Alluvium :bongkah, kerikil, pasir, tanah, lumpur, dan lempung
(Qbs)	Basalt Sukadanabasalt berongga
(Qak)	Pasir Kuarsa :pasir kuarsa halus
(Qs)	Endapan Rawa:pasir, lanau, lumpur, lempung, mengandung sisa tanaman
Batuan Tersier	
(Qpt)	Formasi Terbanggi :batu pasir dengan sisipan batu lempung
(Qty)	Formasi Lampung : tuffa berbatuapung, tuffa riolitik

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan lithologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

- a) Endapan Permukaan (alluvium) seluas 74.470,58 hektar (13,79% luas wilayah) yang terdiri dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada didaerah pesisir dan muara sungai.
- b) Batuan gunung api (Formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api ini seluas 122.405,34 hektar (22,98% luas wilayah), meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada kecamatan Labuhan Ratu yakni 33.340,90 hektar dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).
- c) Batuan sedimen (Formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing (Kls). Formasi ini seluas 173.181,19 hektar (32,52% luas wilayah) berarti bahwa batuan sedimen banyak terdapat di sebagian besar di bagian utara dan sedikit selatan, dengan dominasinya terdapat di Kecamatan Way Bungur (37.638 hektar).

Gambar 2.2
Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011 – 2031

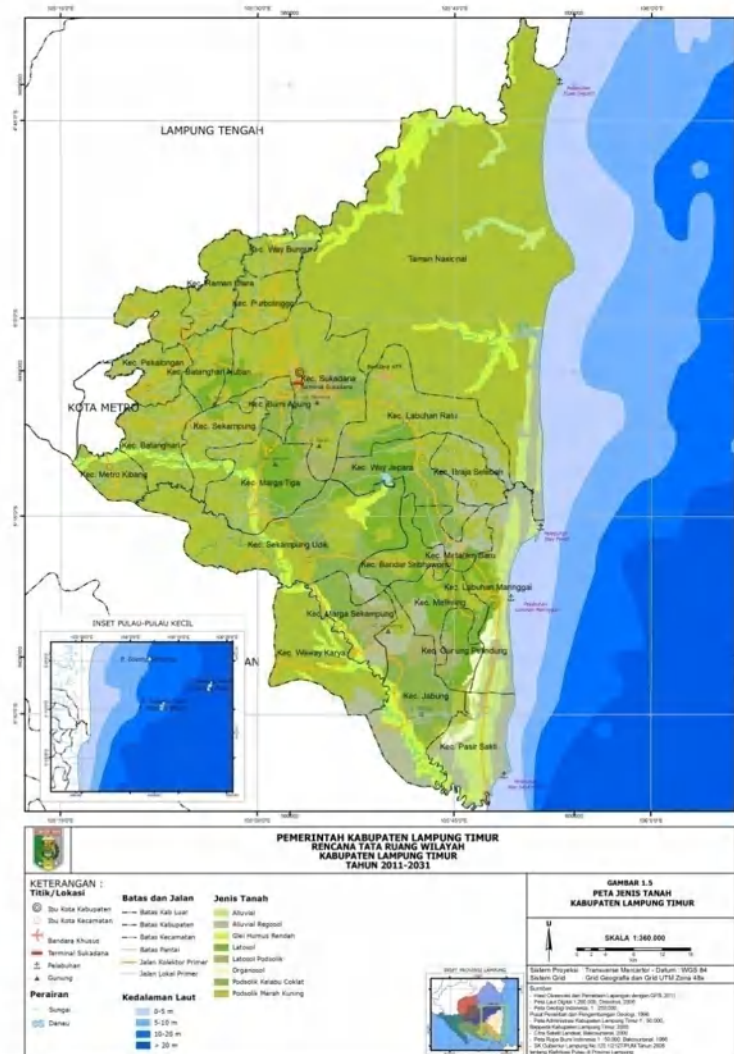
- d) Batuan beku (Basalt Sukadana) yang terbentuk dari basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Formasi batuan beku Kabupaten Lampung Timur seluas 163.445,9 hektar (30,69% luas wilayah), dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar).

5. Jenis Tanah dan Kemampuan Lahan

Jenis tanah di Wilayah Kabupaten Lampung Timur umumnya didominasi oleh tanah jenis podsolik merah kuning, podsolik kekuning-kuningan, latosol cokelat kemerahan, latosol merah, hidromorf kelabu, alluvial hidromorf, regosol cokelat kekuningan, alluvial

cokelat kelabu dan latosol merah. Adapun peta sebaran jenis tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.3
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011 – 2031

Klasifikasi kemampuan lahan (*land capability classification*) merupakan penilaian komponen-komponen lahan secara sistematis dan pengelompokannya kedalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan secara lestari. Adapun kriteria klasifikasi kemampuan lahan sebagai berikut:

- Kelas 1 :Wilayah baik sekali, hampir tidak memiliki penghambat dalam pengelolaannya, dapat digunakan untuk segala macam aktivitas.
- Kelas 2 : Wilayah baik, ada sedikit penghambat, dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan khusus untuk budidaya pertanian perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- Kelas 3 : Wilayah sedang, beberapa hambatan perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- Kelas 4:Wilayah jelek, berbagai penghambat alam membatasi penggunaan lahan untuk pertanian biasa, baik untuk tanaman tahunan, hutan produksi, dan perternakan.
- Kelas 5: Wilayah amat jelek, faktor-faktor alam tidak memungkinkan untuk suatu usaha pertanian, hanya baik untuk hutan lindung atau margasatwa.

Wilayah dengan nilai skor tinggi menunjukkan bahwa area tersebut memiliki keterbatasan atau faktor penghambat yang cukup besar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Untuk wilayah perkotaan diharapkan untuk memiliki nilai keterbatasan yang cukup kecil karena daya tampung aktivitasnya yang relatif besar. Seperti pada kemampuan lahan kelas 1 (sangat baik) yang menunjukkan tingginya tingkat kesetabilan lereng, ketersediaan air yang banyak, tidak peka terhadap erosi, dan memiliki tingkat yang aman terhadap bencana alam lainnya.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan lahan sangat baik (kelas 1) seluas 88.308,39 hektar atau 16,58% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Batanghari, Braja Selehah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Way Bungur. Tidak menutup kemungkinan bagi kelas 1 diperuntukan bagi aktivitas budidaya pertanian lahan basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainasenya terhambat sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun bila diperuntukan bagi aktivitas perindustrian, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan lahannya, antara lain faktor kesetabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan.

Daerah dengan klasifikasi kemampuan lahan baik (kelas 2) dengan beberapa faktor penghambat. Keterbatasan kondisi fisik alam yang terjadi kendala antara lain tingkat erosivitasnya yang lebih peka dibandingkan dengan kelas kemampuan lahan yang rendah. Luas wilayah dengan kriteria lahan baik adalah 101.859,32 hektar setara dengan 19,13% luas wilayah kabupaten Lampung Timur yang meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana dan Way Jepara. Lahan kelas 2 masih dapat digunakan untuk menampung aktifitas manusia tetapi bagi aktivitas budidaya pertanian perlu adanya sedikit usaha untuk intensifikasi (mekanisasi pertanian) untuk meminimalisasi faktor pembatas tersebut. Namun bila faktor pembatas tersebut diabaikan, pada umumnya tidak berakibat fatal terhadap aktifitas lainnya.

Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat klasifikasi kemampuan lahan sedang (kelas 3) seluas 70.411,50 hektar (13,22% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Metro Kibang, Pekalongan Purbolinggo, Waway Karya dan Way Bungur. Faktor pembatas yang dihadapi cenderung lebih banyak, sehingga perlu penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya pertanian. Faktor pembatas tersebut diantaranya tingkat erosivitas yang cenderung peka dan tingkat drainasenya agak cepat, bila digunakan untuk budidaya lebih sesuai untuk tanaman perkebunan karena tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Selain itu, dengan adanya tanaman keras dapat untuk membantu menopang badan tanah sehingga efek erosi tanah dapat ditekan.

Klasifikasi kemampuan lahan jelek (kelas 4) memiliki banyak pembatas alam diantaranya tanah yang lebih bersifat peka terhadap erosi, tingkat drainase tanah tinggi, kesetabilan

tanah mulai berkurang (agak stabil), dan ketersediaan airnya sedikit, sehingga apabila dipergunakan untuk kawasan permukiman atau aktifitas selain budidaya pertanian akan beresiko tinggi. Wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam kriteria ini adalah kecamatan Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Marga Sekampung, Marga Tiga, Melinting, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Jepara, dan Way Bungur, total luasnya mencapai 230.548,04 hektar atau 43,30% dari luas wilayah kabupaten.

Sedangkan sisanya, 7,77% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur setara dengan 41.375,76 hektar merupakan lahan dengan klasifikasi kemampuan lahan amat jelek (kelas 5) dicirikan dengan besarnya jumlah faktor penghambat sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai areal budidaya. Faktor penghambat yang berpengaruh antara lain morfologi lereng yang relative curam dan tidak stabil sehingga tingkat drainasenya cepat dan apabila diterpa hujan yang cukup deras dapat menyebabkan erosi. Di samping itu, tingkat drainase yang cepat menyebabkan tanah tidak sempat menyimpan air. Wilayah dengan klasifikasi amat jelek dapat dijumpai dikecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, dan Sukadana. Kawasan eksklusif adalah Taman Nasional Way Kambas.

6. Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. sistem pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem pusat kegiatan Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi atau PKWp, berada di Perkotaan Sukadana yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal atau PKL, meliputi :
 - Perkotaan Way Jepara yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura; dan
 - Perkotaan Labuhan Maringgai yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan.
- c. Pusat Kegiatan Lokal promosi atau PKLp, meliputi :
 - Perkotaan Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan

- distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan;
- Perkotaan Sekampung Udik yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman; dan
 - Perkotaan Bandar Sribhawono yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman.
- d. Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK meliputi
- Perkotaan Jabung yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung;
 - Perkotaan Purbolinggo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi;
 - Perkotaan Marga Tiga yang berfungsi sebagai pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan;
 - Perkotaan Pasir Sakti yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman dan pertambangan;
 - Perkotaan Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah dan permukiman;
 - Perkotaan Raman Utara yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah, permukiman dan lindung;
 - Perkotaan Melinting yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata;
 - Perkotaan Gunung Pelindung yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung;
 - Perkotaan Marga Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, dan lindung;
 - Perkotaan Batanghari yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman, dan lindung;
 - Perkotaan Metro Kibang yang berfungsi sebagai permukiman, dan perkebunan campur;
 - Perkotaan Batanghari Nuban yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
 - Perkotaan Bumi Agung yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
 - Perkotaan Labuhan Ratu yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, agrowisata; dan
 - Perkotaan Mataram Baru yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata.
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan atau PPL, meliputi :
- PPL Waway Karya yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman;
 - PPL Braja Selehah yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman; dan

- PPL Way Bungur yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman.

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang sebagai berikut :

a. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan, yang meliputi :

- pengembangan PKWp Sukadana,
- Pengembangan PKL Perkotaan Way Jepara dan perkotaan Labuhan Maringgai,
- Pengembangan PKLp Perkotaan Pekalongan, Perkotaan Sekampung Udik dan Perkotaan Bandar Sribhawono, Pengembangan PPK Perkotaan Jabung, Perkotaan Purbolinggo, Perkotaan Marga Tiga, Perkotaan Pasir Sakti, Perkotaan Sekampung, Perkotaan Raman Utara, Perkotaan Melinting, Perkotaan Gunung Pelindung, Perkotaan Marga Sekampung, Perkotaan Batanghari, Perkotaan Metro Kibang, Perkotaan Batanghari Nuban, Perkotaan Bumi Agung, Perkotaan Labuhan Ratu dan Perkotaan Mataram Baru.
- Pengembangan PPL Perdesaan Waway Karya, Perdesaan Braja Selebah dan Perdesaan Way Bungur

b. Perwujudan Sistem Prasarana Utama, yang meliputi :

1. Sistem Transportasi Darat;

- jaringan jalan, yang meliputi jalan yang menghubungkan antar ibukota Kecamatan; pengembangan jalan lokal tersebar di seluruh kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung dari tiap-tiap pusat kegiatan; dan pengembangan jalan lingkar kabupaten terdiri dari ruas jalan Bumi Tinggi-Pasar Sukadana-Muara Jaya; jalan kota Sukadana Mataram Marga-kantor pemda-Jalan Lintas Pantai Timur.
- jaringan prasarana lalu lintas, yang meliputi pembangunan terminal Tipe B di Kecamatan Sukadana; pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Sekampung Udik; pengembangan terminal tipe C Mataram Baru sesuai dengan kriteria yang berlaku; dan *Rest area* di Kecamatan Labuhan Ratu.
- jaringan pelayanan lalu lintas, yang meliputi pengembangan trayek angkutan barang menghubungkan lintas pantai timur Sumatra- Jawa, mulai dari Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Way Bungur; pengembangan trayek yang menghubungkan antara Sumatera Selatan-Lampung Timur-Bandar Lampung; pengembangan trayek Tulang Bawang-Lampung Timur, Lampung Selatan-Lampung Timur, Kota Metro-Lampung Timur, Lampung Tengah-Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung-Lampung Timur; dan pengembangan trayek Kecamatan Pekalongan-Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara-Kecamatan Sukadana.

2. Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian, yang meliputi pengembangan jalur Pringsewu–Rejosari–Tegineneng–Metro–Sukadana; dan pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Sukadana.
 3. Sistem Jaringan Transportasi Laut, yang meliputi pengembangan pelabuhan pengumpan berada di Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Way Penet dan Pelabuhan Way Sekampung; dan pengembangan pelayanan dari Pelabuhan Labuhan Maringgai–Pelabuhan Tanjung Priok.
 4. Sistem Jaringan Transportasi Udara, yang meliputi peningkatan bandar udara khusus Nusantara Tropical Fruit, dan penyusunan rencana induk bandar udara.
- c. Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya, yang meliputi :
1. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan, yang meliputi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah; jaringan pipa gas transmisi melalui Kecamatan Raman Utara–Batanghari Nuban–Sukadana–Labuhan Ratu–Braja Selehah–Labuhan Maringgai; jaringan pipa gas distribusi melalui Kecamatan Labuhan Maringgai–Mataram Baru–Bandar Sribhawono–Sekampung Udik–Kota Bandar Lampung; pengembangan Gardu Induk (GI) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono dengan besar tegangan 70–150 Kv (tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilovolt); pengembangan Gardu Distribusi (GD) terdapat di Kecamatan Sukadana yang berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 70–150 KV tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt) menjadi tegangan rendah 380/220 V (tiga ratus delapan puluh per dua ratus dua puluh volt); pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari pembangkit menuju gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono melalui Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Bandar Sribhawono; pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Metro melalui Kecamatan Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Tiga, Sekampung, Batanghari; pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Kecamatan Sukadana melalui Kecamatan Sribhawono, Mataram Baru, Way Jepara, Sukadana; dan pengembangan jaringan tegangan rendah, merupakan jaringan distribusi dari GD ke konsumen.
 2. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, yang meliputi peningkatan jaringan telekomunikasi dengan sistem sambungan kabel di wilayah-wilayah yang belum terlayani; rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel khususnya di kawasan perkotaan; dan penataan dan efisiensi penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
 3. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air, yang meliputi pengembangan pengelolaan Sungai Way Sekampung sebagai sumber air baku untuk air bersih; pengembangan sumber mata air di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung, dan Danau Way Jepara; pengembangan sumber mata air dari Danau Beringin Indah di Kecamatan Sukadana; peningkatan pelayanan air

minum pada kecamatan-kecamatan yang sudah terlayani seperti Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Purbolinggo; peningkatan kualitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur; peningkatan kuantitas air bersih melalui pembuatan bangunan penangkap air dan sumur bor di kawasan-kawasan perkotaan; pengembangan PDAM Way Guruh sebagai pengelola distribusi air minum; dan pembangunan embung pada kawasan rawan banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.

4. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, yang meliputi

- sistem persampahan, yang meliputi penyusunan rencana induk pengolahan persampahan; pengembangan optimalisasi TPA di Kecamatan Sukadana; pengembangan TPS eksisting yang ada di Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Sribhawono, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Braja Selehah dan Kecamatan Labuhan Ratu; dan pengembangan sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Lampung Timur.
- sistem air minum, yang meliputi peningkatan kualitas air tanah untuk mengoptimalkan produksi air minum penduduk; pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Sukadana.; dan pengembangan distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama.
- sistem pengelolaan air limbah, yang meliputi pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu di kawasan permukiman melalui sistem saluran tertutup; sosialisasi program pemanfaatan *septic tank* sebagai sarana pembuangan limbah rumah tangga; pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah tangga secara komunal di kawasan-kawasan tertentu; pembangunan IPLT pembuangan limbah industri di Kecamatan Sribhawono; dan pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) terdapat di kawasan industri.

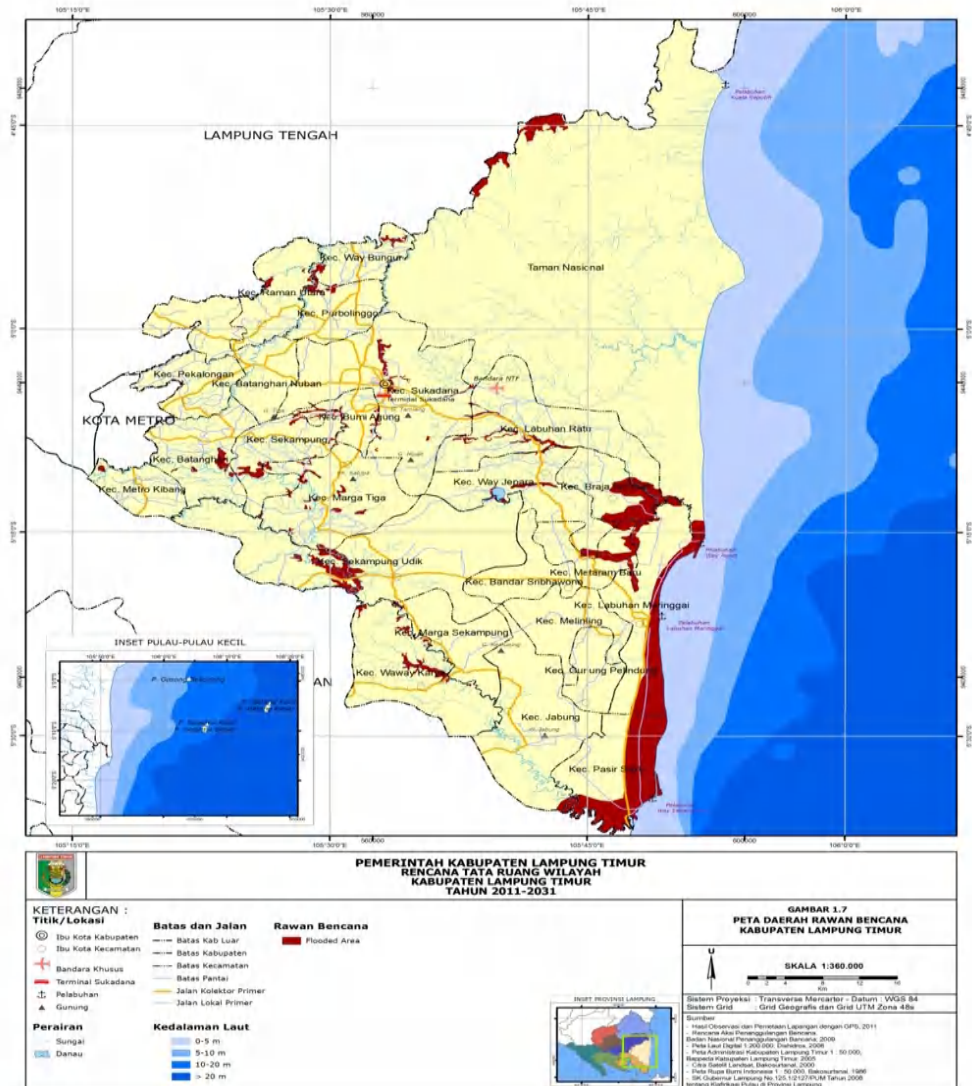
- sistem jaringan drainase, yang meliputi :
 - i. pengembangan jaringan drainase primer terdiri atas sungai dan anak sungai meliputi : Sungai Seputih, Sungai Wako, Sungai Kapuk, Sungai Kambas Jepara, Sungai Jepara, Sungai Nibung, dan Sungai Sekampung
 - ii. normalisasi dan pengerukan secara berkala pada jaringan-jaringan yang mengalami sedimentasi;
 - iii. optimalisasi drainase dengan mengupayakan perlindungan daerah hulu;
 - iv. pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada di Kabupaten Lampung Timur;
 - v. pembangunan prasarana drainase pada kecamatan yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan perkantoran, pusat permukiman kota, pusat pendidikan dan pusat pengembangan permukiman desa; dan
 - vi. pembangunan prasarana drainase di kawasan yang rawan terjadi banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.
- jalur dan ruang evakuasi bencana, yang meliputi :
 - i. pengembangan jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang diberi rambu untuk arah evakuasi;
 - ii. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Bandar Sribowono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara;
 - iii. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan longsor Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti;
 - iv. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan abrasi Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - v. pembangunan rambu-rambu/petunjuk arah evakuasi pada jalur evakuasi bencana; dan
 - vi. pengembangan sistem peringatan dini ketika terjadi bencana.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang di sebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir.

Sedangkan jenis bencana yang di akibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut diatas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan–kawasan yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut.

Gambar 2.4
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011 - 2031

Jenis bencana yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur yaitu berupa banjir yang terjadi pada beberapa kecamatan di Lampung Timur. Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir yaitu Kecamatan Braja Seleh, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, sekampung Udik, Sekampung, Batanghari, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana, dan Bumi Agung. Terjadinya banjir

disebabkan oleh meluapkanya air sungai hingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya.

Berdasarkan dokumen revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, potensi bencana di Kabupaten Lampung Timur meliputi :

Tabel 2.5
Potensi Luas Bahaya Bencana di Kabupaten Lampung Timur

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (ha)	Kelas
1	Banjir	255.051	TINGGI
2	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	2.564	SEDANG
3	Gempa Bumi	394.580	TINGGI
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	134.246	TINGGI
5	Kekeringan	394.580	TINGGI
6	Epidemi dan Wabah Penyakit	17	TINGGI
7	Cuaca Ekstrim	265.094	SEDANG
8	Tanah Longsor	343	TINGGI
9	Tsunami	1	TINGGI

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

2.1.3 Kawasan Lindung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kabupaten Lampung Timur meliputi :

Tabel 2.6
Luas Kawasan Lindung

No	Peruntukan	Luasan (±Ha)	Lokasi
1	Kawasan Lindung		
a	Hutan Lindung		
	Hutan Lindung Gunung Balak Register 38	22.292,50	Kec. Way Jepara, Jabung, Bandar Sribhawono dan Sekampung Udik
	Hutan Lindung Muara Sekampung Register 15	1.488,36	Kec. Marga Sekampung, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, dan Melinting
b	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya		
	- Kawasan Bergambut	11.068,00	Kec. Braja Selehah, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Way Bungur, Way Jepara
	- Kawasan Resapan Air	39.144,00	Kec. Bandar Sribhawono, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Melinting, Pasir Sakti, Sekampung Udik, dan Way Jepara
c	Kawasan Perlindungan Setempat		
	- Kawasan Sempadan Pantai	5.588,00	Kec. Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti

No	Peruntukan	Luasan (±Ha)	Lokasi
	- Kawasan Sempadan Sungai	11.087,00	di seluruh DAS, meliputi Kec. Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Marga Tiga, Metro Kibang, Pasir Sakti, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Bungur, Way Jepara
	- Kawasan Sekitar Danau/Waduk	358,00	Sekitar Danau Way Jepara dan Danau Beringin Indah
	- Kawasan Sekitar Mata Air	3.413,00	Sekitar sumber-sumber mata air di Kec. Bandar Sribhawono, Jabung, dan Danau Way Jepara
	- RTH di Kawasan Perkotaan		
	♦ RTH Publik berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan pantai	45.149,00	
	♦ RTH Privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta	18.060,00	
d	Kawasan Suaka Alam. Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		
	- Suaka Margasatwa		Kawasan perlindungan penyu di TNWK dan Pulau Segama
	- Kawasan Pantai Berhutan Bakau	3.203,00	Kec. Labuhan Maringgai
	- Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	125.621,30	TNWK
	- Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		Taman Wisata Swadaya Pekalongan, Danau Jepara, Danau Beringin Indah Sukadana, Danau Kemuning Sribhawono, Way Curup Mataram Baru, Pantai Mangrove Center Maringgai
	- Kawasan Budaya dan Ilmu Pengetahuan		Taman Purbakala Pugung Raharjo, Museum Budaya Sukadana, Bangunan Adat Sesat Agung Sukadana, Desa Tradisional Wana Melinting, Rumah Tradisional Gedong Wani Marga Tiga, Rumah Tradisional Keratuan Pugung Sekampung Udik
	Kawasan Rawan Bencana Alam		
	- Kawasan Rawan Tanah Longsor	7.333,00	Kec. Sekampung Udik, Marga Sekampung, Waway Karya, Jabung, dan Pasir Sakti
	- Kawasan Rawan Abrasi	1.949,00	Kec. Labuhan Maringgai
	- Kawasan Rawan Banjir	15.983,00	Kec. Bandar Sribhawono, Braja Selehah, Sekampung, Mataram Baru, Melinting, Sekampung Udik, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Raman Utara
	- Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	123.621,00	TNWK
	- Kawasan Rawan Angin Puting Beliung		Kec. Sukadana, Pasir Sakti, Pekalongan, Sekampung, dan Purbolinggo
	- Kawasan Rawan Gelombang Tinggi	7.879,00	Kec. Labuhan Maringgai, Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, Pulau Gosong Sekopong, Pulau Batang Besar, dan Pulau Batang Kecil

Sumber : Bappeda Kabupaten Lampung Timur, 2021



2.1.4 Demografi

Salah satu ciri pokok penduduk di negara berkembang seperti Indonesia, selain jumlahnya besar, secara geografis penyebarannya tidak merata. Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung memiliki ciri yang sama. Persebaran penduduk yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur, historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri. Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Timur per Tahun 2015-2020 adalah 0,7 persen per tahun. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan berimplikasi langsung pada meningkatnya tingkat kepadatan suatu wilayah. Kepadatan penduduk mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dipandang sebagai modal dalam proses pembangunan.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur 2015-2020

Kecamatan	Tahun																		Laju Pertumbuhan
	2015			2016			2017			2018			2019			2020			
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	
Metro Kibang	11.565	11.155	22.720	11.750	11.342	23.092	11.928	11.525	23.453	12.103	11.708	23.811	12.276	11.882	24.158	12.442	12.056	24.498	1,26
Batanghari	29.610	29.464	59.074	30.000	30.000	60.000	30.370	30.274	60.644	30.733	30.666	61.399	31.082	31.039	62.121	31.417	31.404	62.821	1,03
Sekampung	31.965	31.134	63.099	32.225	32.225	64.450	32.460	31.673	64.133	32.684	31.923	64.607	32.892	32.151	65.043	33.080	32.368	65.448	0,61
Marga Tiga	23.380	22.104	45.484	23.541	23.541	47.082	23.683	22.431	46.114	23.817	22.580	46.397	23.939	22.713	46.652	24.046	22.839	46.885	0,51
Sekampung Udik	36.945	35.252	72.197	37.287	37.287	74.574	37.605	35.947	73.552	37.908	36.271	74.179	38.195	36.573	74.768	38.455	36.862	75.317	0,71
Jabung	25.757	24.367	50.124	26.073	26.073	52.146	26.370	24.991	51.361	26.661	25.291	51.952	26.939	25.576	52.515	27.204	25.853	53.057	0,95
Pasir Sakti	18.836	17.884	36.720	19.033	19.033	38.066	19.216	18.277	37.493	19.393	18.464	37.857	19.561	18.638	38.199	19.718	18.807	38.525	0,80
Waway Karya	16.998	16.340	33.338	16.848	16.848	33.696	16.685	16.069	32.754	16.518	15.923	32.441	16.344	15.766	32.110	16.161	15.606	31.767	-0,80
Marga Sekampung	13.724	12.875	26.599	13.749	13.749	27.498	13.764	12.934	26.696	13.772	12.956	26.728	13.773	12.966	26.739	13.765	12.972	26.737	0,09
Labuhan Maringgai	36.476	34.075	70.551	36.897	36.897	73.794	37.292	34.900	72.192	37.678	35.295	72.973	38.046	35.667	73.713	38.393	36.031	74.424	0,89
Malam Baru	14.420	13.782	28.202	14.544	14.544	29.088	14.657	14.033	28.690	14.765	14.151	28.916	14.866	14.259	29.125	14.959	14.361	29.320	0,65
Bandar Sribhawono	25.195	23.783	48.978	25.433	25.433	50.866	25.651	24.258	49.909	25.863	24.480	50.343	26.061	24.687	50.748	26.244	24.886	51.130	0,72
Melinting	13.230	12.327	25.557	13.294	13.294	26.588	13.348	12.460	25.808	13.398	12.518	25.916	13.439	12.567	26.006	13.472	12.612	26.084	0,34
Gunung Pelindung	11.033	10.467	21.500	11.053	11.053	22.106	11.064	10.514	21.578	11.070	10.530	21.600	11.070	10.539	21.609	11.063	10.543	21.606	0,08
Way Jepara	28.277	26.681	54.958	28.620	28.620	57.240	28.942	27.357	56.299	29.256	27.682	56.938	29.559	27.990	57.549	29.845	28.290	58.135	0,94
Braja Seletbah	11.893	11.154	23.047	12.003	12.003	24.006	12.103	11.371	23.474	12.200	11.473	23.673	12.291	11.567	23.858	12.374	11.658	24.032	0,70
Labuhan Ratu	22.935	21.409	44.344	23.193	23.193	46.386	23.435	21.916	45.351	23.670	22.158	45.828	23.895	22.385	46.280	24.106	22.606	46.712	0,87
Sukadana	35.166	33.104	68.270	35.519	35.519	71.038	35.848	33.807	69.655	36.165	34.141	70.306	36.466	34.451	70.917	36.746	34.750	71.496	0,77
Bumi Agung	8.940	8.845	17.785	9.005	9.005	18.010	9.063	8.983	18.046	9.118	9.046	18.164	9.167	9.103	18.270	9.213	9.156	18.369	0,54
Batanghari Nuban	22.243	21.309	43.552	22.456	22.456	44.912	22.651	21.740	44.391	22.841	21.943	44.784	23.018	22.131	45.149	23.183	22.312	45.495	0,73
Pekalongan	24.761	23.892	48.653	25.061	25.061	50.122	25.343	24.498	49.841	25.620	24.789	50.409	25.885	25.064	50.949	26.136	25.333	51.469	0,94
Raman Utara	18.971	18.263	37.234	19.076	19.076	38.152	19.166	18.485	37.651	19.249	18.584	37.833	19.322	18.669	37.991	19.384	18.748	38.132	0,40
Purbolinggo	21.729	21.336	43.065	21.977	21.977	43.954	22.211	21.849	44.060	22.437	22.094	44.531	22.654	22.324	44.978	22.858	22.548	45.406	0,89
Way Bungur	12.030	11.716	23.746	12.177	12.177	24.354	12.314	12.015	24.329	12.450	12.158	24.608	12.579	12.294	24.873	12.702	12.427	25.129	0,95
Jumlah	516.079	492.718	1.008.797	520.814	520.406	1.041.220	525.169	502.307	1.027.476	529.369	506.824	1.036.193	533.319	511.001	1.044.320	536.966	515.028	1.051.994	0,70

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi BPS mencapai 1.051.994 jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 0,73 persen. Sebagai data pembanding, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, pada Tahun 2020 jumlah penduduk Lampung Timur telah mencapai 1.125.674 jiwa.

Selanjutnya, berdasarkan data monografi penduduk di kecamatan Lampung Timur Tahun 2020, terdapat sebaran kepadatan penduduk yang beragam antar kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Kepadatan penduduknya berkisar 73–526 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pekalongan sebesar 526 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Way Bungur sebesar 73 jiwa/km².



Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur per kilometer persegi

	Kecamatan Subdistrict	Presentasi Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km
	(1)	(4)	(5)
1	Metro Kibang	2,15	316
2	Batanghari	5,42	410
3	Sekampung	6,06	460
4	Marga Tiga	4,53	203
5	Sekampung Udik	6,96	231
6	Jabung	4,91	206
7	Pasir Sakti	3,91	227
8	Waway Karya	3,85	205
9	Marga Sekampung	2,76	175
10	Labuhan Maringgai	6,85	395
11	Mataram Baru	2,87	406
12	Bandar Sribhawono	4,70	285
13	Melinting	2,70	218
14	Gunung Pelindung	2,24	321
15	Way Jepara	5,24	257
16	Braja Selebah	2,42	110
17	Labuhan Ratu	4,67	108
18	Sukadana	6,63	99
19	Bumi Agung	1,85	285
20	Batanghari Nuban	4,29	267
21	Pekalongan	4,68	526
22	Raman Utara	3,74	261
23	Purbolinggo	4,16	211
24	Way Bungur	2,43	73
Lampung Timur			
Hasil Registrasi/Registration Result		100	211
Hasil Proyeksi ¹ /Projection Result ¹		100	196

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

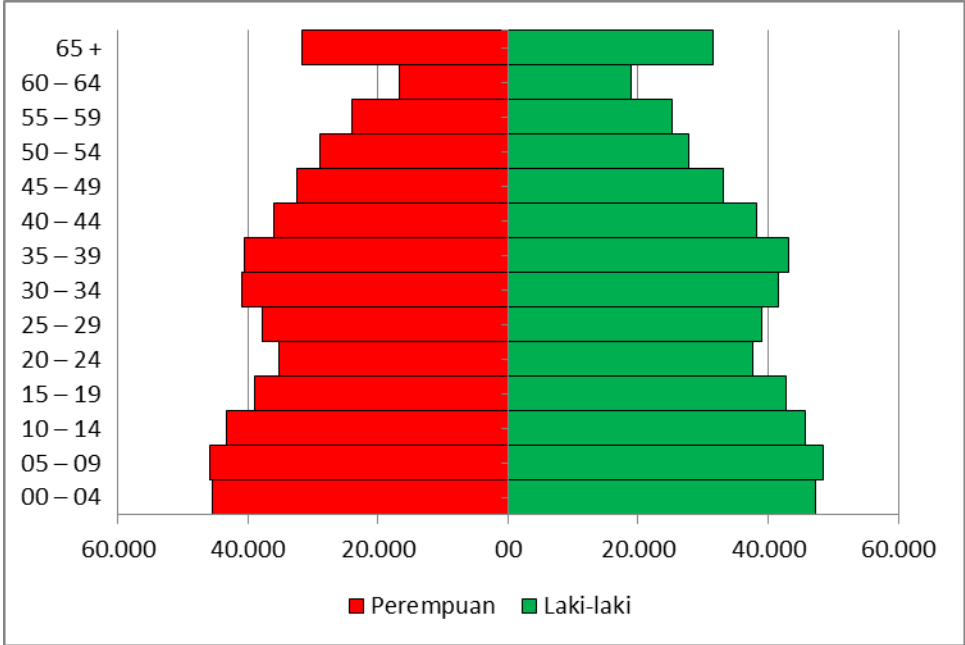
Penduduk menurut struktur usia pada dasarnya berhubungan dengan angkatan kerja. Komposisi penduduk usia produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Agar proses pembangunan berjalan lancar, kelompok penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebaiknya semakin mengecil bila dibandingkan dengan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	43.630	41.609	85.239
5 - 9	47.839	45.862	93.701
10 - 14	46.560	44.121	90.681
15 - 19	46.159	43.624	89.783
20 - 24	46.335	43.610	89.945
25 - 29	43.364	42.204	85.568
30 - 34	41.468	42.171	83.639
35 - 39	41.843	43.456	85.299
40 - 44	43.249	43.492	86.741
45 - 49	40.604	38.606	79.210
50 - 54	33.682	31.301	64.983
55 - 59	27.682	26.295	53.977
60 - 64	21.553	20.795	42.348
65 - 69	17.609	15.841	33.450
70 - 74	11.430	10.244	21.674
70 +	12.736	11.366	24.102
Lampung Timur	565.743	544.597	1.110.340

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Grafik 2.1
Piramida Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan tabel dan grafik di atas Kabupaten Lampung Timur terlihat bahwa penduduk Kabupaten Lampung Timur tergolong penduduk muda menuju "transisi". Hal ini diperlihatkan oleh panjang batang piramida kelompok umur 0-4, 5-9, dan 10-14 tahun yang sedikit lebih panjang dari kelompok umur lainnya. Golongan penduduk muda



biasanya diperlihatkan dengan panjang batang piramida kelompok umur 0–4, 5–9, dan 10–14 tahun lebih panjang dari kelompok umur lainnya dan batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun ke atas yang cukup pendek. Selain itu juga terlihat bahwa persentase penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan kelompok umur tua (64 tahun ke atas) dan usia 0-14 tahun. Artinya, Kabupaten Lampung Timur mempunyai sumber daya manusia yang cukup potensial.

Selanjutnya, berdasarkan data dan grafik di atas terlihat bahwa persentase penduduk pada kelompok umur muda lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur yang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penduduk Lampung Timur tergolong struktur penduduk muda “transisi” karena proporsi penduduk dibawah 15 tahun masih tinggi, yakni mencapai 27 persen. Banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di suatu wilayah menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. Semakin kecil persentase penduduk usia produktif maka semakin besar tanggungannya terhadap penduduk tidak produktif. Lebih lanjut, terkait dengan jumlah keluarga di Kabupaten Lampung Timur per kecamatan ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Jumlah Keluarga per Kecamatan Tahun 2015-2020

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Metro Kibang	5.682	6.813	6.813	6.813	5.682	6.747
2	Batanghari	15.473	15.587	15.587	15.587	15.473	15.473
3	Sekampung	17.527	18.059	18.059	18.059	17.527	18.113
4	Marga Tiga	14.024	13.137	13.137	13.137	14.024	16.914
5	Sekampung Udik	20.667	19.767	19.767	19.767	20.667	20.667
6	Jabung	14.917	13.783	13.783	13.783	14.917	13.787
7	Pasir Sakti	10.714	10.302	10.302	10.302	10.714	11.424
8	Waway Karya	10.422	11.069	11.069	11.069	10.422	10.714
9	Marga Sekampung	7.946	8.116	8.116	8.116	7.946	7.946
10	Labuhan Maringgai	17.204	19.173	19.173	19.173	17.204	20.783
11	Mataram Baru	6.183	7.811	7.811	7.811	6.183	7.608
12	Bandar Sribhawono	7.297	14.211	14.211	14.211	7.297	11.782
13	Melinting	7.464	7.523	7.523	7.523	7.464	7.297
14	Gunung Pelindung	11.782	6.240	6.240	6.240	11.782	6.476
15	Way Jepara	14.827	14.420	14.420	14.420	14.827	14.827
16	Braja Selehah	6.386	6.812	6.812	6.812	6.386	6.386
17	Labuhan Ratu	12.789	12.946	12.946	12.946	12.789	13.935
18	Sukadana	20.173	21.590	21.590	21.590	20.173	21.170
19	Bumi Agung	5.441	5.386	5.386	5.386	5.441	5.441
20	Batanghari Nuban	11.442	12.709	12.709	12.709	11.442	13.171
21	Pekalongan	11.937	13.375	13.375	13.375	11.937	14.944
22	Raman Utara	10.953	11.313	11.313	11.313	10.953	11.629
23	Purbolinggo	11.521	12.251	12.251	12.251	11.521	13.161
24	Way Bungur	6.809	6.608	6.608	6.608	6.809	7.531
Lampung Timur		279.580	289.001	289.001	289.001	279.580	297.926

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan kehidupan keagamaan, pada Tahun 2020 persentase jumlah pemeluk agama Islam sebesar 97,33%. Selanjutnya pemeluk agama Hindu sebanyak 1,42%; Kristen

Protestan 1,32%; Kristen Katolik 0,91%, dan Budha 0,25%. Terkait dengan jumlah pemeluk agama dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut
Tahun 2020

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Metro Kibang	22,291	55	33	-	-
2	Batanghari	53,759	301	952	16	107
3	Sekampung	65,088	501	269	44	87
4	Marga Tiga	46,606	396	270	1,242	17
5	Sekampung Udik	64,844	4,107	456	3,697	324
6	Jabung	74,872	241	896	403	92
7	Pasir Sakti	39,539	189	1,071	885	50
8	Waway Karya	41,217	620	498	1,799	267
9	Marga Sekampung	27,91	221	115	224	53
10	Labuhan Maringgai	65,043	574	180	515	111
11	Mataram Baru	28,887	25	74	10	5
12	Bandar Sribhawono	45,847	643	379	283	221
13	Melinting	28,806	184	26	20	-
14	Gunung Pelindung	17,99	439	50	20	300
15	Way Jepara	49,957	1,197	765	308	93
16	Braja Selebah	21,45	238	243	1,269	7
17	Labuhan Ratu	46,054	1,028	465	375	89
18	Sukadana	71,021	421	150	627	9
19	Bumi Agung	17,261	631	282	238	-
20	Batanghari Nuban	40,786	669	452	19	187
21	Pekalongan	43,906	608	1,173	272	633
22	Raman Utara	34,554	54	224	2,951	41
23	Purbolinggo	41,747	355	443	-	-
24	Way Bungur	27,085	135	135	14	-
Lampung Timur		1,016,520	13,832	9,601	15,231	2,693

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Jumlah tempat peribadatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan secara kuantitas kehidupan keagamaan juga mencerminkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat kerukunan beragama cukup baik yang tercermin dari rendahnya intensitas maupun frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama. Terkait banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

	Kecamatan Subdistrict	Masjid Masque	Mushola Mushola	Gereja Protestan Christian Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura/ Sanggah Temple	Vihara/ Cetya Vihara
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Metro Kibang	33	77	-	1	-	-
2	Batanghari	75	177	3	4	-	3
3	Sekampung	69	180	9	2	-	1
4	Marga Tiga	84	119	5	2	5	-
5	Sekampung Udik	78	188	22	3	16	2
6	Jabung	59	140	1	-	-	1
7	Pasir Sakti	60	67	10	2	3	3
8	Waway Karya	53	109	12	3	6	3
9	Marga Sekampung	35	60	2	2	3	1
10	Labuhan Maringgai	75	107	3	1	2	1
11	Mataram Baru	42	79	2	4	1	3
12	Bandar Sribhawono	49	158	5	2	-	3
13	Melinting	38	69	1	1	-	-
14	Gunung Pelindung	36	54	-	3	-	1
15	Way Jepara	102	115	11	2	5	-
16	Braja Selebah	34	56	2	3	6	-
17	Labuhan Ratu	70	118	4	2	4	1
18	Sukadana	125	155	1	1	2	-
19	Bumi Agung	27	45	2	1	2	-
20	Batanghari Nuban	68	112	3	1	-	3
21	Pekalongan	76	60	3	1	1	3
22	Raman Utara	66	110	2	1	4	-
23	Purbolinggo	67	123	3	1	-	-
24	Way Bungur	52	80	-	-	-	-
Lampung Timur		1,473	2,558	106	43	60	29

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Pada tahun 2016-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur masih tumbuh positif yakni sebesar 4,54 persen, 4,58 persen, 3,71 persen dan 3,81 persen di tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya nilai tambah bruto pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan, dimana Lapangan Usaha ini memberikan *share* terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur, selain hal ini dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di pelosok negeri turut menyumbang kontraksi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur. Gambaran perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku kurun waktu 5 tahun terakhir tergambarkan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 2.13
PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.711.689,52	13.387.759,88	14.395.745,46	15.028.781,64	15.425.573,47
B	Pertambangan dan Penggalian	7.829.893,52	8.674.997,14	9.555.671,84	9.815.830,83	8.338.973,61
C	Industri Pengolahan	2.354.110,80	2.672.795,48	3.000.784,93	3.325.654,56	3.253.855,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93.469,80	237.824,43	258.631,15	289.436,35	256.933,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.970,39	19.827,31	20.860,82	22.017,82	23.359,60
F	Konstruksi	1.723.091,88	2.003.772,82	2.215.817,21	2.394.857,95	2.328.278,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.657.031,79	2.917.766,80	3.214.418,28	3.585.998,25	3.616.483,03
H	Transportasi dan Pergudangan	656.273,28	713.312,41	749.030,08	810.624,76	797.776,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	380.483,63	412.670,14	458.957,02	512.673,27	500.503,06
J	Informasi dan Komunikasi	1.168.615,82	1.298.294,63	1.400.300,30	1.509.500,89	1.623.971,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	457.237,60	494.120,43	519.586,91	542.629,18	556.254,93
L	Real Estat	660.269,97	746.279,23	795.662,94	889.485,05	897.370,78
M,N	Jasa Perusahaan	26.636,95	28.701,87	30.258,05	31.987,46	32.001,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	996.761,65	1.083.942,25	1.146.193,73	1.215.193,95	1.319.280,08
P	Jasa Pendidikan	826.793,69	875.713,94	962.312,48	1.075.533,35	1.122.686,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	226.841,26	239.050,25	255.326,04	275.227,36	304.132,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	298.367,33	336.475,92	370.506,04	410.650,79	390.046,80
Produk Domestik Regional Bruto		33.085.538,85	36.143.304,94	39.350.063,30	41.736.083,45	40.787.482,77
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		25.868.279,43	28.155.307,75	30.540.247,26	32.718.088,96	33.285.578,66

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Timur kurun waktu 2016-2020, juga mengalami penurunan di Tahun 2020, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.439.033,32	9.623.350,67	9.856.341,75	10.086.791,62	10.119.483,11
B	Pertambangan dan Penggalian	7.391.655,56	7.631.777,92	7.655.738,03	7.706.612,57	7.080.172,96
C	Industri Pengolahan	1.770.941,87	1.908.020,22	2.107.470,10	2.303.779,09	2.183.246,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	74.740,60	168.441,92	180.603,99	200.315,95	178.391,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.123,19	14.042,92	14.561,63	15.329,76	16.099,98
F	Konstruksi	1.283.039,07	1.434.848,63	1.562.852,89	1.658.309,73	1.623.873,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.136.745,77	2.278.480,24	2.441.141,81	2.619.268,17	2.570.294,22
H	Transportasi dan Pergudangan	474.981,81	506.619,02	530.874,39	571.927,67	551.878,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232.791,21	252.278,13	275.874,39	300.605,03	290.333,43
J	Informasi dan Komunikasi	940.652,46	1.025.685,50	1.100.133,02	1.176.587,19	1.272.558,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	331.492,39	343.641,10	349.463,61	356.368,34	366.747,70
L	Real Estat	555.542,31	578.948,18	601.941,88	637.352,85	628.159,45
M,N	Jasa Perusahaan	18.391,12	19.424,77	20.183,42	21.020,62	20.686,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	646.662,16	676.595,03	708.917,48	737.833,04	781.771,32
P	Jasa Pendidikan	599.448,67	625.140,20	680.879,02	739.822,19	765.005,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165.390,86	173.188,28	183.471,00	194.709,51	213.326,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	217.555,89	236.356,95	257.778,92	279.498,55	267.597,73
Produk Domestik Regional Bruto		26.292.188,26	27.496.839,69	28.518.177,31	29.606.131,88	28.929.627,06
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		19.362.495,75	20.365.793,79	21.400.453,31	22.469.907,88	22.441.433,37

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan struktur perekonomian, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Timur tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan, yaitu mencapai 37,82 persen. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 36,01 persen. Lapangan usaha pemberi *share* terbesar kedua adalah pertambangan dan penggalian yang mencapai 20,44 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu dibawah 10 persen. Lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016–2020

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	38,42	37,04	36,58	36,01	37,82
B	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	23,67	24,00	24,28	23,62	20,44
C	Industri Pengolahan <i>Manufacturing</i>	7,12	7,39	7,63	7,97	7,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas <i>Electricity and Gas</i>	0,28	0,66	0,66	0,69	0,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
F	Konstruksi <i>Construction</i>	5,21	5,54	5,63	5,74	5,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,03	8,07	8,17	8,59	8,67
H	Transportasi dan Pergudangan <i>Transportation and Storage</i>	1,98	1,97	1,90	1,94	1,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,15	1,14	1,17	1,23	1,23
J	Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication</i>	3,53	3,59	3,56	3,62	3,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,38	1,37	1,32	1,30	1,36
L	Real Estat <i>Real Estate Activities</i>	2,00	2,06	2,02	2,13	2,20
M,N	Jasa Perusahaan <i>Business Activities</i>	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,01	3,00	2,91	2,91	3,23
P	Jasa Pendidikan <i>Education</i>	2,50	2,42	2,45	2,58	2,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,69	0,66	0,65	0,66	0,75
R,S,T,U	Jasa lainnya <i>Other Services Activities</i>	0,90	0,93	0,94	0,98	0,96
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas <i>Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas</i>		78,19	77,90	77,61	78,39	81,61

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Untuk Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

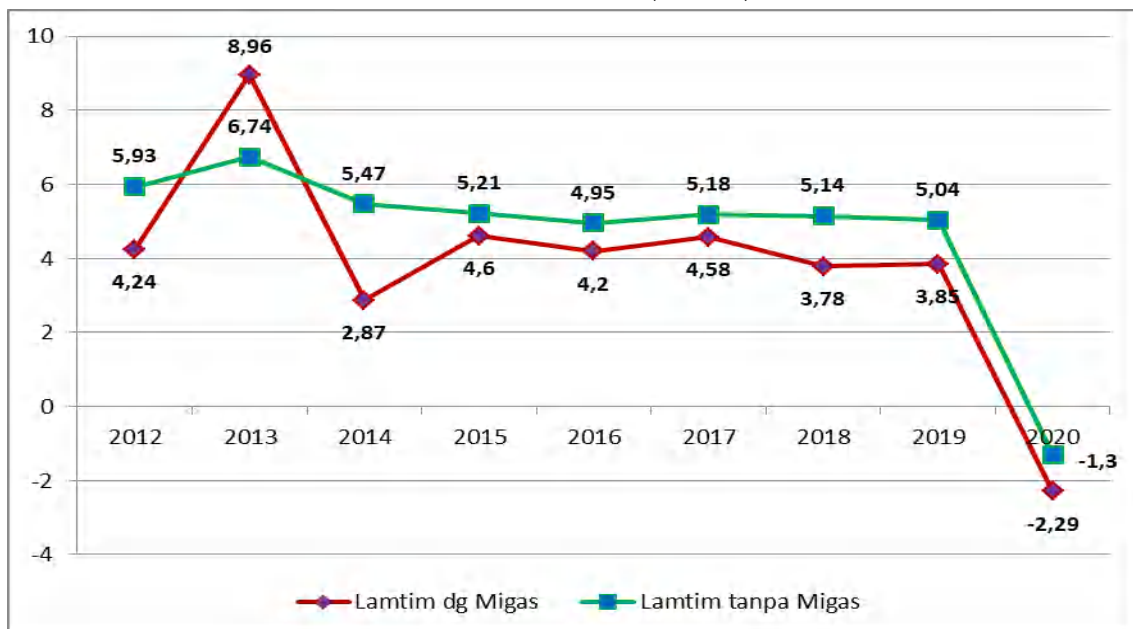
Tabel 2.16
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2016–2020

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry and Fishing	35,90	35,00	34,53	34,07	34,98
B	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	28,11	27,76	26,85	26,03	24,47
C	Industri Pengolahan Manufacturing	6,74	6,94	7,39	7,78	7,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas Electricity and Gas	0,28	0,61	0,63	0,68	0,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
F	Konstruksi Construction	4,88	5,22	5,48	5,60	5,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	8,13	8,29	8,56	8,85	8,88
H	Transportasi dan Pergudangan Transportation and Storage	1,81	1,84	1,86	1,93	1,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food Service Activities	0,89	0,92	0,97	1,02	1,00
J	Informasi dan Komunikasi Information and Communication	3,58	3,73	3,86	3,97	4,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities	1,26	1,25	1,23	1,20	1,27
L	Real Estat Real Estate Activities	2,11	2,11	2,11	2,15	2,17
M,N	Jasa Perusahaan Business Activities	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,46	2,46	2,49	2,49	2,70
P	Jasa Pendidikan Education	2,28	2,27	2,39	2,50	2,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	0,63	0,63	0,64	0,66	0,74
R,S,T,U	Jasa lainnya Other Services Activities	0,83	0,86	0,90	0,94	0,92
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas		73,64	74,07	75,04	75,90	77,57

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Perekonomian Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 ditinjau dari PDRB tanpa migas mengalami kontraksi sebesar minus 1,3 persen. Jika ditinjau dari PDRB dengan migas, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kontraksi yang lebih dalam dari PDRB tanpa migas yakni sebesar 2,29 persen. Adanya penurunan permintaan dan harga migas dalam kurun pandemi COVID-19 di Tahun 2020 sangat mempengaruhi kontraksi perekonomian Kabupaten Lampung Timur.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2012-2020 (Persen)



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2020 didorong oleh beberapa kategori yang menjadi penggerak sumber pertumbuhan. Empat kategori utama yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial; kategori informasi dan komunikasi; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Masing-masing kategori mengalami pertumbuhan sebesar 9,56 persen, 8,16 persen, 5,96 persen dan 5,02 persen.

Seperti telah diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,29 persen. Empat Kategori lapangan usaha yang menyumbang kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur yaitu kategori pengadaan listrik dan gas; kategori pertambangan dan penggalian; kategori industri pengolahan; dan kategori jasa lainnya. Masing-masing kategori tersebut mengalami kontraksi sebesar 10,95 persen, 8,13 persen, 5,23 persen dan 4,26 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2020 dicapai oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,56 persen, disusul oleh sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa pendidikan, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, masing-masing sebesar 8,16%, 5,96%, 5,02%, 3,40%, 2,91%, dan 0,32%, sedangkan untuk sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang minus, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019 [*]	2020 ^{**}
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,27	1,95	2,32	2,44	0,32
B	Pertambangan dan Penggalian	2,42	3,25	0,31	0,66	-8,13
C	Industri Pengolahan	7,18	7,74	10,45	9,31	-5,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	109,08	125,37	7,22	10,91	-10,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,74	7,01	3,69	5,27	5,02
F	Konstruksi	6,23	11,83	8,92	6,11	-2,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	6,63	7,14	7,3	-1,87
H	Transportasi dan Pergudangan	7,97	6,66	4,79	7,73	-3,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	8,37	9,33	8,98	-3,42
J	Informasi dan Komunikasi	7,30	9,04	7,26	6,95	8,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,04	3,66	1,69	1,98	2,91
L	Real Estat	5,45	4,21	3,97	5,88	-1,44
M,N	Jasa Perusahaan	2,85	5,62	3,91	4,15	-1,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,54	4,63	4,78	4,08	5,96
P	Jasa Pendidikan	4,30	4,29	8,92	8,66	3,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,19	4,71	5,94	6,13	9,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,28	8,64	9,06	8,43	-4,26
Produk Domestik Regional Bruto		4,54	4,58	3,71	3,81	-2,29
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		5,41	5,18	5,08	5,00	-0,13

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Dari sisi pengeluaran, berdasarkan PDRB ADH konstan pada Tahun 2020, total ekonomi Kabupaten Lampung Timur turun sebesar 676,50 miliar rupiah. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang terbesar ekonomi Lampung Timur mengalami penurunan sebesar 230 miliar rupiah, tak hanya konsumsi rumah tangga, penurunan ekonomi pun terjadi pada komponen pengeluaran lainnya dimana hal ini dipicu kondisi ekonomi baik lokal maupun global yang cukup terguncang akibat dampak pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020 perdagangan luar daerah Lampung Timur yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih rendah dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan antar daerah Lampung Timur dalam periode tersebut menunjukkan posisi “minus”, dengan kontribusinya sebesar -3,94 persen pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya perkembangan seluruh komponen ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2020

Komponen Pengeluaran <i>Component of Expenditure</i>	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption</i>	19 917,92	21 826,41	24 028,26	26 240,82	26 438,68
2. Konsumsi LNPRT <i>NPISHs Consumption</i>	447,71	515,48	624,53	694,67	680,84
3. Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption</i>	2 141,65	2 231,97	2 335,35	2 449,89	2 468,55
4. PMTB/GFCF	9 916,07	11 006,60	12 272,99	13 259,47	13 062,13
5. Perubahan Inventori <i>Change in Inventories</i>	- 141,04	- 355,87	-563,23	-965,16	-254,08
6. Ekspor Netto/ <i>Net Export</i>	803,23	918,72	652,17	56,39	-1 608,65
Total PDRB/<i>Total GRDP</i>	33 085,54	36 143,30	39 350,06	41 736,08	40 787,48

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Tabel 2.19
PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2020

Komponen Pengeluaran <i>Component of Expenditure</i>	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption</i>	15 136,17	15 990,85	16 894,57	17 785,84	17 555,75
2. Konsumsi LNPRT <i>NPISHs Consumption</i>	327,81	358,11	416,22	455,16	437,46
3. Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption</i>	1 437,09	1 446,42	1 472,78	1 516,86	1 495,99
4. PMTB/GFCF	7 734,41	8 161,01	8 821,52	9 208,45	8 793,06
5. Perubahan Inventori <i>Change in Inventories</i>	- 456,27	- 458,12	-462,89	-266,83	-146,86
6. Ekspor Netto/ <i>Net Export</i>	2 112,98	1 998,56	1 375,97	906,66	794,23
Total PDRB/<i>Total GRDP</i>	26 292,19	27 496,84	28 518,18	29 606,13	28 929,63

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021



Jika kita bandingkan besaran PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku dengan kab/kota di Provinsi Lampung, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Lampung Barat	4.658,13	5.127,31	5.617,12	6.590,61	7.095,40	7.137,81
Tanggamus	10.779,30	11.962,85	13.009,20	14.514,45	15.571,06	15.540,75
Lampung Selatan	31.413,00	34.916,00	38.322,00	41.586,07	44.629,66	44.298,95
Lampung Timur	30.646,87	33.085,53	36.143,30	39.868,54	41.736,08	40.787,48
Lampung Tengah	48.878,37	55.171,37	60.995,29	66.094,62	71.380,74	71.591,75
Lampung Utara	16.841,31	18.745,99	20.532,90	22.137,79	23.780,45	23.808,21
Way Kanan	10.062,99	11.060,71	12.108,68	13.055,24	13.999,28	14.037,76
Tulang Bawang	16.194,04	17.992,07	19.861,02	21.481,67	23.099,86	23.190,49
Pesawaran	11.716,51	12.860,67	13.994,06	15.099,61	16.214,52	16.234,07
Pringsewu	8.036,95	8.896,05	9.685,77	10.389,14	11.159,04	11.176,95
Mesuji	7.313,34	8.109,86	8.931,80	9.691,34	10.409,23	10.435,03
Tulang Bawang Barat	8.130,61	9.042,00	9.854,34	10.654,95	11.455,51	11.432,86
Pesisir Barat	3.231,81	3.615,62	3.947,58	4.282,38	4.619,17	4.628,78
Bandar Lampung	39.428,92	44.741,90	50.082,83	54.609,16	59.377,91	59.078,73
Metro	4.437,93	4.997,83	5.481,68	5.892,67	6.356,41	6.297,84
Provinsi Lampung	252.883,10	279.417,61	306.700,43	333.670,88	356.736,00	354.631,68

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Selanjutnya, jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kabupaten Lampung Timur berkontribusi sebesar 12,03 persen terhadap perekonomian Provinsi Lampung.

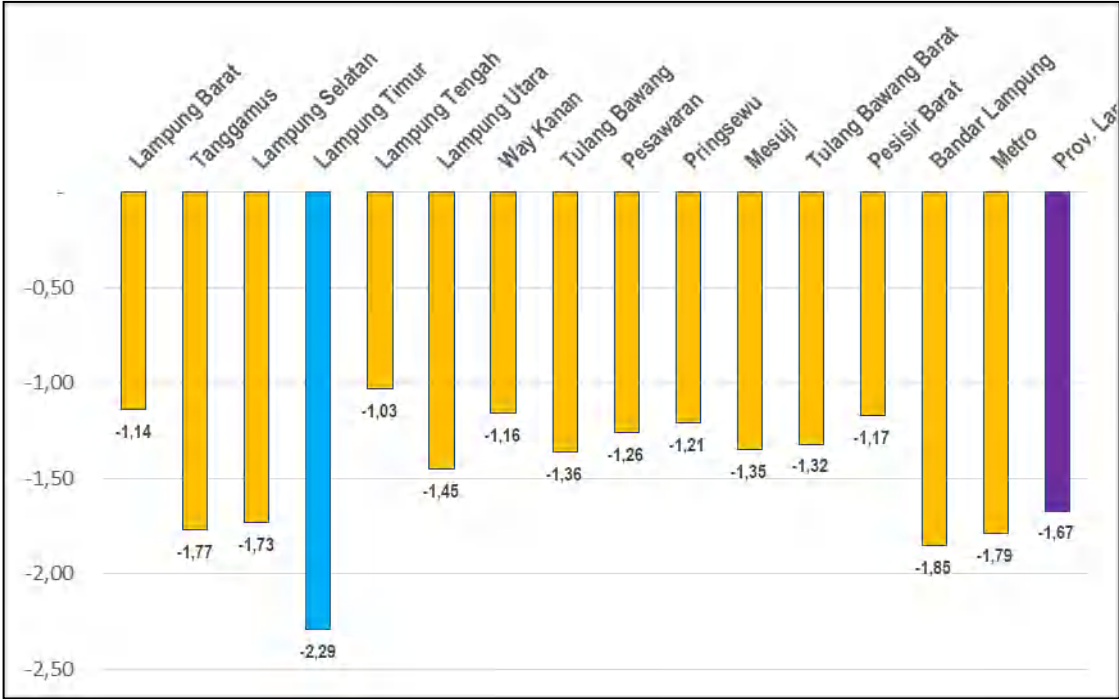
Tabel 2.21
PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Lampung Barat	4.088,44	4.293,42	4.509,54	4.741,25	4.984,63	4.927,79
Tanggamus	8.910,24	9.371,99	9.858,64	10.352,10	10.872,10	10.679,32
Lampung Selatan	24.654,68	25.942,71	27.359,53	28.791,44	30.268,83	29.744,35
Lampung Timur	25.151,47	26.292,18	27.496,83	28.535,97	29.606,13	28.929,62
Lampung Tengah	38.773,80	40.949,37	43.107,05	45.406,22	47.837,69	47.347,97
Lampung Utara	13.458,84	14.145,71	14.882,71	15.672,53	16.508,06	16.296,34
Way Kanan	7.832,39	8.233,78	8.654,29	9.102,87	9.573,87	9.462,80
Tulang Bawang	12.811,52	13.505,40	14.242,03	15.014,47	15.827,46	15.612,30
Pesawaran	9.368,56	9.843,45	10.336,51	10.858,92	11.402,09	11.258,69
Pringsewu	6.356,98	6.677,34	7.018,69	7.370,49	7.742,15	7.648,78
Mesuji	5.716,23	6.008,00	6.320,64	6.655,53	7.005,86	6.911,12
Tulang Bawang Barat	6.370,00	6.705,64	7.078,06	7.451,02	7.850,70	7.747,24
Pesisir Barat	2.520,89	2.654,54	2.795,95	2.944,88	3.103,00	3.066,66
Bandar Lampung	30.873,55	32.859,03	34.921,07	37.084,48	39.385,64	38.656,70
Metro	3.453,95	3.657,86	3.865,01	4.084,80	4.314,15	4.235,49
Provinsi Lampung	199.536,91	209.793,72	220.626,09	232.207,67	244.380,37	240.306,85

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan grafik laju pertumbuhan ekonomi di bawah ini, dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan minus, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

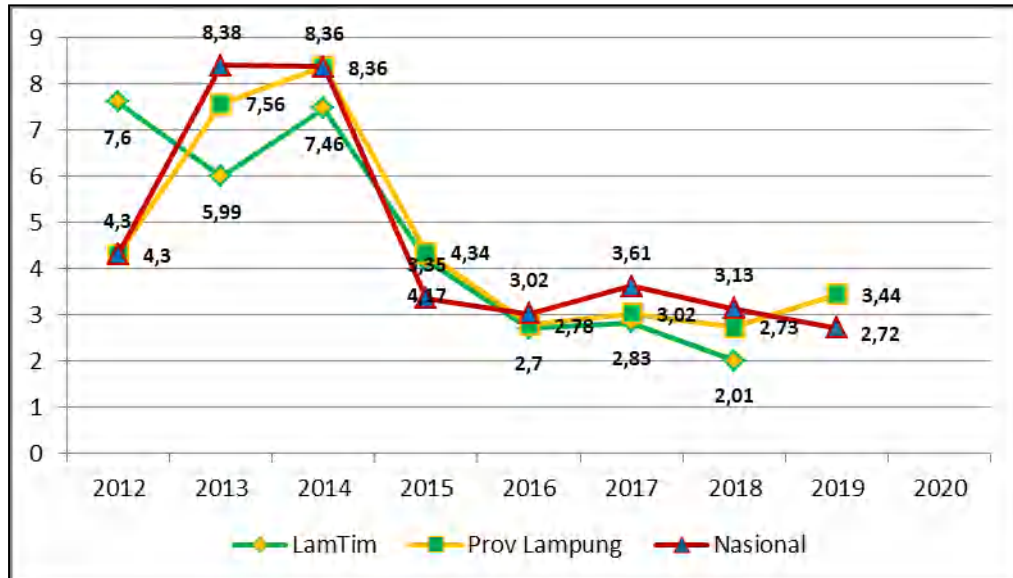
2. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi jika naik dan deflasi jika sebaliknya.

Disamping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah.

Grafik 2.4

Laju Inflasi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2012-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Selama kurun waktu Tahun 2012 hingga Tahun 2018, laju inflasi Kabupaten Lampung Timur terus dapat dikendalikan. Pada Tahun 2012, laju inflasi mencapai tingkat tertinggi yaitu mencapai angka 7,6 persen, yang kemudian mengalami penurunan hingga mencapai angka 2,01 persen pada Tahun 2018. Inflasi Kabupaten Lampung Timur pada tahun tersebut berada di bawah inflasi nasional dan Provinsi Lampung.

Inflasi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat, berhasil atau tidaknya pembangunan yang telah dilaksanakan secara umum. Angka inflasi mempunyai manfaat sebagai rambu-rambu untuk menjaga kestabilan harga serta sebagai dasar bagi berbagai kebijakan yang akan ditetapkan.

3. Kemiskinan

Pada periode 2012-2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami penurunan kurun waktu lima tahun terakhir. Begitupun dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Timur hingga bulan Maret Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 153,57 ribu jiwa atau sebesar 14,62%, dengan garis kemiskinan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.398.298,00/kapita/bulan.



Tabel 2.22
Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011-2020 (bulan Maret 2020)

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	257.284,00	189,46	19,66
2012	273.574,00	182,21	18,59
2013	291.405,00	172,21	17,38
2014	301.339,00	170,73	17,05
2015	307.944,00	170,11	16,91
2016	331.765,00	172,61	16,98
2017	342.295,00	167,64	16,35
2018	352.173,00	162,94	15,76
2019	360.610,00	158,90	15,24
2020	398.298,00	153,57	14,62

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Tabel 2.23
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2011	3,30	0,88
2012	3,19	0,92
2013	2,49	0,6
2014	2,87	0,72
2015	2,51	0,63
2016	3,10	0,86
2017	2,96	0,78
2018	2,91	0,78
2019	2,50	0,60
2020	2,50	0,64

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan jumlah rumah tangga dan individu menurut kecamatan dan status kesejahteraan, ditampilkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.24
Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di
Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan 	Kode	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
			Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
1	METRO KIBANG	1804010	843	1,147	607	300	2,897	3,231	3,599	1,684	889	9,403
2	BATANGHARI	1804020	1,462	1,986	984	542	4,974	6,026	6,705	3,075	1,791	17,597
3	SEKAMPUNG	1804030	1,742	2,097	960	409	5,208	6,939	6,545	2,578	1,170	17,232
4	MARGATIGA	1804040	1,551	1,682	769	443	4,445	6,399	5,285	2,228	1,286	15,198
5	SEKAMPUNG UDIK	1804050	3,114	3,036	1,376	705	8,231	12,622	9,291	3,766	2,049	27,728
6	JABUNG	1804060	2,269	2,483	1,189	667	6,608	9,184	8,160	3,635	2,053	23,032
7	PASIR SAKTI	1804061	1,881	1,596	644	355	4,476	8,041	5,433	1,933	1,100	16,507
8	WAWAY KARYA	1804062	2,756	2,261	836	246	6,099	10,650	6,449	2,008	640	19,745
9	MARGA SEKAMPUNG	1804063	1,258	1,358	678	348	3,642	5,060	4,155	1,838	965	12,018
10	LABUHAN MARINGGAI	1804070	4,590	3,338	1,250	544	9,722	20,473	11,143	3,647	1,689	36,952
11	MATARAM BARU	1804071	1,221	1,343	672	303	3,539	5,248	4,513	1,955	945	12,661
12	BANDAR SRIBAWONO	1804072	914	1,671	1,151	764	4,500	3,794	5,629	3,335	2,256	15,014
13	MELINTING	1804073	1,605	1,488	670	333	4,096	6,978	4,726	1,843	912	14,459
14	GUNUNG PELINDUNG	1804074	1,297	1,136	437	212	3,082	5,337	3,499	1,218	624	10,678
15	WAY JEPARA	1804080	1,533	1,756	817	415	4,521	6,161	5,314	2,206	1,111	14,792



14	GUNUNG PELINDUNG	1804074	1,297	1,136	437	212	3,082	5,337	3,499	1,218	624	10,678
15	WAY JEPARA	1804080	1,533	1,756	817	415	4,521	6,161	5,314	2,206	1,111	14,792
16	BRAJA SLEBAH	1804081	902	992	471	191	2,556	3,618	2,991	1,219	540	8,368
17	LABUHAN RATU	1804082	1,467	1,807	882	398	4,554	5,879	5,597	2,323	1,109	14,908
18	SUKADANA	1804090	2,686	2,954	1,337	646	7,623	11,338	9,739	4,067	1,999	27,143
19	BUMI AGUNG	1804091	504	636	347	148	1,635	2,057	1,955	857	421	5,290
20	BATANGHARI NUBAN	1804092	1,258	2,021	1,016	528	4,823	5,293	6,582	2,870	1,563	16,308
21	PEKALONGAN	1804100	819	1,443	748	530	3,540	3,547	4,903	2,307	1,603	12,360
22	RAMAN UTARA	1804110	575	919	563	265	2,322	2,283	2,808	1,508	719	7,318
23	PURBOLINGGO	1804120	706	1,668	884	623	3,881	3,111	5,748	2,687	1,836	13,382
24	WAY BUNGUR	1804121	583	822	433	174	2,012	2,452	2,637	1,080	511	6,680
Total			37,536	41,640	19,721	10,089	108,986	155,721	133,406	55,865	29,781	374,773

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan , 2021

Selanjutnya, posisi Kabupaten Lampung Timur dalam jumlah dan persentase penduduk miskin diantara kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, dapat terlihat pada Tabel di bawah ini.

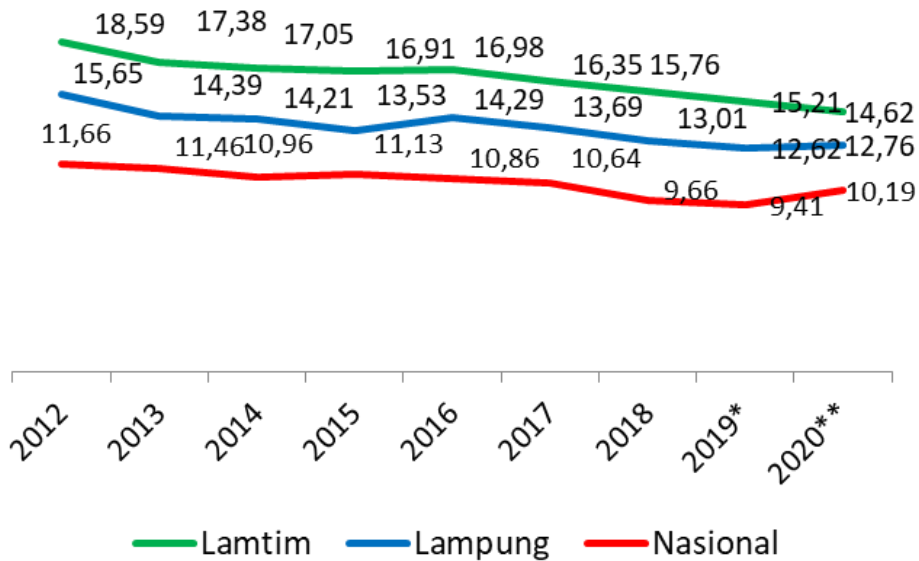
Tabel 2.25
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2020

WILAYAH	MARET 2020 (%)	JUMLAH PENDUDUK MISIKIN MARET 2020 (Ribu Orang)
Lampung Utara	19,30	119,35
Pesawaran	14,76	66,04
Lampung Timur	14,62	153,57
Pesisir Barat	14,29	22,24
Lampung Selatan	14,08	143,33
Way Kanan	12,90	58,41
Lampung Barat	12,52	38,12
LAMPUNG	12,34	1049,32
Lampung Tengah	11,82	152,28
Tanggamus	11,68	70,37
Pringsewu	9,97	40,12
NASIONAL	9,78	26424,02
Tulangbawang	9,33	42,43
Bandar Lampung	8,81	93,74
Metro	8,47	14,94
Tulang Bawang Barat	7,39	20,29
Mesuji	7,33	14,72

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Dari Tabel di atas, terlihat, bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur terbesar diantara Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, meskipun secara persentase masih di bawah Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

Grafik 2.5
Presentase Penduduk Miskin Lampung Timur, Provinsi Lampung
dan Nasional Tahun 2012-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk miskin Lampung Timur masih di atas persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung dan nasional. Persentase penduduk miskin Lampung Timur sebesar 14,62 persen pada Tahun 2020, masih di atas Provinsi Lampung yang sebesar 12,76 persen dan nasional yang sebesar 10,19 persen.

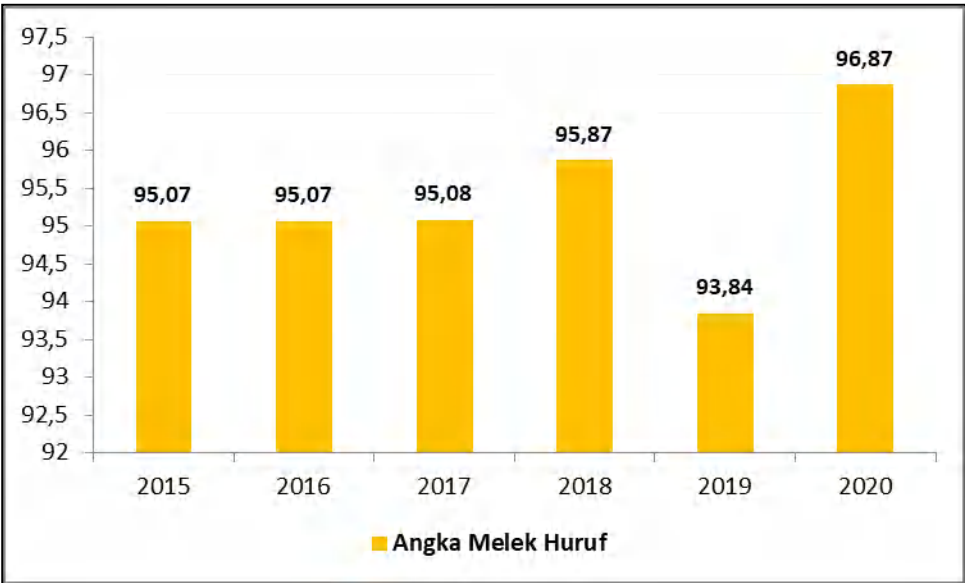
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa (*literacy rate*). Kemampuan baca-tulis ini tercermin dari data angka melek huruf (AMH). Dalam hal ini, AMH merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin, atau huruf arab, atau huruf lainnya. Angka ini bermanfaat untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca dan menulis merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tinggi rendahnya AMH mencerminkan sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Grafik 2.6
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020



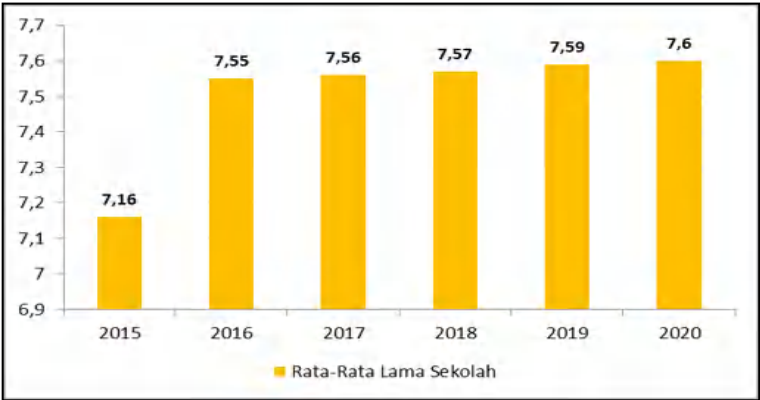
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Selain harapan lama sekolah, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 mencapai 7,6 tahun, naik 0,01 tahun dibandingkan kondisi Tahun 2018. Angka ini mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun 2015 yang sebesar 7,16 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Timur sudah menduduki kelas dua Sekolah Menengah Pertama. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di kota Bandar Lampung (10,85 tahun), sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Mesuji (5,80 tahun).

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih banyak penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terlihat secara nyata hasilnya.

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

3 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Fokus kesejahteraan rakyat lainnya di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 2.26
APK dan APM PAUD, SD dan SLTP Kabupaten Lampung Timur, 2018-2020

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	99,18	99,13	99,16	105,56	105,62	103,87
SMP/MTs	90,28	89,28	90,12	105,31	96,82	96,95
SMA/SMK/MA	58,97	59,60	60,29	74,20	84,56	86,64
Perguruan Tinggi	10,42	10,50	11,21	14,86	15,58	15,80

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa nilai APK pendidikan sekolah dasar Kabupaten Lampung Timur sebesar 103,87 persen, nilai APK SLTP sebesar 96,95 persen. Nilai APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah, pada jenjang tersebut tetapi belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung usia sekolah lebih dari target yang seharusnya.

Indikator pendidikan lainnya, yakni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak pada suatu kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM akan selalu lebih rendah dibandingkan APK karena pembilangnya lebih kecil, sementara penyebutnya sama. Angka ini membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya sehingga angkanya lebih kecil. Indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik dari pada APK karena indikator ini memberikan gambaran kekonsistenan antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan. APM jenjang pendidikan sekolah dasar pada Tahun 2020 mencapai 99,16 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usai 7-12 tahun, terdapat sekitar 99 orang yang sedang mengikuti pendidikan sekolah dasar. Pada jenjang pendidikan selanjutnya, nilai APM mencapai 90,12 persen (sekolah menengah pertama), 60,29 persen (sekolah menengah atas). Nilai APM di Kabupaten Lampung Timur berkecenderungan meningkat. Nilai APM penduduk laki-laki selalu lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan, kecuali pada jenjang pendidikan sekolah dasar. APM merupakan salah satu indikator proses pada bidang pendidikan, sedangkan salah satu indikator outputnya adalah tingkat pendidikan penduduk. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan atau ijazah tertinggi yang dimiliki memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia. Tabel di bawah akan memperlihatkan kualitas sumber daya manusia yang diukur berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari penduduk usia 10 tahun ke atas.

APK dan APM Kabupaten Lampung Timur jika dibandingkan dengan kab/kota di Provinsi Lampung, disajikan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 2.27
APK Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-Laki / Male				Perempuan / Female				Laki-laki + Perempuan / Male + Female			
	Jenjang Pendidikan / Educational Level				Jenjang Pendidikan / Educational Level				Jenjang Pendidikan / Educational Level			
	SD / Primary School	SMP / Junior High School	SMA / Senior High School	PT / University	SD / Primary School	SMP / Junior High School	SMA / Senior High School	PT / University	SD / Primary School	SMP / Junior High School	SMA / Senior High School	PT / University
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lampung Barat	108,76	84,73	77,79	20,03	106,92	89,95	71,44	9,00	107,90	87,40	74,56	14,94
Tanggamus	106,08	96,27	72,73	6,12	105,76	88,76	83,33	13,78	105,93	92,78	77,91	9,58
Lampung Selatan	102,10	93,19	73,89	18,74	103,92	92,85	79,00	26,30	102,92	93,01	76,17	22,36
Lampung Timur	104,77	103,14	93,48	8,92	102,89	91,16	80,74	24,52	103,87	96,95	86,64	15,80
Lampung Tengah	103,69	100,11	81,10	17,92	105,72	82,59	112,31	14,58	104,64	90,19	94,20	16,29
Lampung Utara	112,67	105,05	69,91	7,96	107,53	84,28	92,37	12,80	110,20	93,87	80,42	10,19
Way Kanan	106,79	86,00	90,13	9,87	109,57	91,02	82,63	7,30	108,10	88,09	86,17	8,56
Tulang Bawang	108,82	102,91	61,84	12,05	110,55	90,24	68,60	12,28	109,71	97,10	65,02	12,17
Pesawaran	110,46	89,86	93,86	10,63	105,69	90,53	89,88	14,14	108,07	90,19	91,99	12,15
Pringsewu	103,28	93,25	74,81	17,08	106,44	95,90	83,33	18,54	104,89	94,51	78,83	17,75
Mesuji	108,04	94,01	77,04	5,75	110,71	82,18	69,47	7,22	109,22	88,53	72,92	6,29
Tulang Bawang Barat	104,88	103,77	65,47	7,18	114,77	98,81	63,43	14,26	109,95	101,74	64,37	10,54
Pesisir Barat	106,72	86,52	92,69	5,47	111,44	84,55	88,98	7,92	108,94	85,58	90,93	6,55
Bandar Lampung	104,18	92,76	111,56	39,24	105,31	89,83	110,71	41,84	104,76	91,36	111,13	40,54
Metro	100,05	97,65	92,17	37,22	104,50	93,31	91,08	39,81	102,20	95,21	91,65	38,56
Lampung	105,56	96,14	83,09	16,92	106,32	89,03	88,79	21,08	105,93	92,56	85,84	18,89

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Tabel 2.28
APM Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-Laki / Male				Perempuan / Female				Laki-laki + Perempuan / Male + Female			
	Jenjang Pendidikan / Educational Level				Jenjang Pendidikan / Educational Level				Jenjang Pendidikan / Educational Level			
	SD / Primary School	SMP / Junior High School	SMA / Senior High School	PT / University	SD / Primary School	SMP / Junior High School	SMA / Senior High School	PT / University	SD / Primary School	SMP / Junior High School	SMA / Senior High School	PT / University
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lampung Barat	100,00	75,70	62,02	2,18	98,69	82,84	62,53	1,08	99,39	79,36	62,28	1,67
Tanggamus	97,56	77,05	52,99	3,64	98,81	81,00	61,11	4,95	98,17	78,88	56,96	4,23
Lampung Selatan	97,81	73,74	53,38	14,72	99,25	83,10	56,43	19,28	98,46	78,77	54,74	16,90
Lampung Timur	98,97	94,73	57,38	5,96	99,37	85,81	62,81	17,85	99,16	90,12	60,29	11,21
Lampung Tengah	100,00	77,81	50,59	12,24	98,60	73,20	58,52	10,81	99,35	75,20	53,92	11,54
Lampung Utara	99,57	82,62	52,48	7,06	99,63	75,41	61,96	6,44	99,60	78,74	56,92	6,77
Way Kanan	99,43	80,75	54,29	3,33	99,68	78,86	66,76	1,97	99,55	79,96	60,88	2,63
Tulang Bawang	99,25	80,16	41,26	5,88	99,46	77,89	47,40	4,68	99,36	79,12	44,15	5,27
Pesawaran	100,00	84,55	63,93	7,03	98,34	82,42	66,70	11,77	99,17	83,50	65,23	9,08
Pringsewu	99,42	85,41	61,92	11,46	99,47	81,57	65,40	17,12	99,45	83,60	63,56	14,08
Mesuji	98,71	86,09	58,97	3,20	100,00	80,22	60,12	5,38	99,28	83,37	59,59	4,00
Tulang Bawang Barat	100,00	87,80	48,76	3,84	98,10	80,24	58,25	6,04	99,02	84,71	53,86	4,88
Pesisir Barat	100,00	84,89	75,41	4,29	99,29	81,21	74,39	4,26	99,67	83,13	74,93	4,27
Bandar Lampung	98,91	85,39	69,68	28,59	100,00	77,96	70,58	33,36	99,47	81,85	70,15	30,98
Metro	98,66	95,10	78,51	29,40	100,00	92,32	87,88	25,82	99,31	93,54	82,99	27,55
Lampung	99,09	82,51	56,78	11,40	99,24	79,85	62,60	14,65	99,16	81,17	59,58	12,94

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

4 Ijasah Tertinggi yang Dimiliki Penduduk

Dari Tabel di bawah ini dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk berpendidikan SMA ke atas sebesar 28,17 persen. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin baik pula kualitas sumber dayanya. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri

diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak.

Tabel 2.29
Penduduk Usia Lebih dari 10 Tahun Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2020

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	16,16	27,80	25,64	30,40
Perempuan	19,99	24,91	29,25	25,85
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	22,09	28,37	31,65	17,88
40 Persen Tengah	16,99	28,15	27,72	27,14
20 Persen Teratas	12,83	19,46	19,27	48,44
Lampung Timur	18,04	26,38	27,41	28,17

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dan indikator SDG's yaitu peningkatan kesehatan ibu. Terkait dengan kasus kematian ibu, kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 berjumlah 19 kasus, meningkat dibandingkan dengan kasus kematian ibu Tahun 2019 yaitu 16 kasus. Dari jumlah kasus kematian ibu di Tahun 2020, penyebab langsung kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur adalah perdarahan (7 kasus), pre eklamsi/ eklamsi (6 kasus), penyakit jantung (2 kasus), dan lain-lain (4 kasus). Perkembangan kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.8
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

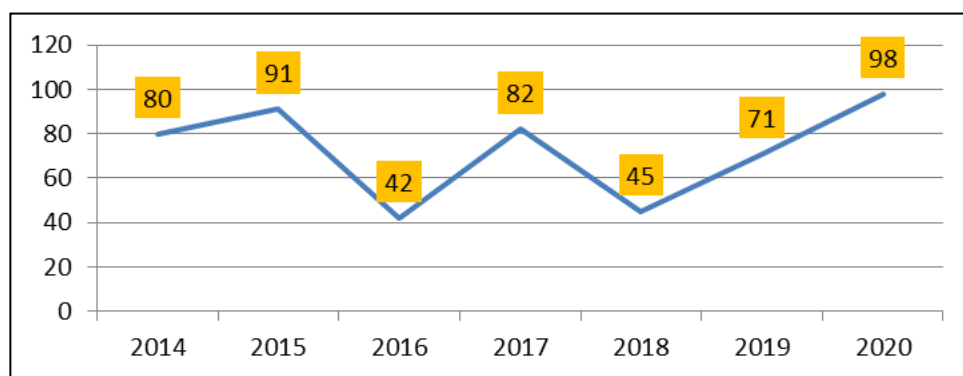
Peningkatan kasus kematian ibu disebabkan oleh faktor-faktor antara lain sistem pencatatan dan pelaporan kasus kematian ibu sudah berbasis elektronik, terdapat aplikasi Maternal Death Notivication (MDN) yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan tempat kejadian kematian ibu berdasarkan KTP, sehingga dimanapun kasus kematian terjadi jika KTP Kabupaten Lampung Timur maka akan tercatat sebagai kasus kematian ibu Kabupaten Lampung Timur.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu di antaranya adalah dengan melakukan bimbingan teknis ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ANC, deteksi dini dan penanganan resiko ibu hamil dengan melibatkan kader, meningkatkan upaya pelayanan kesehatan ibu hamil/bersalin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemic dan menerapkan jejering rujukan dengan fasilitas kesehatan rujukan.

2. Angka Kematian Bayi

Perkembangan kasus kematian bayi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 sd 2019 sebagai berikut :

Grafik 2.9
Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2014-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

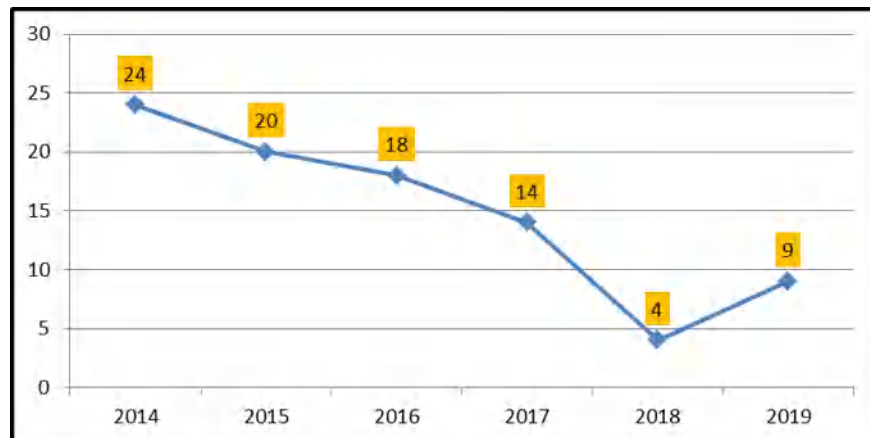
Berdasarkan grafik di atas jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 meningkat cukup signifikan yaitu 71 kasus atau setara dengan 5,7 per 1.000 Kelahiran Hidup dibandingkan dengan jumlah kasus kematian bayi pada Tahun 2019 yang hanya mencapai 42 kasus atau setara dengan 4 per 1.000 Kelahiran Hidup. Jumlah kematian bayi yang meningkat tersebut sebagian besar terjadi pada periode perinatal (76%) dan disebabkan oleh BBLR (31%). Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi tersebut di antaranya adalah dengan peningkatan kualitas antenatal care melalui standar 10 T sehingga factor resiko untuk terjadinya kelahiran dengan BBLR/ premature dapat terdeteksi dan segera ditatalaksana dengan baik. Kendala yang ditemukan untuk pencapaian indikator tersebut adalah karena belum semua sarana prasarana penatalaksanaan ANC sesuai standar tersedia dan mencukupi di semua fasilitas kesehatan yang melayani ANC, dan tingkat kompetensi pemberi pelayanan ANC terutama ANC terpadu yang belum optimal. Di Lampung Timur juga tidak semua penolong persalinan di FKTP tingkat pertama melakukan rujukan dalam rahim pada kasus kasus

premature sehingga bayi yang bermasalah tidak tertangani dengan semestinya.

3. Balita Gizi Buruk

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2014 sd 2019 sebagai berikut :

Grafik 2.10
Kasus Gizi Buruk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014-2019



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2019 meningkat menjadi 9 kasus dibandingkan dengan kasus tahun 2018 yaitu 4 kasus. Sebagian besar kasus gizi buruk yang ditemukan pada tahun 2019 adalah kasus gizi buruk yang disertai dengan penyakit penyerta, dan sebagian gizi buruk disebabkan oleh pola asuh yang salah. Selain itu faktor kemiskinan, kesempatan kerja rendah dan pendidikan yang rendah juga berpengaruh terhadap kejadian gizi buruk pada balita, oleh karena itu penanganan gizi buruk harus dilakukan secara kolektif dan partisipatif dari berbagai pihak melalui penanganan preventif, kuratif, promotif, maupun rehabilitatif salah satunya dengan penanganan kasus gizi buruk dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

4. Prevalensi Balita Kurang Gizi

Balita gizi kurang merupakan salah satu masalah gizi yang diukur berdasarkan berat badan per umur. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya khusus, karena berat badan berkorelasi secara positif dengan umur dan tinggi badan. Namun apabila kondisi gizi kurang ini berlangsung lama maka dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Cara untuk mengetahui berat badan menurut umur (BB/U) adalah dengan melakukan penimbangan rutin pada balita, sehingga diketahui status gizi balita melalui KMS.

Indikator kinerja prevalensi balita kurang gizi di Kabupaten Lampung Timur telah mencapai target yang ditentukan, dimana berdasarkan laporan pada tahun 2020, prevalensi gizi kurang sebesar 3,53%, berada di bawah target Kabupaten Tahun 2020 yaitu <16,4% atau dengan capaian kinerja sebesar 178,5%. Capaian tersebut telah menyumbang 177% dari target RPJMD tahun 2021 (16%). Dengan demikian indikator prevalensi balita kurang gizi tahun 2020 dalam skala nilai kinerja sangat tinggi.

Data prevalensi balita gizi kurang yang digunakan di Kabupaten Lampung Timur

berasal dari aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) dengan cakupan data entry telah mencapai 84%, bila dibandingkan dengan data hasil Riskesdas 2018 dimana disebutkan bahwa gizi kurang pada balita di Kabupaten Lampung Timur sebesar 11,6%, maka terdapat perbedaan angka yang signifikan. Perbedaan tersebut perlu di waspadei adanya kemungkinan kesalahan pengukuran pada saat pengumpulan data e-PPGBM atau kemungkinan *under reporting* sehingga belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di populasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya adalah dengan peningkatan upaya pemantauan balita baik melalui penimbangan rutin maupun melalui kegiatan PPGBM, bimbingan teknis petugas gizi secara berkala, dan upaya pemenuhan sarana prasarana yakni antropometri kit.

5. Prevalensi Hipertensi

Kabupaten Lampung Timur saat ini menghadapi beban ganda, dimana kejadian penyakit menular masih tinggi, sementara itu terjadi kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular/ degeneratif, salah satunya penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi juga masuk ke 10 besar penyakit di Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan pada tahun 2020 menduduki urutan kedua. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Hal tersebut dapat terjadi karena jantung bekerja lebih keras memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat mengganggu fungsi organ-organ lain, terutama organ-organ vital seperti jantung dan ginjal. Berdasarkan gambaran di atas, Dinas Kesehatan menjadikan prevalensi hipertensi sebagai salah satu indikator kinerja yang akan dicapai dan akan diturunkan di akhir RPJMD tahun 2021.

Indikator kinerja prevalensi hipertensi di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 dalam katagori skala nilai sangat tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan data hasil Risesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 20,54%, berada di bawah target Kabupaten tahun 2020 dan target akhir RPJMD (<22%) sehingga capaian kinerja mencapai 106,6%. Data prevalensi hipertensi di Kabupaten Lampung Timur menggunakan data hasil riskesdas dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur belum dapat melakukan perhitungan yang akurat untuk mendapatkan data penderita hipertensi. Data yang tersedia sebagian besar hanya merupakan data kunjungan penderita hipertensi yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas diantaranya adalah dengan melakukan penjangkaran aktif penderita hipertensi di masyarakat baik melalui kegiatan Posbindu, Posyandu Lansia maupun melalui intervensi PIS-PK. Selain itu kampanye untuk hidup sehat juga dilakukan melalui kegiatan edukasi masyarakat dan Germas sebagai upaya pencegahan hipertensi

6. Insiden Rate (IR) kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)

Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 berjumlah 661 kasus (IR 62,8 per 100.000 penduduk), meningkat bila di

banding tahun 2019 yakni 453 kasus (IR 43,38 per 100.000 penduduk) dan berada di atas angka target Kabupaten tahun 2020 dan akhir RPJMD (<41 per 100.000 penduduk). Capaian indikator di banding target IR DBD hanya mencapai 46,8%, sehingga mempunyai skala nilai sangat rendah. IR DBD di Kabupaten Lampung Timur yang tinggi disebabkan karena kejadian DBD sangat terkait dengan kondisi iklim dan musim penghujan di tahun 2020.

Grafik 2.11
Insiden Rate (IR) dan Case Fatality Rate (CFR) DBD
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2020

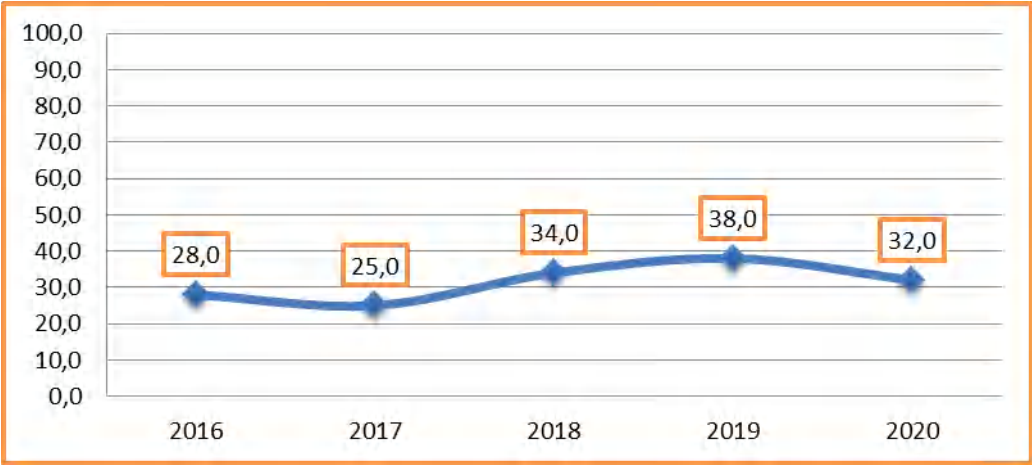
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator di atas adalah masih tingginya tempat perkembangbiakan vektor akibat lingkungan yang kurang bersih, mobilitas manusia dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, persepsi yang salah dari masyarakat yang mengutamakan fogging dari pada PSN, sarana prasarana/ mesin fogging yang terbatas, serta kesadaran masyarakat dan peran serta lintas sektor yang masih kurang dalam upaya pengendalian DBD.

Mengingat berbagai kendala di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kegiatan promotif preventif, kemitraan dan jejaring kerja dengan lintas program maupun lintas sektor di berbagai jenjang administrasi, peningkatan sistem *surveillance* dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat melalui kegiatan PSN, sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB serta penemuan dan tata laksana kasus. Selain itu, pada tahun 2020 juga telah dilakukan fogging di 354 titik fogging.

7. Persentase penemuan dan pengobatan penderita baru TB

Persentase penemuan dan pengobatan penderita baru TB di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 adalah 33%.Trend capaian indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

Grafik 2.12
Persentase Penemuan dan Pengobatan TB
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2020

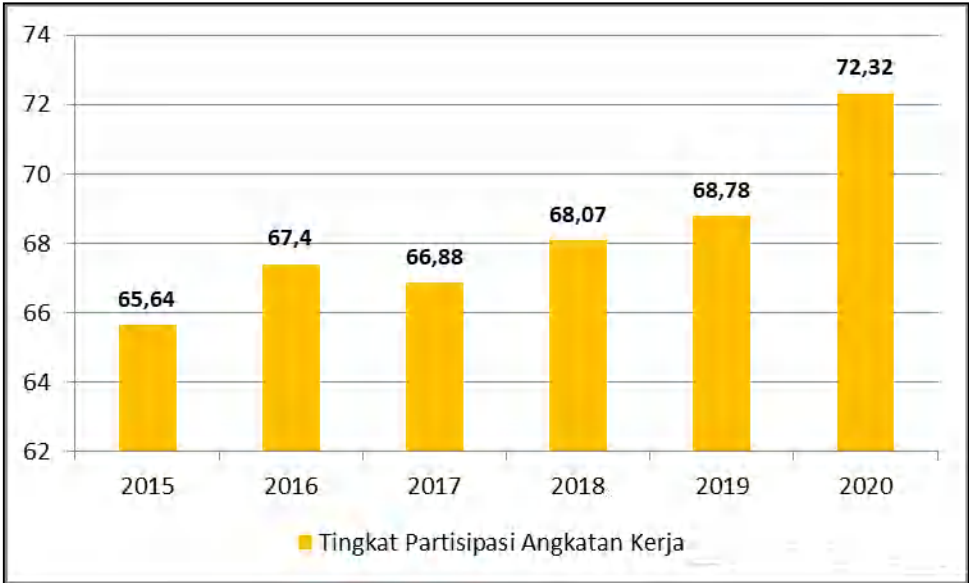
Dari grafik di atas terlihat bahwa, bila di bandingkan dengan tahun 2019, capaian persentase penemuan dan pengobatan TB pada tahun 2020 mengalami penurunan dan belum mencapai target tahun 2020 (52%) dan target akhir RPJMD tahun 2021 (80%). Berdasarkan skala nilai, kinerja persentase penemuan dan pengobatan penderita baru TB rendah, hal ini dibuktikan capaian kinerja tersebut hanya mencapai 63,5% dan hanya menyumbang 41,3% target akhir RPJMD. Penurunan dan belum tercapainya target kinerja di atas disebabkan karena pejarangan aktif penderita TB sangat terbatas akibat situasi pandemic. Kendala lain yang dihadapi adalah belum semua Puskesmas yang memiliki tenaga analis, praktek swasta yang ada di wilayah kerja Puskesmas belum melaporkan secara rutin, serta penyisiran data ke Rumah Sakit dan praktek swasta belum maksimal.

C. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Timur, tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 mencapai 97,35 persen, dengan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas sebanyak 563.065 jiwa dan jumlah angkatan kerja sebanyak 578.338 jiwa. Berdasarkan literatur, tingkat kesempatan kerja menggambarkan peluang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja, dimana semakin besar angka tingkat kesempatan kerja, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah

Lebih lanjut, untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi atau tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Grafik 2.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur, 2015-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

TPAK penduduk Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 mencapai 72,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 72 orang di antaranya yang termasuk ke dalam angkatan kerja, atau dapat diartikan ada 72,32 persen penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomis. Kondisi ini sejalan dengan tingkat pengangguran yang tercermin dalam angka TPT pada Tahun 2020 turun menjadi sekitar 2,64 persen. Artinya, dari 100 penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja, hanya ada sekitar 3 sampai 4 orang yang menganggur atau mencari pekerjaan. Terjadinya penurunan angka TPT ini secara tidak langsung menggambarkan peningkatan daya serap lapangan kerja yang ada.

Tabel 2.30
Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Lampung Timur, 2019-2020

Lapangan Pekerjaan Utama ¹ Main Industry ¹	2019 ¹			2020		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Pertanian ¹ Agriculture ¹	176 025	64 947	240 972	185 616	85 018	270 634
Industri ¹ Manufacture ²	69 270	25 018	94 288	72 113	24 121	96 234
Jasa ³ Services ³	97 059	95 225	192 284	92 768	103 429	196 197
Jumlah/Total	342 354	185 190	527 544	350 497	212 568	563 065

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan lapangan pekerjaan utama, penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada Tahun 2020 mencapai 48,06%, disusul oleh sektor jasa dan industri, masing-masing sebesar 34,84% dan 17,09%.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Upaya peningkatan sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diharapkan akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Faktor-faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), ketersediaan sekolah yang dicerminkan nilai rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dan jumlah guru yang dicerminkan nilai rasio jumlah guru dan murid pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) ditampilkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah di Kabupaten Lampung Timur 2020

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-Laki			
7 - 12	0,45	99,55	0,00
13 - 15	0,00	98,04	1,96
16 - 18	1,25	64,91	33,85
19 - 24	0,00	23,41	76,59
7 - 24	0,36	70,27	29,37
Perempuan			
7 - 12	0,00	100,00	0,00
13 - 15	0,00	94,05	5,95
16 - 18	0,00	69,18	30,82
19 - 24	0,00	24,15	75,85
7 - 24	0,00	73,22	26,78
Laki-laki+Perempuan			
7 - 12	0,23	99,77	0,00
13 - 15	0,00	95,98	4,02
16 - 18	0,58	67,20	32,22
19 - 24	0,00	23,74	76,26
7 - 24	0,19	71,69	28,12

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2019

Tabel di bawah mencerminkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dan memperlihatkan rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Lampung Timur. Dari tabel tersebut menunjukkan angka yang ideal dan sangat berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dikemudian hari. Terkait dengan ketersediaan sekolah, kelas, guru dan murid dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.32
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK	451	1.696	19.216
RA	112	426	5.849
SD	574	6.562	93.298
MI	122	1.223	19.702
SMP	170	2.617	37.227
MTs	96	1.239	13.633
SMA	50	1.154	15.248
SMK	70	1.429	18.434
MA	31	504	4.880

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar per 10.000 penduduk adalah sebesar 157,58 atau jauh di atas rasio ideal yang sebesar 52.

Tabel 2.33
Rasio Guru dan Murid Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
TK	1.696	19.216	1 : 11
SD	6.562	93.298	1 : 14
SMP	2.617	37.227	1 : 14
SMA/SMK	2.583	33.682	1 : 13

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan akreditasi sekolah, pada Tabel di bawah ini ditampilkan akreditasi sekolah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, sebagai berikut

Tabel 2.34
Akreditasi Sekolah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TINGKAT AKREDITASI			
		A	B	C	BELUM
1	PAUD	0,2%	21,5%	14,5%	63,8%
2	SD	6,3%	78,8%	12,8%	2,1%
3	SMP	9,0%	62,9%	24,6%	3,6%
4	LKP	5,6%	27,8%	33,3%	33,3%
5	PKBM	-	29,4%	17,6%	52,9%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2021

Salah faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu kompetensi tenaga pengajar dan pengawas. Kompetensi pendidik yang salah satunya diukur melalui sertifikasi kependidikan. Hingga Tahun 2020, jumlah tenaga pendidik PNS yang memiliki sertifikasi berjumlah 3.672 atau sebesar 90,6 persen, sedangkan untuk tenaga pendidik non PNS yang telah bersertifikat sebesar 923 orang atau baru mencapai 17,22%. Lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.35
Jumlah Guru PNS yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Guru PNS	Guru PNS Bersertifikasi	Guru PNS Yang belum Bersertifikasi	Persen
1	PAUD	92	88	4	96 %
2	SD	2865	2576	289	90 %
3	SMP	1006	916	90	91 %
4	Pengawas	92	92	-	100 %
JUMLAH		4.055	3.672	383	90,6 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Tabel 2.36
Jumlah Guru Non PNS yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Guru NON PNS	Guru NON PNS Bersertifikasi	Guru NON PNS Yang belum Bersertifikasi	Persen
1	PAUD	1.140	338	802	30 %
2	SD	2.814	83	2.731	03 %
3	SMP	1.405	502	903	35 %
JUMLAH		5.359	923	4.436	17,22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

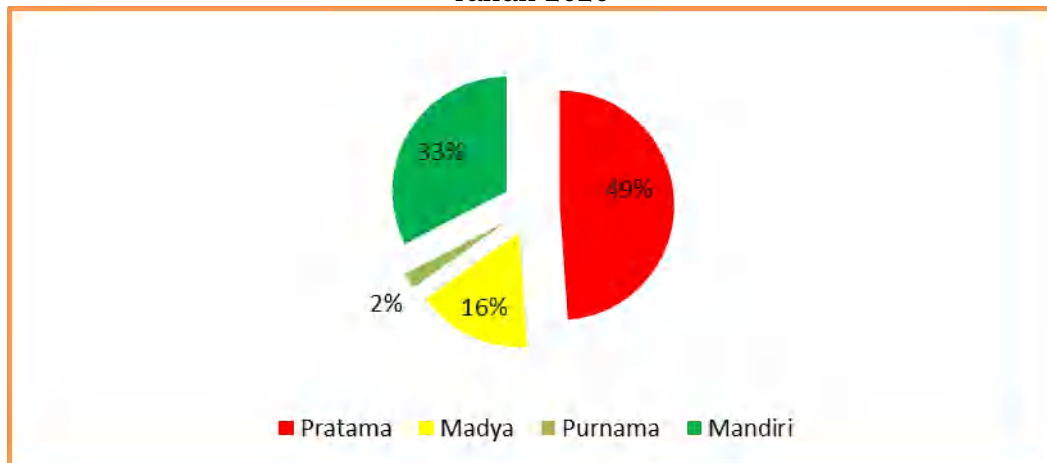
2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kehidupan dan usia harapan hidup manusia, kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Peningkatan kualitas penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dan status kesehatan penduduk. Kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dipercaya menjadi penyebab langsung maupun tak langsung keberhasilan bidang-bidang lain.

1. Persentase desa siaga aktif dengan strata purnama mandiri.

Indikator kinerja persentase desa siaga aktif strata purnama mandiri pada tahun 2020 mempunyai skala nilai kinerja sangat tinggi yaitu mencapai 139,4% bila di bandingkan dengan target 2020 dan menyumbang 116,17% dari target akhir RPJMD. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian kinerja yang mencapai 34,85% dari target 25% di tahun 2020 dan 30% target akhir RPJMD. Capaian indikator kinerja di atas juga meningkat bila di banding capaian tahun 2019 yakni 4,6%. Jumlah desa siaga aktif strata purnama mandiri di Kabupaten Lampung Timur berjumlah 92 desa, dari 264 desa di Kabupaten Lampung Timur. Persentase strata desa di Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Grafik 2.14
Persentase Desa Siaga Berdasarkan Strata Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2020

Capaian persentase desa siaga aktif purnama mandiri merupakan hasil dari kerjasama antara tim Kabupaten, Puskesmas dan masyarakat desa dalam mengaktifkan desa siaga. Capaian tersebut harus tetap dipertahankan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi tersebut yaitu dengan pendampingan desa yang belum aktif dengan melibatkan lintas sector terkait.

Berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan pencapaian indikator persentase desa siaga strata purnama mandiri antara lain: masih banyak belum semua forum desa siaga berjalan semestinya, dukungan lintas setor dan swasta belum optimal, serta peran serta masyarakat masih kurang.

2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Pendataan keluarga dalam rangka Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK) telah dilakukan sejak tahun 2016 terutama di 9 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, pendataan keluarga sehat mulai dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Indikator keluarga sehat terdiri dari 12 indikator, yakni:

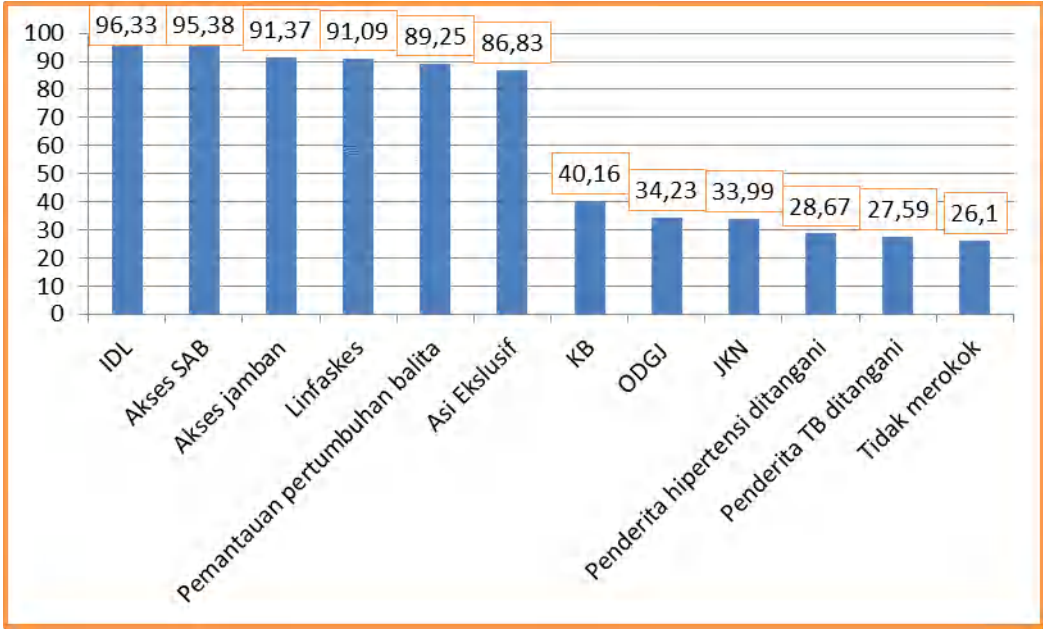
- 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
- 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil pendataan dapat dientri pada aplikasi Keluarga Sehat. Hasil pendataan keluarga yang telah dientri pada aplikasi Keluarga Sehat dapat dilihat pada status pendataan yang dapat menampilkan jumlah keluarga yang telah terdata dan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Pada tahun 2020, Kabupaten Lampung Timur menargetkan cakupan

IKS sebesar 0,15% namun capaian IKS tahun 2020 baru mencapai 0,105 atau 70% dari target. Capaian tahun 2020 tersebut meningkat bila di banding tahun 2019 (IKS=1,0%) dan menyumbang 52,5% target akhir masa RPJMD di tahun 2021. Dengan demikian indikator kinerja Indikator Keluarga Sehat berada pada katagori skala nilai sedang.

Di Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2020 pendataan keluarga sehat mencapai 82% atau 264.491 keluarga dari 323.235 jumlah keluarga. Hasil dari pendataan tersebut menunjukkan bahwa 50% capaian indikator keluarga sehat di Kabupaten Lampung Timur masih rendah, capaian indikator terendah yakni anggota keluarga tidak merokok dengan capaian hanya 26,1%. Hasil pendataan berdasarkan indikator adalah sebagai berikut:

Grafik 2.15
Persentase Indikator Keluarga Sehat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator di atas antara lain adalah belum optimalnya pelaksanaan PIS-PK baik pada tahap intervensi lanjut maupun tahap analisis perubahan perilaku, belum berjalannya kordinasi antara pengampu program PIS-PK dengan pengelola program lain di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Hal yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan melakukan upaya penguatan koordinasi dengan Pengampu Program di Dinas Kesehatan., melibatkan lintas Program / pengampu program di Dinas Kesehatan dalam monev PISPK dan menyusun jadual verifikasi dan pembinaan cluster Puskesmas.

3. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Capaian kinerja persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan tahun 2020 dalam skala nilai kinerja sangat

tinggi. Berdasarkan data, penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan berjumlah 719.202 dari jumlah penduduk 1.051.994 jiwa (68%). Walaupun cenderung menetap bila dibanding dengan capaian tahun 2019 (68%), namun capaian kinerja persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur telah melampaui target kinerja tahun 2020 yakni 63%, capaian kinerja tersebut telah mencapai 107% dan menyumbang 94,44% target akhir RPJMD (72%).

Grafik 2.16
Trend Persentase Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan
terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian indikator persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan adalah belum terupdate nya peserta jaminan dari jalur PBI sehingga ada sebagian peserta yang tidak lagi tepat sasaran serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan secara mandiri sehingga sebagian peserta yang mendaftar adalah masyarakat yang dalam kondisi sakit. Untuk meningkatkan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat menjadi peserta jaminan kesehatan bekerjasama dengan pihak terkait diantaranya Kantor BPJS.

4. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

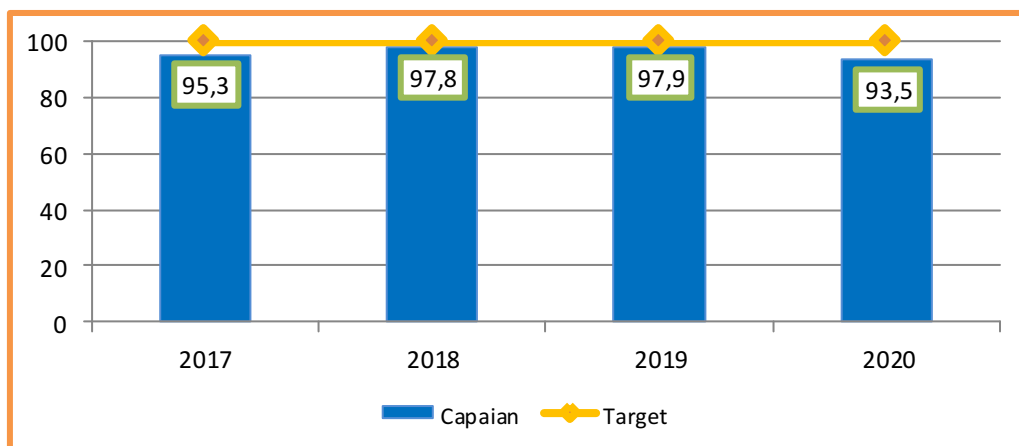
Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; b) Ukur tekanan darah; c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan; g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;

h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan. i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; j) Temu wicara (konseling).

Berdasarkan laporan capaian persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar tahun 2020 berjumlah 17.476 dari 18.691 sasaran ibu hamil atau 93,5%. Capaian tersebut telah mencapai 93,5% dari target kinerja tahun 2020 (100%), sehingga mempunyai skala nilai kinerja sangat tinggi. Namun demikian, capaian tersebut lebih rendah bila di banding capaian tahun 2019 (97,88%), sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.17
Trend Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 - 2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Penyebab dari menurunnya capaian kinerja di atas antara lain:

- Sasaran yang digunakan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur menggunakan data proyeksi penduduk yang berasal dari Badan Pusat Statistik, sehingga memungkinkan terjadi kesenjangan antara jumlah penduduk sasaran proyeksi dengan jumlah riil penduduk.
- Pelayanan antenatal harus memenuhi standar 10 T, sehingga memungkinkan ada beberapa ibu hamil yang ditemukan di akhir tahun belum dapat dimasukkan sebagai capaian karena belum terpenuhinya pelayanan sesuai standard dan baru dapat dicatat di tahun selanjutnya.
- Jejaring sistem pencatatan dan pelaporan dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan mandiri belum terlaksana secara optimal, sehingga memungkinkan *under reporting*, karena ada beberapa ibu hamil K4 yang tidak melaporkan.
- Situasi pandemi membuat ibu hamil takut untuk mengakses pelayanan kesehatan ibu hamil dan banyaknya pembatasan kegiatan luar gedung Puskesmas.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk dalam upaya meningkatkan capaian kinerja di atas antara lain:

- Sweeping* ibu hamil yang dilakukan oleh Puskesmas dan Bidan Desa bekerjasama

dengan kader.

- b) Promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil sesuai standar.
- c) Mengaktifkan jejaring laporan pemeriksaan ibu hamil terutama dengan Bidan Praktek Mandiri.
- d) Monitoring dan bimbingan kepada Puskesmas dan jaringannya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara berkala.
- e) Program unggulan Wasesi, wanita usia subur siap konsepsi, merupakan salah satu program dalam bentuk edukasi/ kursus kepada calon pengantin untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat.
- f) Seluruh kegiatan di atas dilakukan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan di masa pandemic.

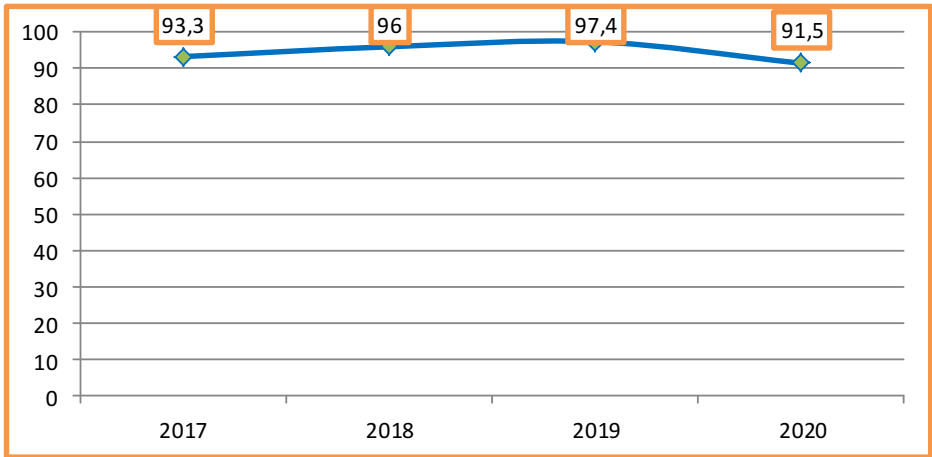
5. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar adalah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi, di fasilitas kesehatan serta sesuai dengan asuhan persalinan normal dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

Berdasarkan laporan, jumlah ibu bersalin di Kabupaten Lampung Timur yang telah mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar berjumlah 16.561 ibu bersalin dari jumlah sasaran 18.100 ibu bersalin sehingga realisasi kinerja persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar mencapai 91,5% bila di banding target 2020 (100%). Dengan demikian capaian kinerja terhadap target untuk indikator ini berada dalam katagori skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi.

Ketersediaan pembiayaan persalinan baik melalui mekanisme BPJS maupun Jampersal dan program berobat gratis bagi ibu melahirkan turut mendukung pencapaian kinerja di atas. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam upaya pencapaian target, antara lain sasaran penduduk menggunakan data proyeksi penduduk, masih terdapat persalinan yang ditolong dukun dan *under reporting* atau tidak terlaporkannya persalinan terutama dari fasilitas kesehatan swasta dan fasilitas kesehatan di luar wilayah Kabupaten. Sehingga bila di banding dengan capaian tahun 2019 terdapat penurunan capaian persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan sesuai standar, seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.18
Trend Cakupan Persalinan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, adalah dengan meningkatkan kemitraan Bidan dan Dukun dalam pertolongan persalinan, meningkatkan peran Puskesmas jaringan dan jejaringnya terutama Bidan Praktek Mandiri dalam melaporkan ibu bersalin di wilayah kerjanya, peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang persalinan yang aman dan sehat melalui media Kelas Ibu dan Posyandu serta peningkatan pemberdayaan kader dan masyarakat dalam upaya P4K.

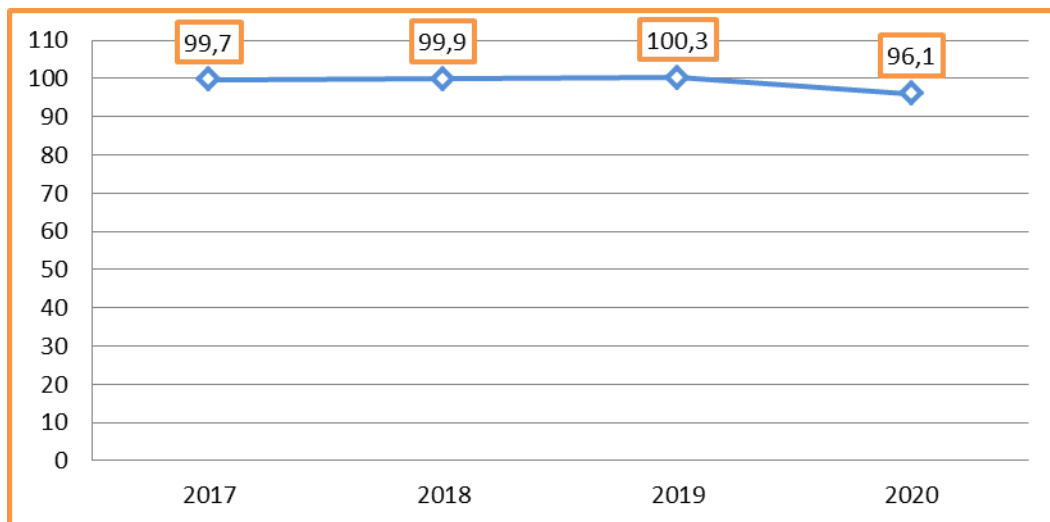
6. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Pelayanan tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah.

Berdasarkan data, bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 berjumlah 16.574 bayi dari 17.238 sasaran bayi, atau dengan capaian realisasi sebesar 96,1% dari target tahun 2020 (100%). Berdasarkan skala, indikator sasaran persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berada pada skala nilai kinerja sangat tinggi. Namun bila di banding dengan tahun 2019 yakni 100,3%, capaian tersebut menurun.

Berikut trend persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar:

Grafik 2.19
Trend Pelayanan Pada Bayi Baru Lahir Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2017-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Penyebab turunnya capaian indikator di atas adalah situasi pandemi membuat sebagian ibu takut membawa bayinya melakukan kunjungan neonatal bila tidak ada keluhan. Solusi untuk meningkatkan capaian persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar antara lain dengan meningkatkan pembinaan Puskesmas guna meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan Bidan Praktik Mandiri dan Klinik Swasta dalam pencatatan dan pelaporan, meningkatkan kegiatan *sweeping* kunjungan ke ibu pasca salin dan neonatal yang pulang dari rujukan rumah sakit, serta membina kader posyandu untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pemetaan sasaran ibu nifas dan bayi baru lahir. Selain itu juga perlu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan guna memenuhi standar pelayanan yang ditentukan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pemberi pelayanan bayi baru lahir dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal, pelatihan tentang manajemen MTBM/MTBS, serta monitoring dan pembinaan berkala ke Puskesmas dan Bidan.

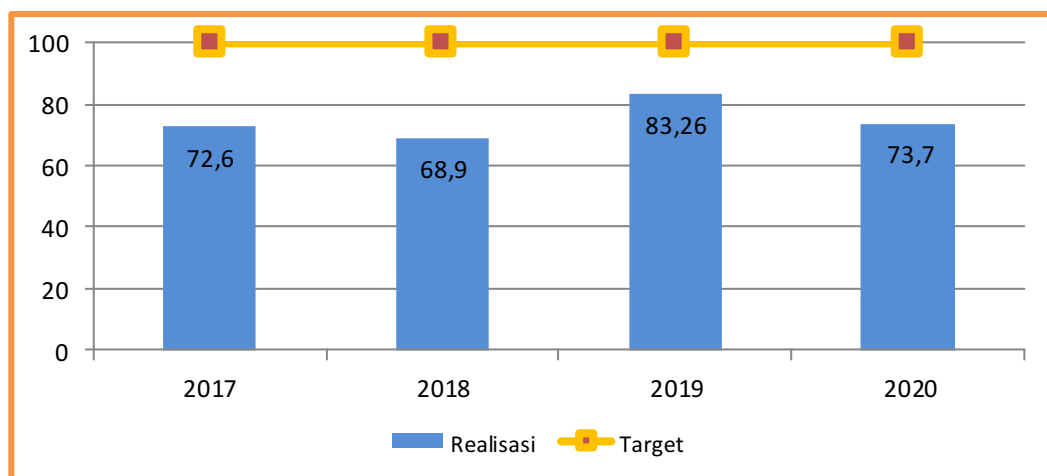
7. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan tersebut, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Capaian kinerja pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada tahun 2019 mencapai 83,26%, dengan skala nilai kinerja sedang. Berdasarkan laporan, jumlah balita yang mendapat pelayanannya sesuai standar berjumlah 64.042 balita dari jumlah sasaran 86.933 balita atau mencapai 73,7% dari target tahun 2020 dan target akhir

masa RPJMD (100%). Capaian tersebut menurun bila di banding capaian tahun 2019 yakni 83,26%. Penurunan tersebut di akibatkan karena situasi pandemic sehingga pelayanan Posyandu sempat ditiadakan, anak PAUD sebagai sasaran balita tidak melakukan pembelajaran di sekolah, dan kegiatan luar gedung Puskesmas yang banyak mengalami pembatasan. Selain hal tersebut, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah pemenuhan standar pelayanan sesuai yang diamanatkan PMK no 4 tahun 2019. Terkait dengan standar pelayanan, di Kabupaten Lampung Timur masih kekurangan SIDTK kit dan belum semua tenaga pemberi pelayanan sudah mengikuti pelatihan SDIDTK. Berikut trend persentase pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Lampung Timur:

Grafik 2.20
Trend Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2017-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja di atas diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas program terkait pelayanan kesehatan balita, mengaktifkan kembali kegiatan Posyandu di masa pandemic dengan tetap menerapkan protocol kesehatan, membina kader posyandu untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kunjungan balita ke Posyandu, melakukan *sweeping* penimbangan dan vitamin A pada balita, pemberian PMT stimulan dan pengadaan sarana dan prasarana yakni antropometri kit sebanyak 99 unit di tahun 2020.

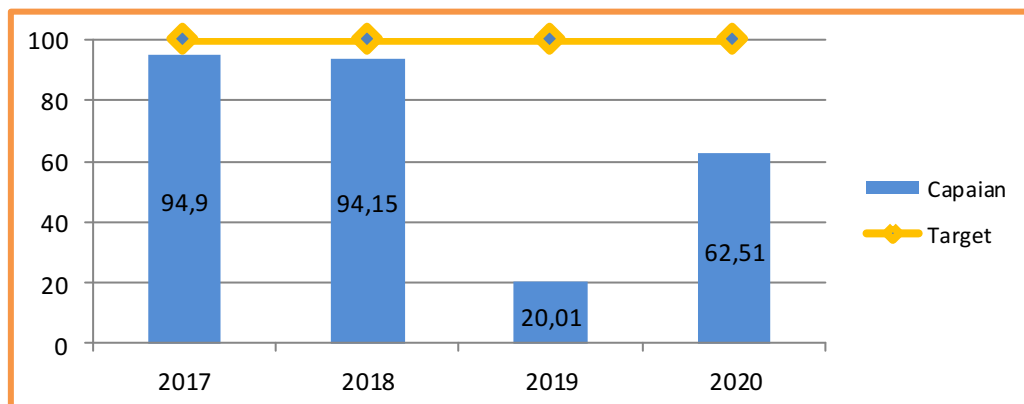
8. Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah satu indikator SPM bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar. Standar pelayanan penjangkaran kesehatan meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah. Skrining yang dilakukan meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut dan penilaian ketajaman indera.

Capaian indikator sasaran kinerja persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 adalah 62,5%, atau dalam kategori rendah dalam skala nilai kinerja, dimana anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan berjumlah 105.048 orang dari sasaran 168.043 anak usia pendidikan dasar. Capaian tersebut belum mencapai target tahun 2020 yakni 100%, namun meningkat signifikan bila di banding capaian tahun 2019 (20,01%).

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar pada tahun 2020 terkendala dengan adanya pandemic COVID-19, dimana pada masa pandemik terdapat kebijakan sekolah tidak mengadakan pembelajaran tatap muka. Upaya yang dilakukan agar anak usia pendidikan dasar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di antaranya dengan melakukan inovasi kegiatan dimana pelayanan kesehatan dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan BIAS, dan pada saat anak-anak mengumpulkan tugas sekolah. Hal ini dapat terlaksana berkat kerjasama yang dilakukan dengan pihak sekolah. Di bawah ini adalah trend pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Timur:

Grafik 2.21
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Belum tercapainya indikator kinerja persentase pelayanan kesehatan usia anak pendidikan dasar juga disebabkan karena:

- Pelaksanaan skrining yang dilakukan pada anak usia pendidikan dasar baru dilakukan pada anak sekolah, sedangkan sasaran di luar sekolah termasuk di pondok pesantren belum terjangkau.
- Pelayanan pada anak usia pendidikan dasar belum mendapatkan penganggaran yang optimal sesuai dengan standar PMK no 4 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan baru terbit tanggal 31 Januari 2019.
- Terbatasnya sarana prasarana seperti UKS kit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar dan buku kesehatan anak sekolah.
- Terbatasnya sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas terutama tenaga gizi dan Dokter gigi/ perawat gigi yang merupakan salah satu syarat pemenuhan standar pelayanan.

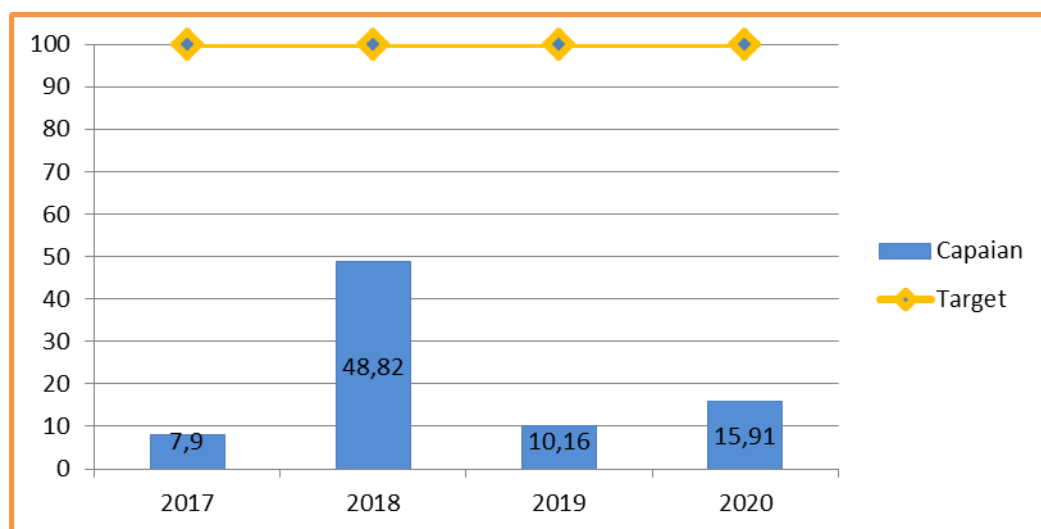
- e) Belum terlibatnya sektor terkait maupun swasta dalam upaya pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar.

9. Persentase Warga Usia 15 sampai dengan 59 Tahun Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun merupakan pelayanan wajib yang harus dilakukan karena bagian dari indikator SPM bidang kesehatan. Pelayanan pada usia produktif tersebut mensyaratkan pelayanan sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular minimal 1 kali dalam setahun terdiri dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku beresiko.

Capaian persentase warga Kabupaten Lampung Timur usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sangat rendah, yaitu 15,9% dengan realisasi 105.093 orang dari 660.672 sasaran atau 15,9% dari target 100% di tahun 2020. Walaupun belum mencapai target, capaian indikator pelayanan kesehatan usia produktif di Kabupaten Lampung Timur meningkat bila di banding capaian tahun 2019 (10,16%). Perkembangan capaian pelayanan kesehatan usia produktif di Kabupaten Lampung Timur tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.22
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Masih rendahnya capaian indikator sasaran di atas diakibatkan karena: belum terpenuhinya standar tenaga pemberi pelayanan di Puskesmas yakni tenaga gizi dan tenaga kesehatan masyarakat; belum terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar SPM dan sesuai jumlah sasaran seperti glukometer, skrining kit, stik pemeriksaan gula darah, dan lain-lain; belum semua kegiatan skrining kesehatan pada usia 15 sampai dengan 59 tahun di Kabupaten Lampung Timur dilaporkan terutama pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan swasta; sistem pembiayaan di Puskesmas belum fokus ke pelayanan; dukungan lintas sektoral dan swasta masih rendah; serta situasi pandemic COVID-19 mengakibatkan

banyak kegiatan luar gedung seperti GERMAS tidak dapat dilaksanakan akibat banyaknya pembatasan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan target kinerja tersebut adalah:

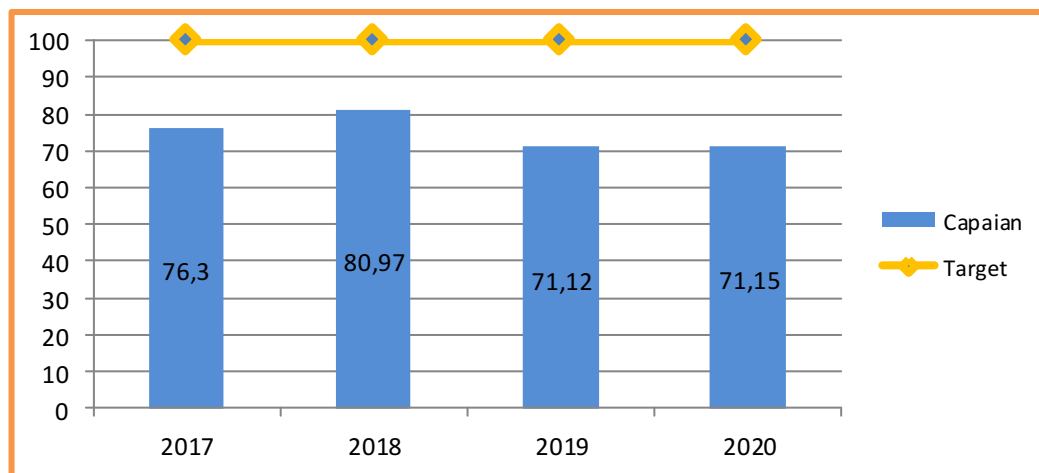
- a) Meningkatkan kerjasama lintas program salah satunya melalui program PIS-PK, lintas sektor dan fasilitas kesehatan swasta dalam melakukan skrining kesehatan bagi penduduk usia 15-59 tahun.
- b) Promosi dan edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan skrining kesehatan.
- c) Melakukan pembinaan Posbindu untuk meningkatkan peran Posbindu.
- d) Bimbingan teknis Dinas Kesehatan ke Puskesmas secara berkala.
- e) Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat Puskesmas, jaringan dan jejaringnya, serta mensosialisasikan penggunaan NIK pada petugas dan masyarakat yang melakukan skrining kesehatan, agar data dapat diinput dan tercatat di sistem pelaporan online.
- f) Tetap melakukan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dengan protocol kesehatan.

10. Persentase Warga Usia 60 Tahun ke atas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan usia lanjut merupakan salah satu indikator SPM bidang kesehatan. Pelayanan dimaksud meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko yang dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun yang terdiri dari pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian, anamnesa perilaku beresiko serta tindak lanjut hasil skrining.

Capaian kinerja pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2020 mempunyai skala nilai sedang. Hal ini dibuktikan dengan capaian realisasi kinerja hanya mencapai 71,15% dari target 100% di tahun 2020. Capaian tersebut relative menetap bila di banding capaian tahun 2019 (71,12%). Capaian tahun 2020 adalah berdasarkan laporan bahwa sebanyak 82.915 usia lanjut di Kabupaten Lampung Timur dari jumlah sasaran 116.550 usia lanjut telah mendapat pelayanan kesehatan. Berikut capaian SPM pelayanan kesehatan pada usila di Kabupaten Lampung Timur:

Grafik 2.23
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Usila
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Capaian indikator pelayanan pada usia lanjut pada tahun 2020 cenderung tetap karena adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut terutama kegiatan di luar gedung di batasi mengingat usia lanjut merupakan kelompok beresiko terpapar COVID-19. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut antara lain:

- Kesadaran masyarakat usia lanjut untuk mengikuti kegiatan skrining kesehatan masih rendah.
- Terbatasnya penganggaran pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2020.
- Belum terpenuhinya tenaga kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan usia lanjut.
- Belum terlatihnya petugas kesehatan terutama untuk pemeriksaan gangguan mental dan gangguan kognitif.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan usia lanjut seperti alat pengukur gula darah dan kolesterol, stik dan reagensia untuk pelaksanaan skrining sesuai jumlah sasaran.
- Belum terpenuhinya buku kesehatan usia lanjut sesuai jumlah sasaran.
- Pelayanan kesehatan usia lanjut pada fasilitas kesehatan swasta belum sesuai standar dan belum sepenuhnya dilaporkan.

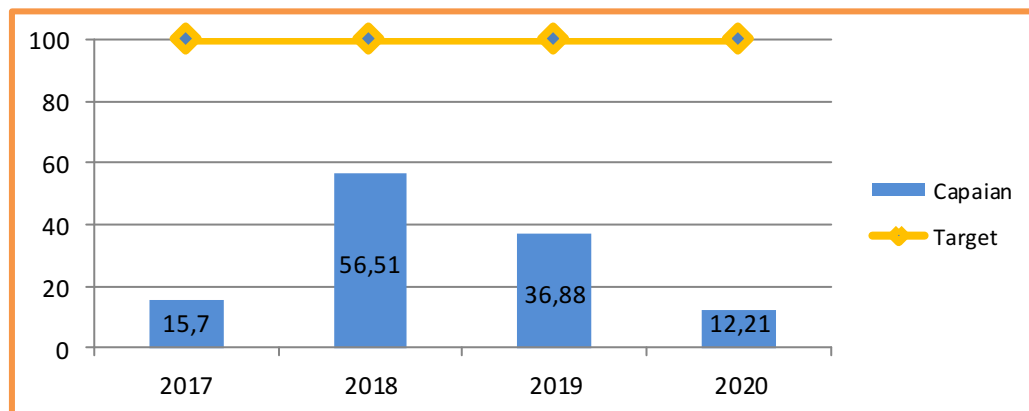
Untuk meningkatkan capaian kinerja di atas, hal yang perlu dilakukan antara lain:

- Peningkatan peran Posyandu Lansia dan Posbindu dalam pelayanan kesehatan usia lanjut dengan tetap menggunakan protocol kesehatan.
- Integrasi program terutama dengan PIS-PK dan pengendalian penyakit tidak menular.
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan usia lanjut
- Melakukan advokasi untuk memperoleh penganggaran pelayanan kesehatan usia lanjut termasuk dari dana desa (DD).
- Pemenuhan sarana dan prasarana serta bahan habis pakai.
- Promosi dan edukasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat
- Monitoring dan bimbingan secara berkala kepada Puskesmas.

11. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah salah satu indikator SPM bidang kesehatan, yang meliputi pengukuran darah minimal dilakukan satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan jika diperlukan. Capaian kinerja pelayanan kesehatan hipertensi pada tahun 2019 berada dalam skala nilai kinerja sangat rendah, yakni hanya mencapai 12,2% dari target SPM 100% di tahun 2020. Realisasi capaian adalah sebanyak 19.486 orang telah mendapat pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar dari perkiraan sasaran 159.641 penderita. Capaian kinerja tersebut juga lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 36,88%. Gambaran capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, sebagai berikut:

Grafik 2.24
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian indikator pelayanan kesehatan penderita Hipertensi menurun tajam pada tahun 2020. Penurunan tersebut dikarenakan pelayanan kesehatan hipertensi di masa pandemic COVID-19 terbatas pada pelayanan rutin Puskesmas, menurunnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan di masa pandemi, pelayanan di luar gedung seperti pelayanan di Posbindu tidak dapat dilaksanakan maksimal, serta belum terlaporkannya pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan swasta.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan untuk penderita hipertensi, hal-hal yang akan dilakukan adalah:

- Peningkatan penjangkauan penderita hipertensi melalui PIS-PK dan kegiatan skrining kesehatan lainnya untuk melakukan penjangkauan penderita hipertensi dan faktor resiko hipertensi.
- Meningkatkan pembinaan Posbindu untuk meningkatkan deteksi faktor resiko hipertensi.
- Peningkatan kapasitas tenaga terutama kader Posbindu.
- Mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan deteksi dini hipertensi.
- Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan baik di Puskesmas maupun laporan dari Rumah Sakit/pelayanan kesehatan swasta.

12. Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan skunder yang meliputi pengukuran gula darah minimal satu kali dalam sebulan di fasilitas kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup/ nutrisi, terapi farmakologi dan rujukan jika diperlukan.

Capaian indikator kinerja penderita Diabetes Melitus (DM) tahun 2020 adalah 49,5% dengan rincian realisasi sebanyak 5.115 penderita dari 10.331 perkiraan sasaran penderita DM telah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Di dalam skala nilai kinerja, capaian tersebut masuk dalam katagori sangat rendah, dan menurun bila di banding capaian tahun 2019 yakni 56,43%.

Penurunan capaian tersebut salah satunya disebabkan karena menurunnya akses masyarakat ke pelayanan kesehatan akibat pandemic COVID-19 dan terbatasnya pelayanan kesehatan di luar gedung. Kendala lain yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan Posbindu.
- b) Masih rendahnya penganggaran untuk pelayanan DM.
- c) Belum semua Puskesmas memiliki tenaga gizi dan tenaga kesehatan masyarakat sesuai dengan standar SPM.
- d) Belum tercukupinya sarana dan prasarana seperti glukometer.
- e) Belum tercukupinya Posbindu kit.
- f) Belum tercukupinya bahan habis pakai seperti stik gula darah sesuai dengan jumlah sasaran.
- g) Belum semua pelayanan DM terutama dari rumah sakit, klinik dan praktek Dokter swasta dilaporkan.

13. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat merupakan salah satu indikator SPM bidang kesehatan. Pada tahun 2020 capaian tersebut mencapai 80,4%, meningkat bila di banding capaian pada tahun 2019 (79,91%). Dalam skala nilai, capaian tersebut berada pada katagori skala nilai kinerja tinggi. Hal ini terbukti dari 1.788 perkiraan sasaran, sebanyak 1438 orang dengan ODGJ telah mendapat pelayanan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan sesuai standar dimaksud harus dilakukan oleh minimal 1 (satu) orang dokter dan/ atau perawat terlatih jiwa atau tenaga lainnya yang meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi.

Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur dilakukan baik di Puskesmas maupun melalui kegiatan kunjungan rumah meliputi pemeriksaan status mental, edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan tindakan kebersihan diri ODGJ berat. Upaya lain yang telah dilakukan di Kabupaten Lampung Timur adalah penjaringan ODGJ, pembebasan pasung, membentuk

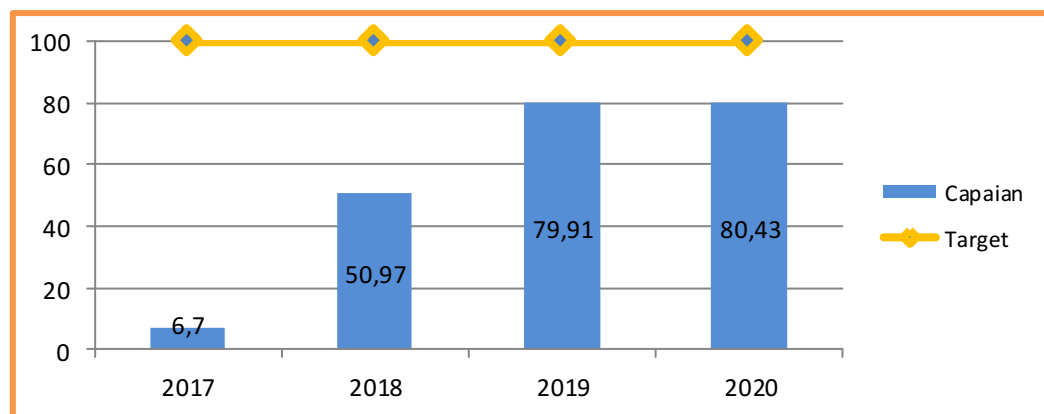
Puskesmas rujukan jiwa yakni Puskesmas Purbolinggo, Batanghari dan Puskesmas Sribhawono, advokasi kepada masyarakat dan *stakeholder* untuk mengurangi stigma buruk tentang ODGJ, serta edukasi penanganan ODGJ terutama pada keluarga ODGJ.

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan orang dengan ODGJ berat, beberapa kendala yang ditemui adalah:

- Data sasaran ODGJ merupakan data hasil proyeksi dan bukan data riil sehingga memungkinkan terjadi kesenjangan di populasi.
- Rendahnya penganggaran yang mendukung kesehatan jiwa.
- Tenaga Dokter Puskesmas yang memberikan pelayanan ODGJ belum semuanya terlatih kesehatan jiwa.
- Masih tingginya stigma masyarakat terhadap ODGJ.
- Masih rendahnya dukungan lintas sektor dalam penanganan ODGJ.

Hal di atas merupakan beberapa kendala yang menyebabkan capaian indikator kinerja persentase penanganan ODGJ belum mencapai target 100%. Berikut trend capaian SPM pelayanan kesehatan pada ODGJ berat, sebagai berikut:

Grafik 2.25
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020



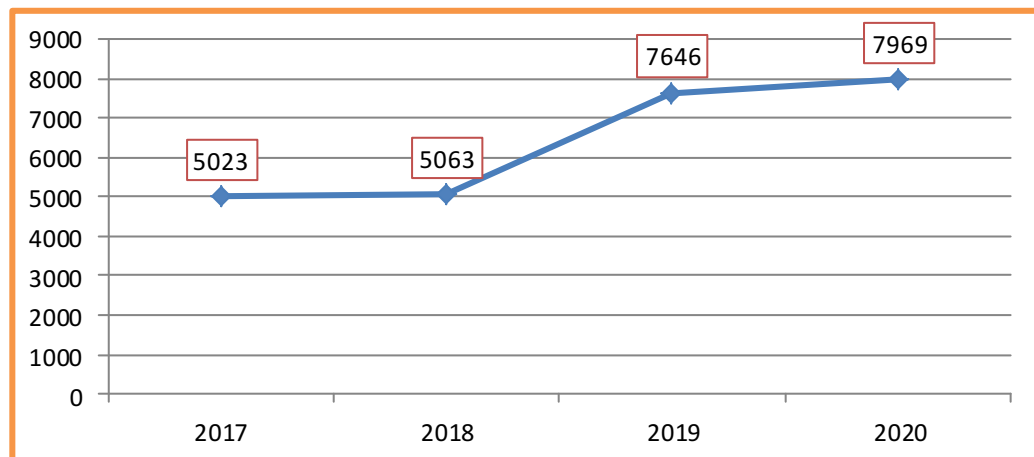
Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

14. Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar.

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi sesuai standar merupakan salah satu indikator SPM bidang kesehatan. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar dimaksud adalah pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Pemeriksaan klinis terduga TBC yaitu dengan melakukan pemeriksaan gejala dan tanda, sedangkan pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan dahak dan atau bakteriologis dan atau radiologis, sedangkan edukasi pada terduga TBC adalah edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan. Selain hal tersebut di atas, pelayanan pada terduga TBC juga dapat dilakukan dengan melakukan rujukan pada kasus-kasus yang memerlukan rujukan. Sehingga untuk memenuhi standar tersebut harus didukung oleh petugas yang berkompeten maupun ketersediaan sarana prasarana seperti mikroskop dan lain lainnya.

Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis pada tahun 2020 mencapai 96% atau dengan katagori sangat tinggi. Capaian tersebut tercapai karena sebanyak 7.969 orang dari jumlah sasaran terduga 8.304 orang terduga TB telah dilayani sesuai standar. Walaupun capaian tersebut belum mencapai target SPM (100%) dan cenderung menurun bila di banding capaian tahun 2019 (101,29%), namun bila dilihat berdasarkan jumlah, capaian terduga TB yang dilayani sesuai standar pada tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019, seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.26
Capaian Terduga TB Mendapat Pelayanan Sesuai Standar
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Penyebab belum tercapainya indikator persentase pelayanan kesehatan untuk terduga TB selain akibat dari pandemic COVID-19 sehingga penjangkaran aktif luar gedung terbatas, juga disebabkan karena sasaran penderita TB menggunakan data penduduk hasil proyeksi. Kendala lainnya adalah belum tercukupinya tenaga ATML di Puskesmas, belum terpenuhinya sarana prasana di Puskesmas seperti ketersediaan mikroskop, dan belum maksimalnya pelaporan dari fasilitas kesehatan swasta.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator di atas adalah dengan menggalang komitmen pengelola TB Puskesmas untuk meningkatkan cakupan, penjangkaran aktif TB bagi pengunjung Puskesmas, bimbingan teknis bagi pengelola TB Puskesmas, serta penyisiran data laporan pasien TB di Rumah Sakit.

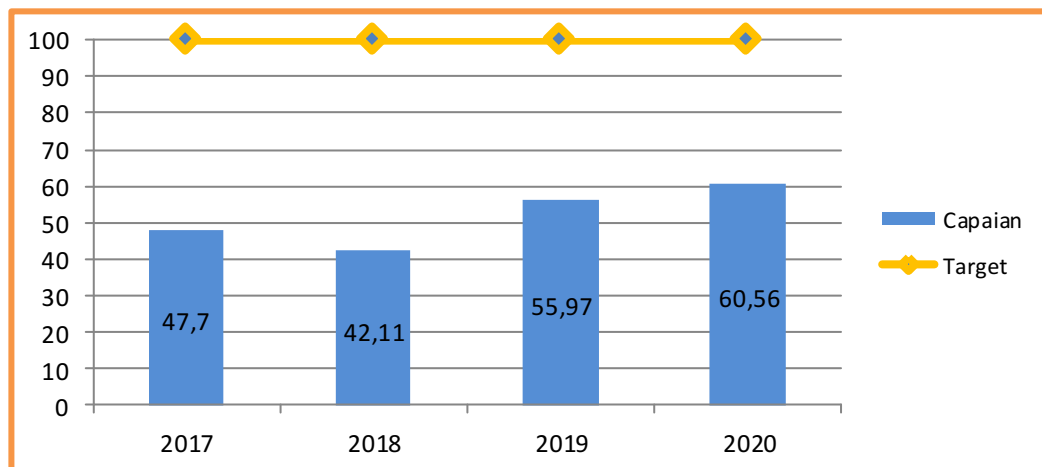
15. Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar.

Permenkes Nomor 4 tahun 2019 mengamanatkan bahwa setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang termasuk orang dengan resiko HIV adalah ibu hamil, pasien TB, penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan sedangkan standar pelayanan yang dimaksud meliputi edukasi perilaku beresiko dan skrining.

Capaian kinerja persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun 2020 mencapai 60,6%, meningkat bila di banding capaian tahun

2019 (55,47%), namun belum mencapai target SPM 100%. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 12.713 dari 20.994 orang yang beresiko terinfeksi HIV telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga capaian kinerja berdasarkan skala nilai masuk dalam katagori rendah. Belum tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya belum terpetakannya populasi kunci, stigma masyarakat terhadap ODHA, kordinasi lintas program maupun lintas sektor yang belum maksimal, kurangnya kompetensi petugas dalam pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi dan keterbatasan kegiatan penjangkaran luar gedung akibat pandemic. Trend pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV di Kabupaten Lampung Timur seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.27
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan pada Orang Beresiko HIV
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2020



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

Dari beberapa masalah dan kendala yang sudah diuraikan diatas, maka solusi/pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pemetaan populasi kunci ditingkat puskesmas;
- Kaderisasi layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) di puskesmas dan Rumah Sakit;
- Penguatan Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas dan atau rekrutment tenaga pencatatan dan pelaporan;
- Penguatan jejaring dengan listas sektor terkait program HIV AIDS;
- Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

16. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah proporsi dari populasi anak di suatu wilayah yang memiliki karakteristik stunting (pendek dan sangat pendek) dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, desa yang memiliki prevalensi yang tinggi ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.37
Kecamatan/Desa di Kabupaten Lampung Timur dengan Prevalensi Stunting Tertinggi

No	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	JUMLAH BALITA PENDEK	PREVALENSI (%)
1	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	Kedaton II	68	42,50%
2	Sukadana	Pakuan Aji	Pakuan Aji	44	42,31%
3	Way Jepara	Braja Caka	Braja Caka	106	41,57%
4	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	Sukacari	68	40%
5	Jabung	Jabung	Negara Batin	51	34,23%
6	Sukadana	Pakuan Aji	Sukadana Selatan	71	33,65%
7	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	Suko Rahayu	190	32,82%
8	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	Trisno Mulyo	54	32,34%
9	Sekampung	Trimulyo	Wonokarto	110	28,50%
10	Way Jepara	Jepara	Braja Sakti	34	28,33%
11	Way Jepara	Jepara	Sumber Rejo	35	26,92%
12	Way Jepara	Jepara	Seri Rejosari	34	24,82%
13	Raman Utara	Raman Utara	Kota Raman	51	23,29%
14	Sukadana	Pakuan Aji	Putra Aji II	154	22,29%
15	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	Tulung Balak	68	21,38%
16	Marga Sekampung	Peniangan	Bukit Raya	22	20,95%
17	Marga Sekampung	Peniangan	Bungkuk	36	20,93%
18	Way Jepara	Braja Caka	Braja Dewa	39	20,21%
19	Bumi Agung	Donomulyo	Marga Mulya	43	20%
20	Sukadana	Pakuan Aji	Sukadana Jaya	26	19,70%
21	Marga Tiga	Tanjung Harapan	Sukadana Baru	55	19,64%
22	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	Negara Ratu	54	19,64%
23	Bumi Agung	Donomulyo	Nyampir	45	19,48%
24	Raman Utara	Rejo Katon	Raman Fuja	22	19,13%
25	Labuhan Ratu	Jepara	Labuhan Ratu V	132	15,17%

Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2021

17. Penanganan Pandemi COVID-19

Saat ini dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kejadian tersebut diawali pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Situasi pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dan banyak menimbulkan implikasi baik ekonomi, sosial, termasuk pelayanan kesehatan. Banyaknya pembatasan membuat akses dan upaya pelayanan kesehatan terkendala. Belum lagi ketakutan dan kemampuan ekonomi masyarakat akibat pandemi juga berpengaruh pada akses ke pelayanan kesehatan. Hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pada capaian beberapa program kesehatan yang sebagian besar cenderung menurun.

Kasus COVID-19 di Indonesia cenderung meningkat dan menjangkau seluruh provinsi dan Kabupaten di Indonesia, demikian juga di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan laporan, sampai dengan Desember tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur terdapat 265 kasus konfirmasi positif dengan jumlah kasus meninggal 11 kasus, dan tersebar di 29 wilayah Puskesmas.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya dalam mengatasi pandemi, dalam bentuk upaya *tracing*, *testing* dan *treatment* serta peningkatan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan Covid 19 dengan bekerjasama sektor terkait. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur menargetkan *positivity rate* COVID-19 dari hasil *tracing* dan *testing* <5%. Angka tersebut mengacu pada kriteria WHO yaitu bahwa angka ideal *positivity rate* COVID-19 maksimal 5%. *Positivity rate* covid 19 adalah jumlah kasus positif dibagi jumlah kasus positif + jumlah kasus negatif diagnosis yang dihitung dalam 2 minggu terakhir.

Berdasarkan data allrecord-tc19.kemkes.go.id, jumlah specimen covid 19 yang diperiksa di Kabupaten Lampung Timur berjumlah 625 spesimen dengan jumlah specimen positif berjumlah 43 spesimen, sehingga *positivity rate* COVID-19 sebesar 6,88%, berada di atas angka ideal yang ditetapkan WHO dan belum mencapai target yang ditetapkan Kabupaten Lampung Timur yakni <5%. Bila dibanding dengan target, capaian kinerja *positivity rate* COVID-19 baru mencapai 62,4% dari target atau dalam skala nilai kinerja rendah. Masih tingginya *positivity rate* COVID-19 di Kabupaten Lampung Timur menggambarkan bahwa penularan COVID-19 di Kabupaten Lampung Timur masih tinggi dan belum dapat dikendalikan.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja di atas karena kesadaran masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan masih sangat rendah, masih ada masyarakat yang tidak percaya adanya COVID-19, dan karena adanya pemberitaan tentang COVID-19 yang sering menyesatkan persepsi masyarakat.

Hal yang dilakukan dalam mengatasi masalah di atas antara lain adalah dengan meningkatkan upaya surveillens *tracing* dan *testing* di tingkat Puskesmas, memperkuat *treatment* di tingkat Rumah Sakit, membentuk tim COVID-19 tingkat Kabupaten Lampung Timur, meningkatkan edukasi tentang COVID-19 ke masyarakat, serta bekerja sama dan bersinergi dengan tim gugus tugas dan sektor terkait dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Lampung Timur.



Grafik 2.28
Sebaran Kasus COVID-19 di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	SUSPEK				PROBABLE			KONFIRMASI				KONTAK ERAT				PELAKU PERJALANAN				DISCARD			SELESAI ISOLASI			KEMATIAN			
			Lama	Baru	Jumlah	Dalam Pantauan	Lama	Baru	Jumlah	Lama	Bergejala	Tdk Bergejala	Jumlah Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah	Dalam Pantauan	Lama	Baru	Jumlah	Dalam pantauan	Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	Sribhawono	Bandar Sribhawono	1	0	1	1	0	0	0	10	0	0	0	10	64	0	64	2	1.078	5	1.083	25	65	0	65	9	0	9	1	0	1
2	Batanghari	Batanghari	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	1	12	55	5	60	17	537	0	537	1	64	0	64	6	0	6	1	0	1
3	Bumi Emas		0	0	0	0	0	0	0	21	1	0	1	22	73	5	78	9	583	0	583	0	81	0	81	13	0	13	0	0	0
4	Sukaraja Nuban	Batanghari Nuban	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	19	0	19	13	1.102	1	1.103	2	27	0	27	1	0	1	0	0	0
5	Brja Harjosari	Brja Selebah	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	8	0	8	0	1.265	0	1.265	0	27	0	27	2	0	2	0	0	0
6	Donomulyo	Bumi Agung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	394	0	394	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0
7	Way Milli	Gunung Pelindung	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	1.194	31	1.225	83	51	0	51	0	0	0	0	0	0
8	Adirejo		0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	77	0	77	16	861	0	861	0	64	0	64	9	0	9	1	0	1
9	Jabung	Jabung	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	1	0	1	0	1.181	0	1.181	56	7	0	7	6	0	6	0	0	0
10	Karya Tani		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	530	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
11	Labuhan Maringgai		2	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	14	0	14	0	1.526	0	1.526	0	30	0	30	2	0	2	0	0	0
12	Rajabasa Lama	Labuhan Ratu	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	1	16	13	0	13	0	826	0	826	0	16	0	16	9	0	9	2	0	2
13	Peniangan	Marga Sekampung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	31	0	31	0	1.116	0	1.116	11	43	0	43	0	0	0	1	0	1
14	Sukaraja Tiga		0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	38	0	38	1	567	0	567	0	42	0	42	21	0	21	0	0	0
15	Tanjung Harapan	Marga Tiga	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	0	6	3	539	0	539	1	18	0	18	0	0	0	0	0	0
16	Mataram Baru	Mataram Baru	1	0	1	1	0	0	0	8	0	0	0	8	43	0	43	19	1.134	23	1.157	46	66	0	66	3	0	3	1	0	1
17	Wana	Melinting	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	21	0	21	5	1.253	28	1.281	132	36	0	36	4	0	4	0	0	0
18	Margotobo	Metro Kibang	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	19	0	19	2	354	0	354	0	33	0	33	2	0	2	0	0	0
19	Pasir Sakti		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	23	0	23	0	2.058	22	2.080	44	91	0	91	3	0	3	0	0	0
20	Ganti Wano		2	0	2	1	0	0	0	6	0	0	0	6	37	0	37	2	718	0	718	0	30	0	30	5	0	5	0	0	0
21	Pekalongan	Pekalongan	1	0	1	1	0	0	0	8	0	0	0	8	91	0	91	4	791	0	791	14	36	0	36	5	0	5	0	0	0
22	Purbolinggo	Purbolinggo	1	0	1	1	0	0	0	17	0	0	0	17	89	1	90	0	1.604	0	1.604	0	73	0	73	11	0	11	0	0	0
23	Raman Utara		0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	78	0	78	0	922	4	926	57	88	0	88	16	0	16	0	0	0
24	Rejo Katon	Raman Utara	2	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	29	0	29	14	560	0	560	1	23	0	23	1	0	1	0	0	0
25	Sekampung	Sekampung	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	32	0	32	0	1.559	0	1.559	0	37	0	37	15	0	15	1	0	1
26	Trimulyo		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	40	0	40	0	648	0	648	11	41	3	44	10	0	10	0	0	0
27	Pugung Raharjo	Sekampung Udik	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	64	0	64	0	548	0	548	0	64	0	64	12	0	12	0	0	0
28	Sidorejo		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	3	0	599	0	599	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0
29	Sukadana	Sukadana	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	120	0	120	13	852	0	852	0	108	0	108	13	0	13	0	0	0
30	Pakuan Aji		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	424	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31	Sumber Rejo	Way Kaya	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	31	0	31	0	873	0	873	0	33	0	33	2	0	2	0	0	0
32	Tambah Subur	Way Bungur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	903	0	903	21	17	0	17	0	0	0	0	0	0
33	Brja Caka		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	0	6	0	674	0	674	4	18	0	18	1	0	1	0	0	0
34	Way Jepara	Way Jepara	2	0	2	2	0	0	0	13	0	0	0	13	70	0	70	0	73	0	73	17	53	0	53	9	0	9	3	0	3
Total			16	-	16	15	-	-	-	262	3	-	3	265	1.218	11	1.229	120	29.846	114	29.960	533	1.416	3	1.419	190	-	190	11	-	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Dalam kaitannya dengan sektor-sektor perekonomian, infrastruktur transportasi, khususnya jalan berperan sebagai perangsang tumbuhnya sektor-sektor perekonomian baru dan berkembangnya sektor-sektor perekonomian yang sudah ada.

Sebagai perangsang, infrastruktur transportasi dapat difungsikan secara aktif untuk menggerakkan perekonomian daerah yang didahului dengan pembangunan infrastruktur transportasi. Dengan adanya infrastruktur transportasi, kegiatan-kegiatan sektor ekonomi lainnya akan tumbuh dan berkembang (*trade follows the ship*).

Secara umum dari 140,81 kilometer jalan nasional yang ada di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan data pada Tahun 2020 telah mencapai lebih dari 95 persen kondisi mantap. Sedangkan untuk jalan provinsi 80,88 persen mantap, dengan jenis permukaan jalan provinsi : Rigid sepanjang 9,9 km dan Hotmix (AC, HRS, ATB) sepanjang 125,03 km.

Lebih lanjut, terkait dengan kondisi jalan kewenangan kabupaten, berdasarkan data Tahun 2020, telah mencapai 61,17 persen berada dalam kondisi mantap. Dengan tidak seimbangnya antara peningkatan volume kendaraan serta disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diizinkan dengan pemeliharaan dan pembangunan jalan menyebabkan kondisi jalan kabupaten harus terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan dan merupakan langkah pembangunan strategis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru (baik secara langsung maupun tidak langsung). Pada sektor pertanian, pembangunan jalan memperlancar informasi produksi perdagangan dan kegiatan bisnis lainnya yang berguna bagi pelaku usaha di sektor pertanian, dampak tersebut lebih tinggi dibanding dengan dampak pembangunan irigasi. Pembangunan jalan-jalan perdesaan juga merupakan faktor kunci dalam upaya pencapaian swasembada pangan dan pengurangan kemiskinan di tingkat daerah.

Berdasarkan status dan wewenang pembinaan jalan, sistem jaringan jalan di Kabupaten Lampung Timur dikelompokkan sebagai berikut:

1. Jalan Negara/Nasional, yang termasuk Jalan Negara/Nasional di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/Kpts/M2015 adalah 140,81 km.
2. Jalan Provinsi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.a/III.09/HK/2016 adalah 134,93 km.
3. Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.69315/SK/2013 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, sampai dengan Tahun 2015 mencapai 1.884,17 km.
4. Jalan desa di Kabupaten Lampung Timur yang terdata adalah 2.196,31 km.

Tabel 2.38
Panjang Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan
di Kabupaten Lampung Timur

Kondisi jalan	Tingkat Kewenangan Pemerintah			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Kelas I	140,81	-	-	140,81
Kelas II	-	-	-	-
Kelas III	-	-	-	-
Kelas III A	-	134,93	1 884,17	2 019,10
Kelas III B	-	-	-	-
Kelas III C	-	-	-	-
Tidak Dirinci	-	-	-	-
Jumlah/Total	140,81	134,93	1.884,17	2.159,91

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan jenis permukaan jalan di Kabupaten Lampung Timur, paling banyak berjenis permukaan jalan aspal, dan masih terdapat 86,90 jalan kabupaten yang berjenis jalan tanah, lebih lengkapnya disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.39
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km)

Jenis Permukaan Jalan	Tingkat Kewenangan Pemerintah			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Aspal (AC, HRS, ATB)	140,81	134,93	1.163,25	1.438,99
Perkerasan Beton			8,63	8,63
Lapis Penetrasi/Latasir/Macadam			363,39	363,39
Telford/Kerikil/Urpil	-	-	297,91	297,91
Tanah/Belum Tembus	-	-	50,99	50,99
JUMLAH	140,81	134,93	1.884,17	2.159,91

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan kondisi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

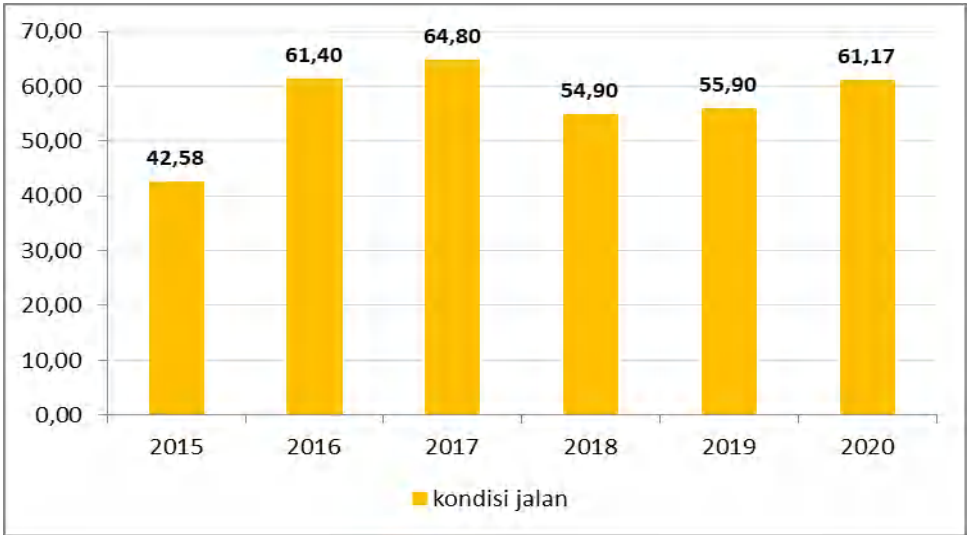
Tabel 2.40
Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 (km)

Kondisi Jalan	Tingkat Kewenangan Pemerintah			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Baik	107,02	100,13	864,41	1.071,56
Sedang	26,75	9,00	288,14	323,89
Rusak	7,04	25,80	585,30	618,14
Rusak Berat	-	0,00	146,32	146,32
JUMLAH	140,81	134,93	1.884,17	2.159,91

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2021

Perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu lima tahun terakhir berkecenderungan meningkat, untuk lebih lengkapnya ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 2.29
Perkembangan Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2021



Untuk jalan desa, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, panjangnya mencapai 4.088,47 km, dengan jenis jalan sebagai berikut :

Tabel 2.41
Panjang Jalan Desa dan Kondisi Permukaan Jalan
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 (km)

	Kecamatan Subdistrict	Kondisi Jalan/Road Condition				
		Baik Good	Sedang Moderate	Rusak Damaged	Rusak Berat Severely	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Metro Kibang	1,90	7,28	73,53	24,58	107,29
2	Batanghari	8,54	14,93	144,63	62,08	230,18
3	Sekampung	1,61	6,11	150,02	128,93	286,67
4	Marga Tiga	1,23	13,41	135,44	60,00	210,08
5	Sekampung Udik	15,72	12,74	120,4	94,84	243,70
6	Jabung	2,47	0,00	114,06	21,11	137,64
7	Pasir Sakti	8,37	11,37	55,87	88,22	163,83
8	Waway Karya	0,00	1,47	78,63	43,73	123,83
9	Marga Sekampung	0,35	5,96	59,98	16,56	82,85
10	Labuhan Maringgai	11,5	20,81	92,21	138,43	262,95
11	Mataram Baru	2,68	19,53	53,82	38,49	114,52
12	Bandar Sribhawono	6,43	19,08	95,03	54,55	175,09
13	Melinting	1,13	23,04	43,17	6,94	74,28
14	Gunung Pelindung	2,40	9,04	36,7	12,68	60,82
15	Way Jepara	6,72	60,48	67,92	39,74	174,86
16	Braja Selehah	0,00	2,65	52,56	58,51	113,72
17	Labuhan Ratu	4,130	26,64	135,91	94,33	261,01
18	Sukadana	3,39	13,86	125,17	130,16	272,58
19	Bumi Agung	0,00	8,37	52,99	24,55	85,91
20	Batanghari Nuban	3,21	4,98	121,03	63,86	193,08
21	Pekalongan	6,39	6,10	120,45	75,59	208,53
22	Raman Utara	2,14	3,20	94,73	150,40	250,47
23	Purbolinggo	3,73	2,23	87,22	52,86	146,04
24	Way Bungur	1,64	2,47	62,24	42,19	108,54
Jumlah/Total		95,68	295,75	2 173,71	1 523,33	4 088,47

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2020

Untuk jembatan, total jumlah jembatan/penyeberangan adalah sebanyak 281 unit dengan panjang 3.133,5 meter. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.42
Kondisi Jembatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

Kondisi Jembatan	Jumlah Unit	%
Baik	245,00	79,29
Sedang	51,00	16,50
Rusak Berat	6,00	1,94
Kritis	7,00	2,27
JUMLAH	309,00	100,00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan kinerja sistem irigasi dalam daerah irigasi permukaan, jumlah daerah irigasi adalah sebanyak 56 daerah irigasi. Untuk luas daerah irigasi sesuai Permen PUPR adalah seluas 4.903,09 hektar dengan luas sawah/fungsional seluas 4.861,44 hektar, dengan kondisi sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.43
Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2021 (ha)

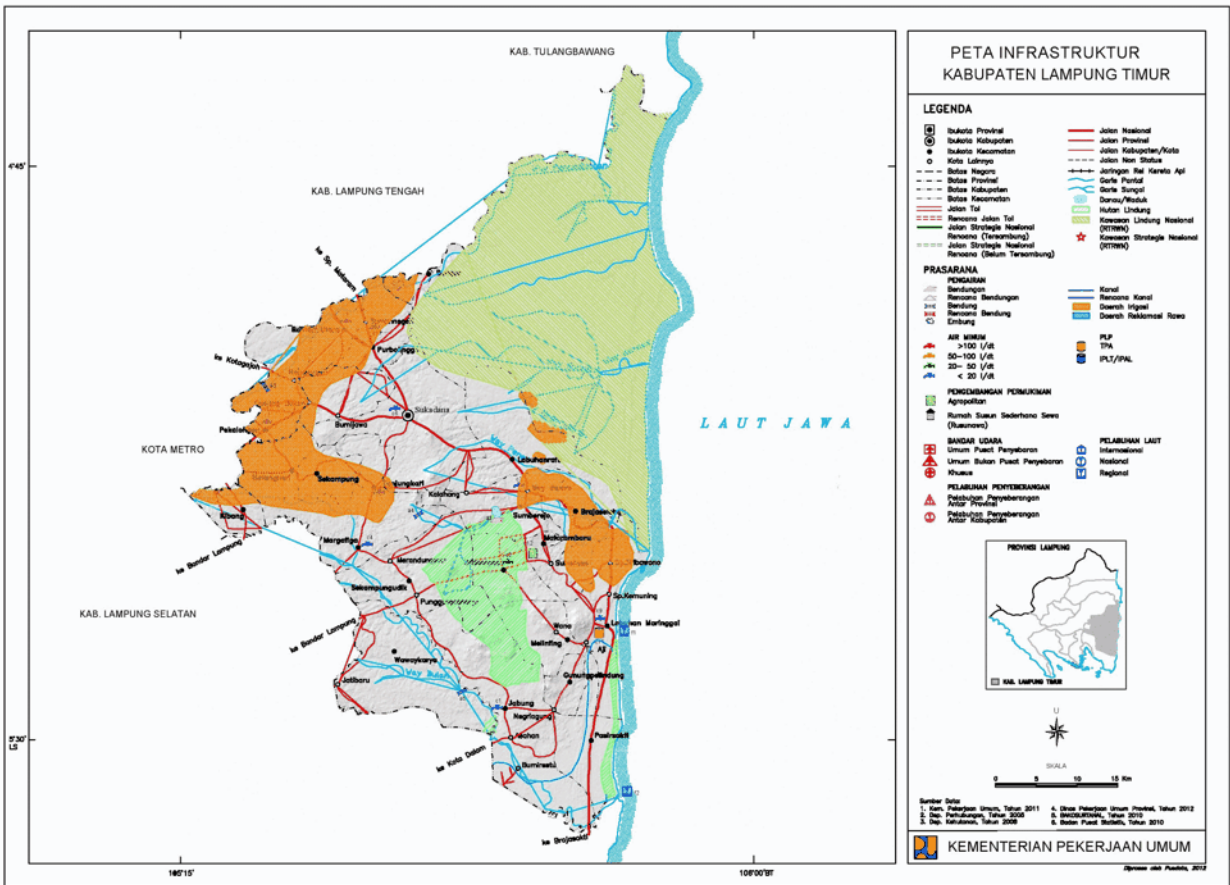
Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas	%
Kondisi Baik	0,00	0,00
Kondisi Rusak Ringan	1.840,60	37,72
Kondisi Rusak Sedang	2.299,74	47,13
Kondisi Rusak Berat	738,75	15,14
JUMLAH	4.879,09	100,00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, luas sawah beririgasi di Kabupaten Lampung Timur adalah seluas 33.560 hektar dan luas sawah tidak beririgasi adalah 29.484 hektar.

Lebih lanjut terkait dengan infrastruktur daerah, gambaran spasial infrastruktur pekerjaan umum di wilayah Kabupaten Lampung Timur tersebut ditampilkan pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.5
Peta Infrastruktur Kabupaten Lampung Timur



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum RI, 2021

Pada bidang penataan ruang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, yang mengamanatkan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Terkait dengan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

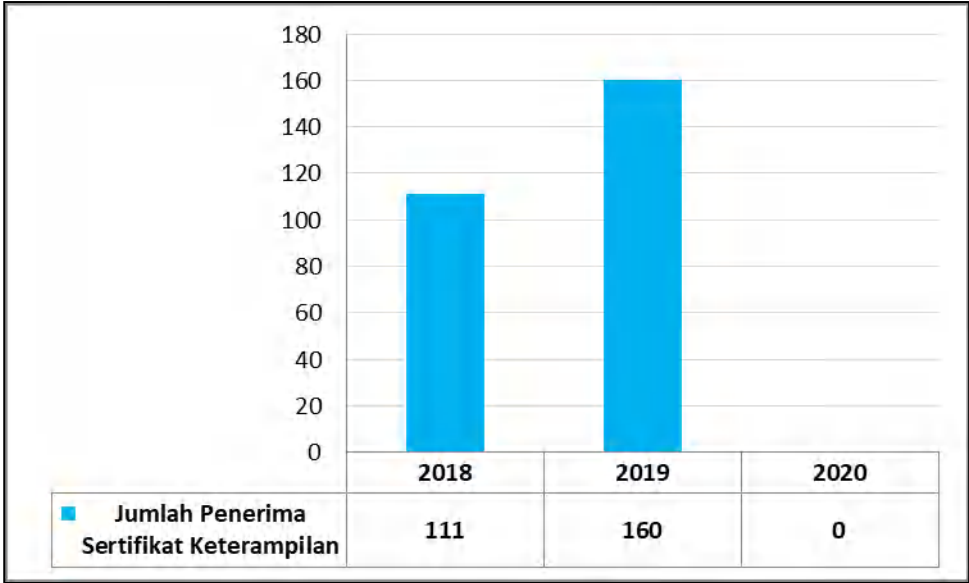
Tabel 2.44
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW, Tahun 2020

URAIAN	CAPAIAN	TARGET RPJMD	%
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	54,84	60	91,40

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2021

Selanjutnya, terkait dengan tenaga kerja sektor konstruksi yang telah menerima sertifikat keterampilan hingga Tahun 2020 mencapai 271 orang, dimana pelatihan keterampilan pada Tahun 2020 ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19. Untuk kebutuhan jumlah Kebutuhan Tenaga Operator dan Teknis/analis di setiap diproyeksikan sebanyak 6.000 orang dengan asumsi 25 orang tenaga operator dan teknis bersertifikat di setiap desa, sehingga masih mengalami kekurangan sebanyak 5.729 orang. Perkembangan jumlah tenaga kerja sektor konstruksi tersertifikasi ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 2.30
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Konstruksi Tersertifikasi



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2021

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan status kepemilikan bangunan rumah tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, persentase rumah tangga berdasarkan status kepemilikan bangunan ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.45
Persentase rumah tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal
Tahun 2020

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan	
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri*
Jenis Kelamin KRT		
Laki-laki	92,00	8,00
Perempuan	87,27	NA
Kuintil Pengeluaran		
40 persen Terbawah	91,61	8,39
40 Persen tengah	91,06	8,94
20 Persen Teratas	91,45	8,55^
Pendidikan Tertinggi KRT		
SD ke bawah	94,37	5,63
SMP ke atas	87,60	12,40^
Lampung Timur	91,35	8,65
*) Termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat, dll		
^) Nilai ini mempunyai nilai RSE antara 25% sampai 50%		

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan dari rumah tinggal tersebut. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri.

Sumber hidup utama kehidupan makhluk hidup adalah air. Dalam semua aktivitasnya, manusia membutuhkan air baik untuk minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Dewasa ini, masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya penyediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan air minum.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Keberadaan fasilitas air minum di Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan sudah relatif baik karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki fasilitas air minum. Jenis air minum yang dianggap higienis atau air bersih yang aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar kesehatan adalah jenis air kemasan, air leding, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Persentase rumah tangga yang sumber air utama untuk memasak/mandi/cuci, dan lain-lain sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.46
 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll
 Tahun 2020

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk Memasak/ Mandi/ Cuci/dll					
	Air Kemasan/ Isi ulang	Leding	Sumur bor/ Pompa	Sumur/ Mata air terlindung	Sumur/ Mata air tidak terlindung	Lainnya**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin KRT						
Laki-laki	NA	NA	31,99	46,69	19,97	NA
Perempuan	NA	NA	38,03	38,53	22,90	NA
Kuintil Pengeluaran						
40 persen Terbawah	NA	NA	26,43	47,81	24,01	NA
40 Persen tengah	NA	NA	35,02	44,58	19,10	NA
20 Persen Teratas	NA	NA	38,70	43,91	17,07	NA
Pendidikan Tertinggi KRT						
SD ke bawah	NA	NA	31,64	43,37	23,46	NA
SMP ke atas	NA	NA	34,28	48,29	16,55	NA
Lampung Timur	NA	NA	32,82	45,57	20,37	NA
Keterangan :	• angka ini mempunyai nilai RSE antara 25% dengan 50% • Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan,dll.					

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2020

Sumber air bersih bagi penduduk Lampung Timur, menurut sumber air bersih yang dikonsumsi oleh penduduk ada lima, yaitu: sumur pompa, sumur gali, mata air, air sungai, dan PDAM Way Guruh. Sumber air yang dipergunakan adalah air bawah tanah (ABT), air tanah dalam (ATD), dan pengolahan air sungai. Penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Timur yang dikelola oleh PDAM Way Guruh tersebar di 14 unit pengelolaan dengan jumlah pelanggan sebanyak 2.617. Jumlah pelanggan dan banyaknya air bersih yang disalurkan di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.47
Jumlah Pelanggan dan Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan
di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2020

	Kecamatan	Pelanggan	Air yang Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Metro Kibang	-	-	-
2	Batanghari	-	-	-
3	Sekampung	-	-	-
4	Marga Tiga	-	-	-
5	Sekampung Udik	128	12.157	50.068.250
6	Jabung	-	-	-
7	Pasir Sakti	-	-	-
8	Waway Karya	-	-	-
9	Marga Sekampung	-	-	-
10	Labuhan Maringgai	381	75.559	306.690.750
11	Mataram Baru	-	-	-
12	Bandar Sribhawono	2.108	330.792	1.364.946.625
13	Melinting	-	-	-
14	Gunung Pelindung	-	-	-
15	Way Jepara	-	-	-
16	Braja Selebah	-	-	-
17	Labuhan Ratu	-	-	-
18	Sukadana	-	-	-
19	Bumi Agung	-	-	-
20	Batanghari Nuban	-	-	-
21	Pekalongan	-	-	-
22	Raman Utara	-	-	-
23	Purbolinggo	-	-	-
24	Way Bungur	-	-	-
Lampung Timur		2.617	418.508	1.721.705.625

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2020

Kondisi perumahan yang higienis secara langsung juga menggambarkan kondisi kesehatan penghuninya. Perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan juga dapat tercermin dari sanitasi rumah yang baik yang salah satunya dapat dilihat dari keberadaan fasilitas buang air besar. Fasilitas buang air yang dianggap baik adalah jika fasilitas yang digunakan masuk dalam kategori digunakan sendiri atau bersama, dan jenis pembuangan akhirnya adalah tangki septik.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan.

Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri. Sebagian rumah tangga yang ada

di Kabupaten Lampung Timur memiliki fasilitas tempat buang air besar yang baik, sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.48
Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Tahun 2015-2020

Karakteristik	Fasilitas Tempat BAB					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sendiri	89,24	86,70	91,93	91,39	93,19	94,15
Lainnya	10,76	13,30	8,07	8,61	6,81	5,85
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan jenis kloset yang digunakan ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.49
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan
Tahun 2015-2020

Karakteristik	Jenis Kloset					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leher Angsa	75,46	81,43	80,74	91,39	90,17	96,47
Lainnya	24,54	18,57	19,26	8,61	9,83	3,53
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Pada Tabel di atas, masih terdapat 3,53 persen rumah tangga yang masih menggunakan WC cemplung yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya, ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.50
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan
Rumah Tangga di Provinsi Lampung Tahun 2020

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Leher Angsa Swan Trine	Plengsengan dengan Tutup, Plengsengan Tanpa Tutup Flushing to Pit Latrine with Slab, Flushing to Pit Latrine	Cemplung/Cubluk Plunged Hole	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	86,05	1,56	12,39	100,00
Tanggamus	94,20	3,38	2,42	100,00
Lampung Selatan	97,04	1,31	1,65	100,00
Lampung Timur	96,47	0,00	3,53	100,00
Lampung Tengah	90,24	0,42	9,34	100,00
Lampung Utara	89,62	2,31	8,07	100,00
Way Kanan	86,37	2,27	11,36	100,00
Tulang Bawang	85,77	0,79	13,44	100,00
Pesawaran	93,26	3,24	3,50	100,00
Pringsewu	98,67	0,23	1,10	100,00
Mesuji	80,12	2,25	17,63	100,00
Tulang Bawang Barat	88,39	2,41	9,20	100,00
Pesisir Barat	80,43	5,39	14,19	100,00
Bandar Lampung	99,16	0,39	0,45	100,00
Metro	99,60	0,40	0,00	100,00
Lampung	92,79	1,27	5,94	100,00

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Selanjutnya, terkait dengan karakteristik dan tempat pembuangan akhir tinja ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.51
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2015-2019

Karakteristik	Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tangki Septik/IPAL/SPAL	22,35	37,96	34,73	33,50	35,82	41,42
Lainnya	77,65	62,04	65,27	66,50	64,18	58,58
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Untuk rumah tangga bersanitasi, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 adalah sebesar 65,9%.

Selanjutnya, merujuk data BPS Kabupaten Lampung Timur, persentase penggunaan sumber penerangan listrik (PLN dan Non PLN) oleh rumah tangga terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2018 yakni telah mencapai 100%, sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2020

Karakteristik	Sumber Utama Penerangan		
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	100,00	0,00	100,00
Perempuan	100,00	0,00	100,00
Kuintil Pengeluaran			
40 persen Terbawah	100,00	0,00	100,00
40 Persen tengah	100,00	0,00	100,00
20 Persen Teratas	100,00	0,00	100,00
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	100,00	0,00	100,00
SMP ke atas	100,00	0,00	100,00
Lampung Timur	100,00	0,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan data pada mencapai 131 hektar atau sebesar 0,024% dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Timur yang mencapai 532.503 hektar, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.53
Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Kecamatan	Desa	Lokasi
Labuhan Maringgai	Margasari	Dsn. 10 dan Dsn. 11
	Muara Gading Mas	Dsn. 5 Kuala Barat 2 dan Dsn. 14 Kampung Sidodadi
	Sukorahayu	Dsn. 1 dan Dsn. 2
Bandar Sribhawono	Sadar Sriwijaya	Dsn. 1
Way Jepara	Labuhan Ratu 2	Dsn. 1
Sukadana	Sukadana	RW 1
	Pasar Sukadana	RW 10
Pekalongan	Pekalongan	Dsn. 4

Sumber : Dinas PUPR Lam Tim, 2020

Lebih lanjut, terkait dengan pemenuhan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman berupa fasilitasi rumah layak huni korban bencana di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.54
Fasilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana Tahun 2020

NO	KEGIATAN	UNIT	HARGA SATUAN (RP. 000)	JUMLAH HARGA (RP. 000)	LOKASI
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	25	30.000	750.000	Tersebar di beberapa kecamatan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	10	50.000	500.000	Tersebar di beberapa kecamatan

Sumber : Dinas PUPR Lam Tim, 2020

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui pembentukan anggota linmas di setiap desa, pembinaan dan pemberdayaan tokoh masyarakat melalui forum kebangsaan, fasilitasi forum kerukunan antar umat beragama, fasilitasi forum Forkopimcam, dan pembinaan terhadap ormas yang dilakukan setiap tahunnya. Meskipun begitu, jumlah kriminalitas kurun waktu lima tahun terakhir terus meningkat, sebagaimana ditampilkan pada Grafik di bawah ini :



Tabel 2.55
Jumlah Kejadian Kriminalitas di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2015-2020 (kasus)

Tingkat Kepolisian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Polres			195	188	249	308
Polsek						
1 Metro Kibang	1	4	4	1	6	6
2 Batanghari	7	17	17	16	14	19
3 Sekampung	22	15	17	9	13	25
4 Marga Tiga	6	13	13	16	9	20
5 Sekampung Udik	8	19	13	16	7	19
6 Jabung	10	9	6	3	6	11
7 Pasir Sakti	27	21	14	23	13	28
8 Waway Karya	5	20	21	7	8	14
9 Marga Sekampung	5	15	8	6	5	10
10 Labuhan Maringgai	20	39	80	31	27	31
11 Mataram Baru	19	17	15	5	4	12
12 Bandar Sribhawono	13	12	9	7	10	18
13 Melinting	5	3	5	3	3	10
14 Gunung Pelindung	14	9	7	4	11	11
15 Way Jepara	51	52	48	47	21	48
16 Braja Selebah	12	11	5	3	2	6
17 Labuhan Ratu	29	55	30	15	23	19
18 Sukadana	30	34	40	20	24	31
19 Bumi Agung	8	7	5	3	4	5
20 Batanghari Nuban	14	18	16	11	23	25
21 Pekalongan	19	24	29	14	11	17
22 Raman Utara	10	8	6	6	7	16
23 Purbolinggo	12	19	16	21	29	13
24 Way Bungur	5	7	10	3	7	13
Lampung Timur	352	448	434	290	287	427

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya, jumlah kejadian kriminalitas yang dilaporkan ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.56
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Kab/Kota Tahun 2017-2019

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan/Crime Total		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	197	198	176
Tanggamus	640	522	563
Lampung Selatan	871	639	650
Lampung Timur	629	456	456
Lampung Tengah	671	703	723
Lampung Utara	741	1 107	1 049
Way Kanan	633	552	478
Tulang Bawang	408	640	690
Pesawaran	298	350	268
Pringsewu	-	-	40
Mesuji	206	175	201
Tulang Bawang Barat	-	-	20
Pesisir Barat	-	-	-
Bandar Lampung	3 181	3 165	3 087
Metro	451	487	528
Lampung	8 926	8 994	8 929

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan resiko penduduk terjadinya tindak pidana per 100.000 penduduk menurut tingkat kepolisian di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.57
Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.00 Penduduk Menurut Tingkat
Kepolisian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018-2020

Tingkat Kepolisian Level of Police		2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)
Polres/Resor Police Lampung Timur		...	...	...
Polsek/Sector Police:				
1	Metro Kibang	4	17	24
2	Batanghari	27	22	30
3	Sekampung	14	19	38
4	Marga Tiga	35	15	42
5	Sekampung Udik	22	10	25
6	Jabung	6	12	20
7	Pasir Sakti	62	30	72
8	Waway Karya	21	21	44
9	Marga Sekampung	23	19	37
10	Labuhan Maringgai	43	36	41
11	Mataram Baru	18	14	40
12	Bandar Sribhawono	14	20	35
13	Melinting	12	12	38
14	Gunung Pelindung	19	46	50
15	Way Jepara	84	36	81
16	Braja Selehah	13	4	24
17	Labuhan Ratu	33	31	40
18	Sukadana	29	26	43
19	Bumi Agung	17	22	27
20	Batanghari Nuban	25	48	54
21	Pekalongan	28	14	33
22	Raman Utara	16	19	41
23	Purbolinggo	48	67	28
24	Way Bungur	12	21	51

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Selanjutnya terkait dengan persentase penyelesaian tindak pidana menurut tingkat kepolisian kurun waktu Tahun 2018-2020 ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.58
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018-2020

Tingkat Kepolisian Level of Police		2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)
Polres/Resor Police Lampung Timur		70	42	69
Polsek/Sector Police:				
1	Metro Kibang	200	25	33
2	Batanghari	94	85	79
3	Sekampung	67	75	28
4	Marga Tiga	31	14	45
5	Sekampung Udik	69	129	63
6	Jabung	167	117	100
7	Pasir Sakti	100	173	17
8	Waway Karya	71	57	64
9	Marga Sekampung	183	100	30
10	Labuhan Maringgai	65	73	68
11	Mataram Baru	120	125	50
12	Bandar Sribhawono	171	190	94
13	Melinting	100	100	160
14	Gunung Pelindung	175	70	136
15	Way Jepara	53	95	71
16	Braja Selehah	33	100	133
17	Labuhan Ratu	67	93	53
18	Sukadana	75	44	35
19	Bumi Agung	100	75	20
20	Batanghari Nuban	155	76	72
21	Pekalongan	164	129	71
22	Raman Utara	200	100	94
23	Purbolinggo	48	48	108
24	Way Bungur	33	60	46

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Untuk jumlah gangguan yang terbesar berdasarkan data pada Tahun 2020 adalah kasus pencurian berat yaitu sebanyak 224 kasus, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.59
Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurut Jenis Kasus
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018-2020

Jenis Kasus <i>Kinds of Cases</i>		2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Pembunuhan/ <i>Killing</i>	4	3	3
2	Penganiayaan Berat <i>Hard Mistreatment</i>	1	3	2
3	Penculikan/ <i>Abduction</i>	-	-	-
4	Pencurian dengan Kekerasan <i>Hard Thieving</i>	42	35	50
5	Pencurian berat/ <i>Hard Thieving</i>	146	144	224
6	Pencurian Kendaraan Bermotor <i>Motorized Vehicle Thieving</i>	14	13	57
7	Perkosaan/ <i>Violation</i>	-	2	3
8	Pembakaran/Kebakaran <i>Inceneration/Conflagration</i>	-	-	-
9	Senjata Api/Bahan Peledak <i>Firearms/Explosives</i>	5	2	2
10	Pemerasan/ <i>Pressing</i>	3	2	8
11	Narkotika dan Obat-Obatan <i>Narcotics and Drugs</i>	115	106	136
12	Penyelundupan/ <i>Smuggling</i>	-	-	-
13	Perjudian/ <i>Gambling</i>	10	5	16
14	Pencurian Kayu/ <i>Illegal Logging</i>	-	-	1
15	Kebakaran Hutan/ <i>Slash and Burn</i>	-	20	-
16	Uang Palsu/ <i>Counterfit Money</i>	-	2	1
17	Lain-Lain/ <i>Others</i>	138	199	222
Jumlah/Total		478	536	725

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait upaya penegakan perda dan perbup, berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja ditampilkan pada grafik berikut ini:

Grafik 2.30
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Penegakan perda dan perbup yang dilakukan tersebut, berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.

Dalam penegakan perda dan perbup dilaksanakan oleh perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait dengan jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2020 yang berstatus ASN terdiri dari 54 pegawai laki-laki dan 5 pegawai perempuan, dengan pendidikan yang ditamatkan SLTP 1 orang, SMA 34 orang, Sarjana/Magister/Doktoral 24 orang. Terkait dengan golongan ruang terdiri dari Golongan II 34 orang, Golongan III 20 orang, dan Golongan IV 5 orang. Untuk jabatan struktural terdiri dari Eselon II 1 jabatan, Eselon III 5 jabatan, dan Eselon IV 13 jabatan. Dalam menjalankan tugasnya para ASN tersebut dibantu oleh 391 tenaga kontrak Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya, pada sub bidang penanggulangan bencana, kurun waktu empat tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur terjadi kejadian bencana yang fluktuatif, sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.60
Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2019

No	Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019
1	Kebakaran Rumah	4	5	7	6
2	Kebakaran Hutan/Lahan				5
3	Rumah Tersambar Petir			1	
4	Orang Tersambar Petir			1	1
5	Angin Puting Beliung	12	14	1	
6	Banjir	2	17	10	
7	Pohon Tumbang				1
8	Tenggelam di Laut				1
9	Tenggelam di Danau				1
JUMLAH		18	36	20	15

Sumber : BPBD Kabupaten Lampung Timur, 2020

Tabel 2.61
Rincian Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

No	Tanggal	Nama	Jenis Bencana
		Kecamatan	
1	2	4	5
1	06 Januari 2020	Pasir Sakti	Kebakaran Rumah
2	11 Januari 2020	Way Jepara	Angin Puting Beliung
3	13 Januari 2020	Way Jepara	Banjir
4	13 Januari 2020	Rajabasa	Pohon Tumbang
5	14 Januari 2020	Lab. Maringgai	Orang Tenggelam
6	24 Januari 2020	Sukadana	Banjir
7	24 Januari 2020	Batanghari Nuban	Banjir
8	24 Januari 2020	Way Bungur	Banjir
9	28 Januari 2020	Sekampung	Pohon Tumbang
10	24 Maret 2020	Way Jepara	Kebakaran Pasar
11	08 Mei 2020	Labuhan Ratu	Kebakaran
12	08 Mei 2020	Labuhan Maringgai	Banjir
13	25 Mei 2020	Orang Tenggelam	Purbolinggo
14	04 Juni 2020	Braja Selehah	Angin Puting Beliung
15	04 Juni 2020	Lab. Maringgai	Banjir
16	04 Juni 2020	Lab. Ratu	Orang Tenggelam
17	06 Juli 2020	Labuhan Maringgai	Angin Puting Beliung
18	29 September 2020	Kebakaran	Batanghari
19	02 Desember 2020	Kebakaran	Sribawono
20	03 Desember 2020	Kebakaran Pasar	Way Jepara

Sumber : BPBD Kabupaten Lampung Timur, 2020

6. Sosial

Pada urusan sosial, terdapat 4 program perlindungan sosial bersumber dari APBN yang diterima oleh masyarakat, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintar, Kartu Perlindungan Sosial dan Program Keluarga Harapan, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.62
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima Tahun 2020

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
(1)	(2)
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	25,00
Program Indonesia Pintar (PIP)	12,45
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)*	22,03
Program Keluarga Harapan (PKH)	21,94
*) Menerima KPS/KKS baik yang <i>dapat menunjukkan kartu</i> maupun <i>tidak dapat menunjukkan kartu</i>	

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Selanjutnya, melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, khususnya pada klaster penyediaan jaring pengaman sosial, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 yang bersumber dari dana APBD. Bantuan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 tahap, yang ditujukan bagi masyarakat di 24 kecamatan khususnya masyarakat pra sejahtera yang belum tersentuh bantuan sosial. Diharapkan dengan bantuan sembako ini, masyarakat pra sejahtera yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Lampung Timur dapat terbantu. Rincian jumlah penerima per kecamatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.63
Jumlah Penerima Bantuan Sembako Masyarakat Terdampak COVID-19
per Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN	
		TAHAP 1	TAHAP 2
1	Kecamatan Metro Kibang	3.599	3.543
2	Kecamatan Batanghari	3.664	2.367
3	Kecamatan Sekampung	2.876	2.876
4	Kecamatan Pekalongan	2.939	3.125
5	Kecamatan Purbolinggo	4.133	4.133
6	Kecamatan Raman Utara	3.095	3.051
7	Kecamatan Way Bungur	1.480	1.480
8	Kecamatan Bumi Agung	2.361	2.361
9	Kecamatan Sukadana	6.289	5.914
10	Kecamatan Marga Tiga	3.002	3.002
11	Kecamatan Sekampung Udik	5.145	4.778
12	Kecamatan Labuhan Ratu	2.535	2.535
13	Kecamatan Way Jepara	2.390	2.060
14	Kecamatan Braja Selehah	1.538	1.432
15	Kecamatan Mataram Baru	1.687	1.484
16	Kecamatan Jabung	7.186	5.639
17	Kecamatan Gunung Pelindung	2.585	2.585
18	Kecamatan Marga Sekampung	1.944	1.933
19	Kecamatan Melinting	2.812	2.789
20	Kecamatan Waway karya	3.245	2.372
21	Kecamatan Bandar Sribhawono	2.327	1.772
22	Kecamatan Labuhan Maringgai	6.712	6.712
23	Kecamatan Batanghari Nuban	3.223	3.223
24	Kecamatan Pasir Sakti	5.372	4.999
TOTAL		82.139	76.165

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi belum tersedia di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga layanan sosial sementara dilaksanakan diluar panti, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.64
Pelayanan Sosial di Luar Panti Kabupaten Lampung Timur

No	Indikator SPM	2017		2018		2019		2020	
		Total	Ditangani	Total	Ditangani	Total	Ditangani	Total	Ditangani
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	2.189	15	2.189	-	2.189	50	3.335	626
2	Jumlah anak terlantar di luar panti sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti sosial	-	-	-	-	2	2	2	2

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam pembangunan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi berkaitan dengan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam rangka memperoleh pendapatan, yang secara langsung berhubungan dengan daya beli untuk dapat hidup layak. Sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tenaga kerja dituntut memiliki kualitas tertentu untuk menjamin pekerja mendapatkan perlindungan dan penghasilan yang memadai untuk dapat hidup layak. Batasan umur untuk penduduk usia kerja berbeda-beda, ada yang menggunakan usia 10 Tahun keatas, 15 Tahun keatas, dan 15-64 Tahun, dalam dokumen ini digunakan batasan 15 Tahun keatas. Pemilihan ini didasarkan pada kebijakan *Internasional Labour Organization* (ILO) dalam menentukan batasan usia kerja dan kondisi empiris yang ada.

Di Kabupaten Lampung Timur, penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2020, jumlah angkatan kerja Kabupaten Lampung Timur mencapai 578.338 jiwa, dan bukan angkatan kerja mencapai 221.390 jiwa. Untuk angkatan kerja yang bekerja mencapai 563.065 jiwa dan pengangguran terbuka sebesar 15.273 jiwa. Untuk bukan angkatan kerja yang beraktivitas sekolah sebesar 45.704 jiwa, mengurus rumah tangga 145.424 jiwa dan lainnya sebesar 30.262 jiwa.

Tabel 2.65
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Karakteristik,
Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 2020

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	358.441	219.897	578.338
Bekerja	350.497	212.568	563.065
Pengangguran terbuka	7.944	7.329	15.273
Bukan Angkatan Kerja	49.854	171.536	221.390
Sekolah/	21.578	24.126	45.704
Mengggurus Rumah Tangga	10.766	134.658	145.424
Lainnya	17.510	12.752	30.262
Jumlah	408.295	391.433	799.728
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	87,79	56,18	72,32
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,22	3,33	2,64

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Secara umum pada Tahun 2020 terjadi kenaikan angkatan kerja, dan pengurangan bukan angkatan kerja, jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Untuk tingkat pengangguran mengalami penurunan dari sebesar 2,89% menjadi 2,64% pada Tahun 2020. Sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 72,32% pada Tahun 2020, atau meningkat dibandingkan capaian Tahun 2019 yang mencapai 68,78%.

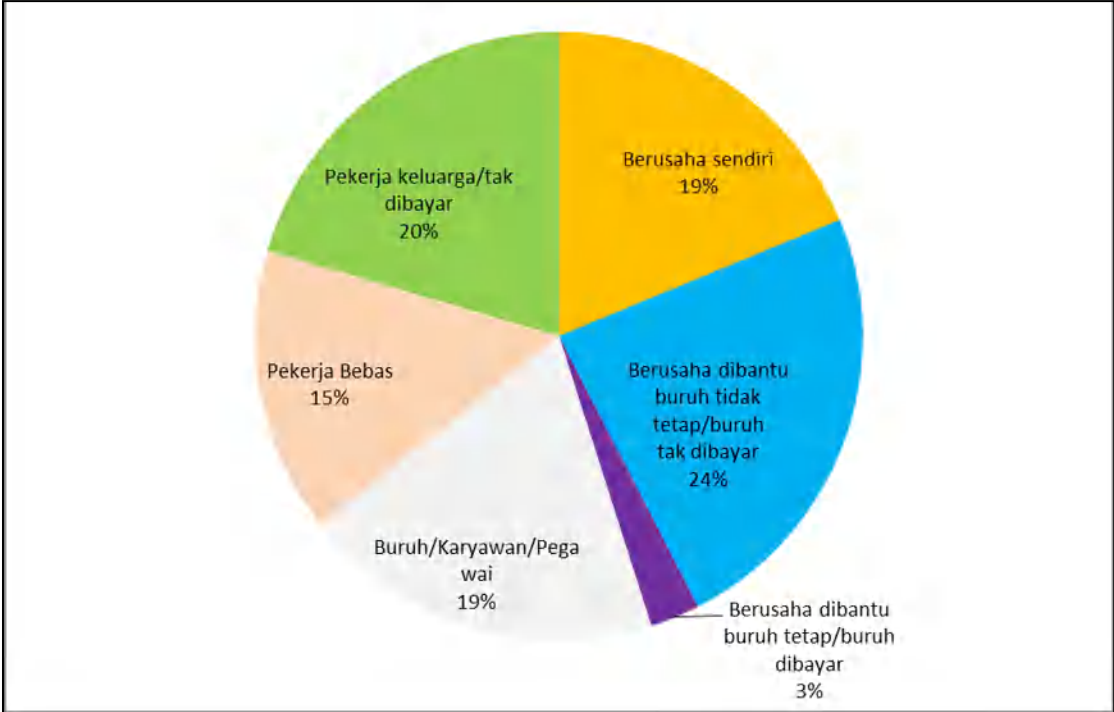
Tabel 2.66
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumah
Berusaha sendiri	70.731	34.882	105.613
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	98.934	34.352	133.286
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	10.516	4.421	14.937
Buruh/Karyawan/Pegawai	67.202	41.466	108.668
Pekerja Bebas	71.209	14.158	85.367
Pekerja keluarga/tak dibayar	31.905	83.289	115.194
Jumlah	350.497	212.568	563.065

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2020

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa status pekerjaan utama tertinggi adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan status pekerjaan utama paling kecil adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Untuk lebih jelasnya ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 2.31
Persentase Status Pekerjaan Utama Masyarakat



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan lapangan pekerjaan utama, pada Tahun 2020 lapangan pekerjaan utama masyarakat adalah di sektor pertanian, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.67
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019-2020

Lapangan Pekerjaan Utama	2019			2020			
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	%
Pertanian	176.025	64.947	240.972	185.616	85.018	270.634	48,06
Industri	69.270	25.018	94.288	72.113	24.121	96.234	17,09
Jasa	97.059	95.225	192.284	92.768	103.429	196.197	34,84
Jumlah	342.354	185.190	527.544	350.497	212.568	563.065	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Selanjutnya terkait dengan tenaga kerja sektor formal, berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2019 jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif adalah sebanyak 4.084 pekerja, dari jumlah pekerja/buruh yang mencapai 514.297 pekerja atau baru mencapai 0,79 persen, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.68
Jumlah Pekerja Buruh/Pekerja yang Menjadi Peserta Jamsostek

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek	N/A	N/A	1.388	1.013	4.084	N/A
2	Jumlah Pekerja/Buruh	N/A	N/A	484.169	498.466	514.297	N/A
3	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	N/A	N/A	0,29	0,20	0,79	N/A

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur, 2021

Sedangkan untuk jumlah pencari kerja yang ditempatkan mencapai 2.273 pekerja dari jumlah pencari kerja yang mendaftar yang sebanyak 3.738 pekerja atau mencapai 60,80%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.69
Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencari Kerja yang Ditempatkan	9.675	8.838	7.619	8.382	8.761	2.273
2	Pencari Kerja yang Terdaftar	12.220	9.507	9.912	12.786	13.350	3.738
3	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	79,17	92,96	76,87	65,56	65,63	60,81

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur, 2021

2. Pangan

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pangan, pemerintah daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur tentang cadangan pangan pemerintah.

Salah satu instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan di wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah melalui Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP). PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Tabel 2.70
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020

Skor Pola Pangan Harapan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	N/A	N/A	84,9	84,4	84,7	84,7

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lampung Timur, 2021

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan berbagai upaya di bidang ketahanan pangan diantaranya pengembangan sistem tunda jual, pengadaan pengisian gudang pangan pemerintah, penganekaragaman pangan, pengembangan desa mandiri pangan, dan pembangunan lumbung pangan desa. Dimana hingga Tahun 2020 telah tersedia 60 lumbung pangan desa.

Selanjutnya terkait dengan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun pada Tahun 2019 mencapai 262.132.117 kg yang terdiri dari jenis pangan utama padi, jagung, sagu, dan umbi.

3. Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pertanahan yang menyebutkan bahwa ada 9 (sembilan) Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut adalah izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa tanah garapan, ganti rugi, penetapan subyek obyek redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah.

Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan. Berdasarkan data, luas lahan bersertifikat di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 mencapai 1.678.959 meter persegi atau mencapai 82,62%.

Untuk jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan adalah sebanyak 4 kasus pertanahan, atau capaian 100%. Sedangkan untuk penyelesaian izin lokasi pada Tahun 2020 adalah sebanyak 1 bidang dengan capaian 100%.

4. Lingkungan Hidup

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur persentase sungai yang memenuhi baku mutu level B, kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 60% sungai telah memenuhi baku mutu level B.

Selain itu, jumlah volume sampah yang telah ditangani pada Tahun 2019 mencapai 10.915,33 m³, dengan capaian mencapai 83% dari total produksi sampah yang mencapai 13.151 m³.

Untuk jumlah pasar tradisional yang kebersihannya tergolong baik adalah 35 unit pasar, atau mencapai 51,4% dari 68 pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Untuk tempat pembuangan sampah per satuan penduduk yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur daya tampungnya mencapai 9.984m³.

Selanjutnya terkait Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.71
Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur

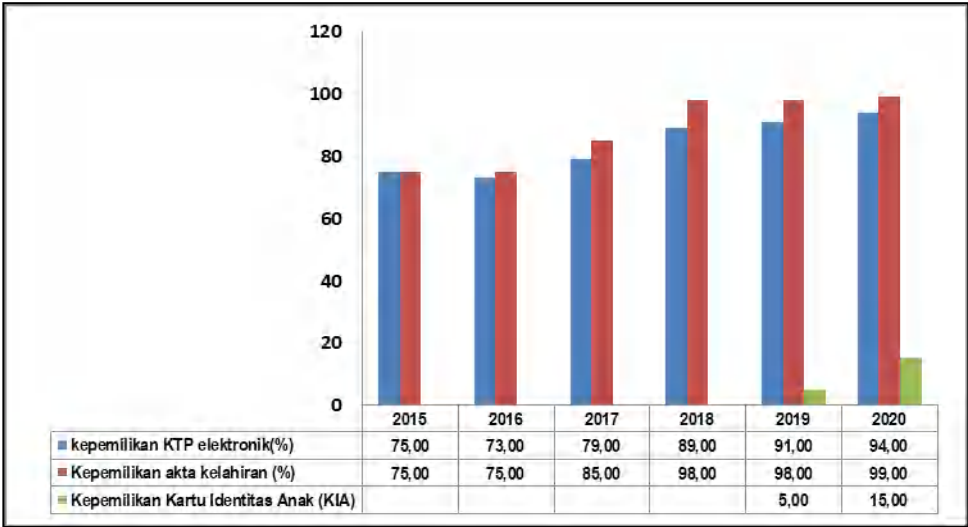
No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	N/A	84,49	86,64
2	Indeks Kualitas Air	N/A	N/A	N/A	64,29	63,33
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Lam Tim, 2021

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, pada Tahun 2020 persentase penduduk yang memiliki KTP dan akta kelahiran telah mencapai 94% dan 99%, sebagaimana ditampilkan pada Grafik di bawah ini

Grafik 2.32
Capaian Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2019



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam rangka percepatan pembangunan desa, pada Tahun 2021 total belanja transfer ke desa kepada 264 desa melalui APBD yang berupa belanja bagi hasil pajak dan retribusi serta belanja transfer (dana desa dan alokasi dana desa) telah mencapai Rp.457,8 milyar.

Terkait dengan Indeks Desa Membangun, pada Tahun 2021 Status Desa Membangun Kabupaten Lampung Timur, ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.72
Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
1	Bandar Sribhawono	-	3	4	-	-	7
2	Batanghari	-	3	13	1	-	17
3	Batanghari Nuban	-	-	13	-	-	13
4	Braja Selehah	-	2	5	-	-	7
5	Bumi Agung	-	-	5	2	-	7
6	Gunung Pelindung	-	1	3	1	-	5
7	Jabung	-	-	14	1	-	15
8	Labuhan Maringgai	-	-	10	1	-	11
9	Labuhan Ratu	-	-	11	-	-	11
10	Marga Sekampung	-	2	3	3	-	8
11	Marga Tiga	-	4	9	-	-	13
12	Mataram Baru	-	1	6	-	-	7
13	Melinting	-	-	6	-	-	6
14	Metro Kibang	-	-	7	-	-	7
15	Pasir Sakti	-	-	8	-	-	8
16	Pekalongan	-	5	7	-	-	12
17	Purbolinggo	-	4	8	-	-	12
18	Raman Utara	-	-	11	-	-	11
19	Sekampung	-	2	15	-	-	17
20	Sekampung Udik	-	4	10	1	-	15
21	Sukadana	-	1	15	4	-	20
22	Waway Karya	-	3	6	2	-	11
23	Way Bungur	-	3	5	-	-	8
24	Way Jepara	-	-	10	6	-	16
Jumlah		-	38	204	22	-	264

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Status Indeks Desa Membangun di atas merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Berdasarkan Keputusan tersebut, jumlah desa tertinggal pada Tahun 2021 mencapai 22 desa atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai 31 desa.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data, Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 mencapai 199.182 pasangan. Dari jumlah pasangan PUS tersebut, jumlah peserta KB aktif baru mencapai 14,23%. Jumlah PUS dan jumlah peserta KB aktif Tahun 2020 ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.73
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Tahun 2020

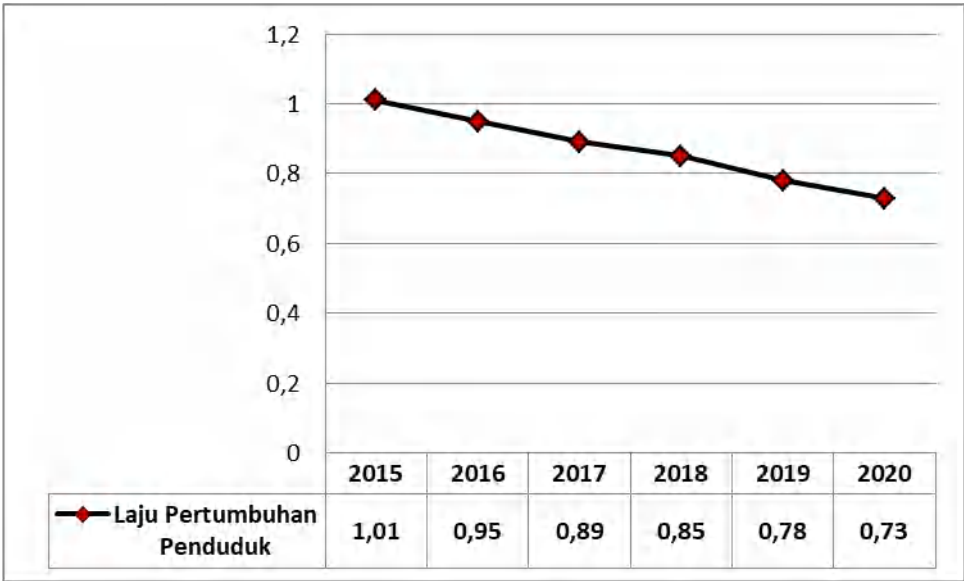
Kecamatan Subdistrict		Jumlah PUS Couples of Reproductive Age	Peserta KB Aktif Family Planning Participants			
			Intra Uterine Device (IUD)	Metode Operasi Wanita (MOW) Tubectomy	Metode Operasi Pria (MOP) Vasectomy	Kondom Condom
			(3)	(4)	(5)	(6)
1	Metro Kibang	4 852	311	100	11	162
2	Batanghari	10 649	317	372	37	234
3	Sekampung	12 702	1825	171	97	59
4	Marga Tiga	8 769	372	110	3	29
5	Sekampung Udik	15 574	2 172	217	110	157
6	Jabung	9 738	1 207	97	84	293
7	Pasir Sakti	8 447	558	45	45	227
8	Waway Karya	7 840	332	20	5	54
9	Marga Sekampung	8 692	654	209	50	20
10	Labuhan Maringgai	11 379	2 091	40	244	25
11	Mataram Baru	6 508	701	67	23	367
12	Bandar Sribhawono	8 387	1 141	102	116	123
13	Melinting	5 793	795	30	35	138
14	Gunung Pelindung	5 080	791	33	137	72
15	Way Jepara	9 969	989	339	168	476
16	Braja Selebah	5 088	660	45	44	40
17	Labuhan Ratu	10 411	769	116	114	35
18	Sukadana	11 371	945	120	86	91
19	Bumi Agung	3 470	503	51	45	39
20	Batanghari Nuban	8 537	1 084	123	25	40
21	Pekalongan	6 140	352	42	56	29
22	Raman Utara	7 587	945	173	110	88
23	Purbolinggo	7 089	654	169	222	21
24	Way Bungur	5 110	492	19	10	194
Lampung Timur		199 182	20 660	2 810	1 877	3 013

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Untuk rasio petugas lapangan KB/penyuluh (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan baru mencapai 4,71%, dimana jumlah PLKB/PKB hanya berjumlah sebanyak 56 orang untuk melayani 264 desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Terkait dengan laju pertumbuhan penduduk kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata sebesar 0,87 persen, dengan kecenderungan menurun, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Grafik 2.33
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Untuk laju pertumbuhan penduduk kab/kota di Provinsi Lampung kurun waktu lima tahun sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.74
Laju Pertumbuhan Penduduk Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2020

Wilayah	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	0,94	0,88	0,88	0,81	0,71	0,68
Tanggamus	1,19	1,13	1,08	1,02	0,96	0,90
Lampung Selatan	1,11	1,06	1,01	0,96	0,90	0,84
Lampung Timur	1,01	0,95	0,89	0,85	0,78	0,73
Lampung Tengah	0,97	0,92	0,88	0,80	0,77	0,71
Lampung Utara	0,56	0,53	0,46	0,42	0,36	0,31
Way Kanan	1,13	1,07	1,00	0,95	0,90	0,85
Tulang Bawang	1,37	1,31	1,24	1,20	1,15	1,11
Pesawaran	1,16	1,13	1,07	1,00	0,95	0,91
Pringsewu	0,99	0,93	0,87	0,84	0,75	0,73
Mesuji	0,72	0,63	0,60	0,54	0,52	0,40
Tulang Bawang Barat	0,91	0,85	0,82	0,76	0,74	0,62
Pesisir Barat	1,00	0,93	0,82	0,80	0,75	0,64
Bandar Lampung	1,94	1,88	1,82	1,76	1,71	1,66
Metro	1,55	1,46	1,40	1,36	1,34	1,25
Provinsi Lampung	1,13	1,08	1,03	0,98	0,92	0,87

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 mencapai 88,83. Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender kurun waktu lima tahun terakhir ditampilkan pada Grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Sedangkan untuk Indeks Pemberdayaan Gender, berdasarkan data BPS RI, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 mencapai 63,13, semakin membaik dibanding capaian Tahun 2019 yang sebesar 63,42.

Lebih lanjut, pada sub bidang urusan perlindungan anak, sejak Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah Desa Layak Anak, hingga Tahun 2020 telah terbentuk 52 Desa Ramah Anak, sebagaimana ditampilkan pada Grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

9. Perhubungan

Berdasarkan data Polres Lampung Timur, jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan kepolisian sektor pada Tahun 2015-2020, sebagaimana ditampilkan pada Tabel dan Grafik di bawah ini:

Tabel 2.75
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Sektor, 2015-2020

Kepolisian Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Metro Kibang	0	4	0	1	1	4
Batanghari	2	6	5	8	8	11
Sekampung	0	2	5	4	4	10
Marga Tiga	0	7	4	5	4	5
Sekampung Udik	0	4	3	18	13	17
Jabung	0	2	2	3	3	5
Pasir sakti	9	0	6	5	6	11
Waway Karya	0	7	0	1	0	1
Marga Sekampung	0	0	0	1	0	1
labuhan Maringgai	12	18	16	14	16	11
Mataram Baru	0	2	15	7	12	8
Bandar Sribawono	0	0	8	7	4	7
Melinting	6	14	0	0	0	0
Gunung Pelindung	0	2	1	2	2	0
Way Jepara	0	15	9	16	15	14
Braja Selehah	3	1	1	1	0	1
Labuhan Ratu	0	12	9	13	14	17
Sukadana	0	16	17	22	25	22
Bumi Agung	0	4	5	2	4	0
Batanghari Nuban	0	9	11	12	19	9
Pekalongan	9	11	15	23	18	12
Raman Utara	0	2	3	1	1	3
Purbolinggo	5	3	7	7	9	4
Way Bungur	4	3	2	6	5	4
JUMLAH	50	144	144	179	183	177

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Grafik 2.36
Perekembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Sektor, 2015-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

10. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi guna operasionalisasi e-Gov dan publikasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah tersedia selama ini, yaitu *www.lampungtimurkab.go.id* yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten Lampung Timur dapat secara mudah diakses.

Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga telah dilaksanakan oleh Pemkab Lampung Timur melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur).

Untuk prasarana komunikasi, khususnya ketersediaan BTS di wilayah Kabupaten Lampung Timur, digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.76
Jumlah *Base Transceiver Station* per Kecamatan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>		Penyedia Layanan/ <i>Provider</i>					
		Telkom	Indosat	XL	TBG	STI	STP
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Metro Kibang	1	-	-	2	-	-
2	Batanghari	1	-	-	3	-	4
3	Sekampung	3	2	1	2	-	-
4	Marga Tiga	3	1	-	3	-	1
5	Sekampung Udik	2	1	1	5	-	2
6	Jabung	4	-	-	1	-	3
7	Pasir Sakti	4	2	-	4	-	1
8	Waway Karya	3	-	-	-	1	2
9	Marga Sekampung	1	-	-	-	-	-
10	Labuhan Maringgai	5	2	-	2	-	3
11	Mataram Baru	1	-	1	1	-	-
12	Bandar Sribhawono	4	1	-	7	1	1
13	Melinting	3	-	-	1	-	2
14	Gunung Pelindung	2	-	-	-	-	2
15	Way Jepara	2	2	-	2	1	1
16	Braja Selebah	1	-	-	1	-	1
17	Labuhan Ratu	4	1	-	2	-	2
18	Sukadana	4	2	-	1	1	-
19	Bumi Agung	1	-	-	2	-	-
20	Batanghari Nuban	-	1	-	2	-	-
21	Pekalongan	2	1	-	3	-	-
22	Raman Utara	2	-	-	2	-	2
23	Purbolinggo	2	-	-	3	-	1
24	Way Bungur	1	-	-	2	-	-
Jumlah/Total		56	16	3	51	4	28

Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2020

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

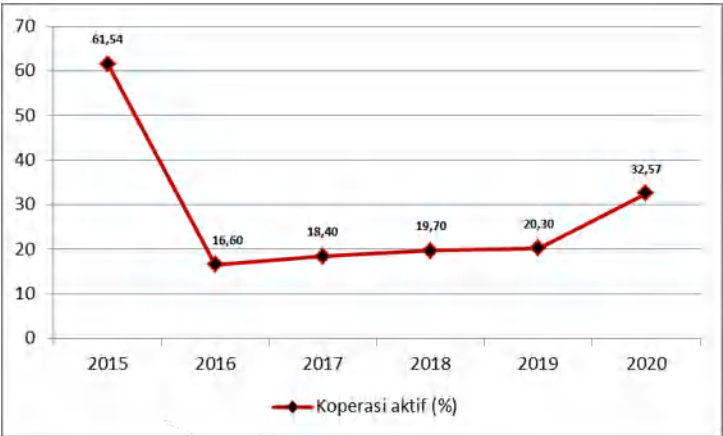
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur, jumlah koperasi berbadan hukum pada Tahun 2020 mencapai 644 koperasi, dengan persentase koperasi aktif mencapai 32,57%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel dan Grafik di bawah ini:

Tabel 2.77
Perkembangan Jumlah Koperasi Berbadan Hukum 2015-2020

No	Kecamatan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Metro Kibang	15	16	17	15	15	15
2	Kecamatan Batanghari	40	42	41	42	42	42
3	Kecamatan Sekampung	45	47	52	50	42	41
4	Kecamatan Pekalongan	40	39	42	41	41	42
5	Kecamatan Purbolinggo	45	49	48	49	48	49
6	Kecamatan Raman Utara	19	19	20	20	20	20
7	Kecamatan Way Bungur	10	13	14	14	14	14
8	Kecamatan Bumi Agung	5	6	7	6	7	6
9	Kecamatan Sukadana	40	41	42	42	39	38
10	Kecamatan Marga Tiga	17	15	16	17	16	16
11	Kecamatan Sekampung Udik	50	54	60	62	59	54
12	Kecamatan Labuhan Ratu	29	30	31	30	30	30
13	Kecamatan Way Jepara	48	49	47	49	48	49
14	Kecamatan Braja Selehah	10	12	13	14	14	15
15	Kecamatan Mataram Baru	9	11	12	10	10	10
16	Kecamatan Jabung	30	35	36	36	36	36
17	Kecamatan Gunung Pelindung	9	10	11	10	12	10
18	Kecamatan Marga Sekampung	10	14	13	15	14	16
19	Kecamatan Melinting	4	6	5	6	6	6
20	Kecamatan Waway Karya	10	11	12	12	12	12
21	Kecamatan Bandar Sribhawono	20	21	20	22	21	22
22	Kecamatan Labuhan Maringgai	48	45	46	48	47	48
23	Kecamatan Batanghari Nuban	20	21	22	21	21	21
24	Kecamatan Pasir Sakti	30	31	32	32	32	32
TOTAL		603	637	659	663	646	644

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Lam Tim, 2021

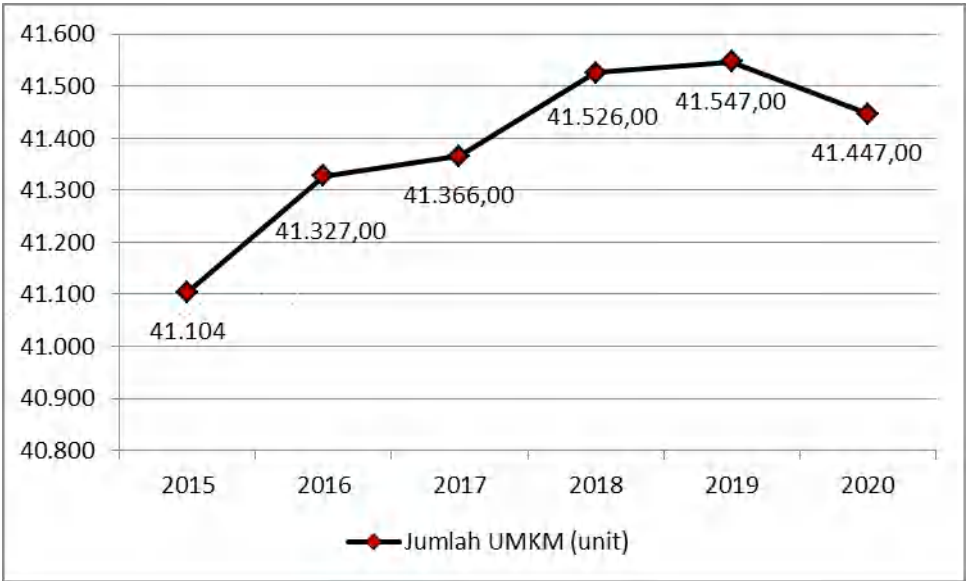
Grafik 2.37
Perkembangan Koperasi Aktif Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Lam Tim, 2021

Selanjutnya, pada Tahun 2020 jumlah UMKM mencapai 41.447 UMKM atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019, sebagaimana ditampilkan pada Grafik di bawah ini

Grafik 2.38
Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Lam Tim, 2021

Terkait dengan sebaran UMKM, kecamatan Labuhan Maringgai adalah kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak di Tahun 2020 yaitu mencapai 4.083 unit, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.78
Jumlah UMKM per Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM			
		USAHA MIKRO	USAHA KECIL	USAHA MENENGAH	JUMLAH
1	SUKADANA	2.366	459	7	2.832
2	JABUNG	565	282	6	853
3	LABUHAN MARINGGAI	3.805	271	7	4.083
4	WAY JEPARA	904	274	17	1.195
5	SEKAMPUNG	2.082	577	10	2.669
6	PEKALONGAN	1.076	422	9	1.507
7	METRO KIBANG	1.360	153	2	1.515
8	PURBOLINGGO	3.035	281	3	3.319
9	RAMAN UTARA	1.215	324	4	1.543
10	BATANGHARI	3.202	473	2	3.677
11	MARGA TIGA	2.058	325	6	2.389
12	SEKAMPUNG UDIK	3.415	519	11	3.945
13	WAWAY KARYA	683	250	2	935
14	BANDAR SRIBHAWONO	1.822	342	16	2.180
15	BATANGHARI NUBAN	847	231	5	1.083
16	BRAJA SELEBAH	850	170	1	1.021
17	BUMI AGUNG	445	148	4	597
18	GUNUNG PELINDUNG	648	77	1	726
19	LABUHAN RATU	668	124	8	800
20	MATARAM BARU	339	161	7	507
21	MELINTING	349	89		438
22	WAY BUNGUR	1.014	150	4	1.168
23	PASIR SAKTI	1.500	236	2	1.738
24	MARGA SEKAMPUNG	412	312	3	727
JUMLAH		34.660	6.650	137	41.447

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Lam Tim, 2021

12. Penanaman Modal

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, realisasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 mencapai Rp.223,6 milyar atau meningkat lebih dari 7,8% jika dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar Rp.207,42 milyar.

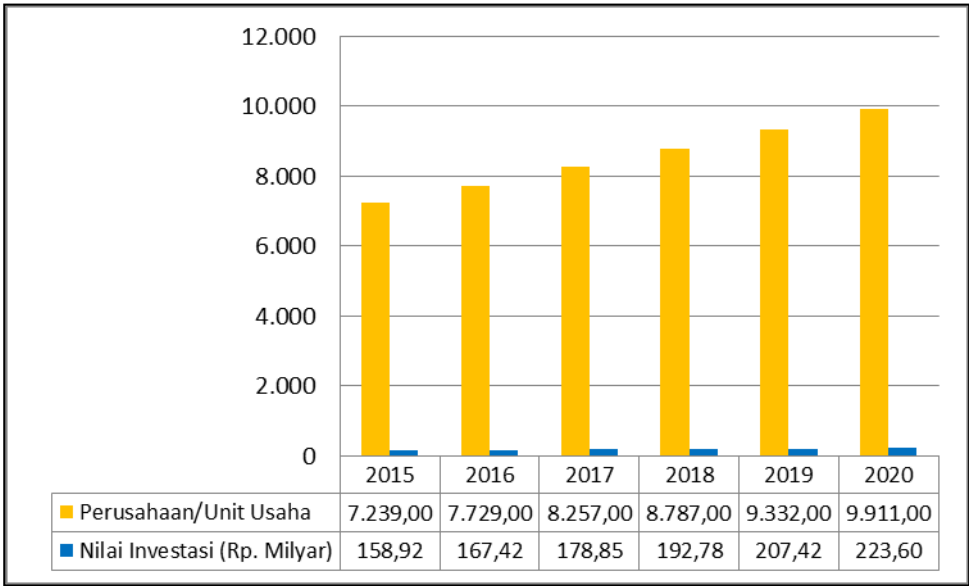
Berdasarkan data BPS, jumlah unit usaha di Kabupaten Lampung Timur mencapai 9.911 unit, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 46.151 tenaga kerja, dengan nilai produksi mencapai Rp.6,2 trilyun, yang tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2.79
Jumlah Unit Usaha dan Nilai Investasi Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perusahaan/Unit Usaha	7.239,00	7.729,00	8.257,00	8.787,00	9.332,00	9.911,00
Nilai Investasi (Rp. Miliar)	158,92	167,42	178,85	192,78	207,42	223,60

Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2021

Grafik 2.39
Perkembangan Jumlah Unit Usaha dan Nilai Investasi Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2020

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Fasilitasi bagi generasi muda untuk mengembangkan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, mengingat penduduk Lampung Timur yang sebagian berusia produktif. Pemuda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara yang memasuki periode penting dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk yang masuk kategori pemuda pada Tahun 2020 sebanyak 265.296 jiwa atau 23,89 persen dari jumlah seluruh penduduk Lampung Timur. Untuk lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 2.80
Jumlah Pemuda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

Kategori Pemuda	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15 - 19	46.159	43.624	89.783
20 - 24	46.335	43.610	89.945
25 - 29	43.364	42.204	85.568
Lampung Timur	135.858	129.438	265.296

Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2020

Untuk organisasi pemuda yang tercatat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 33 organisasi yang tersebar di 24 kecamatan, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.81
Organisasi Kepemudaan Aktif di Kabupaten Lampung Timur

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT SEKRETARIAT
1	Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP ANSOR NU) Kabupaten Lampung Timur	Jl. Khanafiah No. 9 Sukadana Lampung Timur
2	Satuan Koordinasi Cabang Banser Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Lampung Timur	Jl. Khanafiah No.9 Sukadana Lampung Timur
3	Fatayat NU Kabupaten Lampung Timur	Jl. Khanafiah No. 9 Sukadana Lampung Timur
4	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lampung Timur	Jl. Khanafiah No. 9 Sukadana Lampung Timur
5	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Lampung Timur	Jl. Khanafiah No. 9 Sukadana Lampung Timur
6	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Lampung Timur	Jl. Khanafiah No. 9 Sukadana Lampung Timur
7	Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Lampung Timur	Jl. Khanafiah No. 9 Sukadana Lampung Timur
8	DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)	Jl. Kauman No. 01 Margosari Metro Kibang Lampung Tim.
9	Pengurus Daerah Asosiasi Majelis Taklim Indonesia (AMTI)	Jl. Sampoerna Jaya No. 05 Desa Negara Nabung Kec. Sukadana
10	DPK Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Lampung	Dusun IV, Rt 003, Rw 004, Desa Restu Rahayu Kec. Raman Utara
11	Persatuan Pemuda Sukadana Lampung Timur (PEDAS LAMTIM)	Jl. A n Nur Sukadana Kec. Sukadana
12	Laskar Merah Putih	Jl. Kiemas Putra Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana
13	Komite Nasional Pemuda Indonesia Lampung Timur (KNPI)	Jl. Sutrasno Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana
14	Ikatan Mahasiswa Lampung Timur (IKAM LAMTIM)	Jl. Gereja No. 2 Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan
15	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	Dsn Sinar Banten Rt 06, Rw 03, Labuhan Ratu I Way Jepara
16	Nasyi'atul Aisyiyah Kabupaten Lampung Timur	Gedung Dakwah Muhammadiyah Komplek Lapangan Pemda Lamtim Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana
17	Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lampung Timur	Gedung Dakwah Muhammadiyah Komplek Lapangan Pemda Lamtim Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana
18	Pemuda Muhammadiyah Lampung Timur	Gedung Dakwah Muhammadiyah Komplek Lapangan Pemda Lamtim Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana
19	Hizbulwaton (HW) Kabupaten Lampung Timur (Pramuka Muhammadiyah)	Gedung Dakwah Muhammadiyah Komplek Lapangan Pemda Lamtim Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana
20	Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GP3)	Desa Raya Mulyo Asri, Donomulyo, Kec. Bumi Agung
21	Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD)	Jl. Kol. Arifin No. 260 Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana



22	Purna Paskibraka Indonesia (PPI)	Jln. Taman Nasional Way Kambas, Desa Raja Basa Lama Induk Kecamatan Labuhan Ratu
23	Kelompok Pemuda Buay Selagai	Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga
24	Kelompok Pemuda Lebung Mandiri	Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga
25	Forum Pemuda Kreatif	Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari
26	Forum Pemuda Karya Mandiri	Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari
27	Remaja Banjarrejo Club	Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari
28	Kelompok Pemuda Pemudi Jejamo Tuah	Dusun 1 Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung
29	Kelompok Pemuda Sidorejo	Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik
30	Paguyuban Muda Mandiri Tugu Payung	Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo
31	Pemuda Risma Taman Endah	Dusun 4 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo
32	KPPL (Kelompok Pemuda Pemudi Peduli Lingkungan)	Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo
33	Kelompok Pemuda Kecamatan Purbolinggo	Kecamatan Purbolinggo

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lam Tim, 2021

Selanjutnya, pada urusan olahraga, terkait dengan capaian medali pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2017, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-9 dari sebelumnya yang berada di posisi 8, meskipun secara perolehan medali mengalami peningkatan, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.82
Hasil Perolehan Medali Porprov Lampung Tahun 2014 dan 2017

No	Kabupaten/Kota	Porprov VII Tahun 2014			Porprov VIII Tahun 2017		
		Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
1	Bandar Lampung	72	47	66	148	102	94
2	Pesawaran	2	2	9	55	43	69
3	Lampung Selatan	75	69	61	47	57	75
4	Pringsewu	25	19	25	47	40	59
5	Metro	19	20	34	41	58	110
6	Lampung Utara	3	6	19	40	25	44
7	Lampung Barat	28	19	46	27	42	60
8	Tanggamus	5	3	8	19	25	38
9	Lampung Timur	11	15	24	18	18	38
10	Lampung Tengah	14	23	25	16	26	55
11	Way Kanan	4	8	19	11	19	19
12	Tulang Bawang	13	25	47	7	16	23
13	Pesisir Barat	4	8	17	6	5	9
14	Tulang Bawang Barat	6	9	17	4	3	11
15	Mesuji	1	2	4	0	8	12

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lam Tim, 2021

Cabang olahraga prestasi yang memperoleh medali emas pada penyelenggaraan Porprov tersebut terdiri dari cabang olahraga bulutangkis, bola voli, bola voli pasir, renang, panahan, taekwondo dan atletik. Untuk medali perak diraih oleh cabang olahraga gulat, bulu tangkis, bola voli, karate, atletik, sepakbola, futsal, pencak silat dan taekwondo. Sedangkan untuk medali perunggu cabang olahraga gulat, bulu tangkis, tenis lapangan, bola voli, karate, atletik, panahan, pencak silat dan taekwondo.

Dalam rangka menumbuhkembangkan olahraga prestasi di masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga sangat diperlukan. Berdasarkan data Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:

Tabel 2.83
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Gedung Olahraga (GOR) Bumei Tuwah Bepadan	1 unit	
2	Lintasan BMX	1 unit	
3	Karpet Lapangan Futsal	1 unit	
4	Karpet Lapangan Bulu Tangkis	1 unit	
5	Karpet Lapangan Basket	1 unit	
6	Karpet Lapangan Tennis	1 unit	
7	Karpet Lapangan Voly	1 unit	
8	Karpet Lapangan Sepak Takraw	1 unit	
9	Meja tenis	1 unit	
10	Tiang dan net Futsal	1 unit	
11	Tiang dan Net Bulu Tangkis	1 unit	
12	Tiang dan Net Basket	1 unit	
13	Tiang dan net Tennis	1 unit	
14	Tiang dan Net Voly	1 unit	
15	Tiang dan Net sepak Takraw	1 unit	
16	Kursi Wasit Voly	1 unit	
17	Kursi Wasit Bulu Tangkis	1 unit	
18	Kursi Wasit Tennis	1 unit	
19	Kursi Wasit Sepak Takraw	1 unit	
20	Stadion Mini di SKB Purbolinggo	1 unit	
21	Tribun Stadion Mini	1 unit	
22	Gawang Sepakbola	1 unit	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lam Tim, 2021

14. Kebudayaan

Masyarakat Lampung Timur yang multi etnis memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Lampung Timur secara berkala menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:

- a. Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo;
- b. Museum Budaya di Kecamatan Sukadana;
- c. Bangunan Adat Sesat Agung dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi di Kecamatan Sukadana;
- d. Desa Tradisional Wana di Kecamatan Melinting;
- e. Rumah tradisional Gedong Wani di Kecamatan Marga Tiga;
- f. Rumah tradisional warisan Keratuan Melinting; dan
- g. Rumah tradisional warisan Keratuan Pugung di Kecamatan Sekampung Udik.

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan registrasi grup kesenian dan kebudayaan. Data grup seni dan budaya yang telah teregistrasi menurut kecamatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.84
Grup Seni dan Budaya Teregistrasi Menurut Kecamatan Tahun 2018-2020

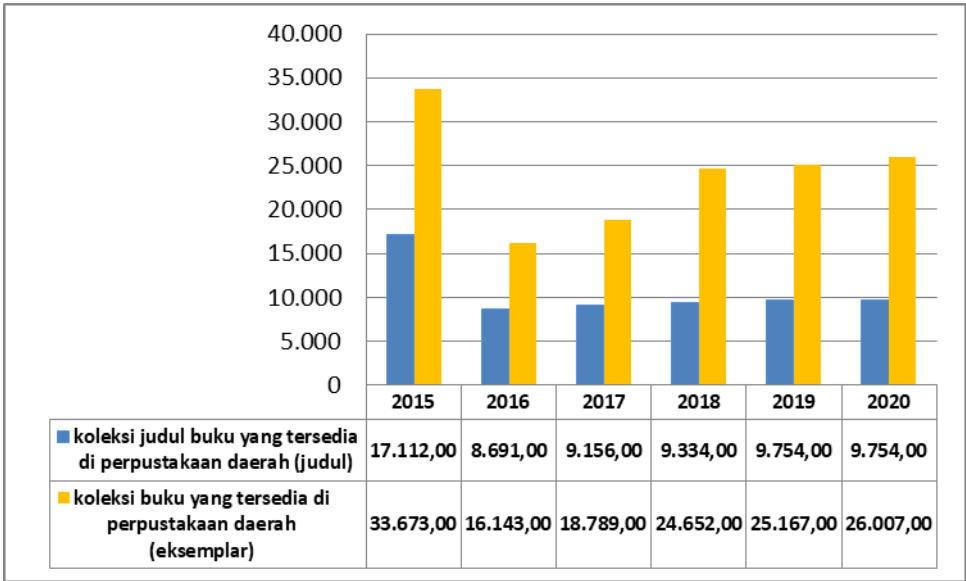
No	KECAMATAN	2018	2019	2020	Jumlah
1	SUKADANA	5	19	37	61
2	PURBOLINGGO	1	7	14	22
3	BATANGHARI	26	6	10	42
4	GUNUNG PELINDUNG	0	6	7	13
5	WAY JEPARA	0	4	17	21
6	MARGA TIGA	0	8	10	18
7	PASIR SAKTI	0	6	8	14
8	MATARAM BARU	0	12	15	27
9	BRAJA SELEBAH	0	6	6	12
10	LABUHAN RATU	0	10	12	22
11	PEKALONGAN	1	10	13	24
12	SEKAMPUNG UDIK	1	4	11	16
13	BATANGHARI NUBAN	0	3	5	8
14	BANDAR SRIBHAWONO	0	11	13	24
15	SEKAMPUNG	2	8	17	27
16	WAWAY KARYA	3	6	6	15
17	BUMI AGUNG	5	3	14	22
18	JABUNG	1	10	10	21
19	RAMAN UTARA	0	11	11	22
20	METRO KIBANG	0	5	7	12
21	MELINTING	0	6	6	12
22	LABUHAN MARINGGAI	0	8	11	19
23	WAY BUNGUR	0	1	2	3
24	MARGA SEKAMPUNG	0	2	2	4
JUMLAH		45	172	264	481

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lam Tim, 2021

15. Perpustakaan

Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada Tahun 2020 mencapai 9.754 judul dan jumlah koleksi buku yang tersedia mencapai 26.007 eksemplar, atau mengalami peningkatan 5 tahun terakhir ini. Untuk lebih jelasnya ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 2.40
Koleksi Judul Buku dan Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah

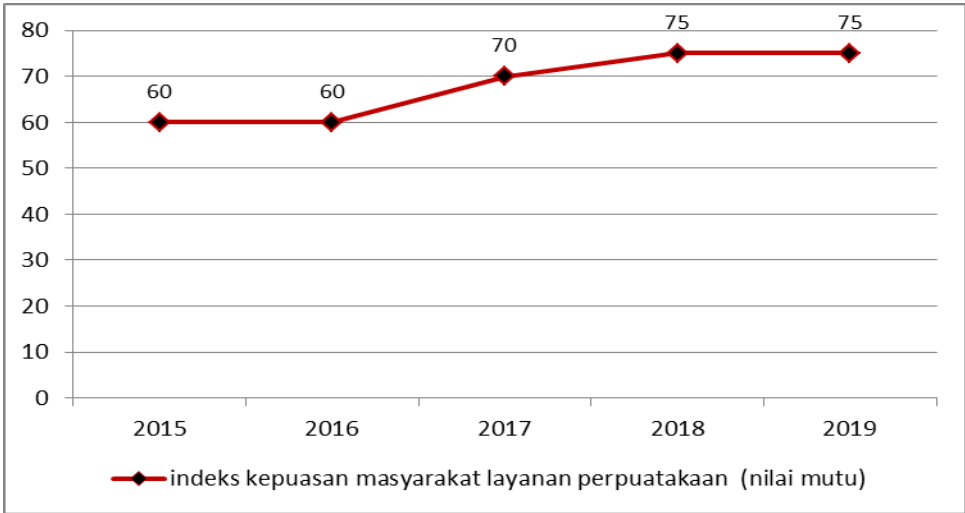


Sumber : Dispusip Kab. Lam Tim, 2020

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan peningkatan penggunaan layanan oleh masyarakat guna menuju transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia.

Selanjutnya, terkait dengan perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan (Nilai Mutu), ditampilkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.41
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan (Nilai Mutu)



Sumber : Dispusip Kab. Lam Tim, 2021

Lebih lanjut, terkait dengan pengembangan perpustakaan desa, perkembangan jumlah perpustakaan desa, ditampilkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.42
Perkembangan Perpustakaan Desa



Sumber : Dispusip Kab. Lam Tim, 2021

16. Kearsipan

Pada urusan kearsipan, jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku mencapai 14 OPD dari 52 OPD yang ada, atau ketercapaian mencapai 26,92%.

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2020

Capaian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	3,00	8,00	16,00	24,00	24,00	24,00
Retrival arsip (menit)	N/A	50,00	45,00	30,00	30,00	30,00
jumlah arsip yang dikelola (arsip)	7.000,00	10.000,00	3.500,00	12.300,00	17.542,00	N/A
jumlah desa sadar arsip (desa)	N/A	20,00	30,00	70,00	80,00	64,00

Sumber : Dispusip Kab. Lam Tim, 2020

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian dan Perkebunan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masa pandemi COVID-19 Tahun 2020 mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat, yang berpengaruh terhadap hampir semua sektor ekonomi masyarakat. Sektor-sektor ekonomi hampir seluruhnya tumbuh negatif pada Tahun 2020.

Tantangan yang dihadapi sektor pertanian dan perikanan di masa pandemi adalah berfluktuatifnya harga komoditas. Hal ini disebabkan oleh produksi tetap berjalan, namun penyerapan pasar rendah, khususnya pada ternak unggas. Pemberlakuan PSBB mempengaruhi konsumsi masyarakat yang mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produksi ternak unggas. Penurunan permintaan tersebut berimbas pada peningkatan suplai yang kemudian terjadi penurunan harga komoditas ternak unggas.

Hal ini pun dialami oleh para petani dan peternak di Kabupaten Lampung Timur. Sebagaimana diketahui, sektor pertanian dan perikanan adalah penggerak utama PDRB Kabupaten Lampung Timur kurun waktu lima tahun terakhir. Sektor pertanian utamanya berperan sebagai penyedia bahan baku, penyedia bahan pakan, penyedia bahan baku untuk industri kecil, menengah, dan besar, penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerap tenaga kerja, dan sumber utama pendapatan rumah tangga.

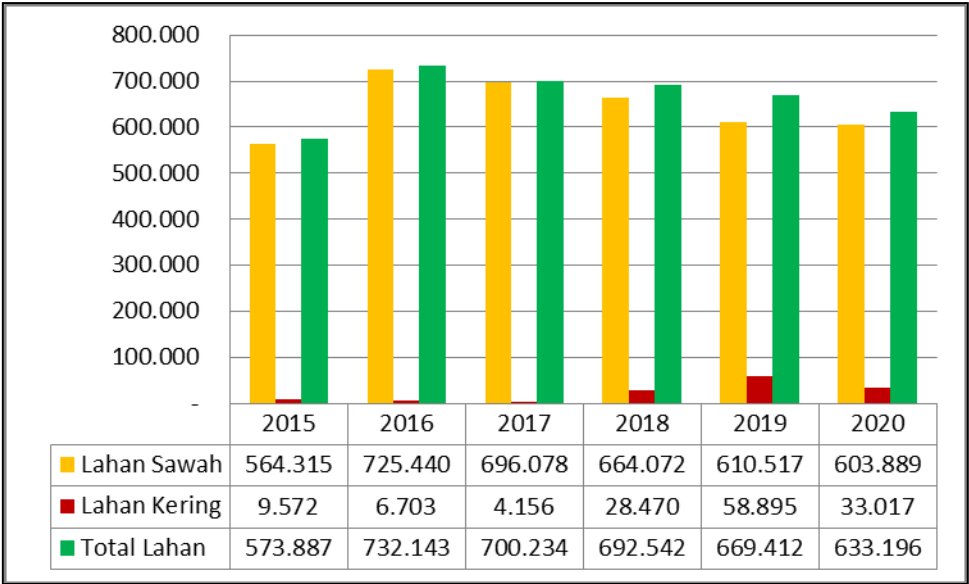
Potensi lahan di wilayah Kabupaten Lampung Timur sangat mendukung untuk budidaya pertanian. Tidak heran jika pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, merupakan sektor utama dan strategis Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan data, masyarakat Lampung Timur sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Selain itu, sektor pertanian tanaman pangan juga merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan kategori pertanian. Terkait realisasi luas panen, produktivitas dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan khususnya padi per kecamatan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.86
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	Panen	Produktivitas	Produksi
		(ha)	(ku/ha)	(ton)
1	Metro Kibang	378,00	50,81	1.920,68
2	Batanghari	7.007,60	58,52	41.008,48
3	Sekampung	6.902,70	51,60	35.615,86
4	Marga Tiga	4.122,40	44,21	18.223,30
5	Sekampung Udik	4.439,20	53,06	23.555,08
6	Jabung	12.063,00	53,67	64.742,12
7	Pasir Sakti	7.505,20	55,60	41.728,91
8	Waway Karya	6.618,90	50,75	33.592,89
9	Marga Sekampung	143,80	52,78	758,98
10	Labuhan Maringgai	6.555,80	55,67	36.496,14
11	Mataram Baru	2.758,00	47,45	13.087,20
12	Bandar Sribhawono	4.798,70	51,39	24.658,23
13	Melinting	2.655,00	50,54	13.419,51
14	Gunung Pelindung	2.666,60	52,94	14.115,81
15	Way Jepara	7.451,80	47,04	35.051,47
16	Braja Selehah	4.487,80	52,21	23.430,80
17	Labuhan Ratu	3.352,70	48,19	16.156,22
18	Sukadana	5.888,10	51,25	30.174,20
19	Bumi Agung	1.927,10	52,67	10.150,66
20	Batanghari Nuban	4.691,90	51,51	24.167,50
21	Pekalongan	6.909,50	54,69	37.789,40
22	Raman Utara	8.734,50	56,22	49.105,36
23	Purbolinggo	4.303,10	55,60	23.925,24
24	Way Bungur	3.818,20	53,23	20.322,40
	Jumlah	120.179,60	52,81	633.196,41

Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Timur, 2021

Grafik 2.43
Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah total produksi padi (lahan sawah dan lahan kering) mencapai 633.196,41 ton (menurun 5,4% dari produksi Tahun 2019) dengan produktivitas 52,81 kuintal per hektar (meningkat jika dibandingkan produktivitas Tahun 2019 yang sebesar 52,07 kuintal per hektar). Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur, penurunan produksi tersebut disebabkan adanya perbaikan jaringan irigasi sekampung sistem, sedangkan untuk lahan rawa, pada Tahun 2020 banyak terjadi banjir dan tingginya curah hujan menyebabkan banyak bakal buah padi yang hampa karena jamur.

Sentra produksi padi adalah Kecamatan Jabung yang memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen padi terbesar diantara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 64.742,12 ton.

Dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Program Kartu Petani Berjaya yang mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, termasuk Kabupaten Lampung Timur. Hingga bulan Agustus Tahun 2021 petani Kabupaten Lampung Timur peserta Program Kartu Petani Berjaya telah mencapai 16.470 petani yang tersebar di Kecamatan Pekalongan dan Raman Utara.

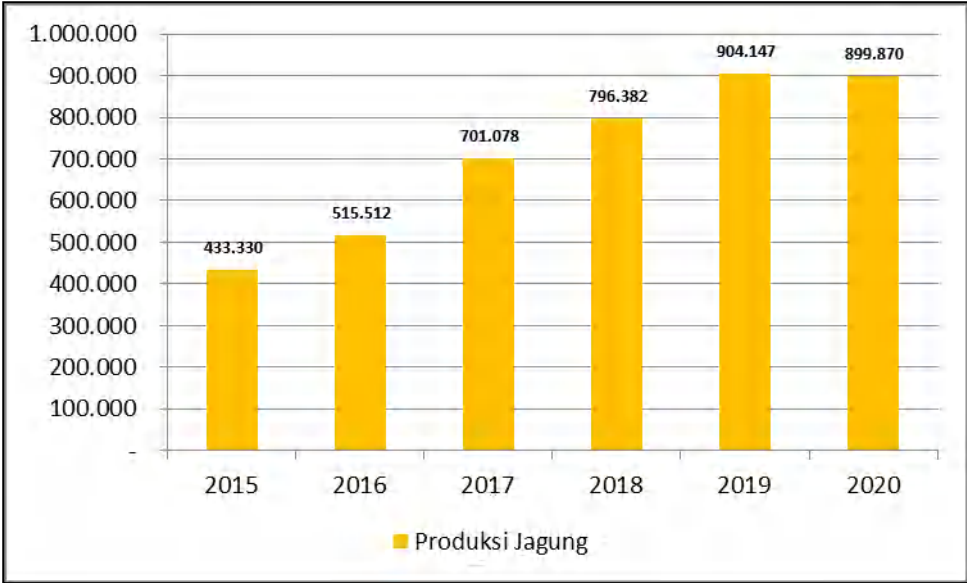
Selanjutnya, terkait dengan produksi tanaman pangan lainnya, yaitu produksi jagung, berdasarkan data dari Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Timur, pada Tahun 2020, produksi jagung di Kabupaten Lampung Timur mencapai 899.870,44 ton, atau mengalami penurunan jika dibandingkan produksi Tahun 2019.

Tabel 2.87
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	Panen	Produktivitas	Produksi
		(ha)	(ku/ha)	(ton)
1	Metro Kibang	8.939,00	55,00	49.164,50
2	Batanghari	2.426,90	60,00	14.561,40
3	Sekampung	3.874,60	41,90	16.234,57
4	Marga Tiga	15.402,00	47,83	73.667,77
5	Sekampung Udik	22.150,00	55,83	123.663,45
6	Jabung	20.830,10	56,67	118.044,18
7	Pasir Sakti	25,00	55,23	138,08
8	Waway Karya	5.362,00	52,67	28.241,65
9	Marga Sekampung	18.080,00	57,00	103.056,00
10	Labuhan Maringgai	273,30	58,44	1.597,17
11	Mataram Baru	1.465,00	52,66	7.714,69
12	Bandar Sribhawono	28.530,00	56,80	162.050,40
13	Melinting	6.176,00	52,00	32.115,20
14	Gunung Pelindung	2.169,00	52,33	11.350,38
15	Way Jepara	6.619,70	59,00	39.056,23
16	Braja Selebah	1.702,40	57,50	9.788,80
17	Labuhan Ratu	2.335,00	57,80	13.496,30
18	Sukadana	4.284,60	57,89	24.803,55
19	Bumi Agung	2.779,00	57,00	15.840,30
20	Batanghari Nuban	2.291,40	56,00	12.831,84
21	Pekalongan	1.811,10	49,00	8.874,39
22	Raman Utara	2.281,80	45,00	10.268,10
23	Purbolinggo	2.468,40	57,00	14.069,88
24	Way Bungur	2.174,50	42,50	9.241,63
Jumlah		164.450,90	54,87	899.870,44

Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Timur, 2021

Grafik 2.44
Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Timur, 2021



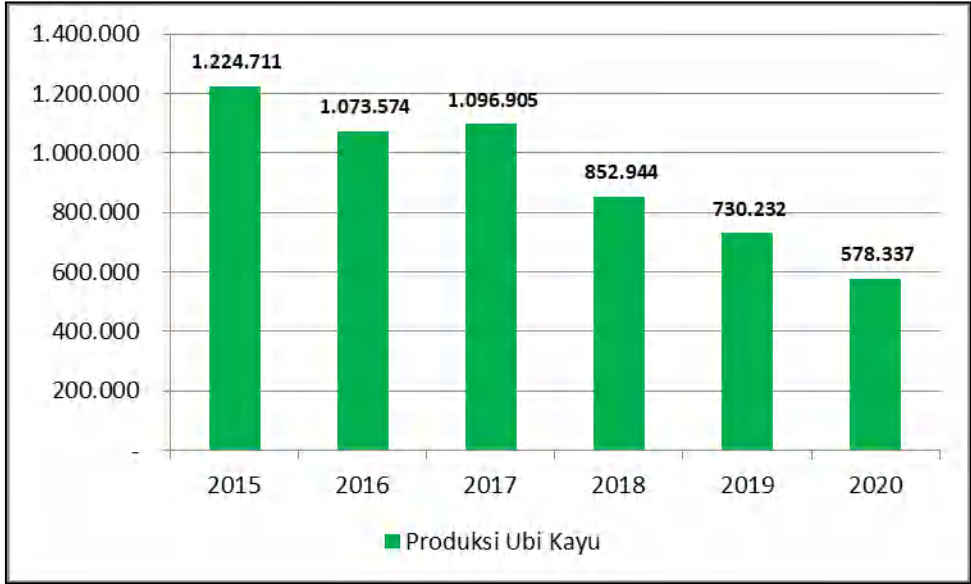
Selanjutnya, terkait dengan komoditas pertanian tanaman pangan lainnya yaitu ubi kayu. Total produksi ubi kayu mencapai 578.337,08 ton, atau mengalami penurunan dibandingkan produksi Tahun 2019. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.88
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	Panen	Produktivitas	Produksi
		(ha)	(ku/ha)	(ton)
1	Metro Kibang	304,00	238,84	7.260,63
2	Batanghari	132,00	130,40	1.721,28
3	Sekampung	45,00	229,39	1.032,24
4	Marga Tiga	6.706,00	274,55	184.115,41
5	Sekampung Udik	2.069,00	238,03	49.249,22
6	Jabung	616,00	202,80	12.492,78
7	Pasir Sakti	90,00	199,82	1.798,36
8	Waway Karya	804,00	204,77	16.463,33
9	Marga Sekampung	715,00	211,00	15.086,50
10	Labuhan Maringgai	101,00	233,23	2.355,66
11	Mataram Baru	81,00	248,49	2.012,78
12	Bandar Sribhawono	161,00	136,13	2.191,70
13	Melinting	188,00	110,00	2.068,00
14	Gunung Pelindung	795,00	267,40	21.258,18
15	Way Jepara	1.466,00	212,90	31.211,51
16	Braja Selebah	279,90	223,50	6.255,76
17	Labuhan Ratu	1.191,00	211,20	25.153,92
18	Sukadana	3.672,00	262,40	96.355,02
19	Bumi Agung	1.895,00	184,70	35.000,65
20	Batanghari Nuban	1.331,60	268,76	35.787,68
21	Pekalongan	350,00	269,02	9.415,67
22	Raman Utara	114,00	256,58	2.925,05
23	Purbolinggo	114,00	259,30	2.955,97
24	Way Bungur	543,80	260,57	14.169,80
Jumlah		23.764,20	239,27	578.337,08

Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Timur, 2020

Grafik 2.45
Perkembangan Produksi Ubi Kayu Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Timur, 2020

Selain tanaman pangan, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki potensi di sektor hortikultura, khususnya buah-buahan. Komoditas pisang merupakan salah satu produk yang paling besar produksinya dan memiliki daya saing yang cukup baik. Pada Tahun 2020, produksi pisang Kabupaten Lampung Timur berhasil mencapai 3.521.395 ton, dengan produksi terbesar di Kecamatan Labuhan Ratu. Selanjutnya, komoditas jeruk saat ini menjadi salah satu komoditas potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Produksi per kecamatan untuk komoditas tanaman buah-buahan khususnya Mangga, Durian, Jeruk, Pisang, Pepaya, Nanas, dan Jambu Biji, disajikan pada Tabel di berikut ini :

Tabel 2.89
Produksi Pertanian Tanaman Buah-Buahan Kabupaten Lampung Timur

Jenis Tanaman Kind of Plants	Satuan Unit	2018	2019	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alpukat/Avocado	kui/qui	4 607	8 047	5 171
Anggur/Grape	kui/qui	—	—	—
Apel/Apple	kui/qui	—	—	—
Belimbing/Star Fruit	kui/qui	2,160	3,506	1,939
Duku/Langsar/Kokosan Duku	kui/qui	7 377	4 911	4 967
Durian/Durian	kui/qui	33 770	16 955	10 364
Jambu Air/Rose Apple	kui/qui	2 827	4 502	12 982
Jambu Biji/Guava	kui/qui	2 500	3 748	4 305
Jeruk Besar/Pomelo	kui/qui	203	702	504
Jeruk Siam/Keprok Tangerine/Orange	kui/qui	39 204	49 627	21 851
Jeruk/Orange (Tangerine + Pomelo)	kui/qui	39 407	50 329	22 355
Mangga/Mango	kui/qui	17 036	18 033	13 209
Manggis/Mangosteen	kui/qui	368	925	406
Markisa/Marquisa	kui/qui	—	—	—

Jenis Tanaman Kind of Plants	Satuan Unit	2018	2019	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangka/Cempedak Jack Fruit	kui/qui	23 165	35 134	22 766
Nenas/Pineapple	kui/qui	3 767	23 578	1 912
Pepaya/Papaya	kui/qui	397 523	699 049	350 307
Pisang/Banana	kui/qui	3 780 414	532 524	552 737
Rambutan/Rambutan	kui/qui	13 896	25 202	13 036
Salak/Salacca	kui/qui	627	1 799	12 588
Sawo/Sapodilla Star Apple	kui/qui	20 755	20 639	19 450
Sirsak/Soursop	kui/qui	1 416	1 436	5 015
Sukun/Bread Fruit	kui/qui	3 167	4 917	4 947
Jengkol/Jengkol	kui/qui	8 009	10 303	9 236
Melinjo/Melinjo	kui/qui	5 482	6 665	9 137
Petai/Twisted Cluster Bean	kui/qui	5 019	8 879	10 054

Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2021

Selanjutnya, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki potensi di sektor hortikultura lainnya, yaitu tanaman biofarma. Tanaman biofarma sangat bermanfaat di masa pandemi COVID-19, diyakini mengkonsumsi tanaman ini dapat meningkatkan imunitas tubuh.

Komoditas biofarma yang diproduksi di Kabupaten Lampung Timur, meliputi jahe, laos, kencur, kunyit, lempuyang, temu lawak dan temu hitam. Untuk komoditas jahe merupakan jenis tanaman yang paling besar produksinya di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu mencapai 106.994 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

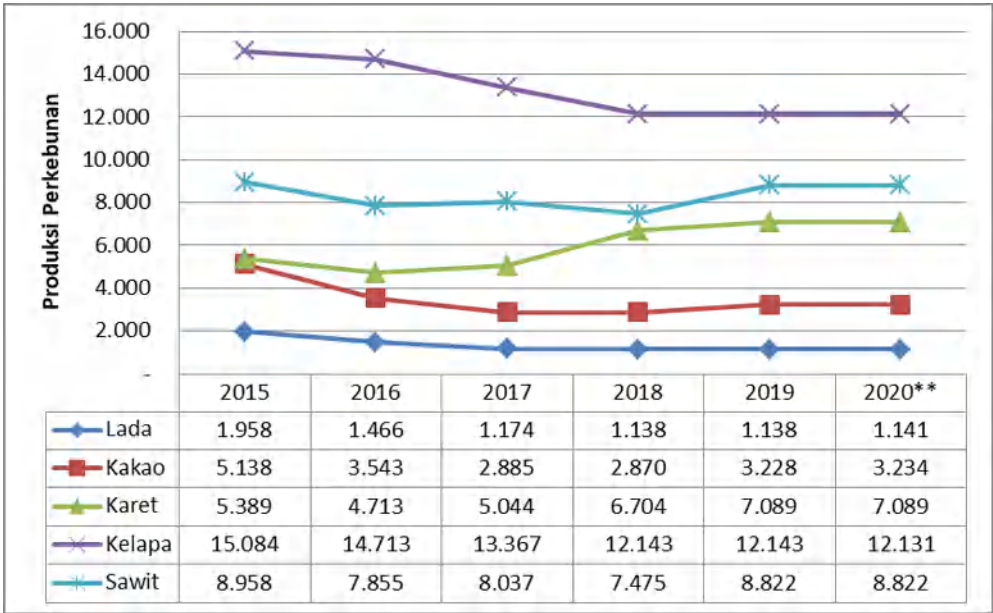
Tabel 2.90
Produksi Pertanian Tanaman Biofarma
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 (ton)

No	Kecamatan	Jahe	Laos	Kencur	Kunyit	Lempu- yang	Temu Lawak	Temu Hitam
1.	Metro Kibang	-	-	-	-	-	-	-
2.	Batanghari	356	202	412	342	68	223	55
3.	Sekampung	1.417	462	123	2.842	-	-	-
4.	Marga Tiga	12.960	3.268	23.345	4.448	-	1.567	1.892
5.	Sekampung Udik	74	94	36	48	21	20	5
6.	Jabung	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pasir Sakti	49	45	28	26	21	14	11
8.	Waway Karya	15.201	7.522	1.213	5.023	5.111	5.411	-
9.	Marga Sekampung	-	-	-	-	-	-	-
10.	Labuhan Maringgai	1.624	1.521	552	502	-	294	-
11.	Mataram Baru	311	154	-	98	-	-	-
12.	Bandar Sribhawono	40.311	-	18.624	6.423	-	-	-
13.	Melinting	7.022	5.100	1.030	4.040	-	-	-
14.	Gunung Pelindung	822	178	912	9.582	-	691	-
15.	Way Jepara	-	-	-	-	-	-	-
16.	Braja Selehah	3.511	1.534	4.521	1.958	577	622	724
17.	Labuhan Ratu	-	-	-	-	-	-	-
18.	Sukadana	-	-	-	-	-	-	-
19.	Bumi Agung	-	-	-	-	-	-	-
20.	Batanghari Nuban	-	-	-	-	-	-	-
21.	Pekalongan	4.188	1.962	4.645	366	1.622	2.464	411
22.	Raman Utara	-	-	-	-	-	-	-
23.	Purbolinggo	1.604	1.300	1.100	1.400	-	-	-
24.	Way Bungur	17.544	10.000	16.033	7.522	-	-	-
Lampung Timur		106.994	33.342	72.574	44.620	7.420	11.306	3.098

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Lampung Timur, 2020

Di sektor perkebunan, komoditas unggulan Lampung Timur meliputi lada, kakao, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Realisasi produksi tanaman perkebunan pada Tahun 2015-2020 tersaji pada Tabel berikut ini:

Grafik 2.46
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Lampung Timur, 2021

Komoditas kakao bersentra di Kecamatan Sekampung Udik, Gunung Pelindung, Way Jepara, dan Marga Tiga. Sedangkan untuk komoditas karet berkembang di Kecamatan Labuhan Ratu, Sekampung, Kecamatan Way Jepara, dan Sekampung Udik.

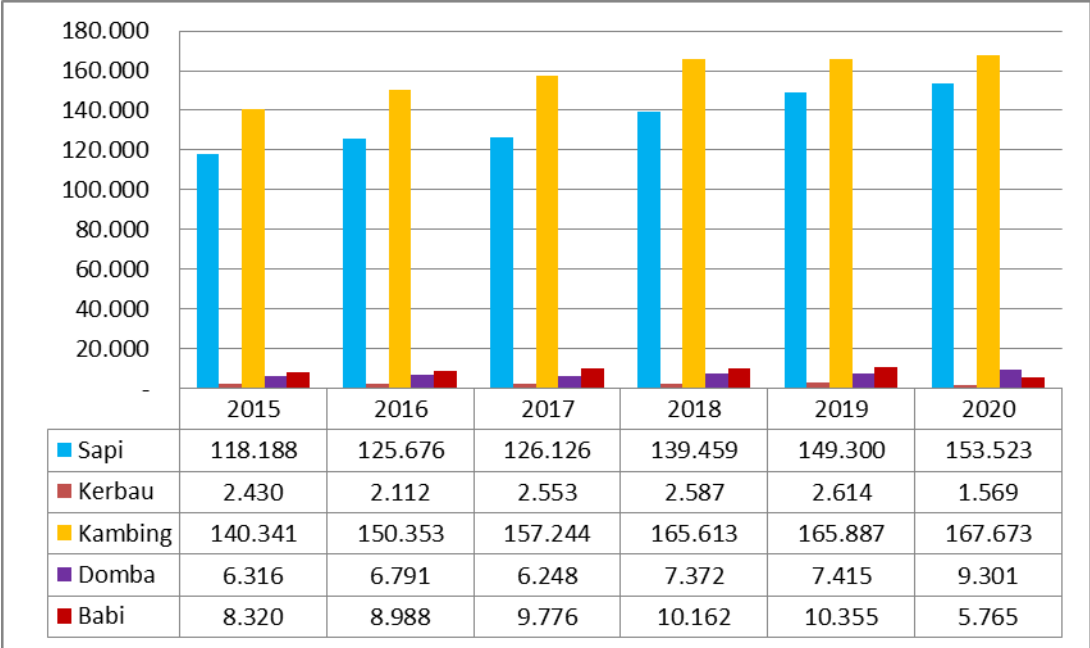
Selanjutnya, terkait dengan sektor kehutanan, komoditas unggulan bidang kehutanan adalah kayu jati, akasia, sengon, gmelina, jabon, dan sungkai. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Kegiatan ini hanya dilakukan pada areal hutan yang memiliki potensi untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan dapat dilaksanakan setelah diperoleh izin usaha.

Terkait dengan kawasan hutan di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-11/2000, kawasan hutan di wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi : Taman Nasional Way Kambas dengan luas 125.621,3 ha, Hutan Lindung Gunung Balak (Reg 38) dengan luas 22,292,5 ha, Hutan Lindung Muara Sekampung (Reg 15) dengan luas 1.488,36 ha, Hutan Produksi Metro Kibang dan Gedung Wani (Reg 37 dan 40) dengan luas 13.175 ha, Hutan Mangrove di Pantai Timur sepanjang kurang lebih 45 km, dan Hutan Rakyat. Pengembangan hutan mangrove berada di sepanjang pantai timur di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, merupakan desa pesisir pantai dalam kondisi baik kurang lebih 20 km berada di Desa Margasari, Sriminosari, Karya Tani, Mulyosari, Purworejo, dan Labuhan Ratu.

2. Peternakan

Sektor perikanan dan sub sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan pada sektor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar pada pembangunan ekonomi daerah. Dalam RTRW Nasional menyebutkan bahwa Provinsi Lampung adalah salah satu lumbung ternak nasional. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam pengembangan sektor peternakan dan perikanan.

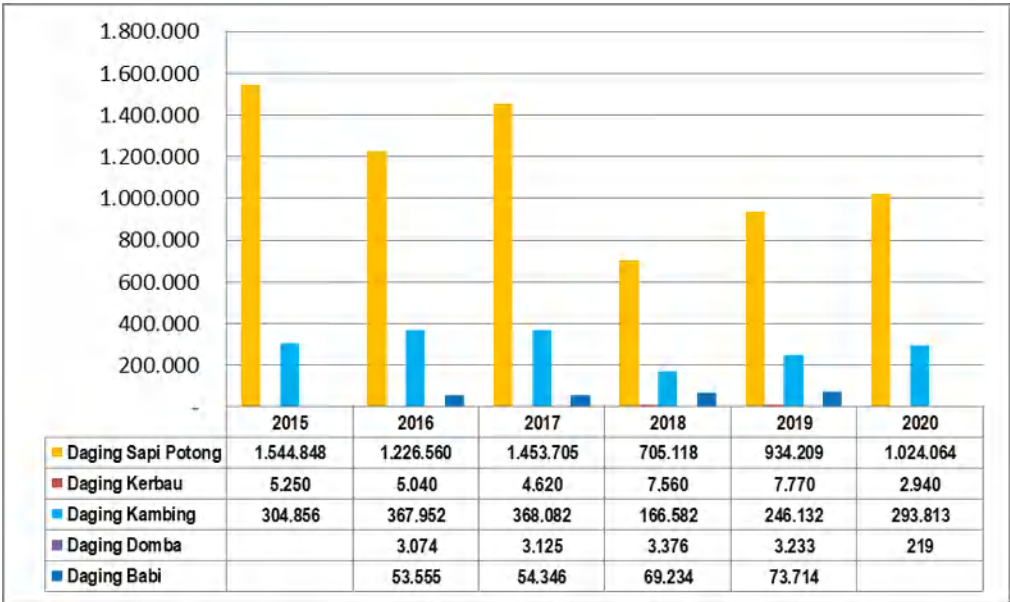
Grafik 2.47
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2015-2020 (ekor)



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Lampung Timur, 2021

Saat ini permintaan pasar untuk sapi, baik pasar nasional maupun internasional sebagian telah mampu dipenuhi oleh peternak dari Kabupaten Lampung Timur. Potensi investasi di bidang peternakan adalah belum adanya industri pengolahan ternak berupa pabrik pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Lampung Timur. Daging sapi merupakan produk unggulan di Kabupaten Lampung Timur, pada Tahun 2020 produksi daging sapi mencapai 153.523 kg, dengan sentranya di Kecamatan Way Jepara dan Labuhan Ratu. Terkait dengan produksi daging per kecamatan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

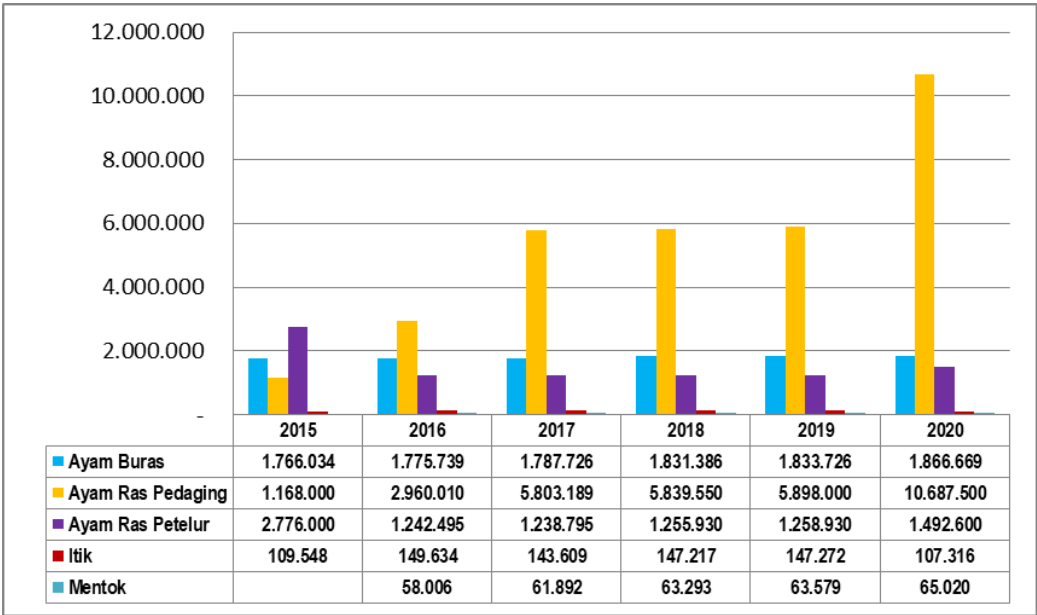
Grafik 2.48
Produksi Daging (Kg) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan peternakan unggas di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar dilakukan oleh peternak rakyat skala kecil. Populasi unggas di Kabupaten Lampung Timur dari Tahun 2018–2020 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan permintaan atas kedua jenis unggas tersebut yang meningkat disertai keuntungan yang semakin besar. Perkembangan populasi unggas dapat dilihat pada Grafik berikut:

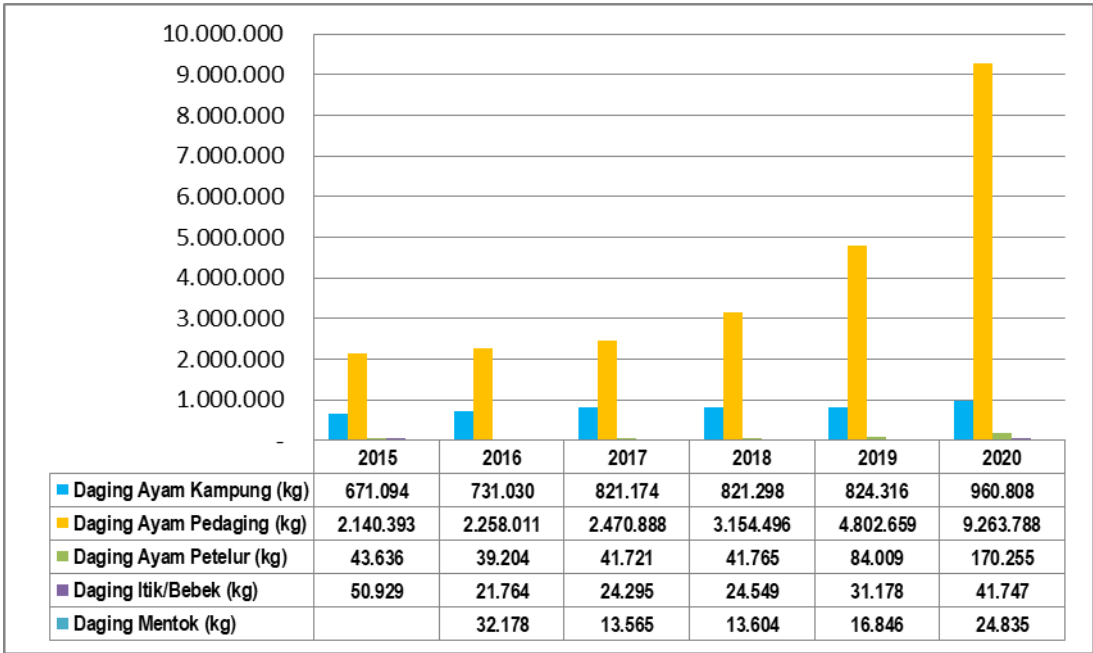
Grafik 2.49
Perkembangan Populasi Unggas (ekor) Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lampung Timur, 2021

Selanjutnya, terkait dengan produksi daging unggas pada Tahun 2020, daging ayam ras pedaging merupakan produk unggulan Kabupaten Lampung Timur dengan produksi di Tahun 2020 mencapai 9.263.788 kg atau meningkat dibandingkan produksi Tahun 2019. Lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

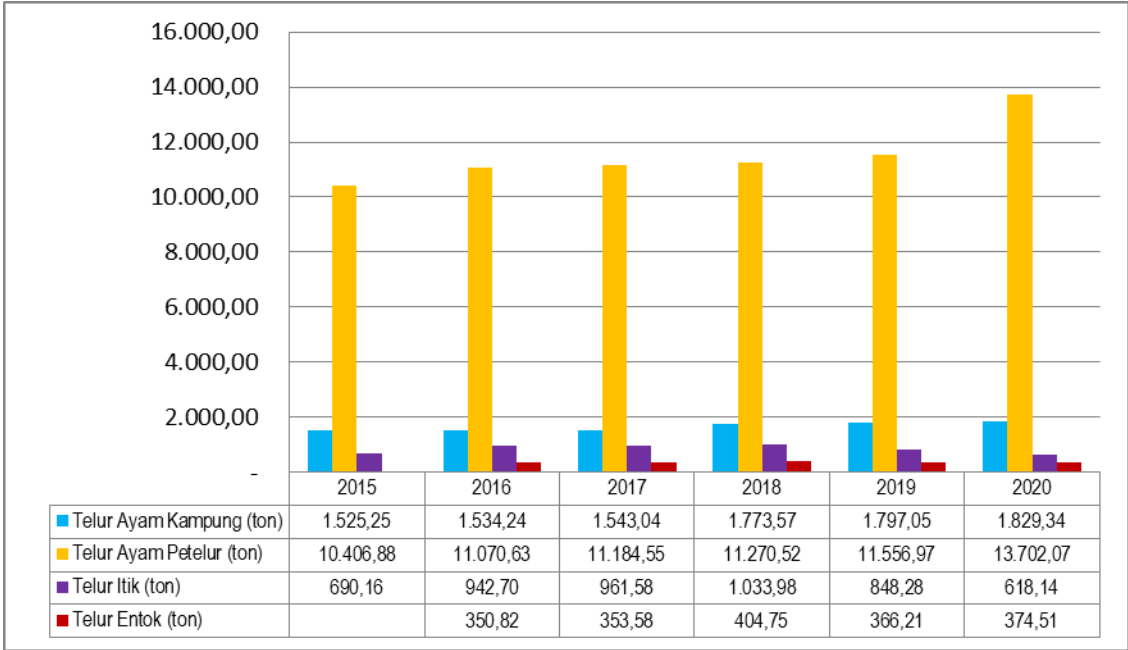
Grafik 2.50
Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan produksi telur, pada Tahun 2020 telur ayam ras merupakan produk unggulan di Kabupaten Lampung Timur mencapai 13.702,07 kg (meningkat jika dibandingkan dengan produksi Tahun 2019) dengan sentranya di Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Purbolinggo. Lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Grafik 2.51
Produksi Telur Tahun 2016-2020

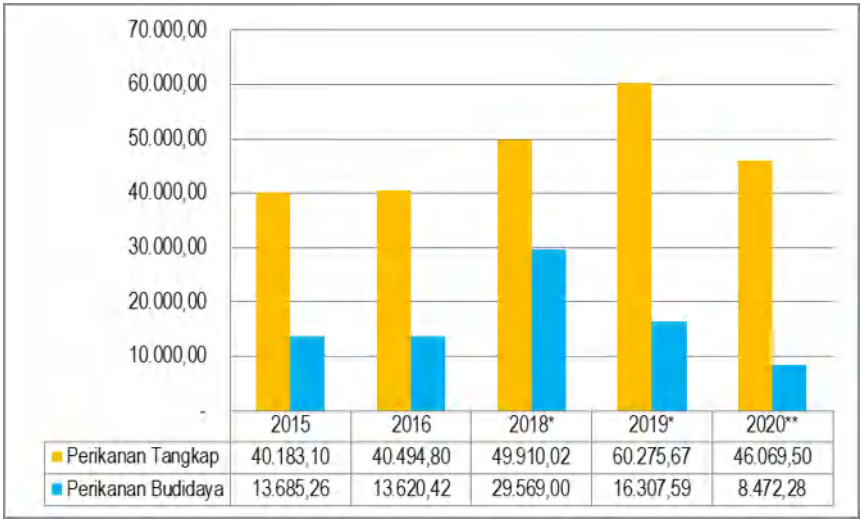


Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lampung Timur, 2021

3. Perikanan

Potensi selanjutnya adalah potensi di bidang perikanan. Potensi bidang perikanan di Kabupaten Lampung Timur meliputi perikanan budidaya dan tangkap. Pengembangan sektor perikanan baik tangkap dan budidaya di Kabupaten Lampung Timur memiliki prospek yang cukup baik bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Produksi perikanan budidaya dan tangkap pada Tahun 2020 mengalami penurunan produksi, lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Grafik 2.52
Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020 (ton)

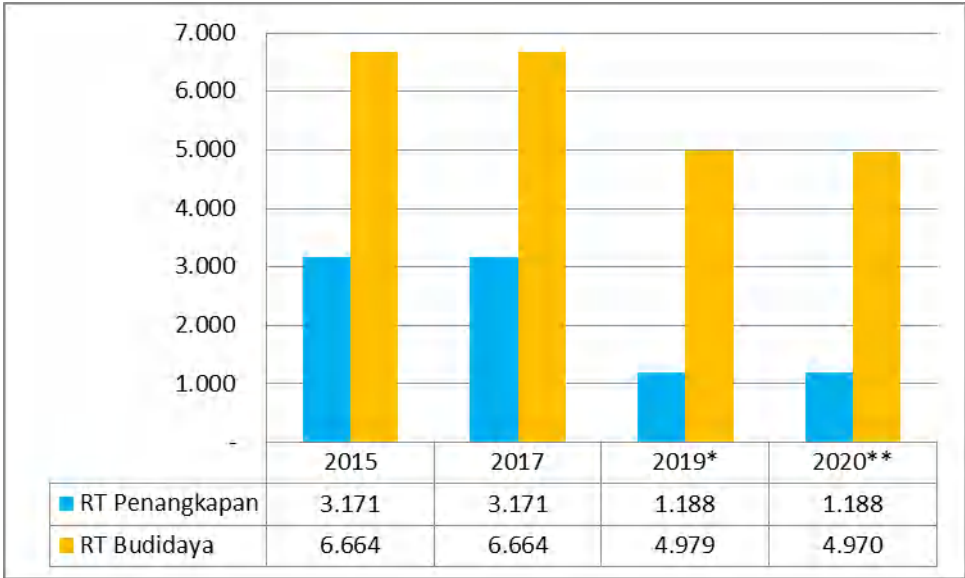


Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Lam Tim, 2021

Penurunan perikanan tangkap pada Tahun 2020 disebabkan oleh para nelayan yang memiliki keterbatasan melaut akibat sering terjadinya cuaca buruk atau badai, sedangkan untuk perikanan budidaya penurunan produksi disebabkan produksi udang yang mengalami penurunan produksi akibat penyakit.

Sektor perikanan budidaya yang banyak di budidayakan meliputi ikan mas, nila, gurame, patin, lele dan udang vaname. Sedangkan untuk perikanan tangkap, didominasi oleh produksi kepiting, rajungan, dan kerang. Selanjutnya, terkait dengan rumah tangga perikanan, ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 2.53
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.32/MEN/2020 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kawasan minapolitan di Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.324/04/SK/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lampung Timur, ditetapkan Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai sebagai Kawasan Minapolitan Kabupaten Lampung Timur yang memiliki potensi dan keunggulan di bidang perikanan di Provinsi Lampung.

4. Industri dan Perdagangan

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan jika cukup tersedia industri pengolahan. Kabupaten Lampung Timur dengan potensi yang besar dalam memproduksi bahan mentah khususnya di sektor pertanian dan perikanan, memerlukan ketersediaan industri yang berskala kecil hingga besar. Jumlah industri pada Tahun 2020 mencapai 10.025 unit usaha dengan rincian industri kecil sebanyak 9.875 unit, industri menengah 38 unit dan 12 industri besar. Perkembangan industri di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.91
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi
Kabupaten Lampung Timur, 2015-2020

Uraian	2015	2017	2018*	2019*	2020**
Unit Usaha (unit)	7.729	8.787	9.332	9.911	10.025
Tenaga Kerja (orang)	35.751	41.250	43.334	46.151	46.456
Nilai lvestasi (Rp. ribu)	167.420.740	192.782.000	207.422.461	223.601.413	225.450.000
Nilai Produksi (Rp. ribu)	4.739.843.072	5.479.505.200	5.819.234.522	6.209.123.235	6.210.830.000

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Industri yang berkembang di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar adalah industri yang bergerak pada Industri Hasil Pertanian & Kehutanan (IHPK) mencapai 74,07%. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan produksi bahan baku hasil pertanian sangat tersedia. Jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Timur terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.92
Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kecamatan dan Kualifikasi Industri di Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2020

Kecamatan		Industri Kecil	Industri Menengah	Industri Besar	Jumah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Metro Kibang	313	1	-	314
2	Batanghari	425	2	-	427
3	Sekampung	629	6	-	635
4	Marga Tiga	636	-	-	636
5	Sekampung Udik	415	3	1	419
6	Jabung	392	-	1	393
7	Pasir Sakti	260	1	-	361
8	Waway Karya	286	-	-	286
9	Marga Sekampung	377	-	-	377
10	Labuhan Maringgai	452	1	-	453
11	Mataram Baru	492	-	1	493
12	Bandar Sribhawono	405	1	-	406
13	Melinting	285	-	-	285
14	Gunung Pelindung	196	-	-	196
15	Way Jepara	631	-	-	631
16	Braja Selebah	423	-	-	423
17	Labuhan Ratu	479	7	1	487
18	Sukadana	417	4	1	422
19	Bumi Agung	344	-	-	344
20	Batanghari Nuban	347	4	2	353
21	Pekalongan	520	4	2	526
22	Raman Utara	437	1	2	440
23	Purbolinggo	505	1	-	506
24	Way Bungur	209	2	1	212
Lampung Timur		9875	38	12	10025

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021



Pada Tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2020 total unit usaha di Kabupaten Lampung Timur adalah sebanyak 10.025, yang menyerap 46.456 tenaga kerja. Total nilai investasi usaha di Kabupaten Lampung Timur mencapai Rp.225,45 milyar dengan nilai produksi mencapai Rp.6,21 trilyun. Kecamatan Sekampung Udik tercatat sebagai kecamatan dengan nilai investasi terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya pada Tabel di bawah ini ditampilkan direktori industri besar dan sedang di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.93
Direktori Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Alamat	Tenaga Kerja	Hasil Produksi Utama
1	MITRA PATI MAS	GANTI WARNO	42	TAPIOKA
2	ARI INDAH	DESA MUARA GADING MAS	40	DAGING RAJUNGAN
3	KERANG "AGUS WARSITO"	JL. UMBUL BLITAR	35	DAGING KERANG
4	RAJUNGAN "PHILIP"	DESA MARGASARI	21	DAGING RAJUNGAN
5	RAJUNGAN "SAMSUDIN"	DESA MUARA GADING MAS	62	DAGING RAJUNGAN
6	RAJUNGAN "HJ. SAENAH"	DESA MUARA GADING MAS	48	DAGING RAJUNGAN
7	RAJUNGAN "JAYA SENA"	DESA MUARA GADING MAS	44	DAGING RAJUNGAN
8	RAJUNGAN HJ. JASMANI "SHOLEH PUTRA"	DUSUN 10 RT 40 KUALA PENET	42	DAGING RAJUNGAN
9	RAJUNGAN JAYA KUSUMA "UDIN SAIR"	DESA MUARA GADING MAS	31	DAGING RAJUNGAN
10	RAJUNGAN HI. SUKARI	DESA MARGASARI	32	DAGING RAJUNGAN
11	RAJUNGAN "DASTIAH"	DESA MUARA GADING MAS	25	DAGING RAJUNGAN
12	KERANG TUKATNO	UMBUL METRO DESA MARGASARI	35	DAGING KERANG
13	PENGOLAHAN KERANG HI. KOMARUDIN	DUSUN I KUALA PENET	21	DAGING KERANG
14	KERANG ZAINURI	MARGASARI	31	DAGING KERANG
15	RAJUNGAN UJANG	DUSUN I	26	DAGING RAJUNGAN
16	KERANG MUSLIM	MARGASARI	20	DAGING KERANG
17	KERANG RUDI	MARGASARI	24	DAGING KERANG
18	KERANG ROSIDI	DUSUN I RT 5	22	DAGING KERANG
19	PENGOLAHAN KERANG HI. AWING	MARGASARI	52	DAGING KERANG
20	PENGOLAHAN KERANG SAKIM	DUSUN 2 SUKORAHAYU	22	DAGING KERANG
21	SUMBER JAYA AGRATAMA KECANA, PT	DUSUN 3 RT 9 RW 3	73	MINYAK KELAPA
22	BUDI ACID JAYA, PT	DESA LABUHAN RATU	22	TEPUNG TAPIOKA
23	UMAS JAYA AGROTAMA, PT	JL.RAYA SRIBAWONO KM	341	TEPUNG TAPIOKA
24	FLORINDO MAKMUR, PT	DUSUN 1	26	TAPIOKA
25	WAY RAMAN, CV	DESA RAMAN ENDRA	28	TEPUNG TAPIOKA
26	ITARA RUKUN SANTOSO	DESA MUARA JAYA	25	TAPIOKA
27	SORINI AGRO ASIA CORP, PT	TAMBAH SUBUR	500	TEPUNG TAPIOKA
28	SRIKANDI, CV	JL. LINTAS TIMUR	70	TEPUNG TAPIOKA
29	FERMENTECH INDONESIA,PT	JL. IR SUTAMI KM 33	484	BAHAN BAKU BUMBU MASAK
30	ROTI BERKAH	DUSUN 5	24	ROTI
31	JAPFA COMFEED INDONESIA, PT	JL. RAYA METRO KIBAN	20	JAGUNG
32	WATERINDEX TIRTA LESTARI, PT	DESA MUMBANG JAYA	517	AIR MINUM DALAM KEMASAN
33	KASUR "SUKISWAN"	RANDU SARI BELAKANG PASAR TEMPEL BUMI HARJO	61	KASUR
34	KASUR "KUNTADI"	DUSUN MAWAR	22	PEMBUAT KASUR, BANTAL, & GULING
35	PENGOLAHAN KERANG AMBO ALA	DUSUN 1	26	DAGING KERANG
36	PENGOLAHAN KERANG Hi. HIFNI	MARGASARI	31	DAGING KERANG
37	PENGOLAHAN Hi. LAKING	DUSUN 1	20	DAGING KERANG
38	PENGOLAHAN KERANG Hi. TENDRI	DUSUN 1	25	DAGING KERANG

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Terkait dengan jumlah pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil di wilayah Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan, 2020

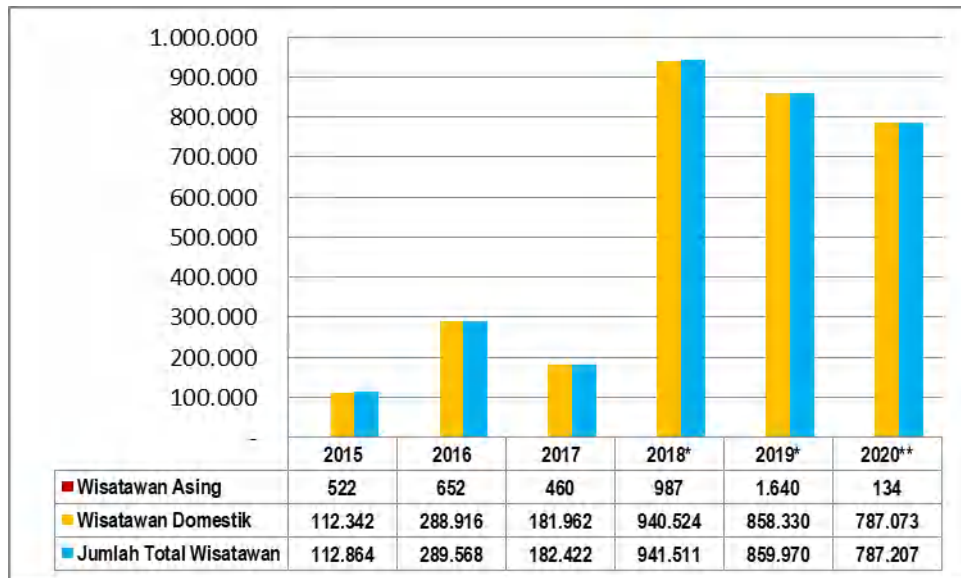
Kecamatan Subdistrict		Pedagang Besar Wholesaler	Pedagang Menengah Medium Trader	Pedagang Kecil Small Trader
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Metro Kibang	-	-	10
2	Batanghari	-	1	53
3	Sekampung	-	4	5
4	Marga Tiga	-	-	24
5	Sekampung Udik	-	1	41
6	Jabung	-	11	17
7	Pasir Sakti	-	2	42
8	Waway Karya	-	-	5
9	Marga Sekampung	-	-	4
10	Labuhan Maringgai	-	1	42
11	Mataram Baru	-	1	40
12	Bandar Sribhawono	-	1	14
13	Melinting	-	-	46
14	Gunung Pelindung	-	-	11
15	Way Jepara	-	2	26
16	Braja Selebah	-	2	70
17	Labuhan Ratu	2	-	13
18	Sukadana	-	5	44
19	Bumi Agung	-	-	1
20	Batanghari Nuban	-	-	1
21	Pekalongan	-	4	4
22	Raman Utara	-	-	3
23	Purbolinggo	-	1	7
24	Way Bungur	1	11	-
Lampung Timur		3	47	523

Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2021

5. Pariwisata

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan, yang merupakan salah satu indikator pengembangan pariwisata daerah. Pemerintah daerah terus fokus untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan even wisata daerah. Sepanjang Tahun 2020 jumlah pengunjung event dan destinasi wisata mencapai 787.207 pengunjung, baik nusantara maupun mancanegara, menurun dibandingkan Tahun 2019. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.54
Jumlah Pengunjung Event dan Destinasi Wisata 2015-2020



Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Lam Tim, 2021

Sejak Tahun 2016, dengan dukungan dan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dan pemerintahan desa, Agrowisata Desa telah berkembang di wilayah Kabupaten Lampung Timur, khususnya di Kecamatan Braja Selehah. Desa Agrowisata dikunjungi oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk menikmati suasana dan kegiatan pedesaan seperti menanam padi, memanen buah-buahan, menikmati tarian tradisional dan lain sebagainya.

2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan laporan hasil survey harapan masyarakat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015, bahwa masyarakat Lampung Timur merasa cukup puas terhadap kinerja pemerintah daerah dengan indeks kepuasan 6,1 dari nilai maksimum 10. Aspek pendidikan dinilai masyarakat Lampung Timur sebagai aspek yang paling memuaskan pelayanannya dibandingkan aspek lain. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan oleh pemerintah daerah, namun masyarakat Lampung Timur masih cukup yakin bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur mampu mengatasinya dengan tingkat keyakinan 65 persen. Selanjutnya dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025. Selanjutnya melaksanakan tahapan pembangunan jangka menengah, RPJMD tahap II telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-

2015, dan untuk RPJMD Tahap III telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021. Lebih lanjut, terkait dengan rencana pembangunan tahunan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, capaian target indikator makro daerah, disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Gambar 2.6
Target dan Realisasi Indikator Makro Daerah Tahun 2020



Sumber : BPS dan Data Diolah, 2021

Lebih lanjut, terkait dengan penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada capaian indeks inovasi daerah, pada Tahun 2020 Kabupaten Lampung Timur memperoleh predikat sangat inovatif dengan nilai skor 1.201.

Dalam rangka meningkatkan inovasi, riset dan pengembangan IPTEKS, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset pengembangan telah dilakukan oleh perangkat daerah terkait, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.95
Kerjasama Pemkab Lampung Timur dengan Instansi dan Lembaga Pendidikan

No	PERANGKAT DAERAH	URAIAN	LEMBAGA/INSTANSI	TAHUN
1	BKPPD	Seleksi Terbuka JPT	UPT Pengembangan Karir dan Keirausahaan UNILA	2016
2	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung	2016
3	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Timur	Pusat Pengkajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung	2017
4	BKPPD	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Perguruan Tinggi Terkait	2019
5	BKPPD	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	IPDN	2019
6	BKPPD	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Perguruan Tinggi Terkait	2020

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lam Tim, 2021



2. Keuangan

Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini adalah capaian tertinggi tiga tahun berturut-turut.

Selanjutnya terkait dengan target dan realisasi kurun waktu 2016-2019, ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Tabel 2.96
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2016-2020

Kode Rekening	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Proyeksi APBD-P
1	2	3				
4	PENDAPATAN DAERAH	1.916.378.911.952,30	2.016.931.888.485,93	2.051.436.100.614,82	2.132.688.979.133,90	2.149.418.494.493,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	94.924.247.670,30	207.020.398.116,34	125.035.423.317,06	147.527.535.828,35	166.753.952.654,26
4.1.01	Pajak Daerah	29.684.748.217,78	39.718.701.783,00	53.213.791.410,00	62.332.058.166,00	57.317.597.200,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	4.831.882.437,00	5.159.271.347,00	5.715.507.215,00	3.925.575.233,00	3.948.905.750,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.829.118.619,64	2.282.977.078,32	2.739.592.254,28	3.176.760.331,26	3.460.827.024,26
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.578.498.395,88	159.859.447.908,02	63.366.532.437,78	78.093.142.098,09	102.026.622.680,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.821.351.589.282,00	1.809.637.060.869,59	1.830.850.797.297,76	1.867.168.337.305,55	1.872.843.841.838,74
4.2.01	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.726.269.375.796,00	1.707.055.295.931,00	1.729.207.994.709,00	1.748.835.897.944,00	1.731.358.859.941,97
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.555.333.164.796,00	1.489.412.947.931,00	1.494.906.155.709,00	1.475.128.391.944,00	1.412.188.583.941,97
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	64.025.787.197,00	82.280.387.544,00	69.740.971.630,00	43.041.853.197,00	47.664.068.941,97
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.081.165.467.000,00	1.062.555.526.000,00	1.069.168.109.000,00	1.106.577.701.000,00	1.015.031.133.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	410.141.910.599,00	344.577.034.387,00	355.997.075.079,00	325.508.837.747,00	349.493.382.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	40.653.243.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	170.936.211.000,00	217.642.348.000,00	234.301.839.000,00	273.707.506.000,00	278.517.033.000,00
4.2.02	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	95.082.213.486,00	102.581.764.938,59	101.642.802.588,76	118.332.439.361,55	141.484.981.896,77
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	95.082.213.486,00	102.581.764.938,59	101.642.802.588,76	118.332.439.361,55	141.484.981.896,77
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103.075.000,00	274.429.500,00	95.549.880.000,00	117.993.106.000,00	109.820.700.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	103.075.000,00	274.429.500,00	95.549.880.000,00	117.993.106.000,00	109.820.700.000,00
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data Diolah, 2020

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur, pemerintah daerah Lampung Timur telah melakukan berbagai upaya yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengembangan aparatur, dan peningkatan disiplin aparatur. Hingga Tahun 2016 jumlah aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencapai 10.235 aparatur. Dimana jumlah aparatur yang terbesar pada Golongan III yaitu sebanyak 4.775 aparatur atau 46,65 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.97
Jumlah PNS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

NO	GOLONGAN	CPNS	PNS	JUMLAH	%
1	I/a		1	1	0,01
2	I/b		1	1	0,01
3	I/c		10	10	0,13
4	I/d		19	19	0,24
	Jumlah Gol. I		31	31	0,4
5	II/a	5	84	89	1,14
6	II/b		149	149	1,92
7	II/c	17	343	360	4,63
8	II/d		450	450	5,79
	Jumlah Gol. II	22	1026	1048	13,5
9	III/a	133	648	781	10
10	III/b	11	881	892	11,5
11	III/c		1006	1006	12,9
12	III/d		1173	1173	15,1
	Jumlah Gol. III	144	3708	3852	49,5
13	IV/a		1063	1063	13,7
14	IV/b		1750	1750	22,5
15	IV/c		29	29	0,37
16	IV/d		2	2	0,03
	Jumlah Gol. IV		2844	2844	36,6
	TOTAL	166	7609	7775	100

Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2021

Jika kita lihat dari pendidikan yang ditamatkan, pada Tahun 2016 jumlah PNS yang berpendidikan Strata 1 (Sarjana) menempati jumlah terbanyak yaitu 4.419 aparatur atau mencapai 47,14 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.98
PNS Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021

NO	JENJANG PENDIDIKAN	CPNS	PNS	JUMLAH	%
1	SD		20	20	0,26
2	SLTP		42	42	0,54
3	SLTA	5	944	949	12,2
4	D-1		41	41	0,53
5	D-2		597	597	7,68
6	D-3	17	919	936	12
7	D-4	2	129	131	1,68
8	S-1	142	4598	4740	61
9	S-2		318	318	4,09
10	S-3		1	1	0,01
	TOTAL	166	7609	7775	100

Sumber : BPS Kab. Lam Tim, 2021

Selanjutnya, terkait dengan jumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 2.99
Jumlah Pejabat Berdasarkan Tingkatan Eselon Tahun 2021

NO	ESELON	CPNS	PNS	JUMLAH
1	II-a	-	-	-
2	II-b	-	34	34
3	III-a	-	62	62
4	III-b	-	129	129
5	IV-a	-	509	509
6	IV-b	-	46	46
7	Fungsional	128	5732	5860
8	JFU	38	1097	1135
	TOTAL	166	7609	7775

Sumber : BKPPD Kab. Lam Tim, 2021

Lebih lanjut, terkait dengan data pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan, digambarkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.100
Pejabat Eselon/Struktural yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

NO	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	DIKLAT KEPEMIMPINAN		KET
			SUDAH	BELUM	
1	ESELON II	35	17	18	Diklat Pim II
2	ESELON III	187	45	142	Diklat Pim III
3	ESELON IV	555	145	410	Diklat Pim IV

Sumber : BKPPD Kab. Lam Tim, 2021

Berdasarkan data di Tabel di atas, persentase Pejabat Eselon II yang telah mengikuti Diklat Pim Tingkat II baru mencapai 48,57%, atau sebanyak 51,43% belum mengikuti Diklat Pim Tingkat II. Selanjutnya, untuk Pejabat Eselon III yang telah mengikuti Diklat Pim Tingkat III baru mencapai 24,06% (75,94% belum mengikuti), dan untuk Pejabat Eselon IV yang telah mengikuti Diklat Pim Tingkat IV baru mencapai 26,13% (73,87% belum mengikuti).

2.3.5 Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Capaian Pemerintah

Kabupaten dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pada Tahun 2020 ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.101
Capaian/Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

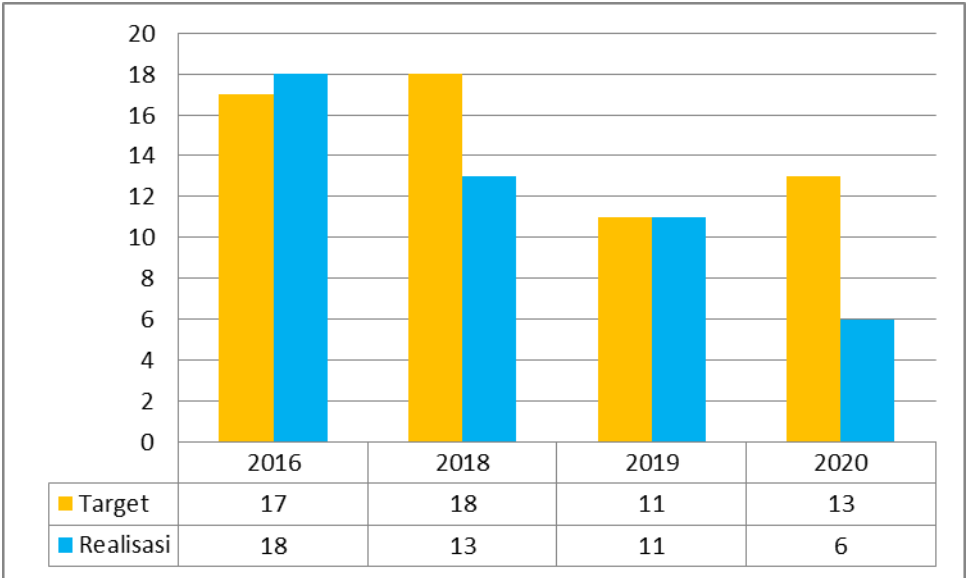
No.	KATEGORI	CAPAIAN KINERJA/ PREDIKAT
1	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	8,1
2	Nilai SAKIP	C
3	Zona Pelayanan Ombudsman	Hijau
4	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup

Sumber : Setdakab Lampung Timur, 2021

2. Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program Propemperda ditampilkan pada Tabel di bawah ini. Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang merupakan instrumen pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan secara operasional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Propemperda dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Grafik 2.55
Kinerja Propemperda 2016-2020



Sumber : Setdakab Lampung Timur, 2021

3. Inspektorat

Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Kabupaten Lampung Timur berada di level 3 atau integrated, yang berarti APIP Kabupaten Lampung Timur mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Terkait dengan tingkat capaian *Monitoring Center of Prevention* (MCP) KPK RI Tahun 2020, kinerja Kabupaten Lampung Timur mencapai 67%, atau terendah se-Provinsi Lampung.

4. Kesatuan Bangsa dan Politik

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebesar 70,2 persen, atau di bawah rata-rata target nasional partisipasi masyarakat yang ditetapkan sebesar 77,5%.

Selanjutnya, terkait dengan penyalahgunaan NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), berdasarkan data Polres Lampung Timur, kasusnya terus meningkat 3 tahun terakhir.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian daerah Lampung Timur. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran kurun waktu lima tahun terakhir ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.102
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran <i>Component of Expenditure</i>	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption</i>	19 917,92	21 826,41	24 028,26	26 240,82	26 438,68
2. Konsumsi LNPRT <i>NPISHs Consumption</i>	447,71	515,48	624,53	694,67	680,84
3. Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption</i>	2 141,65	2 231,97	2 335,35	2 449,89	2 468,55
4. PMTB/GFCF	9 916,07	11 006,60	12 272,99	13 259,47	13 062,13
5. Perubahan Inventori <i>Change in Inventories</i>	- 141,04	- 355,87	-563,23	-965,16	-254,08
6. Ekspor Netto/ <i>Net Export</i>	803,23	918,72	652,17	56,39	-1 608,65
Total PDRB/Total GRDP	33 085,54	36 143,30	39 350,06	41 736,08	40 787,48

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Nilai PDRB Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB ADHB sebesar 948,60 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Lebih jauh lagi penurunan PDRB adh berlaku pada tahun 2020 dipengaruhi oleh menurunnya konsumsi akhir yang terdampak ekonomi global akibat pandemi COVID-19.

Tabel 2.103
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran <i>Component of Expenditure</i>	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption</i>	15 136,17	15 990,85	16 894,57	17 785,84	17 555,75
2. Konsumsi LNPR <i>NPISHs Consumption</i>	327,81	358,11	416,22	455,16	437,46
3. Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption</i>	1 437,09	1 446,42	1 472,78	1 516,86	1 495,99
4. PMTB/GFCF	7 734,41	8 161,01	8 821,52	9 208,45	8 793,06
5. Perubahan Inventori <i>Change in Inventories</i>	- 456,27	- 458,12	-462,89	-266,83	-146,86
6. Ekspor Netto/ <i>Net Export</i>	2 112,98	1 998,56	1 375,97	906,66	794,23
Total PDRB/<i>Total GRDP</i>	26 292,19	27 496,84	28 518,18	29 606,13	28 929,63

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan PDRB ADHK pada tahun 2020, total ekonomi Kabupaten Lampung Timur turun sebesar 676,50 miliar rupiah. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang terbesar ekonomi Lampung Timur mengalami penurunan sebesar 230 miliar rupiah, tak hanya konsumsi rumah tangga, penurunan ekonomi pun terjadi pada komponen pengeluaran lainnya dimana hal ini dipicu kondisi ekonomi baik lokal maupun global yang cukup terguncang akibat dampak pandemi COVID-19.

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Secara rata-rata dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Lampung Timur, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan.

Tabel 2.104
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2016-2020 (persen)

Uraian/Description	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp) <i>Total Household Consumption (Billion Rp)</i>					
a. ADHB/at Current Prices	19 917,92	21 826,41	24 028,26	26 240,82	26 438,68
b. ADHK 2010/at 2010 Constant Prices	15 136,17	15 990,85	16 894,57	17 785,84	17 555,75
Proporsi terhadap PDRB (ADHB) <i>Share to GRDP (% at Current Price)</i>	60,20	60,39	61,06	62,87	64,82
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Rp) <i>Average per capita consumption per year (Rp)</i>					
a. ADHB/at current prices	19,557,594	21,242,743	23,188,979	25,127,186	25,131,973
b. ADHK 2010/at 2010 constant prices	14,862,342	15,563,237	16,304,461	17,031,020	16,688,066
Pertumbuhan/Growth					
a. Total konsumsi RT <i>Total of Household consumption</i>	4,35	5,65	5,65	5,28	-1,29
b. Perkapita/per capita	3,36	4,72	4,76	4,46	-2,01
Jumlah penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>	1 018	1 027	1 036	1 044	1 051

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguh pun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

3. Pendapatan Per-Kapita

PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 sebesar 38,77 juta rupiah, turun dibandingkan Tahun 2019, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.105
PDRB per-Kapita Kabupaten Lampung Timur

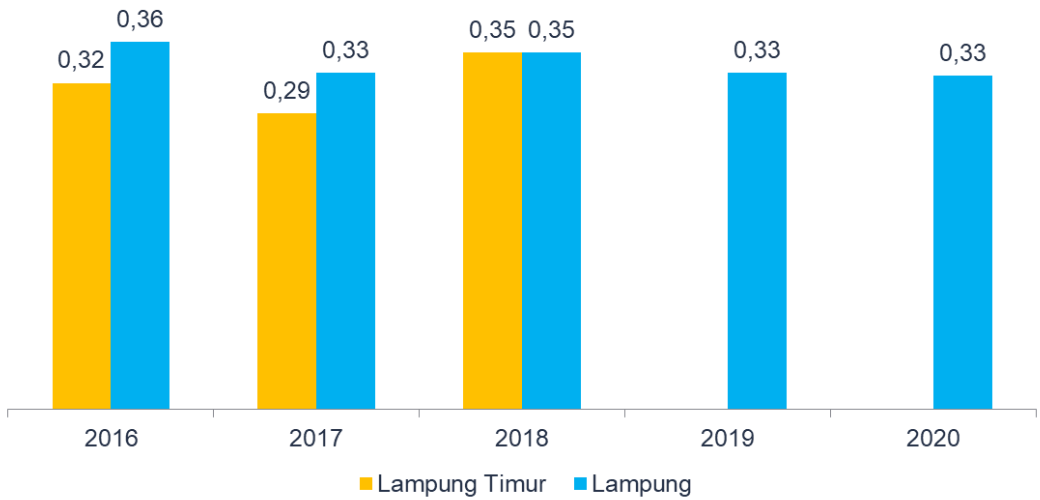
Tahun Year	PDRB per Kapita GRDP per Capita		PDRB per Kapita Tanpa Migas GRDP per Capita without Oil and Gas	
	ADHB at Current Price	ADHK at Constant Prices	ADHB at Current Price	ADHK at Constant Prices
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	32 487 030,29	25 400 329,17	25 400 329,17	19 012 233,37
2017	35 176 787,53	26 761 539,63	27 402 399,42	19 821 186,86
2018	37 975 611,97	27 521 899,88	29 473 512, 43	20 652 960,71
2019*	39 964 761,76	28 349 548,03	31 329 562,74	21 516 305,23
2020**	38 771 133,68	27 499 206,27	31 640 464,35	21 332 282,67

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

4. Ketimpangan Pendapatan Penduduk

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Indeks Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang). Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 2.56
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Hotel/Losmen

Di Kabupaten Lampung Timur hingga Tahun 2020 terdapat 15 hotel dengan 200 kamar dan 243 tempat tidur. Hotel/losmen 1 berlokasi di Kecamatan Sekampung Udik, 4 di Kecamatan Pasir Sakti, 2 di Kecamatan Labuhan Maringgai, 3 di Kecamatan Mataram Baru, 2 di Kecamatan Bandar Sribhawono, 1 di Kecamatan Way Jepara dan 1 di Kecamatan Labuhan Ratu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.106
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2020

Kecamatan Subdistrict	Hotel Bintang Classified Hotel		Hotel Nonbintang/Melati Non-classified/ Jasmine Hotel		Akomodasi Lainnya Other Accommodation	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Metro Kibang	-	-	-	-	-	-
2 Batanghari	-	-	-	-	-	-
3 Sekampung	-	-	-	-	-	-
4 Marga Tiga	-	-	-	-	-	-
5 Sekampung Udik	-	-	1	1	-	-
6 Jabung	-	-	-	-	-	-
7 Pasir Sakti	-	-	4	2	-	-
8 Waway Karya	-	-	-	-	-	-
9 Marga Sekampung	-	-	-	-	-	-
10 Labuhan Maringgai	-	-	2	2	-	-
11 Mataram Baru	-	-	3	3	-	-
12 Bandar Sribhawono	-	-	2	2	-	-
13 Melinting	-	-	-	-	-	-
14 Gunung Pelindung	-	-	-	-	-	-
15 Way Jepara	-	-	1	1	-	-
16 Braja Selebah	-	-	-	-	-	-
17 Labuhan Ratu	-	-	1	1	-	-
18 Sukadana	-	-	-	-	-	-
19 Bumi Agung	-	-	-	-	-	-
20 Batanghari Nuban	-	-	-	-	-	-
21 Pekalongan	-	-	1	1	-	-
22 Raman Utara	-	-	-	-	-	-
23 Purbolinggo	-	-	-	-	-	-
24 Way Bungur	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	15	13	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2020

Selanjutnya terkait dengan jumlah restoran atau rumah makan yang ada di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.107
Perkembangan Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020

Kecamatan Subdistrict		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Metro Kibang	4	4	4	4	4
2	Batanghari	6	6	6	6	6
3	Sekampung	6	6	6	6	6
4	Marga Tiga	3	3	3	3	3
5	Sekampung Udik	5	5	5	5	5
6	Jabung	4	4	4	4	4
7	Pasir Sakti	9	9	9	9	9
8	Waway Karya	16	16	16	16	16
9	Marga Sekampung	-	-	-	-	-
10	Labuhan Maringgai	3	3	3	3	3
11	Mataram Baru	3	3	3	3	3
12	Bandar Sribhawono	4	4	4	4	4
13	Melinting	0	0	0	0	0
14	Gunung Pelindung	2	2	2	2	2
15	Way Jepara	-	-	-	-	3
16	Braja Selebah	2	2	2	2	2
17	Labuhan Ratu	6	6	6	6	6
18	Sukadana	29	29	29	29	29
19	Bumi Agung	4	4	4	4	4
20	Batanghari Nuban	2	2	2	2	2
21	Pekalongan	10	10	10	10	10
22	Raman Utara	2	2	2	2	2
23	Purbolinggo	8	8	8	8	4
24	Way Bungur	10	10	10	10	10
Lampung Timur		138	138	138	138	137

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2020

Pada Tabel di atas terlihat bahwa jumlah restoran/rumah makan yang terdata di Lampung Timur pada Tahun 2019 mencapai 137 unit, menurun dibandingkan Tahun 2019. Kecamatan yang terbanyak jumlah restoran/rumah makan adalah Kecamatan Sukadana, disusul oleh Kecamatan Waway Karya dan Kecamatan Way Bungur.

2. Jaringan Listrik

Untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini dipasok oleh pembangkit – pembangkit yang dikelola oleh PT. PLN Sektor Bandar Lampung sebesar 70 % dan sisanya dipasok oleh pembangkit listrik dari sistem Sumsel – Lampung sebesar 30 % dari total kebutuhan melalui sistem interkoneksi Sumsel – Lampung – Bengkulu.

Jika kita perhatikan bahwa kebutuhan listrik total mengalami kenaikan dari Tahun- ke Tahun (2013-2017) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2%. Adapun kebutuhan energi listrik daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.108
Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN
di Kabupaten Lampung Timur

Tahun/Year	Daya Terpasang Installed Capacity (KW)	Produksi Listrik Production (KWh)	Listrik Terjual Electricity Sold (KWh)	Dipakai Sendiri Own Usage (KWh)	Susut/Hilang Shrinked (KWh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	106 009,30	208 084 186,00	177 624 030,00	788 702,40	29 671 453,60
2014	112 806,50	222 574 187,00	184 954 865,00	1 070 428,07	36 548 893,93
2015	118 695,90	237 461 709,70	195 849 543,00	2 014 616,03	39 073 370,24
2016	123 648,55	252 621 049,67	212 113 092,00	3 548 124,75	36 959 832,92
2017	132 133,55	258 837 135,81	219 115 820,00	3 797 445,74	35 923 870,07
2018	143 733,45	267 088 426,67	235 248 688,00	3 894 054,11	31 839 738,67
2019	155 333,35	298 437 393,96	271 929 790,00	4 438 956,93	26 487 216,11
2020	164 458,75	322 537 081,71	291 888 639,00	3 197 801,76	31 270 791,47

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

3. Jaringan Telepon

Jaringan telepon belum menjangkau seluruh wilayah, namun jaringan telepon seluler sudah menjangkau ibukota kabupaten dan beberapa kecamatan. Pola jaringan yang ada mengikuti pola jaringan jalan. Berdasarkan Tabel terlihat jika kapasitas saluran telepon yang tersedia belum maksimal termanfaatkan sehingga masih besar peluangnya untuk dimanfaatkan untuk menunjang kemajuan teknologi informasi Jaringan telepon yang ada masih dibawah pengawasan kantor Telkom cabang Metro. Untuk mengetahui tingkat layanan telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.109
Jumlah Kapasitas Telepon dan Saluran tersambung Lokasi STO
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

Sentral Telepon Otomat Automatic Telephone Central (STO)		Kapasistas Telepon Server Capa Municipatily		Saluran Dalam Layanan Service Line	
		2018	2019	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukadana	20	27	...	...
2	Labuhan Maringgai	62	84	...	...
3	Way Jepara	86	97	...	...
Jumlah/Total		163	208	...	...

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

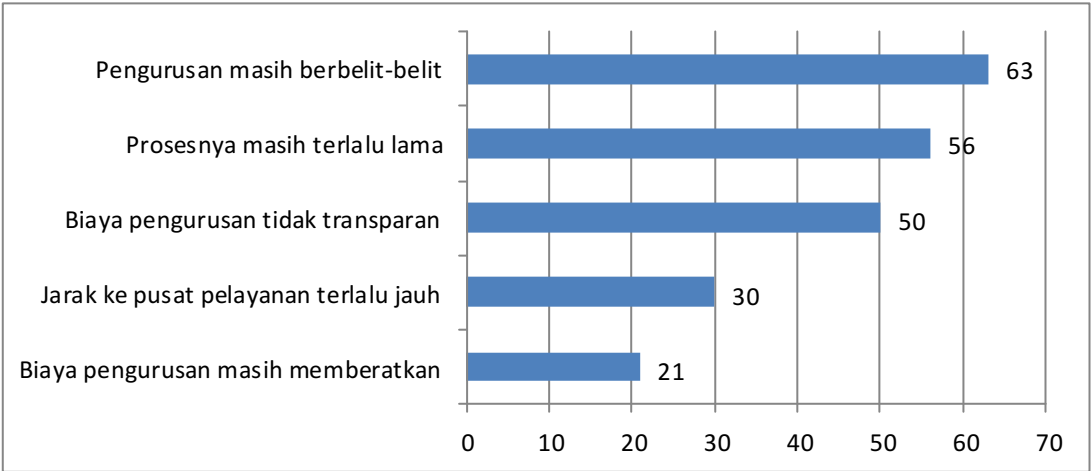
1. Lama Proses Perizinan

Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Tahun 2009, dan pada Tahun 2013 dinaikkan statusnya menjadai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah diatur standar waktu pelayanan perizinan yang dikelola BPTSPPM yaitu paling lama 14 hari kerja.

Hingga kini kinerja pelayanan perizinan belum sesuai dengan harapan masyarakat. berdasarkan laporan hasil survey harapan masyarakat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015, persepsi masyarakat yang menyatakan puas terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Lampung Timur baru mencapai 53 persen.

Adapun persepsi masyarakat menyatakan ada lima permasalahan utama yang terkait dengan pelayanan perizinan, dimana dari 30 responden yang disurvei 63 persen menyatakan bahwa pengurusan perizinan usaha masih berbelit-belit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.57
Persepsi Masyarakat Menurut Jenis Permasalahan Izin Usaha Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 (persen)



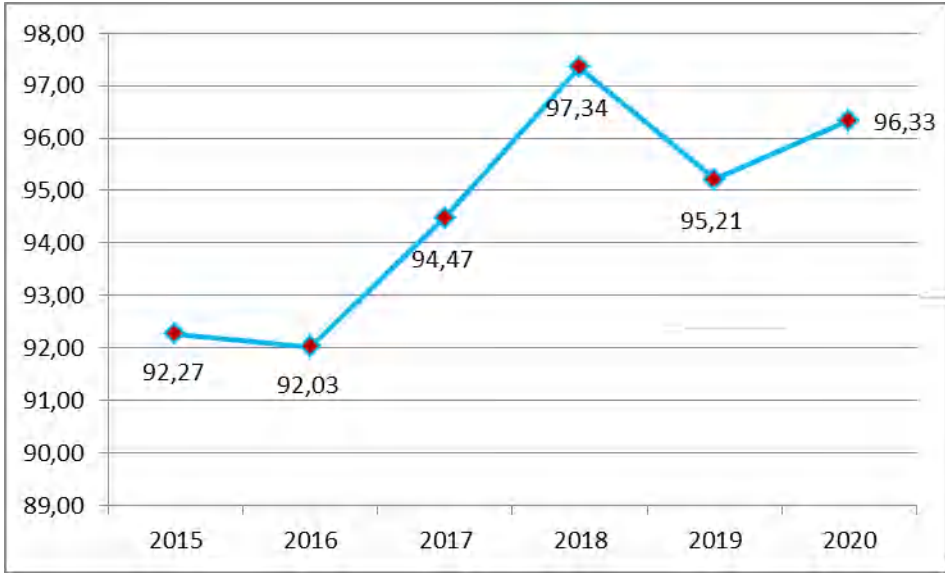
Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Selain itu, belum seluruh pelayanan non perizinan yang dilayani oleh BPTSPPM, masih terdapat beberapa pelayanan khususnya non perizinan yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah secara langsung, dimana ada beberapa pelayanan yang belum memiliki standar waktu pelayanan. Kedepan perlu disusun SOP dan penetapan standar waktu pelayanan seluruh perizinan dan non perizinan daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pos pendapatan asli daerah pada Tahun 2020 terinci sebagai berikut:

Grafik 2.58
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2020



Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2020

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2015-2020 menurut jenis kelamin tersaji dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.110
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lampung Timur, 2015-2020 (persen)

Rasio Ketergantungan	2015	2017	2018	2019*	2020**
Laki-Laki	50,08	49,65	49,54	49,45	47,88
Perempuan	50,39	49,92	49,73	49,58	45,01
Jumlah	50,23	49,78	49,63	49,51	46,44

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2020

Banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di suatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. Semakin kecil persentase penduduk usia produktif maka semakin besar penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut. Pada Tabel di atas terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk Lampung Timur Tahun 2020 adalah sebesar 47,88 persen (turun dibandingkan Tahun 2019), yang berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk produktif, harus menanggung sekitar 48 orang penduduk tidak produktif.

2. Perkembangan IPM Kabupaten Lampung Timur

Kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI). IPM atau HDI merupakan suatu ukuran yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Menurut UNDP IPM atau HDI dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

Pada Tahun 2020, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 69,37, meningkat 3 basis poin dibandingkan Tahun 2019. Peningkatan tersebut dicapai akibat adanya kenaikan dari nilai indeks, yaitu indeks kelangsungan hidup, indeks daya beli, dan indeks pengetahuan.

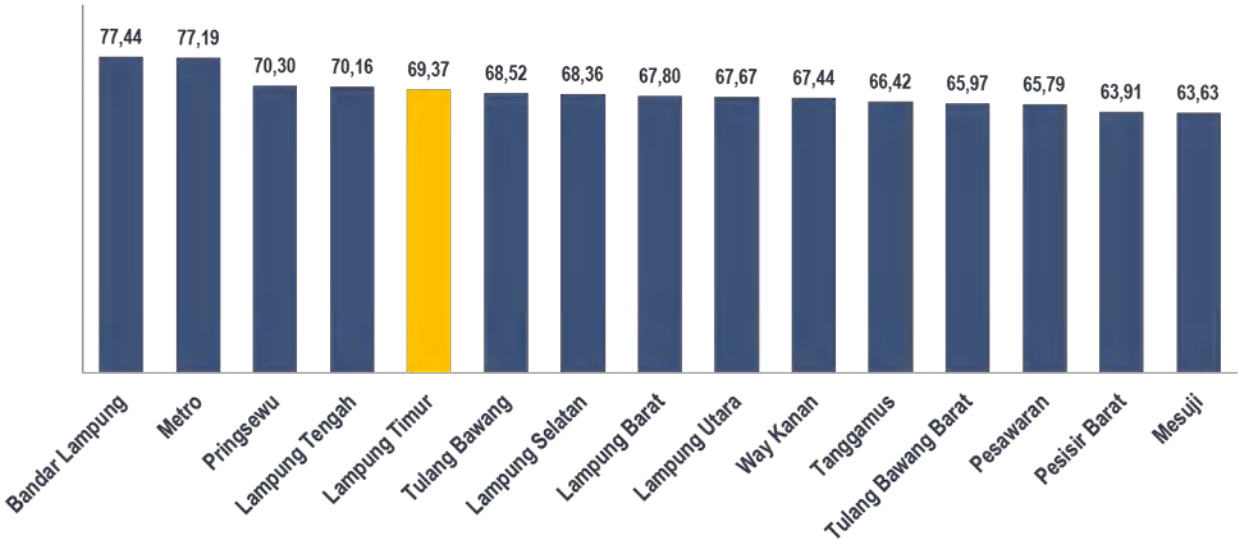
Tabel 2.111
Indeks Komponen IPM Kabupaten Lampung Timur

Komponen IPM HDI Component	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (tahun) Life Expectancy (year)	69,92	70,11	70,31	70,61	70,73
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Expected Years of Schooling (year)	12,41	12,44	12,83	12,84	12,85
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Mean Years of Schooling (year)	7,55	7,56	7,57	7,59	7,60
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun) Adjusted Expenditure per Capita (thousand rupiahs/people/year)	9 416	9 453	9 908	10 028	9 983
Index Pembangunan Manusia Human Development Index	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37

Sumber :BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

Tabel di bawah memperlihatkan perbandingan nilai IPM Kabupaten Lampung Timur dengan nilai IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, sekaligus memperlihatkan posisi Kabupaten Lampung Timur relatif terhadap seluruh kabupaten/kota lainnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kabupaten Lampung Timur menduduki peringkat ke lima setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu. Peringkat IPM Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu sama yaitu peringkat lima, walaupun secara indeks menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya.

Grafik 2.59
Perbandingan Nilai dan Rangking IPM di Provinsi Lampung, 2020



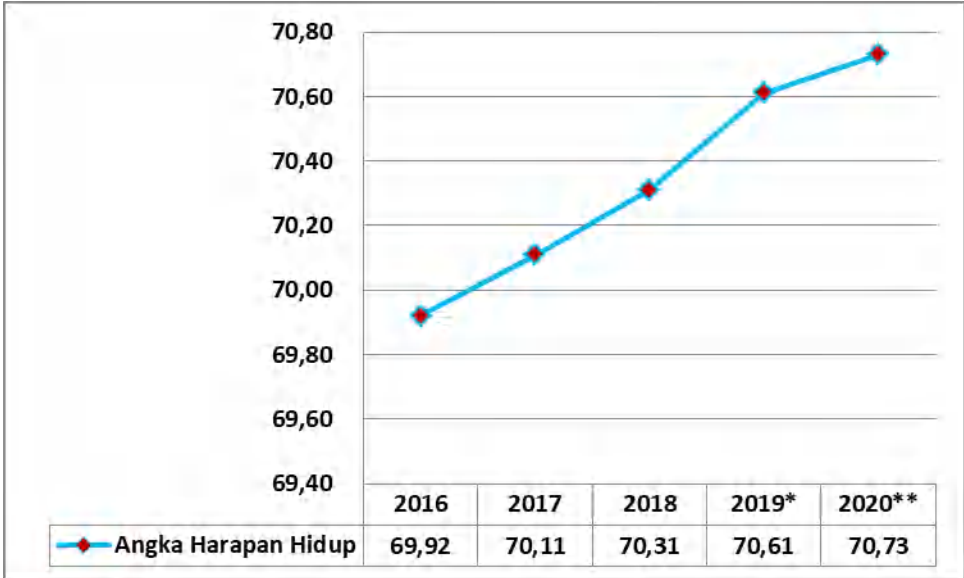
Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah Tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka ini sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*), namun karena data kematian menurut kelompok umur tidak tersedia maka cara ini tidak dapat dilakukan. Dalam publikasi ini, perhitungan angka harapan hidup dilakukan dengan metode tidak langsung (*indirect method*). Komponen IPM meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli. Tabel berikut menguraikan lebih jauh tentang komponen Indeks Pembangunan Manusia tersebut.

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 mencapai 70,73 tahun, meningkat dari Tahun 2019 yang sebesar 70,61 tahun. Naiknya angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan kehidupan penduduk Kabupaten Lampung Timur juga menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya di Kabupaten Lampung Timur.

Grafik 2.60
Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2020

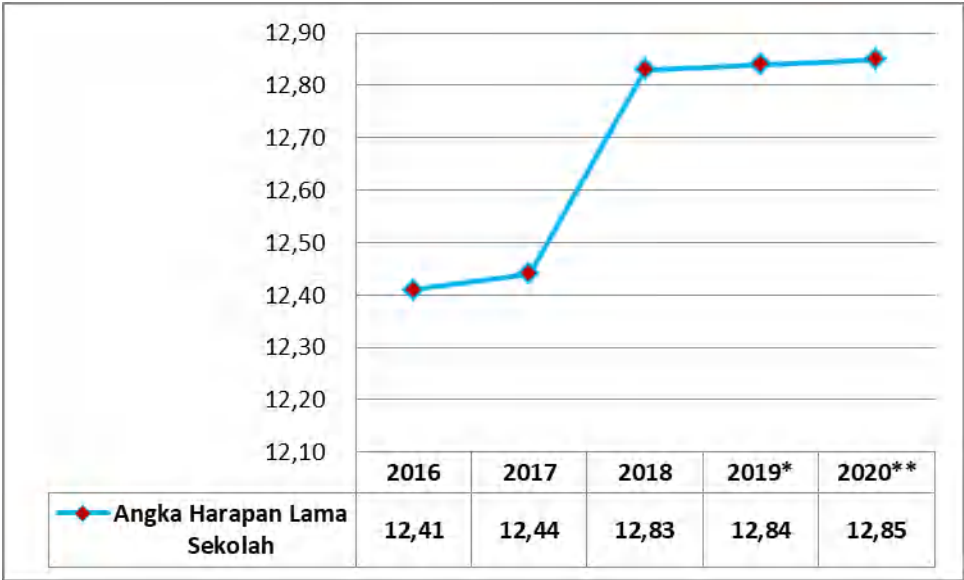


Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator di bidang pendidikan yang dapat memberikan gambaran tentang lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada Tabel terlihat bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 sebesar 12,85 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak pada Tahun 2020 ini diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,85 tahun. Meskipun kenaikan angka harapan lama sekolah tidak terlalu signifikan, namun apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur sudah cukup baik, yakni berada pada posisi keempat (setelah Metro, Bandar Lampung, dan Pringsewu).

Grafik 2.61
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

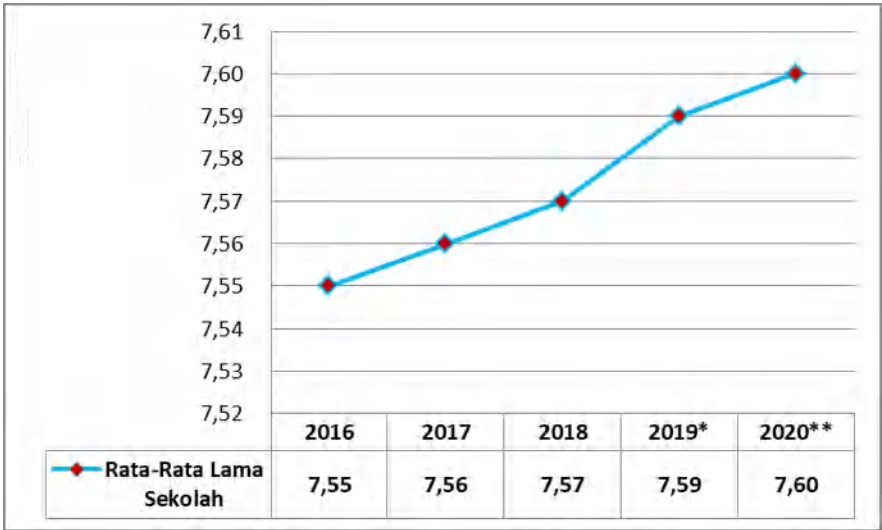
C. Rata-Rata Lama Sekolah

Selain harapan lama sekolah, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang dijalani penduduk dalam kegiatan pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 Tahun keatas.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 mencapai 7,60 tahun, meningkat 0,01 poin dibandingkan Tahun 2019. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Timur sudah menduduki kelas dua Sekolah Menengah Pertama.

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih banyak penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terlihat secara nyata hasilnya.

Grafik 2.62
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020



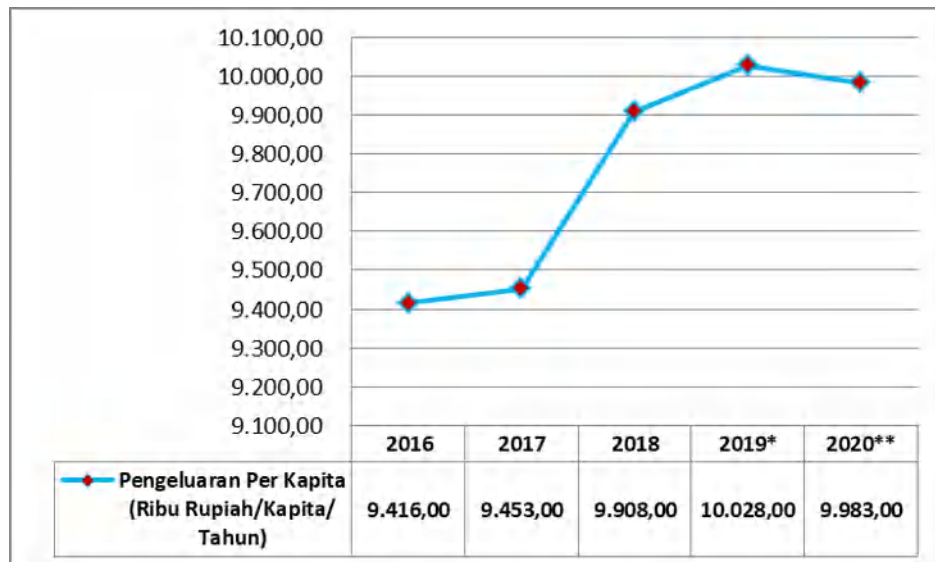
Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

D. Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)

Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkatnya pendapatan seseorang, diharapkan peningkatan kemampuan daya beli. Akan tetapi bila dikaji lebih mendalam bahwa hubungan tersebut tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah daripada tingkat kenaikan harga secara umum. Paritas daya beli juga sangat ditentukan oleh lokasi tempat tinggal seseorang. Dengan demikian penduduk dengan pendapatan sama belum tentu mempunyai paritas daya beli yang sama bila tempat tinggalnya berbeda.

IPM Lampung Timur dilihat dari faktor pengeluaran per-kapita pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk Lampung Timur melakukan pengeluaran sebesar 9,98 juta rupiah per kapita per tahun, mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2019.

Grafik 2.63
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

2.5 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri dari:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- Sosial

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan OPD memprioritaskan penyusunan rencana



pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ke dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dilakukan oleh OPD melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berikut ditampilkan jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.112
Tabel Jenis Layanan SPM Kabupaten Lampung Timur

No	PELAYANAN DASAR	JENIS LAYANAN	MUTU	PENERIMA LAYANAN	INDIKATOR	DATA	KET
1.	PENDIDIKAN	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 3. tata cara pemenuhan standar	1. anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada jenis pelayanan PAUD 2. anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada jenis pelayanan pendidikan dasar 3. anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan	- APK PAUD - APK SD - APK SMP - APM PAUD - APM SD - APM SMP - Rata-rata Lama Sekolah - Angka Partisipasi Sekolah	Subbab 2.2.2.3 Subbab 2.2.2.2 Subbab 2.3.1.1	
2.	KESEHATAN	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. Pelayanan kesehatan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa 2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan 3. tata cara pemenuhan standar	1. ibu hamil; 2. ibu bersalin; 3. bayi baru lahir; 4. balita; 5. usia pendidikan dasar; 6. usia produktif; 7. usia lanjut; 8. penderita hipertensi; 9. penderita diabetes melitus; 10. orang dengan gangguan jiwa berat; 11. orang terduga tuberkulosis; 12. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase anak pada Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6. persentase warga Usia 15 sampai dengan 59 Tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7. persentase warga usia 60 Tahun ke atas yang mendapatkan	Subbab 2.3.1.4 Subbab 2.3.1.5 Subbab 2.3.1.7 Subbab 2.3.1.6 Subbab 2.3.1.8 Subbab 2.3.1.9 Subbab 2.3.1.10 Subbab 2.3.1.11 Subbab 2.3.1.12 Subbab 2.3.1.13 Subbab 2.3.1.14	



		terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).			8. pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar 9. persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10. persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12. Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar 13. Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	Subbab 2.3.1.15	
3.	PEKERJAAN UMUM	1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.	1. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	1. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; 2. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.	1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll 2. Jumlah Pelanggan dan Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan 3. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Subbab 2.3.1.4 Subbab 2.3.1.4 Subbab 2.3.1.4	
4.	PERUMAHAN RAKYAT	1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	1. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. 2. standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam	1. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria. 2. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap	1. Fasilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana Tahun 2020	Subbab 2.3.1.4	



			dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. 3. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. 4. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. 5. standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani. 6. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.	rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.			
5	KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM	1. jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	1. standar operasional prosedur Satpol PP; standar sarana prasarana Satpol PP; 2. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; 3. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.	warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada.	1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada 2. Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kabupaten/kota serta Perkada. 3. Jumlah Pol PP dan PPNs yang terdidik dan berkompeten	Subbab 2.3.1.5 Subbab 2.3.1.5 Subbab 2.3.1.5	
6.	SOSIAL	1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial; 2. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. standar jumlah dan kualitas tata cara pemenuhan standar	1. Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar 2. Gelandangan dan Pengemis 3. pengungsi/penyintas	1. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 3. Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan 4. Persentase Rumah Tangga Menurut	Subbab 2.2.1.3 Subbab 2.2.1.3 Subbab 2.3.1.3 Subbab 2.3.1.6 Subbab 2.3.1.6	

		Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; 3. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.			Jenis Program Perlindungan Sosial 5. Jumlah Penerima Bantuan Sembako Masyarakat Terdampak COVID-19 6. Pelayanan Sosial di Luar Panti	Subbab 2.3.1.6	

2.6 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

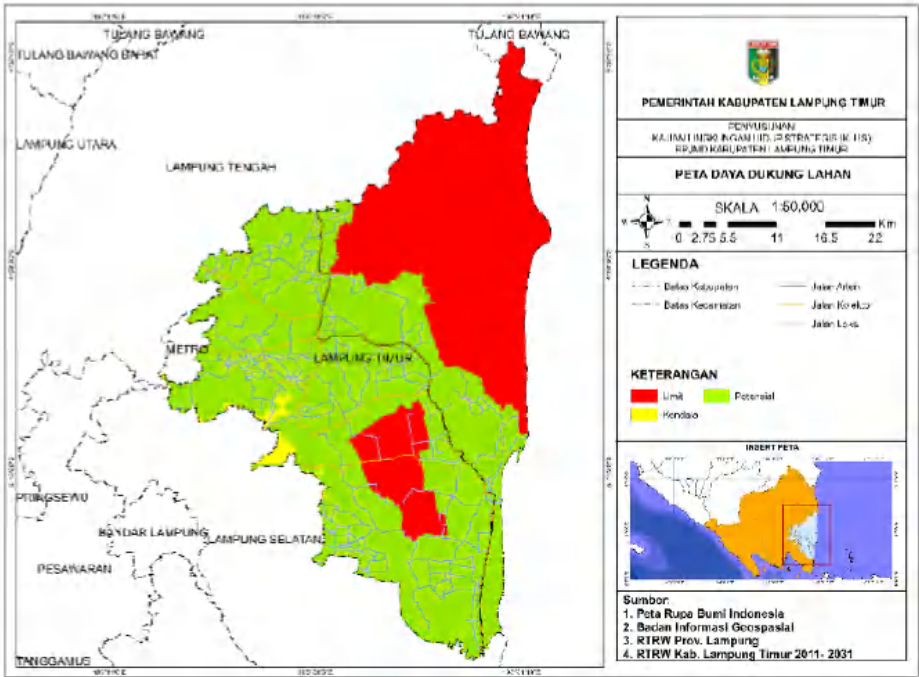
Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD, kondisi umum wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dibawah ini:

1. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan, kegiatan ekonomi, dan kesinambungan diantaranya. Daya dukung lahan pada dasarnya ditentukan oleh adanya ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Daya dukung lahan berfungsi mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan potensial, lahan memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan wilayah.

Analisis ini menggunakan data kondisi fisik lingkungan namun dengan metode ambang batas boleh dan tidak bolehnya dilakukan pembangunan, tidak berdasarkan skoring seperti analisis kemampuan lahan sehingga hasil analisis dapat dijadikan bahan dalam menganalisis lebih lanjut yaitu daya tampung lahan pada lahan potensi dan kendala, namun mutlak untuk mengeleminasi lahan limitasi agar pembangunan wilayah kedepannya tidak mengarah ke lahan limitasi.

Gambar 2.7
Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Timur



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2021

2. Daya Dukung Fungsi Lindung

Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLH tahun 2014 dan menggunakan data peruntukan lahan eksisting Kabupaten Lampung Timur, maka Didapatkan nilai daya dukung fungsi lindung sebesar 0,24 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung masih berada pada klasifikasi rendah.

3. Daya Dukung Lahan Terbangun

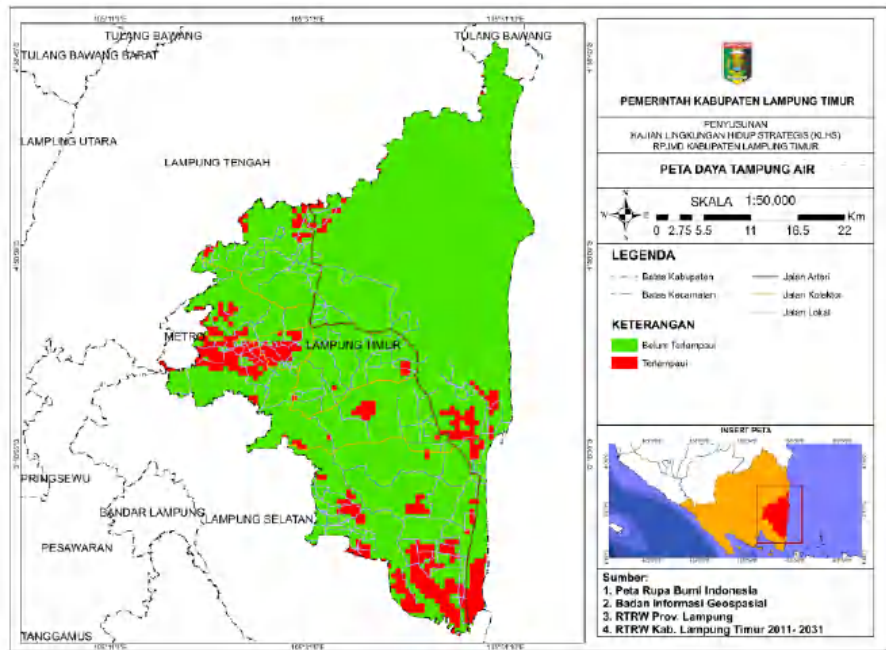
Daya dukung lahan terbangun dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan terbangun guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak serta mendapatkan fasilitas dan mendukung kegiatan lainnya. Analisis daya dukung (*Carrying Capacity Ratio/CCR*) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas yang ada di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah ada sebelumnya maka luas lahan terbangun di Kabupaten Lampung Timur seluas 61.675,05 hektare. Sedangkan luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas lahan terbangun menjadi seluas 74.010,06 hektare. Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun sebesar 3,23.

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Timur masih dalam kondisi baik dengan nilai DDLB > 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Timur masih memiliki daya tampung lahan untuk dibangun yang cukup dalam pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

4. Daya Dukung Air Permukaan

Daya Dukung Air dihitung berdasarkan gap atau selisih antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kebutuhan air didapatkan dari kebutuhan air untuk hidup layak yaitu 1600 m³/Kapita/Tahun.

Gambar 2.8
Peta Daya Tampung Air Kabupaten Lampung Timur



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2021

5. Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan ini pada dasarnya adalah perbandingan antara *supply* dan *demand*. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan dalam skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga untuk kebutuhan di masa depan. Karena daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Daya dukung pangan di Kabupaten Lampung Timur dilihat dari neraca beras diketahui bahwa ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 masih cukup melimpah dengan surplus sebesar 1.800.735,25 ton/tahun.

Tabel 2.113
Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Timur

No	Daya Dukung Pangan	Tahun 2019
1	Luas lahan panen (hektare)	456.358
2	Produktivitas lahan (ton/hekatre/tahun)	6,52
3	Produktivitas (ton)	2.977.09
4	Produksi beras (konversi GKG ke beras 64,02%)	1.905.933,65
5	Jumlah penduduk (jiwa)	1.051.994
6	Angka Konsumsi Beras (ton/orang/tahun)	0,1
7	Jumlah beras dikonsumsi (ton)	105.199,4
8	Daya Dukung Pangan	28,29
9	Surplus beras (ton)	1.800.734,25

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2021

6. Daya Tampung Lahan

Kapasitas lahan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun 2026 sebagai *demand* atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan per kecamatan dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2026 dengan asumsi bahwa jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (5 jiwa) yaitu sebesar 36m². Hasil akhir daya tampung lahan di dapat dari rasio SL/DL.

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila $SL > DL$ daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat apa urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut.

➤ **Jika $SL/DL > 1$**

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

➤ **Jika $SL/DL = 1$**

Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan.

➤ **Jika $SL/DL < 1$**

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

Kondisi daya tampung lahan merupakan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36m². Berdasarkan perhitungan menggunakan kriteria dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 9 meter persegi/jiwa, maka total kebutuhan lahan di Kabupaten Lampung Timur adalah



sebesar 757,44 hektare. Berikut merupakan data daya tampung lahan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.114
Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Lahan (hektare)	Ketersediaan Lahan Pemukiman (hektare)	Rasio
Way Jepara	58.135	41,86	2.604,90	62,23
Way Bungur	25.129	18,09	1.331,89	73,61
Waway Karya	31.767	22,87	3.916,20	171,22
Sukadana	71.496	51,48	3.241,15	62,96
Sekampung Udik	75.317	54,23	3.303,71	60,92
Sekampung	65.448	47,12	4.672,68	99,16
Raman Utara	38.132	27,46	1.843,63	67,15
Purbolinggo	45.406	32,69	2.581,07	78,95
Pekalongan	51.469	37,06	3.221,97	86,94
Pasir Sakti	38.525	27,74	2.683,54	96,75
Metro Kibang	24.498	17,64	2.022,96	114,69
Melinting	26.084	18,78	698,97	37,22
Mataram Baru	29.320	21,11	1.099,57	52,09
Margatiga	46.885	33,76	1.488,05	44,08
Marga Sekampung	26.737	19,25	1.020,00	52,99
Labuhan Ratu	46.712	33,63	2.648,11	78,74
Labuhan Maringgai	74.424	53,59	3.236,95	60,41
Jabung	53.057	38,20	1.961,38	51,34
Gunung Pelindung	21.606	15,56	946,54	60,85
Bumi Agung	18.369	13,23	558,08	42,20
Braja Slebah	24.032	17,30	2.653,57	153,36
Batanghari Nuban	45.495	32,76	3.287,07	100,35
Batanghari	62.821	45,23	3.287,80	72,69
Bandar Sribhawono	51.130	36,81	2.030,47	55,16
Lampung Timur	1.051.994	757,44	56.340,28	1836,05

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Berikut disajikan sandingan indikator SDGs dengan indikator RPJMD.

Tabel 2.115
Integrasi Indikator SDG's ke Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur

No	TUJUAN SDG's	INDIKATOR SDG's	INDIKATOR DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Subbab 2.2.1.3
		Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Cakupan Jaminan kesehatan	Subbab 2.3.1.2.3
		Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	Penerima Bantuan Program Sosial	Subbab 2.3.1.6
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Subbab 2.3.1.4
		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan	Subbab 2.3.2.2
		Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	Subbab 2.3.3.1
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu	Subbab 2.2.2.B.1
		Menurunnya angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi	Subbab 2.2.2.B.2
		Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Subbab 2.3.1.2.4
		meningkatnya cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Subbab 2.3.1.2.5
		meningkatnya cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Subbab 2.3.1.2.7
		meningkatnya cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Subbab 2.3.1.2.6
		meningkatnya cakupan anak sekolah mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase anak pada Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Subbab 2.3.1.2.8
		meningkatnya cakupan usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan	persentase warga Usia 15 sampai dengan 59 Tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Subbab 2.3.1.2.9
		meningkatnya cakupan lansia mendapatkan pelayanan kesehatan	persentase warga usia 60 Tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Subbab 2.3.1.2.10
		meningkatnya cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Subbab 2.3.1.2.11
		meningkatnya cakupan penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan	persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Subbab 2.3.1.2.12
		meningkatnya cakupan orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Subbab 2.3.1.2.13
		meningkatnya cakupan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	Subbab 2.3.1.2.14
		meningkatnya orang beresiko HIV mendapatkan pelayanan kesehatan	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	Subbab 2.3.1.2.15



No	TUJUAN SDG's	INDIKATOR SDG's	INDIKATOR DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
		Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Pemakaian Kontrasepsi Usia Subur	Subbab 2.3.2.7
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Subbab 2.2.2.2
		Meningkatnya angka melek aksara	Angka Melek Huruf	Subbab 2.2.2.1
		meningkatnya harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah	Subbab 2.4.4.3.B
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar PAUD	APK PAUD	Subbab 2.2.2.3
		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni PAUD	APM PAUD	Subbab 2.2.2.3
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD	APK SD	Subbab 2.2.2.3
		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD	APM SD	Subbab 2.2.2.3
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP	APK SMP	Subbab 2.2.2.3
		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP	APM SMP	Subbab 2.2.2.3
		Kepemilikan akte lahir untuk penduduk	Persentase Penduduk dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	Subbab 2.3.2.5
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Subbab 2.3.2.8
		Meningkatnya jumlah Desa Ramah Anak	Perkembangan Desa Ramah Anak	Subbab 2.3.2.8
		Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Pemakaian Kontrasepsi Usia Subur	Subbab 2.3.2.7
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama	Subbab 2.3.1.4
		Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Subbab 2.3.1.4
			Rumah tangga bersanitasi	Subbab 2.3.1.4
		Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Subbab 2.3.2.4
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Subbab 2.3.2.4
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan	Subbab 2.3.2.4
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita	Subbab 2.4.1.3
			Pertumbuhan Ekonomi	Subbab 2.2.1.1
			Inflasi	Subbab 2.2.1.2
		Terciptanya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Subbab 2.2.2.C
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Subbab 2.3.2.1
		Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lampung Timur	Subbab 2.3.3.4
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Infrastruktur Mantap	Jalan Mantap	Subbab 2.3.2.3
		Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	PDRB Industri Pengolahan	Subbab 2.2.1.1
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Koefisien Gini	Koefisien Gini	Subbab 2.4.1.4
		Tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Subbab 2.2.1.3
		Berkurangnya jumlah Desa Tertinggal	Desa Tertinggal	Subbab 2.3.2.6
		Meningkatnya jumlah Desa Maju	Desa Maju	Subbab 2.3.2.6
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Tersedianya akses bagi rumah tangga terhadap hunian yang layak	Kawasan Kumuh	Subbab 2.3.1.4
			Persentase rumah tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal	Subbab 2.3.1.4
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Subbab 2.3.1.4
		Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	Kejadian Bencana	Subbab 2.3.1.5
			Indeks Resiko Bencana	Subbab 2.1.1
		Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan	Pelayanan Persampahan	Subbab 2.3.2.4
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pola Konsumsi	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Subbab 2.4.1.1
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah	Potensi Luas Bahaya Bencana	Subbab 2.1.1
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	produksi perikanan tangkap dan budidaya	Subbab 2.3.3.3
		Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Kabupaten Lampung Timur	Subbab 2.3.3.3
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Subbab 2.3.2.4
			Jenis Tanah dan Kemampuan Lahan	Subbab 2.1.1.5



No	TUJUAN SDG's	INDIKATOR SDG's	INDIKATOR DALAM RPJMD	DATA TERSEDIA
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian	Opini BPK	Subbab 2.3.4.2
		Meningkatnya persentase Skor atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	SAKIP	Subbab 2.3.1.4.1
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas	Pertumbuhan ekspor daerah	Subbab 2.2.1.1

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan dalam Tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.116
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	Pertumbuhan PDRB/LPE (%)	4,2	4,58	3,78	3,85	-2,26	<
	PDRB per kapita ADHB (Rp.juta)	32,4	35,1	38,4	40,7	38,7	<
	Kemiskinan (%)	16,98	16,35	15,76	15,24	14,62	<
	Tingkat Inflasi (%)	2,7	2,83	2,01	N/A	N/A	N/A
	Indeks Gini	0,41	0,2	0,35	0,35	0,35	>
	Angka Melek Huruf	95,07	95,08	93,84	96,87	96,87	>
	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,55	7,75	7,57	7,59	7,7	>
	APM SD/MI	95,84	94,75	94,07	94,52	99,16	<
	APM SMP/MTs	74,13	73,49	73,05	71,29	90,12	>
	APK PAUD	100,93	99,8	99,08	91,41	N/A	N/A
	APK SD/MI/Paket A	106,71	105,95	106	104,02	103,87	<
	APK SMP/MTs/Paket B	97,14	97,92	97,09	93,66	96,95	>
	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,92	70,11	70,31	70,61	70,61	>
	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	2,37	4,51	2,5	4	3,8	>
	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	79	77	50	89	92,3	>
	Prevalensi Balita kurang gizi (%)	12,1	12,1	12,1	11,69	11,69	>
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	N/A	66,88	68,07	68,78	72,32	>
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B.1	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	PENDIDIKAN						
	Angka Melek Huruf (%)	95,07	95,08	93,84	96,87	96,87	>
	- APK PAUD	100,00	99,80	99,08	91,41	N/A	N/A
	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun (%)	93,15	95,24	94,76	94,61	99,80	<
	- APK SD/MI/Paket A	100,00	105,95	106,00	104,02	103,87	>
	- APM SD/MI	95,84	94,75	94,07	94,52	99,16	>
	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun (%)	65,18	73,10	65,39	66,58	94,61	<
	- APK SMP/MTs/Paket B	97,14	97,92	97,09	93,66	96,95	<
	- APM SMP/MTs	74,13	73,49	73,05	71,29	90,12	>
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	7,75	7,57	7,59	7,70	>
	Tingkat sertifikasi tenaga pendidik (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	90,60	>
2	KESEHATAN						
	Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	12,50	95,15	96,64	97,84	97,06	<
	Persentase kunjungan rawat jalan puskesmas	46,03	50,00	56,32	66,75	21,57	<
	Persentase warga Kabupaten Lampung Timur usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/A	76,30	80,97	71,12	71,15	<
	Persentase Balita diimbang berat badannya (D/S)	71,00	74,00	80,00	88,00	81,53	<
	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak)	71,72	71,77	72,17	73,00	73,70	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Penemuan penderita baru (CNR) TB per 100.000 penduduk	90,14	96,50	98,46	130,99	83,00	<
	Persentase kasus terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	N/A	50,23	50,63	76,46	79,69	<
	Insiden rate kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	45,30	26,70	20,00	43,38	62,80	<
	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat ARV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	N/A	47,70	42,11	55,97	60,56	<
	Persentase penatalaksanaan kasus kronis Filariasis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100,00	100,40	100,50	100,20	63,80	<
	Persentase puskesmas yang terakreditasi	29,40	70,60	100,00	100,00	100,00	=
	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,30	3,30	3,30	3,30	3,20	<
	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat	96,04	70,79	10,60	14,30	25,00	<
	% Jajanan Anak Sekolah (JAS) yang memenuhi syarat	N/A	66,20	67,60	68,80	70,00	<
	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	89,54	93,30	96,00	97,40	65,48	<
	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN I)	96,70	99,70	99,90	100,00	75,10	<
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	90,00	95,30	97,80	97,90	93,50	<
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	89,50	93,30	96,00	97,40	91,50	<
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	96,70	99,70	99,90	100,30	96,10	<
	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,96	72,60	68,90	83,26	73,70	<
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00	94,90	94,15	20,01	62,51	<
	Persentase warga Kabupaten Lampung Timur usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/A	7,90	48,82	10,16	15,91	<
	Prevalensi Hipertensi	8,30	8,30	26,80	20,54	20,54	<
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	N/A	15,70	56,51	36,88	8,77	<
	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	15,40	43,40	56,43	49,50	<
	Persentase orang dengan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	6,70	50,97	79,91	80,94	<
	Rasio dokter per 100.000 penduduk	6,50	9,10	9,70	10,60	12,74	>
	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	4,90	4,50	4,60	4,60	34,84	>
	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	49,04	53,00	54,00	68,00	68,00	>
	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	<
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	panjang jalan terbangun (km)	N/A	144,30	167,67	69,65	264,86	>
	jembatan terbangun (unit)	N/A	5,00	3,00	13,00	8,00	>
	Tingkat Kemanjapan Jalan Kabupaten (%)	61,40	64,80	54,90	54,40	61,17	<
	panjang jalan perdesaan terbangun (km)	N/A	N/A	106,80	50,15	59,99	<
	cakupan rehabilitasi dalam kondisi tanggap darurat (%)	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	<
	cakupan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	<
	usaha jasa konstruksi yang terbina (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	<
	rehabilitasi jaringan irigasi (lokasi)	4,00	33,00	40,00	31,00	26,00	<
	jaringan irigasi baru terbangun (lokasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (%)	0,00	64,00	64,00	58,00	40,00	<
4	PENATAAN RUANG						
	tersedianya dokumen acuan penataan ruang (dok)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	<
	tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	<
	pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW/RTBL (%)	N/A	N/A	N/A	51,43	54,84	<
5	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	RT pengguna sumber air minum bersih (%)	69,36	69,95	70,82	73,55	82,60	>
	RT berfasilitas tempat BAB (%)	99,40	N/A	N/A	N/A	94,15	<
	Rata-rata luas lantai (m2)	84,00	84,00	84,00	N/A	N/A	N/A
	cakupan penanganan kawasan kumuh kabupaten yang ditangani (ha)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah pelanggan air minum (SSR)	0,00	0,00	1224,00	0,00	2617,00	<
	program bantuan stimulan perumahan swadaya sesuai aturan (persen)	0,00	0,00	0,00	100,00	89,03	<
	rumah akibat bencana alam yang ditangani (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penerangan jalan umum (PJU) terbangun (unit)	407,00	215,00	300,00	256,00	397,00	>



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
6	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN LINMAS						
	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk	0,60	0,59	0,45	0,50	1,96	>
	Cakupan penegakan perda & perbup (%)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	<
	jumlah LINMAS per desa (orang)	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	=
	Siskamling berjalan dengan baik di seluruh tingkatan administrasi	0,00	24,00	24,00	33,00	37,00	<
	tingkat keamanan pelaksanaan pileg dan pilkada (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	=
	ketersediaan data dan informasi kepomongprajaaan (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	<
	terpantaunya keberadaan warga negara asing di wilayah Lam Tim	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	kerukunan antar warga terjaga (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	forum pembauran kebangsaan kecamatan terlaksana secara berkala (%)	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	<
	masyarakat yang dibina (orang)	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	=
	tingkat keamanan pelaksanaan pileg dan pilkada (%)				100,00	100,00	=
	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (jam)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	<
	ketersediaan data dan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	60,00	75,00	80,00	90,00	90,00	<
	cakupan korban bencana alam yang tertangani (%)	20,00	20,00	20,00	25,00	75,00	<
7	SOSIAL						
	Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	cakupan PMKS yang difasilitasi (persen)	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	>
	korban bencana yang terbantu (orang)	2475,00	329325,00	9665,00	1023,00	1150,00	>
	anak terlantar/jalanani yang difasilitasi (anak)	N/A	5,00	20,00	37,00	60,00	>
	penyandang cacat dan trauma yang difasilitasi (%)	N/A	N/A	10,00	15,00	20,00	<
	Eks Penyandang Penyakit Sosial yang difasilitasi (orang)	N/A	20,00	20,00	N/A	N/A	N/A
	masyarakat yang dibina (orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	pemuda/pelajar yang dibina (orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	keluarga pra sejahtera (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B.2	LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
8	TENAGA KERJA						
	perusahaan yang menerapkan K3 (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	=
	Balai Latihan Kerja (BLK)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada	=
	kasus perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	>
	rasio pencari kerja terdaftar yang mendapat pelatihan (%)		20,00	40,00	3,97	12,30	<
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,40	66,88	68,07	68,78	72,32	>
9	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	Desa Ramah Anak (desa)	0,00	26,00	26,00	31,00	37,00	>
	cakupan perempuan dan anak tindak kekerasan yang ditangani (orang)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	kader GSI, ibu hamil dan anak yang dibina (orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	cakupan perempuan dan anak tindak kekerasan yang ditangani (orang)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	keluarga pra sejahtera (%)	16,95	16,35	15,76	15,24	N/A	N/A
	cakupan perempuan dan anak tindak kekerasan yang ditangani (orang)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Indeks Pembangunan Gender	0,00	67,85	88,67	88,78	N/A	N/A
10	PANGAN						
	Skor Pola Pangan Harapan (%)	N/A	84,90	84,40	84,70	84,70	<
	tersedianya data harga pangan (%)	95,00	85,00	90,00	100,00	50,00	<
	cakupan usaha kecil yang dikembangkan (%)	35,00	40,00	50,00	75,00	70,00	<
	cakupan pembinaan distribusi dan harga pangan (%)	15,00	20,00	25,00	23,00	15,00	<
	devan kelahanan pangan berfungsi dengan baik (%)	80,00	80,00	85,00	90,00	90,00	>
	daerah rawan pangan yang tertangani (%)	N/A	N/A	50,00	65,00	65,00	<
	jumlah lumbung pangan (unit)	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00	>
11	PERTANAHAN						
	konflik pertanahan yang terselesaikan (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	>
	pengadaan tanah untuk pembangunan tersedia sesuai aturan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ketersediaan data dan informasi tanah (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	<
	cakupan tanah milik pemda yang bersertifikat (%)	N/A	N/A	80,00	80,00	80,00	<
12	LINGKUNGAN HIDUP						
	Sungai yang memenuhi baku mutu level B (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	>
	cakupan sumber daya air yang terjaga kualitasnya (%)	85,00	86,00	88,00	90,00	90,00	>
	cakupan ketersediaan data dan informasi pengendalian sumber daya alam dan LH (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	<
	buku laporan status lingkungan hidup daerah tersedia (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<
	bank sampah masyarakat yang terfasilitasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
13	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL						
	kepemilikan KTP elektronik(%)	73,00	79,00	89,00	91,00	94,00	<
	Kepemilikan akta kelahiran (%)	75,00	85,00	98,00	98,00	99,00	<
	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	<
14	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	Desa Maju	0,00	0,00		19,00	19,00	>
	penggunaan dana desa sesuai aturan (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	<
	panjang jalan desa terbangun (m)	421222,00	390964,00	237893,00	260043,00	177302,00	>
	Jumlah Desa Yang Menggunakan E-Budgeting (E-Village	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Posyantekdes Yang Terbentuk (unit)	0,00	0,00	25,00	231,00	5,00	=
	jumlah BUMDES (unit)	126,00	238,00	247,00	249,00	249,00	>
	jumlah desa yang memiliki DOKRENDES (desa)	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	=
	ketersediaan data dan informasi pembangunan infrastruktur desa/tahun (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	desa berprestasi (desa)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	=
	kader posyandu yang dibina (orang)	96,00	96,00	72,00	96,00	96,00	<
	cakupan kepala desa yang lulus pelatihan kepemimpinan (orang)	0,00	0,00	112,00	115,00	115,00	<
	APBDes sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	KSP yang terbina (kelompok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pemilihan kepala desa sesuai aturan (%)	0,00	100,00	0,00	100,00	N/A	N/A
	BPD berfungsi sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	penatausahaan keuangan desa sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
15	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,95	0,88	0,84	0,78	0,73	<
	Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (%)	71,44	72,52	72,67	73,34	73,98	<
	Unmeet Need	18,90	18,06	17,84	17,51	16,33	<
	ketersediaan data dan informasi keluarga dan individu dalam keluarga (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	KIE program KB berjalan sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	cakupan ketersediaan sarana dan prasarana PLKB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
16	PERHUBUNGAN						
	terminal darat beroperasi dengan baik (unit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<
	cakupan FLLAJ yang berfungsi dengan baik (%)	40,00	41,00	42,00	44,00	45,00	<
	cakupan APILL yang berfungsi dengan baik (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	<
	Jumlah kecelakaan lalu lintas (kasus)	143,00	144,00	179,00	152,00	132,00	>
	Cakupan angkutan umum lulus uji kir (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
17	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	cakupan pengaduan yang ditangani (%)	30,00	30,00	40,00	50,00	50,00	<
	e-Gov berfungsi dengan baik (%)	N/A	54,00	54,00	30,00	70,00	<
	Layanan pengaduan masyarakat online berfungsi dengan baik (%)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	<
	Stasiun Radio Pemkab berfungsi dengan baik (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<
	kelompok informasi masyarakat dibidang komunikasi dan informasi yang dibina/tahun (klp)	24,00	7,00	7,00	7,00	7,00	<
	buku data dan informasi rencana dan hasil pembangunan daerah kepada publik (dokumen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<
	ketersediaan data dan informasi menara telekomunikasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	menara telekomunikasi yang berizin (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	=
18	KOPERASI DAN UKM						
	Koperasi aktif (%)	16,60	18,40	19,70	20,30	32,57	<
	Jumlah UMKM (unit)	41327,00	41366,00	41526,00	41547,00	41447,00	<
	koperasi dan UMKM yang dibina (unit)	185,00	246,00	303,00	245,00	162,00	>
	jumlah UMKM yang dibina dan dikembangkan (unit)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	>
	jumlah koperasi yang dikembangkan (unit)	65,00	126,00	183,00	125,00	49,00	<
19	PENANAMAN MODAL						
	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14,00	12,00	10,00	7,00	=
	jumlah industri (unit)	8257,00	8787,00	8787,00	9911,00	10025,00	>
20	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	ketersediaan data & informasi potensi kepemudaan (%)	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	=
	pemuda penggerak desa yang dibina (orang)	N/A	30,00	30,00	30,00	30,00	=
	pemuda yang dilatih (orang)	N/A	60,00	30,00	30,00	20,00	<
	pemuda yang dibina (orang)	N/A	30,00	30,00	30,00	20,00	<
	guru olahraga (seluruh jenjang pendidikan) yang tersertifikasi (orang)	N/A	0,00	0,00	54,00	54,00	>
	jumlah atlet yang berprestasi di tingkat daerah/nasional (orang)	N/A	83,00	0,00	20,00	1,00	<
	jumlah gedung olahraga (unit)	N/A	0,00	0,00	1,00	1,00	=
	sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara (unit)	N/A	0,00	1,00	1,00	1,00	=
	peralatan olahraga yang didistribusikan (set)	N/A	0,00	160,00	0,00	100,00	=



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
21	KEBUDAYAAN						
	kelompok adat budaya masyarakat yang dibina dan difasilitasi (kelompok)	N/A	N/A	N/A	586,00	586,00	<
	ketersediaan data dan informasi budaya daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	pentas seni yang diikuti/diselenggarakan pertahun (even)	N/A	10,00	10,00	12,00	0,00	<
	kelompok pelestari budaya yang terfasilitasi (kelompok)	N/A	10,00	10,00	5,00	6,00	>
22	PERPUSTAKAAN						
	koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	8691,00	9156,00	9334,00	9754,00	9754,00	<
	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	16143,00	18789,00	24652,00	25167,00	26007,00	<
	pengunjung perpustakaan/minat baca (rasio minat baca)	0,28	0,28	0,30	0,48	0,48	>
	perpustakaan desa aktif (%)	28,00	28,00	28,00	100,00	100,00	>
	indeks kepuasan masyarakat layanan perpuustakaan (nilai mutu)	60,00	60,00	70,00	75,00	75,00	>
23	KEARSIPAN						
	Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	8,00	16,00	24,00	24,00	24,00	=
	Retrival arsip (menit)	50,00	45,00	30,00	30,00	30,00	=
	jumlah arsip yang dikelola (arsip)	10000,00	3500,00	12300,00	17542,00	17542,00	>
	jumlah desa sadar arsip (desa)	20,00	30,00	70,00	80,00	64,00	<
B.3	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
24	PARIWISATA						
	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun (orang)	289568,00	182422,00	941511,00	859970,00	12810,00	<
	Kontribusi Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) terhadap PDRB	1,15	1,14	1,15	1,21	1,00	>
	even yang digelar/tahun (even)	4,00	22,00	99,00	100,00	7,00	<
	objek wisata yang ditangani (lokasi)	3,00	4,00	15,00	2,00	1,00	<
	kelompok/saka pariwisata yang difasilitasi (klp)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	>
25	PERTANIAN						
	produktivitas padi (kw/ha)	52,33	51,77	47,61	52,07	52,15	<
	produktivitas jagung (kw/ha)	48,60	51,86	54,01	54,09	54,87	<
	produktivitas ubi kayu (kw/ha)	247,55	275,50	253,23	289,55	239,27	>
	even promosi pertanian yang dilaksanakan/diikuti (even)	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	<
	even promosi perkebunan yang dilaksanakan/diikuti (even)	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	<
	Produksi padi (ton)	645913,00	667730,00	660345,00	669412,00	436189,91	<
	produksi jagung (ton)	473617,00	735742,84	784009,00	904147,00	833698,67	>
	produksi ubi kayu (ton)	1294411,52	1184497,02	909794,18	891104,00	476577,99	<
	Produksi kakao (ton)	5722,30	3543,80	2885,38	3297,00	3234,00	<
	produksi kelapa (ton)	15083,00	14713,00	13367,20	13372,00	12131,00	<
	produksi kelapa sawit (ton)	8959,00	7849,00	8036,60	8055,00	8822,00	<
	produksi lada (ton)	1959,00	1634,00	1173,53	1189,00	1141,00	<
	Produksi karet (ton)	5392,00	4716,00	5043,90	5047,00	7089,00	>
	produksi tembakau (ton)	N/A	N/A	519,00	519,00	N/A	N/A
	jumlah kelompok tani swasembada benih (klp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<
	cakupan penyuluh ahli (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	83,00	<
	BP3K yang ditangani (unit)	2,00	2,00	3,00	2,00	0,00	<
	Produksi daging (ton)	5832,54	6402,64	5007,54	7024,06	1326,00	<
	produksi telur (ton)	13260,95	14042,76	14491,41	14586,34	16970,13	>
	persentase kejadian penyakit menular ternak yang tertangani (%)	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	>
	peningkatan populasi ternak (%)	2,30	2,30	2,40	2,40	2,80	>
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	PERDAGANGAN						
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,03	8,07	8,08	8,69	8,80	>
	Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	N/A	14,30	0,30	N/A	N/A	N/A
	pasar yang diberdayakan (unit)	1,00	3,00	5,00	3,00	1,00	<
	penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan (%)	96,00	97,00	98,00	96,00	96,00	<
	cakupan pengawasan metrologian pasar daerah (%)	10,00	15,00	20,00	60,00	70,00	>
	pasar daerah yang tertata dengan baik (unit)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	>
	cakupan pasar daerah yang tertangani sistem persampahan TPA (unit)	2,00	2,00	3,00	3,00	5,00	=
	kenaikan retribusi pasar/tahun (%)	43,60	41,70	20,00	1,15	-18,00	<
27	PERINDUSTRIAN						
	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	6,74	6,94	7,39	7,78	7,55	<
	masyarakat dapat mengakses sarana informasi perindustrian (%)	60,00	60,00	60,00	65,00	75,00	<
	cakupan IKM yang dibina (%)	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00	<
	jumlah IKM yang dibina (unit)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	=
	UMKM dan IKM yang terfasilitasi HAKI (unit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<
28	PERIKANAN						
	produksi perikanan budidaya (ton)	13.604,36	68.813,66	29569,00	16307,59	8472,28	<
	produksi perikanan tangkap (ton)	39330,44	38543,83	37790,95	33214,66	46069,50	<
	konsumsi ikan perkapita (kg perkapita)	24,00	35,00	31,27	31,27	31,27	>
	ketersediaan data dan informasi perikanan (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	
B.4	PENUNJANG URUSAN						
29	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
	cakupan ketersediaan kebutuhan data dan informasi perencanaan	50,00	60,00	70,00	75,00	75,00	<
	persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (%)	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	=
	persentase kesenjangan pencapaian sasaran pokok RPJMD dengan realisasi tahunan (%)	≤30	≤30	≤30	≤30	≤30	=
	persentase kesenjangan pencapaian sasaran pokok RPJMD dengan realisasi tahunan bidang perekonomian (%)	13,47	11,68	9,21	11,12	11,12	>
	persentase kesenjangan pencapaian sasaran pokok RPJMD dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya (%)	1,31	-0,51	0,02	0,54	0,54	>
	persentase kesenjangan pencapaian sasaran pokok RPJMD dengan realisasi tahunan bidang prasarana dan SDA (%)	≤30	≤30	≤30	8,00	8,00	>
30	KEUANGAN						
	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
	Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah sesuai aturan (%)	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00	<
	Pertumbuhan PAD (%)	23,50	118,32	-39,32	17,52	27,00	>
	administrasi keuangan daerah sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Terbayarnya PJU (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	penyaluran bansos dan hibah sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	terbayarnya gaji aparatur sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Penganggaran daerah sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
31	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	cakupan pejabat yang telah lulus diklat kepemimpinan (%)	44,36	44,11	33,08	32,61	27,94	<
	cakupan ASN yang mengikuti diklat/pelatihan (%)	5,56	0,00	5,60	0,00	0,00	<
	terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	>
	ASN yang terfasilitasi (orang)	2,00	10,00	13,00	13,00	100,00	>
	Cakupan ASN yang terfasilitasi (persen)	99,88	99,86	98,47	99,93	99,90	>
	administrasi pindah tugas dan pensiun sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	aparatur taat aturan (%)	99,90	99,97	99,96	99,77	99,62	<
32	PENGAWASAN						
	persentase temuan pengelolaan keuangan oleh BPK/BPKP/lrjen	75,00	75,00	75,00	78,00	80,00	<
	persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang (%)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	<
	persentase pengaduan yang tertangani (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	<
	tersedianya review laporan keuangan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	SDM APJP yang bersertifikat (orang)	5,00	5,00	8,00	10,00	15,00	=
	laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	91,20	93,09	93,36	89,29	81,49	<
33	SEKRETARIAT DAERAH						
	penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai aturan (%)	75,00	80,00	83,00	87,00	89,00	<
	Skala Kepuasan Layanan Masyarakat (Skala 1-10)	N/A	N/A	7,90	8,00	8,10	>
	persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	=
	penataan kelembagaan dan tata laksana organisasi sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	penetapan kinerja SKPD tersedia (%)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM (%)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	road map reformasi birokrasi (dokumen)	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	=
	analisis jabatan/analisis beban kerja perangkat daerah tersedia	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	SOP ketatalaksanaan, sistem kerja dan budaya kerja perangkat daerah tersedia (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	terfasilitasinya rapat koordinasi dengan instansi terkait (%)	6,00	6,00	6,00	N/A	6,00	<
34	SEKRETARIAT DPRD						
	ketercapaian pelaksanaan prolegda (%)	105,88	N/A	72,22	100,00	46,15	<
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pertumbuhan PAD (%)	12,34	17,87	11,75	17,99	27	>
2	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk	0,44	0,61	0,46	0,51	0,35	>
3	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	-	-	-	76,66	70,20	>
4	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14,00	12,00	10,00	7,00	=
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37	<
6	Indeks Pembangunan Gender	87,51	87,85	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,49	3,89	3,83	2,89	2,64	>

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi capaian kinerja yang mencapai dan melampaui target adalah sebanyak 126 indikator atau mencapai 44,52 persen. Sedangkan untuk indikator kinerja yang belum mencapai target sebanyak 134 indikator atau 47,52 persen. Untuk indikator yang tidak tersedia data realisasi capaian adalah sebanyak 22 indikator atau sebesar 7,77 persen.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aktivitas pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Timur kurun waktu lima tahun terakhir secara umum diarahkan dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD 2016-2021, tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan program dan kegiatan banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Walaupun partisipasi masyarakat ternyata juga ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian ketersediaan dana pembangunan masih tetap merupakan faktor yang sangat menentukan.

Gambaran keuangan daerah yang disajikan pada Bab ini seyogyanya berisi gambaran periode kinerja keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016-2021, namun untuk penyajian datanya diuraikan mulai Tahun 2015 sebagai data dasar

atau kondisi *eksisting* periode Tahun 2016-2021, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, sedangkan untuk data Tahun 2020 menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan data sangat sementara dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Secara struktur, APBD Kabupaten Lampung Timur yang termuat dalam LPPA Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2019 dan LRA Tahun 2020 menggunakan struktur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana diketahui sejak Tahun Anggaran 2021 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kabupaten Lampung Timur telah menggunakan struktur APBD yang sesuai dengan regulasi terbaru.

Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka struktur APBD Tahun Anggaran 2022-2026 yang notabene merupakan periode RPJMD 2022-2026 akan menggunakan struktur APBD yang baru. Menyikapi kondisi tersebut, untuk lebih memudahkan dalam menganalisis dan memproyeksikan kapasitas fiskal daerah lima tahun ke depan, maka dalam penyajian data keuangan daerah dalam Bab ini, dilakukan penyesuaian terhadap data LPPA menyesuaikan dengan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, struktur APBD Kabupaten Lampung Timur terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

A. Komponen Pendapatan:

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. komponen pendapatan dapat terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, struktur pendapatan daerah dibandingkan dengan struktur pendapatan daerah sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Pendapatan Daerah Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 64 Tahun 2020

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PERMENDAGRI 64 TAHUN 2020
PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN DAERAH
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH a Pajak Daerah b Hasil Retribusi Daerah c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2 DANA PERIMBANGAN a Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak b Dana Alokasi Umum c Dana Alokasi Khusus 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a Pendapatan Hibah b Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 PENDAPATAN ASLI DAERAH a Pajak Daerah b Hasil Retribusi Daerah c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2 PENDAPATAN TRANSFER a Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat 1 Dana Perimbangan (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2 Dana Insentif Daerah 3 Dana Otonomi Khusus 4 Dana Keistimewaan 5 Dana Desa b Pendapatan Tranfer Antar Daerah 1 Pendapatan Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a Pendapatan Hibah b Dana Darurat c Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan struktur tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Timur adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

a. Pajak Daerah, yang diproyeksikan bersumber dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir

-
- 7) Pajak Air Tanah
 - 8) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (Batu Belah)
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - 10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - b. Retribusi Daerah, yang diproyeksikan bersumber dari :
 - 1) Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum
 - 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 3) Retribusi Parkir Tempat Khusus
 - 4) Retribusi Izin Trayek
 - 5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - 6) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan/Jasa Potong Hewan
 - 7) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 8) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 9) Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan
 - 10) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 11) Retribusi IMB
 - 12) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (Ho)
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang diproyeksikan bersumber dari :
 - 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
 - 2) Penerimaan Jasa Giro
 - 3) Pendapatan Bunga
 - 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 5) Pendapatan Denda Pajak
 - 6) Pendapatan Denda Retribusi
 - 7) Pendapatan dari Pengembalian
 - 8) Pendapatan BLUD
 - 9) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diproyeksikan bersumber dari :
 - 1) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
2. Pendapatan Transfer
- a. Transfer Pemerintah Pusat, yang diproyeksikan bersumber dari :
 - 1) Dana Perimbangan
 - i. Dana Transfer Umum
 - Dana Bagi Hasil, yang diproyeksikan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non Pajak.
 - Dana Alokasi Umum
 - ii. Dana Transfer Khusus
 - DAK Fisik
 - DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Desa
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil

- 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diproyeksikan bersumber dari pendapatan hibah pemerintah pusat.

B. Komponen Belanja:

Belanja adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Secara regulasi, komponen belanja daerah terdiri dari

- 1) Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
- 2) Belanja Modal
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer

Untuk lebih jelasnya, struktur belanja daerah dibandingkan dengan struktur belanja daerah sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Struktur Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan
Permendagri 64 Tahun 2020

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PERMENDAGRI 64 TAHUN 2020
BELANJA DAERAH	BELANJA DAERAH
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG a Belanja Pegawai b Belanja Subsidi c Belanja Hibah d Belanja Bantuan Sosial e Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa f Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik g Belanja Tidak Terduga	1 BELANJA OPERASI a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Bunga d Belanja Subsidi e Belanja Hibah f Belanja Bantuan Sosial
2 BELANJA LANGSUNG a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	2 BELANJA MODAL a Belanja Modal Tanah b Belanja Modal Peralatan dan Mesin c Belanja Modal Gedung dan Bangunan d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4 BELANJA TRANSFER a Belanja Bagi Hasil b Belanja Bantuan Keuangan

C. Komponen Pembiayaan:

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara regulasi, komponen pembiayaan daerah terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Untuk lebih jelasnya, struktur pembiayaan daerah dibandingkan dengan struktur pembiayaan daerah sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Struktur Pembiayaan Daerah Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 64 Tahun 2020

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PERMENDAGRI 64 TAHUN 2020
PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman Daerah; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; b. Penyertaan Modal Daerah; c. Pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Penerimaan Pembiayaan a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman Daerah; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan f. Penerimaan Piutang Daerah. 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; c. Pembayaran Pokok Utang; dan d. Pemberian Pinjaman Daerah.

Gambaran kinerja keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2019 berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2015-2020

Kode Rekening	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH	1.673.230.554.391,56	1.916.378.911.952,30	2.017.656.162.813,36	2.051.436.200.614,82	2.132.688.979.133,90	2.070.599.236.920,02	2,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.496.936.513,56	94.924.247.670,30	111.886.192.443,77	125.035.523.317,06	147.527.535.828,35	157.429.128.814,97	13,58
4.1.01	Pajak Daerah	25.086.449.376,88	29.685.570.227,78	39.717.698.427,60	53.213.791.410,00	62.332.058.166,00	60.205.717.890,60	20,37
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	4.429.279.813,00	4.831.882.437,00	5.058.720.698,00	5.715.607.215,00	3.925.575.233,00	3.361.926.570,00	(7,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.184.386.127,55	1.829.118.619,64	2.282.977.078,32	2.739.592.254,28	3.176.760.331,26	3.460.827.024,59	17,43
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.796.821.196,13	58.577.676.385,88	64.826.796.239,85	63.366.532.437,78	78.093.142.098,09	90.400.657.329,78	11,85
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.587.930.547.878,00	1.821.351.589.282,00	1.809.637.060.869,59	1.830.850.797.297,76	1.867.168.337.305,55	1.803.603.918.105,05	(0,22)
4.2.01	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.524.920.546.356,00	1.726.269.375.796,00	1.707.055.295.931,00	1.729.207.994.709,00	1.748.835.897.944,00	1.690.193.726.851,00	(0,51)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.164.854.841.356,00	1.555.333.164.796,00	1.489.412.947.931,00	1.494.906.155.709,00	1.475.128.391.944,00	1.371.023.450.851,00	(3,06)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	91.635.128.356,00	64.025.787.197,00	82.280.387.544,00	69.740.971.630,00	43.041.853.197,00	45.068.143.431,00	(5,08)
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	974.792.193.000,00	1.081.165.467.000,00	1.062.555.526.000,00	1.069.168.109.000,00	1.106.577.701.000,00	1.007.072.973.000,00	(1,65)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	98.427.520.000,00	410.141.910.599,00	344.577.034.387,00	355.997.075.079,00	325.508.837.747,00	318.882.334.420,00	(5,82)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	40.653.243.000,00	-
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	360.065.705.000,00	170.936.211.000,00	217.642.348.000,00	234.301.839.000,00	273.707.506.000,00	278.517.033.000,00	13,39
4.2.02	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	63.010.001.522,00	95.082.213.486,00	102.581.764.938,59	101.642.802.588,76	118.332.439.361,55	113.410.191.254,05	4,81
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	63.010.001.522,00	95.082.213.486,00	102.581.764.938,59	101.642.802.588,76	118.332.439.361,55	113.410.191.254,05	4,81
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	803.070.000,00	103.075.000,00	96.132.909.500,00	95.549.880.000,00	117.993.106.000,00	109.566.190.000,00	23.295,19
4.3.01	Pendapatan Hibah	803.070.000,00	103.075.000,00	96.132.909.500,00	95.549.880.000,00	117.993.106.000,00	109.566.190.000,00	23.295,19
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	1.733.408.499.651,80	1.922.657.369.455,99	1.947.368.023.837,90	2.002.789.116.451,75	2.086.664.488.096,44	2.129.428.929.847,88	2,59
5.1	BELANJA OPERASI	1.276.401.797.949,59	1.263.379.318.488,29	1.279.784.183.573,00	1.356.855.384.184,11	1.468.267.875.349,90	1.451.350.451.625,60	3,59
5.1.01	Belanja Pegawai	869.415.532.130,00	895.178.247.853,00	815.649.891.260,00	840.753.460.205,00	858.136.886.212,00	818.228.594.498,00	(2,10)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.045.445.339,59	335.280.875.385,29	421.238.977.037,00	470.076.499.661,11	558.554.290.369,90	539.746.033.127,60	13,17
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	640.000.000,00	-	-	-	800.000.000,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	60.200.820.480,00	32.895.195.250,00	40.751.315.276,00	44.516.674.318,00	49.179.698.768,00	91.742.824.000,00	32,54
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	25.000.000,00	2.144.000.000,00	1.508.750.000,00	1.597.000.000,00	1.633.000.000,00	2.113,62
5.2	BELANJA MODAL	255.907.955.827,21	364.083.387.167,70	321.795.859.200,90	285.430.669.667,64	204.551.856.450,54	256.809.425.669,28	(6,43)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	268.625.050,00	236.773.100,00	113.520.000,00	177.760.000,00	1.377.907.696,00	82.224.839,00	146,41
5.4	BELANJA TRANSFER	200.830.120.825,00	294.957.890.700,00	345.674.461.064,00	360.325.302.600,00	412.466.848.600,00	421.186.827.714,00	9,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	116.510.125,00	-	6.525.808.664,00	4.891.497.000,00	5.492.391.500,00	5.792.663.000,00	(2,43)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	200.713.610.700,00	294.957.890.700,00	339.148.652.400,00	355.433.805.600,00	406.974.457.100,00	415.394.164.714,00	9,09



Kode Rekening	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PEMBIAYAAN DAERAH	97.425.295.888,00	37.231.762.609,43	30.913.875.169,33	101.202.014.144,73	149.844.298.307,80	195.868.789.345,26	72,29
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	98.436.116.904,00	37.231.762.609,43	30.913.875.169,33	101.202.014.144,73	149.844.298.307,80	195.868.789.345,26	72,29
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	98.436.116.904,00	37.231.762.609,43	30.913.875.169,33	101.202.014.144,73	149.844.298.307,80	195.868.789.345,26	72,29
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.010.821.016,00	-	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang	10.821.016,00	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	97.425.295.888,00	37.231.762.609,43	30.913.875.169,33	101.202.014.144,73	149.844.298.307,80	195.868.789.345,26	72,29
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	37.247.350.627,76	30.953.305.105,74	101.202.014.144,79	149.849.098.307,80	195.868.789.345,26	137.039.096.417,40	68,92

Sumber : LRA dan Data diolah

Rincian anggaran setiap komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tersebut secara lebih lengkap diuraikan pada penjelasan di bawah ini:

3.1.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan data, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2020 terus mengalami peningkatan, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

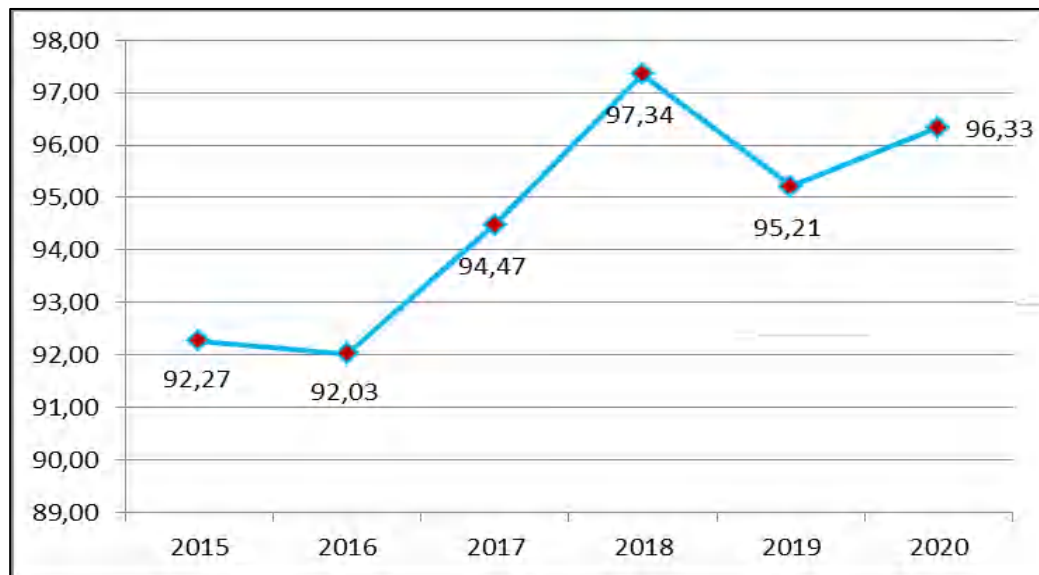
Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Selisih
2015	1.813.502.876.000,17	1.673.230.554.391,56	92,27	(140.272.321.608,61)
2016	2.082.365.407.446,00	1.916.378.911.952,30	92,03	(165.986.495.493,70)
2017	2.135.687.446.000,00	2.017.656.162.813,36	94,47	(118.031.283.186,64)
2018	2.107.403.562.527,50	2.051.436.200.614,82	97,34	(55.967.361.912,68)
2019	2.239.935.315.960,26	2.132.688.979.133,90	95,21	(107.246.336.826,36)
2020	2.149.418.494.493,00	2.070.599.236.920,02	96,33	(78.819.257.572,98)
Rata-rata	2.142.962.045.285,35	2.037.751.898.286,88	94,61	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Berdasarkan data di atas, realisasi tertinggi pendapatan daerah tercapai di Tahun Anggaran 2018 dan realisasi terendah di Tahun 2016, sebagaimana ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun Anggaran 2015-2020, proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur T.A. 2015-2020 ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur T.A. 2015-2020

Jenis Pendapatan	Kontribusi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)						Rata-Rata Kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapatan Asli Daerah	5,05	4,95	5,55	6,10	6,92	7,60	6,03
Pendapatan Transfer	94,90	95,04	89,69	89,25	87,55	87,11	90,59
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,05	0,01	4,76	4,66	5,53	5,29	3,38
Total	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendptan daerah merupakan yang terbesar dengan rata-rata 90,59%. Untuk kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, yaitu sebesar 6,03%, disusul oleh sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sebesar 3,38%.

Grafik 3.2
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur T.A. 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Dengan tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah, dapat dikatakan bahwa rasio ketergantunga Kabupaten Lampung Timur terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun antar daerah masih relatif tinggi. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Sebaliknya, dengan semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar.

Secara rinci, target dan realisasi pendapatan daerah periode Tahun Anggaran 2015-2020 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

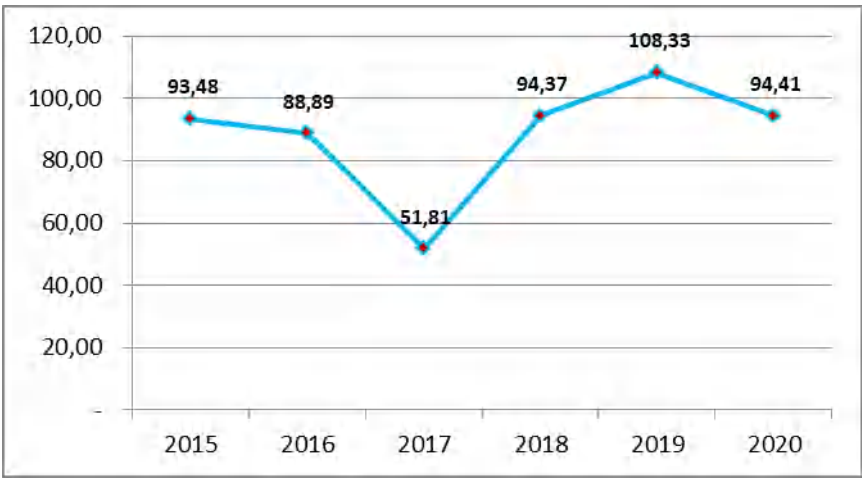
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dalam APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2019 terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan(d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun Anggaran 2015-2020, realisasinya rata-rata mencapai 88,55%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	90.391.025.512,00	84.496.936.513,56	93,48	(5.894.088.998,44)
2016	106.785.510.887,00	94.924.247.670,30	88,89	(11.861.263.216,70)
2017	215.971.472.400,00	111.886.192.443,77	51,81	(104.085.279.956,23)
2018	132.489.811.269,00	125.035.523.317,06	94,37	(7.454.287.951,94)
2019	136.179.395.752,26	147.527.535.828,35	108,33	11.348.140.076,09
2020	166.753.952.654,26	157.429.128.814,97	94,41	(9.324.823.839,29)
Rata-rata	141.428.528.079,09	120.216.594.098,00	88,55	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

a. Pajak Daerah

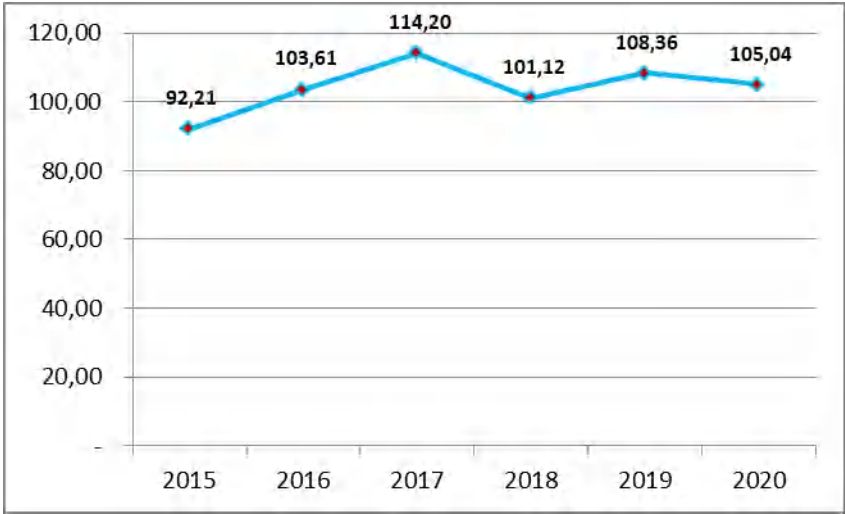
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi pajak daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020 secara rata-rata lebih tinggi dari target yang ditetapkan, atau mencapai 104,90%, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2015	27.207.000.000,00	25.086.449.376,88	92,21	(2.120.550.623,12)
2016	28.650.104.897,00	29.685.570.227,78	103,61	1.035.465.330,78
2017	34.779.044.400,00	39.717.698.427,60	114,20	4.938.654.027,60
2018	52.626.824.225,00	53.213.791.410,00	101,12	586.967.185,00
2019	57.524.664.900,00	62.332.058.166,00	108,36	4.807.393.266,00
2020	57.317.597.200,00	60.205.717.890,60	105,04	2.888.120.690,60
Rata-rata	43.017.539.270,33	45.040.214.249,81	104,09	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.4
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang berupa pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2020, rata-rata capaian realisasi retribusi daerah mencapai 90,35%, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	2.614.848.522,00	4.429.279.813,00	169,39	1.814.431.291,00
2016	7.777.662.997,00	4.831.882.437,00	62,13	(2.945.780.560,00)
2017	11.152.500.000,00	5.058.720.698,00	45,36	(6.093.779.302,00)
2018	6.009.000.000,00	5.715.607.215,00	95,12	(293.392.785,00)
2019	4.620.679.500,00	3.925.575.233,00	84,96	(695.104.267,00)
2020	3.948.905.750,00	3.361.926.570,00	85,14	(586.979.180,00)
Rata-rata	6.020.599.461,50	4.553.831.994,33	90,35	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.5
Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan yang bersumber dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah, selama periode Tahun Anggaran 2015-2020, rata-rata realisasi mencapai 88,75%, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	3.000.000.000,00	2.184.386.127,55	72,81	(815.613.872,45)
2016	3.027.191.993,00	1.829.118.619,64	60,42	(1.198.073.373,36)
2017	2.300.000.000,00	2.282.977.078,32	99,26	(17.022.921,68)
2018	2.739.592.254,28	2.739.592.254,28	100,00	-
2019	3.176.760.331,26	3.176.760.331,26	100,00	-
2020	3.460.827.024,26	3.460.827.024,59	100,00	0,33
Rata-rata	2.950.728.600,47	2.612.276.905,94	88,75	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.6
Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

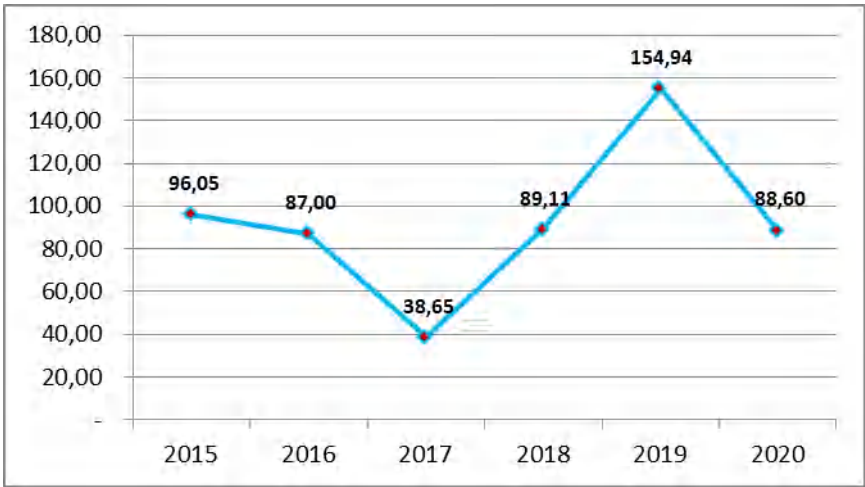
Penerimaan yang bersumber dari sektor Lain-Lain PAD yang Sah selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 rata-rata realisasi adalah sebesar 92,39%, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	54.965.602.065,00	52.796.821.196,13	96,05	(2.168.780.868,87)
2016	67.330.551.000,00	58.577.676.385,88	87,00	(8.752.874.614,12)
2017	167.739.928.000,00	64.826.796.239,85	38,65	(102.913.131.760,15)
2018	71.114.394.790,00	63.366.532.437,78	89,11	(7.747.862.352,22)
2019	50.401.681.440,00	78.093.142.098,09	154,94	27.691.460.658,09
2020	102.026.622.680,00	90.400.657.329,78	88,60	(11.625.965.350,22)
Rata-rata	85.596.463.329,17	68.010.270.947,92	92,39	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.7
Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

2. Dana Transfer

Dalam APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020, dana Transfer terdiri dari (a) Dana Transfer Pemerintah Pusat dan (b) Dana Transfer Antar Daerah. Secara kurun waktu tersebut, realisasi rata-rata Dana Transfer adalah sebesar 94,43%, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Dana Transfer Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	1.721.861.850.488,17	1.587.930.547.878,00	92,22	(133.931.302.610,17)
2016	1.973.882.966.559,00	1.821.351.589.282,00	92,27	(152.531.377.277,00)
2017	1.919.315.973.600,00	1.809.637.060.869,59	94,29	(109.678.912.730,41)
2018	1.878.978.151.258,22	1.830.850.797.297,76	97,44	(48.127.353.960,46)
2019	1.984.839.334.208,00	1.867.168.337.305,55	94,07	(117.670.996.902,45)
2020	1.872.843.841.838,74	1.803.603.918.105,05	96,30	(69.239.923.733,69)
Rata-rata	1.891.953.686.325,36	1.786.757.041.789,66	94,43	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.8
Perkembangan Realisasi Dana Transfer Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

a. Dana Transfer Pemerintah Pusat

Sektor Dana Transfer yang bersumber dari Dana Tansfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, secara rinci ditampilkan di bawah ini:

1. Dana Bagi Hasil

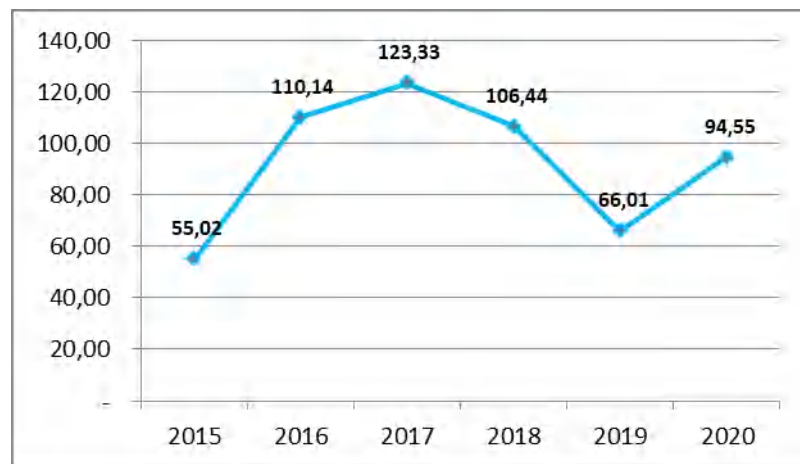
Secara rata-rata Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2019 terealisasi sebesar 92,58%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	166.558.593.185,17	91.635.128.356,00	55,02	(74.923.464.829,17)
2016	58.131.296.815,00	64.025.787.197,00	110,14	5.894.490.382,00
2017	66.717.008.000,00	82.280.387.544,00	123,33	15.563.379.544,00
2018	65.519.049.235,00	69.740.971.630,00	106,44	4.221.922.395,00
2019	65.206.539.998,00	43.041.853.197,00	66,01	(22.164.686.801,00)
2020	47.664.068.941,97	45.068.143.431,00	94,55	(2.595.925.510,97)
Rata-rata	78.299.426.029,19	65.965.378.559,17	92,58	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.9
Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

2. Dana Alokasi Umum

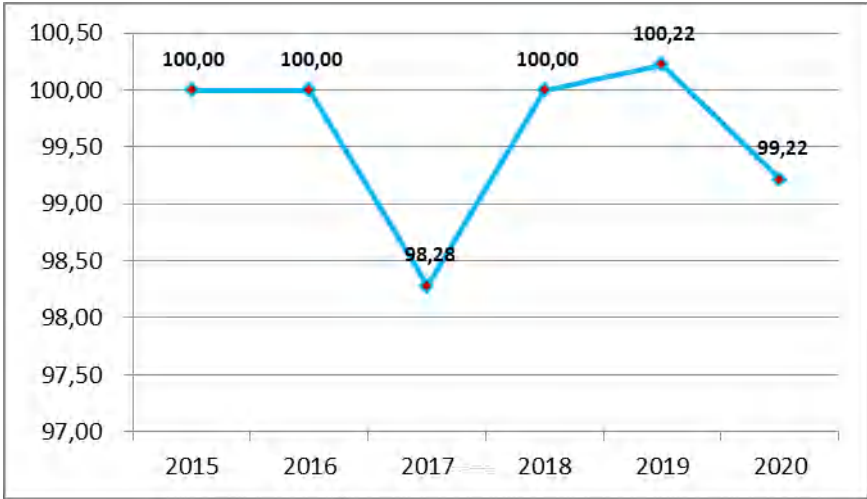
Rata-rata realisasi sektor Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 adalah sebesar 99,62% disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	974.792.193.000,00	974.792.193.000,00	100,00	-
2016	1.081.165.467.000,00	1.081.165.467.000,00	100,00	-
2017	1.081.165.467.000,00	1.062.555.526.000,00	98,28	(18.609.941.000,00)
2018	1.069.168.109.000,00	1.069.168.109.000,00	100,00	-
2019	1.104.135.612.000,00	1.106.577.701.000,00	100,22	2.442.089.000,00
2020	1.015.031.133.000,00	1.007.072.973.000,00	99,22	(7.958.160.000,00)
Rata-rata	1.054.242.996.833,33	1.050.221.994.833,33	99,62	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.10
Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

3. Dana Alokasi Khusus

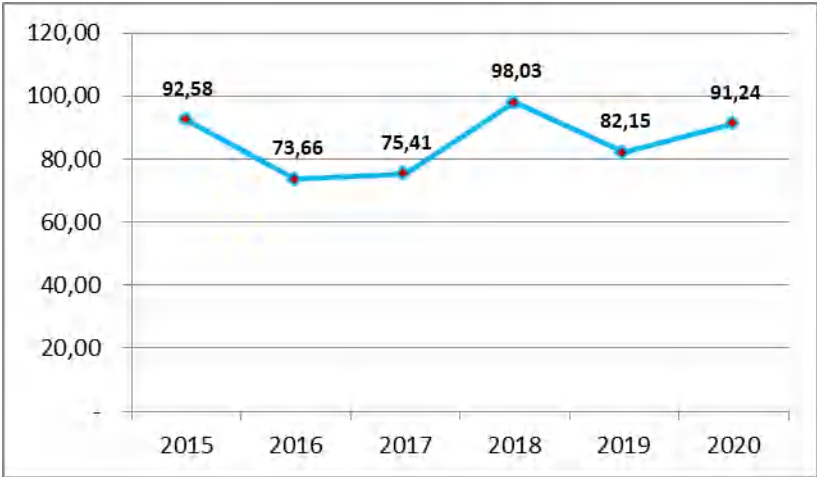
Sektor Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2015-2020, secara rata-rata terealisasi sebesar 85,51%, secara rinci disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	106.319.100.000,00	98.427.520.000,00	92,58	(7.891.580.000,00)
2016	556.806.239.000,00	410.141.910.599,00	73,66	(146.664.328.401,00)
2017	456.908.150.600,00	344.577.034.387,00	75,41	(112.331.116.213,00)
2018	363.143.901.000,00	355.997.075.079,00	98,03	(7.146.825.921,00)
2019	396.223.748.000,00	325.508.837.747,00	82,15	(70.714.910.253,00)
2020	349.493.382.000,00	318.882.334.420,00	91,24	(30.611.047.580,00)
Rata-rata	371.482.420.100,00	308.922.452.038,67	85,51	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.11
Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

4. Dana Insentif Daerah

Untuk Dana Insentif Daerah, kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak mendapatkan alokasi dari Pemerintah Pusat, baru pada Tahun Anggaran 2020 mulai menerima pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, yang teralisasi sebesar 100%.

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	40.653.243.000,00	40.653.243.000,00	100,00	-
Rata-rata	40.653.243.000,00	40.653.243.000,00	100,00	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

5. Dana Desa

Dana Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Desa kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dengan realisasi rata-rata sebesar 99,87%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Dana Desa
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	360.065.705.000,00	360.065.705.000,00	100,00	-
2016	170.936.211.000,00	170.936.211.000,00	100,00	-
2017	217.642.348.000,00	217.642.348.000,00	100,00	-
2018	236.184.602.000,00	234.301.839.000,00	99,20	(1.882.763.000,00)
2019	273.707.506.000,00	273.707.506.000,00	100,00	-
2020	278.517.033.000,00	278.517.033.000,00	100,00	-
Rata-rata	256.175.567.500,00	255.861.773.666,67	99,87	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.12
Perkembangan Realisasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

b. Dana Transfer Antar Pemerintah Daerah

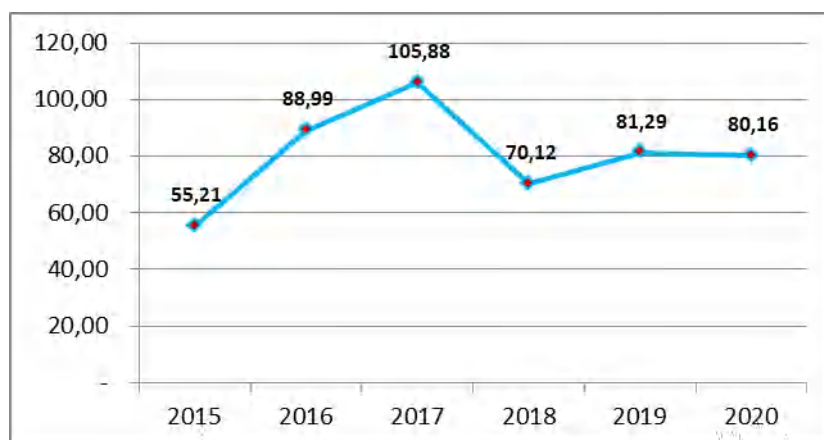
Dana Transfer Antar Pemerintah Daerah kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2020 hanya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Lampung, dengan realisasi rata-rata sebesar 80,27%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Bagi Hasil
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	114.126.259.303,00	63.010.001.522,00	55,21	(51.116.257.781,00)
2016	106.843.752.744,00	95.082.213.486,00	88,99	(11.761.539.258,00)
2017	96.883.000.000,00	102.581.764.938,59	105,88	5.698.764.938,59
2018	144.962.490.023,22	101.642.802.588,76	70,12	(43.319.687.434,46)
2019	145.565.928.210,00	118.332.439.361,55	81,29	(27.233.488.848,45)
2020	141.484.981.896,77	113.410.191.254,05	80,16	(28.074.790.642,72)
Rata-rata	124.977.735.362,83	99.009.902.191,83	80,27	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.13
Perkembangan Realisasi Bagi Hasil Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kurun waktu 2015-2020 secara rata-rata terealisasi sebesar 4.067,02%. Tingginya persentase realisasi tersebut diakibatkan adanya reformulasi pendapatan hibah pada Tahun 2017 yang semula dianggarkan pada sektor Pendapatan Asli Daerah, digeser pada rekening Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sehingga menyebabkan *over target* yang sangat besar.

Tabel 3.19
Target dan Realisasi lain-Lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	1.250.000.000,00	803.070.000,00	64,25	(446.930.000,00)
2016	1.696.930.000,00	103.075.000,00	6,07	(1.593.855.000,00)
2017	400.000.000,00	96.132.909.500,00	24.033,23	95.732.909.500,00
2018	95.935.600.000,00	95.549.880.000,00	99,60	(385.720.000,00)
2019	118.916.586.000,00	117.993.106.000,00	99,22	(923.480.000,00)
2020	109.820.700.000,00	109.566.190.000,00	99,77	(254.510.000,00)
Rata-rata	54.669.969.333,33	70.024.705.083,33	4.067,02	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2020 hanya bersumber dari Pendapatan Hibah sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	1.250.000.000,00	803.070.000,00	64,25	(446.930.000,00)
2016	1.696.930.000,00	103.075.000,00	6,07	(1.593.855.000,00)
2017	400.000.000,00	96.132.909.500,00	24.033,23	95.732.909.500,00
2018	95.935.600.000,00	95.549.880.000,00	99,60	(385.720.000,00)
2019	118.916.586.000,00	117.993.106.000,00	99,22	(923.480.000,00)
2020	109.820.700.000,00	109.566.190.000,00	99,77	(254.510.000,00)
Rata-rata	54.669.969.333,33	70.024.705.083,33	4.067,02	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Mencermati realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari sektor PAD, Pendapatan Transfer, maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di atas, diperoleh rata-rata pertumbuhan Tahun Anggaran 2015-2020 adalah sebesar 4,51%. Dana Transfer, meskipun kontribusinya paling besar, tetapi rata-rata pertumbuhan pertahun adalah yang paling kecil, yaitu hanya sebesar 4,30%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
PENDAPATAN DAERAH	1.673.230.554.391,56	1.916.378.911.952,30	2.017.656.162.813,36	2.051.436.200.614,82	2.132.688.979.133,90	2.070.599.236.920,02	4,51
PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.496.936.513,56	94.924.247.670,30	111.886.192.443,77	125.035.523.317,06	147.527.535.828,35	157.429.128.814,97	14,99
Pajak Daerah	25.086.449.376,88	29.685.570.227,78	39.717.698.427,60	53.213.791.410,00	62.332.058.166,00	60.205.717.890,60	25,81
Hasil Retribusi Daerah	4.429.279.813,00	4.831.882.437,00	5.058.720.698,00	5.715.607.215,00	3.925.575.233,00	3.361.926.570,00	(1,14)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.184.386.127,55	1.829.118.619,64	2.282.977.078,32	2.739.592.254,28	3.176.760.331,26	3.460.827.024,59	11,13
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.796.821.196,13	58.577.676.385,88	64.826.796.239,85	63.366.532.437,78	78.093.142.098,09	90.400.657.329,78	10,65
PENDAPATAN TRANSFER	1.587.930.547.878,00	1.821.351.589.282,00	1.809.637.060.869,59	1.830.850.797.297,76	1.867.168.337.305,55	1.803.603.918.105,05	4,30
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.524.920.546.356,00	1.726.269.375.796,00	1.707.055.295.931,00	1.729.207.994.709,00	1.748.835.897.944,00	1.690.193.726.851,00	3,63
Dana Perimbangan	1.164.854.841.356,00	1.555.333.164.796,00	1.489.412.947.931,00	1.494.906.155.709,00	1.475.128.391.944,00	1.371.023.450.851,00	7,08
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	91.635.128.356,00	64.025.787.197,00	82.280.387.544,00	69.740.971.630,00	43.041.853.197,00	45.068.143.431,00	(13,79)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	974.792.193.000,00	1.081.165.467.000,00	1.062.555.526.000,00	1.069.168.109.000,00	1.106.577.701.000,00	1.007.072.973.000,00	3,33
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	98.427.520.000,00	410.141.910.599,00	344.577.034.387,00	355.997.075.079,00	325.508.837.747,00	318.882.334.420,00	73,86
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	40.653.243.000,00	
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	
Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	
Dana Desa	360.065.705.000,00	170.936.211.000,00	217.642.348.000,00	234.301.839.000,00	273.707.506.000,00	278.517.033.000,00	(0,18)
Pendapatan Tranfer Antar Daerah	63.010.001.522,00	95.082.213.486,00	102.581.764.938,59	101.642.802.588,76	118.332.439.361,55	113.410.191.254,05	18,57
Pendapatan Bagi Hasil	63.010.001.522,00	95.082.213.486,00	102.581.764.938,59	101.642.802.588,76	118.332.439.361,55	113.410.191.254,05	18,57
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	803.070.000,00	103.075.000,00	96.132.909.500,00	95.549.880.000,00	117.993.106.000,00	109.566.190.000,00	23,275,18
Pendapatan Hibah	803.070.000,00	103.075.000,00	96.132.909.500,00	95.549.880.000,00	117.993.106.000,00	109.566.190.000,00	23,275,18
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kelentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

3.1.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2015-2020, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2020, realisasi belanja daerah mencapai 89,93%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

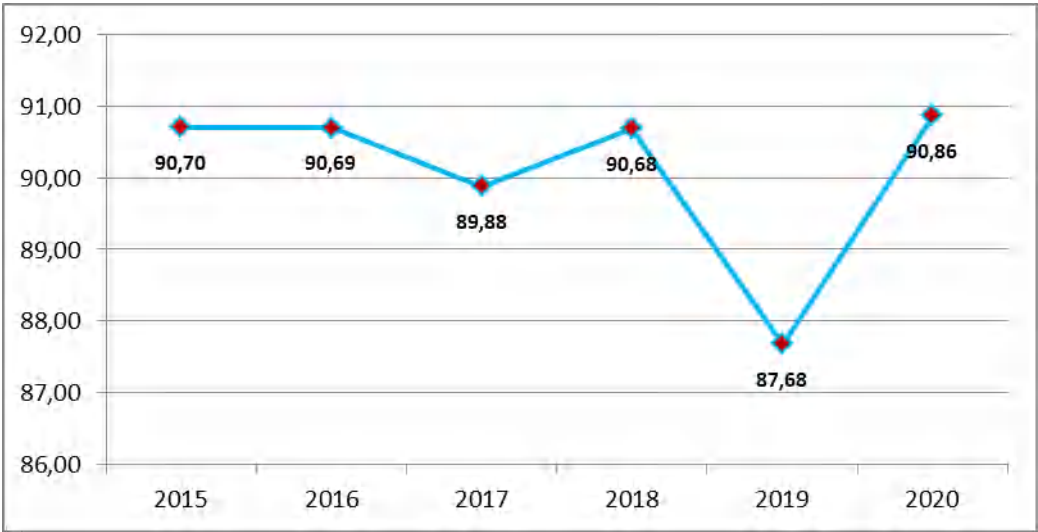
Tabel 3.22
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2015	1.911.101.948.169,00	1.733.408.499.651,80	90,70	(177.693.448.517,20)
2016	2.119.937.474.660,76	1.922.657.369.455,99	90,69	(197.280.105.204,77)
2017	2.166.640.751.105,74	1.947.368.023.837,90	89,88	(219.272.727.267,84)
2018	2.208.605.576.672,23	2.002.789.116.451,75	90,68	(205.816.460.220,48)
2019	2.379.784.414.268,06	2.086.664.488.096,44	87,68	(293.119.926.171,62)
2020	2.343.596.758.768,26	2.129.428.929.847,88	90,86	(214.167.828.920,38)
Rata-rata	2.188.277.820.607,34	1.970.386.071.223,63	90,08	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Berdasarkan data di atas, realisasi belanja daerah kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2020 berfluktuatif. Realisasi tertinggi tercapai pada Tahun Anggaran 2020 yang sebesar 90,86%, dan terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2019 yang hanya terelisasi sebesar 87,68%. Perkembangan realisasi belanja daerah ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 3.14
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Berdasarkan regulasi, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020 terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) dan Belanja Bantuan Sosial.. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 terealisasi rata-rata sebesar 88,19%, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Belanja Operasi
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	1.435.982.385.137,00	1.276.401.797.949,59	88,89	(159.580.587.187,41)
2016	1.395.403.724.709,36	1.263.379.318.488,29	90,54	(132.024.406.221,07)
2017	1.467.530.812.150,83	1.279.784.183.573,00	87,21	(187.746.628.577,83)
2018	1.518.187.939.875,33	1.356.855.384.184,11	89,37	(161.332.555.691,22)
2019	1.668.018.958.349,91	1.468.267.875.349,90	88,02	(199.751.083.000,01)
2020	1.592.545.411.611,26	1.451.350.451.625,60	91,13	(141.194.959.985,66)
Rata-rata	1.512.944.871.972,28	1.349.339.835.195,08	89,19	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.15
Perkembangan Realisasi Belanja Operasi
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

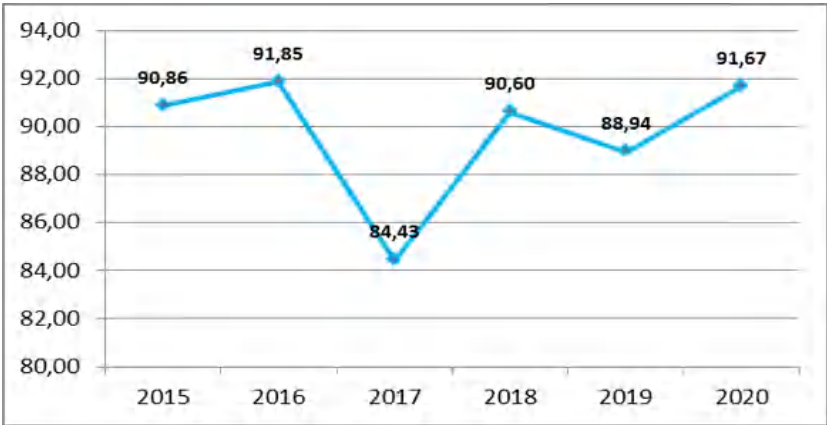
Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 terealisasi rata-rata sebesar 89,73% sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	956.871.657.685,37	869.415.532.130,00	90,86	(87.456.125.555,37)
2016	974.586.966.868,36	895.178.247.853,00	91,85	(79.408.719.015,36)
2017	966.074.974.933,43	815.649.891.260,00	84,43	(150.425.083.673,43)
2018	927.934.797.717,33	840.753.460.205,00	90,60	(87.181.337.512,33)
2019	964.808.587.686,56	858.136.886.212,00	88,94	(106.671.701.474,56)
2020	892.556.326.536,29	818.228.594.498,00	91,67	(74.327.732.038,29)
Rata-rata	947.138.885.237,89	849.560.435.359,67	89,73	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.16
Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Rata-rata realisasi Belanja Barang dan Jasa selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 sebesar 88,88%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	406.406.267.451,63	346.045.445.339,59	85,15	(60.360.822.112,04)
2016	374.716.257.841,00	335.280.875.385,29	89,48	(39.435.382.455,71)
2017	452.685.887.217,40	421.238.977.037,00	93,05	(31.446.910.180,40)
2018	533.693.692.158,00	470.076.499.661,11	88,08	(63.617.192.496,89)
2019	647.806.157.663,35	558.554.290.369,90	86,22	(89.251.867.293,45)
2020	591.212.851.865,97	539.746.033.127,60	91,29	(51.466.818.738,37)
Rata-rata	501.086.852.366,23	445.157.020.153,42	88,88	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.17
Perkembangan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2020, Belanja Subsidi rata-rata terealisasi sebesar 44,91%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	1.843.000.000,00	640.000.000,00	34,73	(1.203.000.000,00)
2016	250.000.000,00	-	0,00	(250.000.000,00)
2017	-	-		-
2018	-	-		-
2019	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	-
2020	-	-		-
Rata-rata	482.166.666,67	240.000.000,00	44,91	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

d. Belanja Hibah

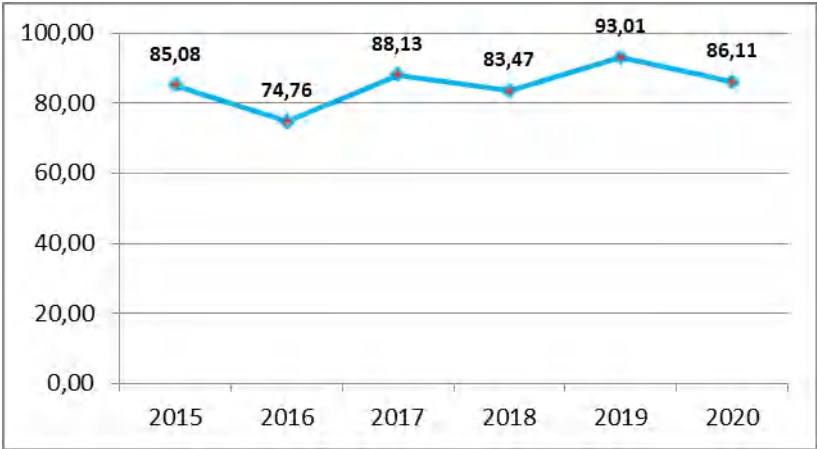
Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, dan/atau barang, jasa, yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 rata-rata terealisasi sebesar 85,09%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Belanja Hibah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	70.761.460.000,00	60.200.820.480,00	85,08	(10.560.639.520,00)
2016	43.998.250.000,00	32.895.195.250,00	74,76	(11.103.054.750,00)
2017	46.240.700.000,00	40.751.315.276,00	88,13	(5.489.384.724,00)
2018	53.330.200.000,00	44.516.674.318,00	83,47	(8.813.525.682,00)
2019	52.874.963.000,00	49.179.698.768,00	93,01	(3.695.264.232,00)
2020	106.546.983.209,00	91.742.824.000,00	86,11	(14.804.159.209,00)
Rata-rata	62.292.092.701,50	53.214.421.348,67	85,09	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.18
Perkembangan Realisasi Belanja Hibah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

e. Belanja Bantuan Sosial

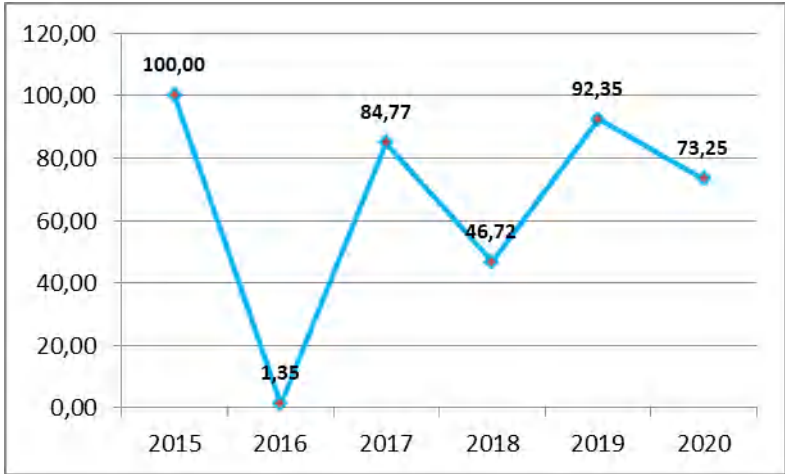
Belanja Bantuan Sosial adalah setiap pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 rata-rata terealisasi sebesar 66,41%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
2016	1.852.250.000,00	25.000.000,00	1,35	(1.827.250.000,00)
2017	2.529.250.000,00	2.144.000.000,00	84,77	(385.250.000,00)
2018	3.229.250.000,00	1.508.750.000,00	46,72	(1.720.500.000,00)
2019	1.729.250.000,00	1.597.000.000,00	92,35	(132.250.000,00)
2020	2.229.250.000,00	1.633.000.000,00	73,25	(596.250.000,00)
Rata-rata	1.944.875.000,00	1.167.958.333,33	66,41	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.19
Perkembangan Realisasi Belanja Sosial
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah alokasi anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan masuk dalam batas minimal kapitalisasi aset. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2020, realisasi rata-rata Belanja Modal sebesar 85,45%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.29
Target dan Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	273.005.837.460,00	255.907.955.827,21	93,74	(17.097.881.632,79)
2016	423.948.711.545,00	364.083.387.167,70	85,88	(59.865.324.377,30)
2017	350.062.531.730,60	321.795.859.200,90	91,93	(28.266.672.529,70)
2018	312.590.143.540,00	285.430.669.667,64	91,31	(27.159.473.872,36)
2019	292.951.057.107,65	204.551.856.450,54	69,82	(88.399.200.657,11)
2020	320.814.540.918,00	256.809.425.669,28	80,05	(64.005.115.248,72)
Rata-rata	328.895.470.383,54	281.429.858.997,21	85,45	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.20
Perkembangan Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

3. Belanja Tidak Terduga

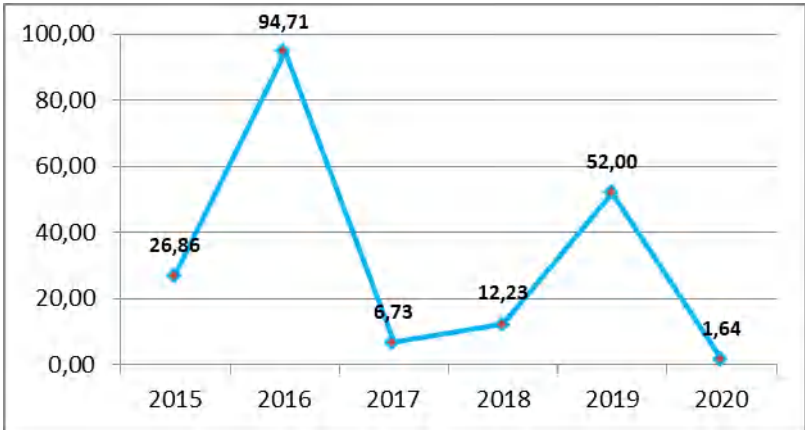
Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2020, realisasi rata-rata Belanja Tidak Terduga secara akumulatif sebesar 32,36%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	1.000.000.000,00	268.625.050,00	26,86	(731.374.950,00)
2016	250.000.000,00	236.773.100,00	94,71	(13.226.900,00)
2017	1.686.785.803,15	113.520.000,00	6,73	(1.573.265.803,15)
2018	1.453.902.159,40	177.760.000,00	12,23	(1.276.142.159,40)
2019	2.650.069.564,00	1.377.907.696,00	52,00	(1.272.161.868,00)
2020	5.000.000.000,00	82.224.839,00	1,64	(4.917.775.161,00)
Rata-rata	2.006.792.921,09	376.135.114,17	32,36	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.21
Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

4. Belanja Transfer

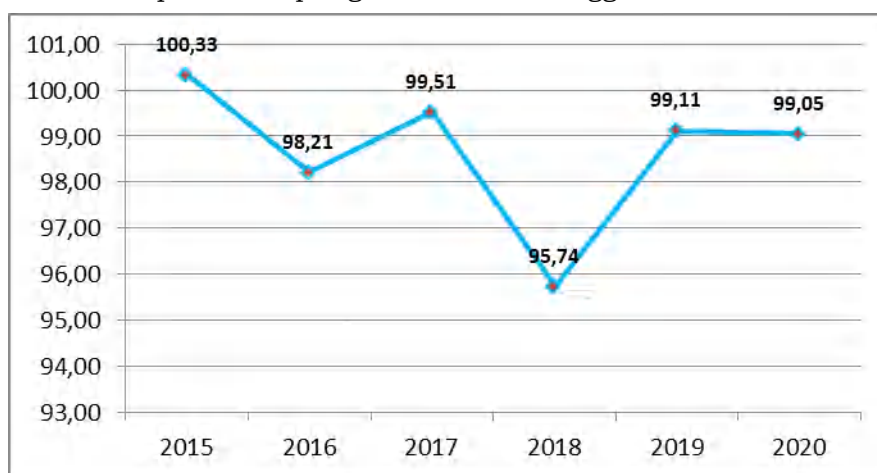
Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2020, realisasi rata-rata Belanja Transfer secara akumulatif sebesar 98,66%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.31
Target dan Realisasi Belanja Transfer
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	200.168.726.572,00	200.830.120.825,00	100,33	661.394.253,00
2016	300.335.038.406,40	294.957.890.700,00	98,21	(5.377.147.706,40)
2017	347.360.621.421,16	345.674.461.064,00	99,51	(1.686.160.357,16)
2018	376.373.591.097,50	360.325.302.600,00	95,74	(16.048.288.497,50)
2019	416.164.329.246,50	412.466.848.600,00	99,11	(3.697.480.646,50)
2020	425.236.806.239,00	421.186.827.714,00	99,05	(4.049.978.525,00)
Rata-rata	344.273.185.497,09	339.240.241.917,17	98,66	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.22
Perkembangan Realisasi Belanja Transfer
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Secara regulasi Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan realisasi anggaran sebagaimana di bawah ini:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah alokasi anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi rata-rata Belanja Bagi Hasil selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 adalah sebesar 63,68%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.32
Target dan Realisasi Bagi Hasil
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	400.000.000,00	116.510.125,00	29,13	(283.489.875,00)
2016	3.461.837.834,40	-	0,00	(3.461.837.834,40)
2017	7.642.654.721,16	6.525.808.664,00	85,39	(1.116.846.057,16)
2018	5.271.022.218,00	4.891.497.000,00	92,80	(379.525.218,00)
2019	7.195.967.302,50	5.492.391.500,00	76,33	(1.703.575.802,50)
2020	5.884.248.795,00	5.792.663.000,00	98,44	(91.585.795,00)
Rata-rata	4.975.955.145,18	3.803.145.048,17	63,68	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.23
Perkembangan Realisasi Belanja Bagi Hasil
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

b. Belanja Bantuan Keuangan

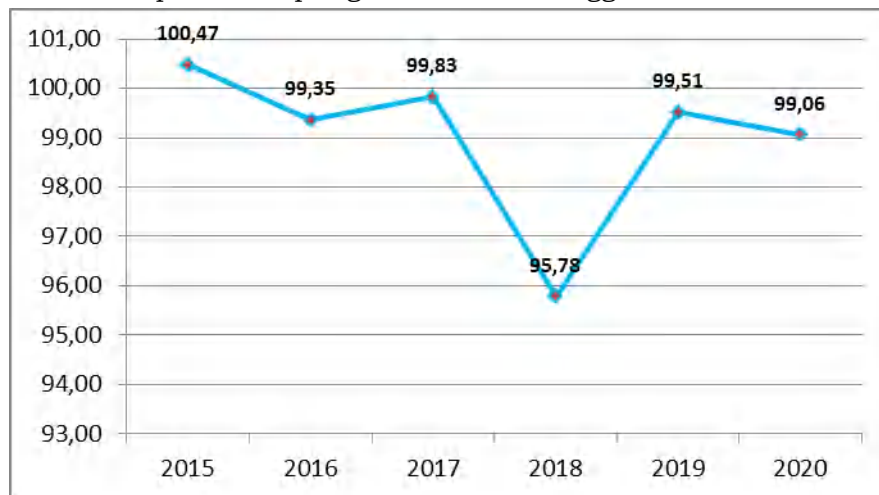
Belanja Bantuan Keuangan adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Realisasi rata-rata Belanja Bantuan Keuangan selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 mencapai 98,99%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.33
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2015	199.768.726.572,00	200.713.610.700,00	100,47	944.884.128,00
2016	296.873.200.572,00	294.957.890.700,00	99,35	(1.915.309.872,00)
2017	339.717.966.700,00	339.148.652.400,00	99,83	(569.314.300,00)
2018	371.102.568.879,50	355.433.805.600,00	95,78	(15.668.763.279,50)
2019	408.968.361.944,00	406.974.457.100,00	99,51	(1.993.904.844,00)
2020	419.352.557.444,00	415.394.164.714,00	99,06	(3.958.392.730,00)
Rata-rata	339.297.230.351,92	335.437.096.869,00	99,00	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.24
Perkembangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

3.1.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

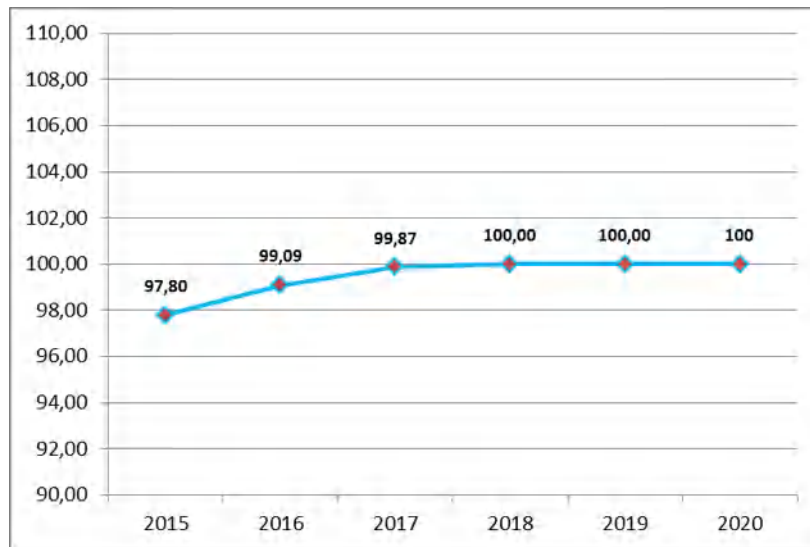
Penerimaan Pembiayaan secara regulasi dapat berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA). Realisasi rata-rata Penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 sebesar 102,44% seperti disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.34
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2015	98.609.893.184,83	98.436.116.904,00	99,82	(173.776.280,83)
2016	37.572.067.214,76	37.231.762.609,43	99,09	(340.304.605,33)
2017	30.953.305.105,74	30.913.875.169,33	99,87	(39.429.936,41)
2018	87.346.307.104,73	101.202.014.144,73	115,86	13.855.707.040,00
2019	149.849.098.307,80	149.844.298.307,80	100,00	(4.800.000,00)
2020	195.868.789.345,26	195.868.789.345,26	100,00	-
Rata-rata	100.033.243.377,19	102.249.476.080,09	102,44	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.25
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020



Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Realisasi penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut bersumber dari SiLPA. Realisasi rata-rata SiLPA selama periode Tahun Anggaran 2015-2020 mencapai 102,93%, atau lebih dari target, secara rinci disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.35
Target dan Realisasi SiLPA
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2015	98.609.893.184,83	98.436.116.904,00	99,82	(173.776.280,83)
2016	37.572.067.214,76	37.231.762.609,43	99,09	(340.304.605,33)
2017	30.953.305.105,74	30.913.875.169,33	99,87	(39.429.936,41)
2018	87.346.307.104,73	101.202.014.144,73	115,86	13.855.707.040,00
2019	149.849.098.307,80	149.844.298.307,80	100,00	(4.800.000,00)
2020	195.868.789.345,26	195.868.789.345,26	100,00	-
Rata-rata	100.033.243.377,19	102.249.476.080,09	102,44	

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 3.36
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
ASET							
Aset Lancar							
Kas di Kas Daerah	25.208.796.812,85	23.703.090.520,33	96.450.851.848,04	146.503.719.005,65	183.865.234.676,72	122.117.154.536,04	68,95
Kas di Bendahara Penerimaan	325.380.200,00	36.026.800,00	4.550.000,00	81.125.500,00	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.567.068.467,00	-	92.300.000,00	3.422.373.441,00	-	-	-
Kas di BLUD	1.894.288.682,00	1.612.697.878,33	1.724.835.276,92	1.071.653.181,59	2.274.566.614,40	5.618.767.239,02	42,70
Kas di Bendahara FKTP/JKN	7.576.533.052,91	5.609.357.187,08	2.676.659.209,98	1.841.416.207,77	4.577.314.351,35	9.243.174.642,34	28,21
Kas di Bendahara BOS	-	-	252.817.809,79	257.617.809,79	5.151.673.702,79	63.040.000,00	-
Piutang Pendapatan	69.669.390.056,49	42.951.180.341,72	61.992.344.440,09	89.348.641.685,03	85.874.300.665,95	63.758.538.930,90	4,09
Piutang Lainnya	-	-	4.622.559.688,00	6.668.253.379,00	10.515.123.813,00	8.348.606.320,33	-
Penyisihan Piutang	-	-	(5.612.414.961,88)	(25.419.938.200,27)	(29.833.230.021,38)	(7.019.476.998,67)	-
Beban Dibayar Dimuka	-	17.285.164,00	663.326.336,01	317.631.583,50	300.942.393,75	391.725.045,00	-
Persediaan	8.691.663.688,05	13.699.822.346,41	40.193.235.732,66	36.852.882.218,71	106.767.477.569,83	97.175.295.887,03	84,68
Jumlah Aset Lancar	115.933.120.959,30	87.629.460.237,87	203.061.065.379,61	260.945.375.811,77	369.493.403.766,41	299.696.825.601,99	31,71
INVESTASI JANGKA PANJANG							
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Per	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.114.198.943,61	16.541.966.265,90	17.293.953.455,62	18.422.459.240,18	21.055.747.895,67	21.054.103.946,72	5,60
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permane	16.114.198.943,61	16.541.966.265,90	17.293.953.455,62	18.422.459.240,18	21.055.747.895,67	21.054.103.946,72	5,60
Jumlah Investasi Jangka Panjang	16.114.198.943,61	16.541.966.265,90	17.293.953.455,62	18.422.459.240,18	21.055.747.895,67	21.054.103.946,72	5,60
ASET TETAP							
Tanah	130.472.609.194,90	125.318.163.554,90	383.297.532.792,90	384.263.875.392,00	416.980.720.925,90	416.879.470.975,90	42,13
Peralatan dan Mesin	422.802.572.136,91	440.675.399.582,63	381.046.964.072,06	408.636.576.309,81	459.700.246.337,90	517.205.122.732,93	4,59
Gedung dan Bangunan	557.505.156.631,50	574.597.379.647,38	576.203.425.414,92	587.826.554.506,59	661.098.484.838,50	649.071.696.225,94	3,20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.269.825.785.582,94	1.629.780.110.622,94	1.805.169.253.761,73	1.994.214.255.512,84	1.522.709.871.903,88	1.712.851.282.192,45	7,68
Aset Tetap Lainnya	67.514.840.595,11	67.768.364.897,73	74.266.179.452,61	90.022.988.348,81	110.733.019.950,27	118.213.100.916,49	12,19
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.399.064.382,08	6.617.018.896,74	14.315.962.083,12	22.669.747.955,59	30.435.282.512,31	30.311.164.912,31	46,22
Akumulasi Penyusutan Aset	(1.232.237.600.736,08)	(1.247.437.679.573,44)	(1.189.862.821.070,37)	(1.387.149.544.556,38)	(1.368.900.366.399,10)	(1.540.859.780.558,31)	4,89
Jumlah Aset Tetap	1.221.282.427.787,36	1.597.318.757.628,88	2.044.436.496.506,97	2.100.484.453.469,26	1.832.757.260.069,66	1.903.672.057.397,71	10,53
ASET LAINNYA							
Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan TGR	-	-	139.850.000,00	136.537.500,00	119.900.000,00	116.962.500,00	-
Aset Tidak Berwujud	286.830.000,00	215.122.500,00	351.630.000,00	-	-	-	-
Aset Lain-Lain	115.680.787.492,17	168.704.633.107,61	211.570.947.363,81	207.029.138.723,99	722.534.332.034,13	211.292.210.249,79	49,47
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	(73.161.397.274,88)	(67.311.971.964,15)	(279.183.217.591,49)	(60.064.314.863,82)	-
Jumlah Aset Lainnya	115.967.617.492,17	168.919.755.607,61	138.901.030.088,93	139.853.704.259,84	443.471.014.442,64	151.344.857.885,97	35,96
JUMLAH ASET	1.469.297.365.182,44	1.870.409.939.740,26	2.403.692.545.431,13	2.519.705.992.781,15	2.666.777.426.174,38	2.375.767.844.832,39	11,11
KEWAJIBAN DAN EKUITAS							
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.842.409.854,00	1.158.477.266,00	-	8.845.183,00	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	262.357.697,08	462.511.919,09	406.593.175,25	310.205.277,94	-
Utang Beban	-	-	4.753.850.917,00	7.335.953.352,25	13.625.556.560,20	24.597.198.929,13	-
Utang Belanja	1.809.151.833,83	54.459.672.233,75	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	15.111.557.320,00	19.903.099.308,09	11.114.783.199,73	22.972.692.016,56	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.651.561.687,83	55.618.149.499,75	20.127.765.934,08	27.710.409.762,43	25.146.932.935,18	47.880.096.223,63	295,63
JUMLAH KEWAJIBAN	3.651.561.687,83	55.618.149.499,75	20.127.765.934,08	27.710.409.762,43	25.146.932.935,18	47.880.096.223,63	295,63
EKUITAS							
Ekuitas	1.465.645.803.494,61	1.814.791.790.240,51	2.383.564.779.497,05	2.491.995.583.018,72	2.641.630.493.239,20	2.327.887.748.608,76	10,77
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	1.469.297.365.182,44	1.870.409.939.740,26	2.403.692.545.431,13	2.519.705.992.781,15	2.666.777.426.174,38	2.375.767.844.832,39	11,11

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Tahun 2020, Kabupaten Lampung Timur memiliki aset senilai Rp.2,3 Trilyun, dengan tingkat pertumbuhan 11,11% per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada Tahun 2020 telah mencapai Rp.1,9 trilyun dan rata-rata tumbuh 10,58% pertahun. Aset tetap ini meliputi 68,72% dari seluruh aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.47,8 Milyar. Dari Tahun 2015 hingga 2020, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah Tahun 2015 dan tertinggi Tahun 2016, karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 mencapai Rp.2,3 Trilyun, dan mengalami peningkatan dari 2015-2020 dengan rata-rata 10,77%.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya, dan sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3.37
Analisis Rasio Keuangan Daerah

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	%	%	%
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	3.174,89	157,56	1.008,86	941,69	1.469,34	625,93
Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	2.936,87	132,92	809,17	808,69	1.044,76	422,98
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,25	2,97	0,84	1,10	0,94	2,02

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat

jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Menyikapi hal tersebut, data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2015-2019 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD. Sedangkan untuk APBD Tahun 2020 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2015-2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2015-2020, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
 - b. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
 - c. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah.
 - d. Memantapkan kelembagaan.
 - e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
 - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
 - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
 - h. peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan
 - i. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah dan provinsi.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan.
 - a. Mengoptimalkan upaya instensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
 - c. Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.
3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD)

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2015-2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021, yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak kepada Kepentingan Rakyat”*, yang akan dicapai melalui pelaksanaan misi :

Misi Pertama : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

Misi Kedua : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Misi Ketiga : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi Keempat : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Misi Kelima : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Misi Keenam : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun., proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 56,66% pada Tahun 2015, turun menjadi 41,88% Tahun 2017, dan turun lagi menjadi 41,12% pada Tahun 2019. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus meningkatkan alokasi belanja pelayanan publik.

Tabel 3.38
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
2015	982.700.883.833,00	1.734.419.320.667,80	56,66
2016	895.178.247.853,00	1.922.657.369.455,99	46,56
2017	815.649.891.260,00	1.947.368.023.837,90	41,88
2018	840.753.460.205,00	2.002.789.116.451,75	41,98
2019	858.136.886.212,00	2.086.664.488.096,44	41,12
2020	818.228.594.498,00	2.129.428.929.847,88	38,42

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada data tersebut di atas diperoleh dari perhitungan tabel realisasi belanja pemenuhan aparatur di bawah ini:

Tabel 3.39
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Operasi	982.700.883.833,00	895.178.247.853,00	815.649.891.260,00	840.753.460.205,00	858.136.886.212,00	818.228.594.498,00
Belanja Pegawai	869.415.532.130,00	895.178.247.853,00	815.649.891.260,00	840.753.460.205,00	858.136.886.212,00	818.228.594.498,00
Belanja gaji dan tunjangan	612.812.635.934,00	644.003.485.942,00	583.542.193.433,00	763.827.995.523,00	780.243.344.509,00	733.338.361.044,00
Belanja tambahan penghasilan PNS	249.883.772.600,00	245.460.577.771,00	222.196.870.290,00	62.060.882.612,00	62.493.642.943,00	70.109.584.286,16
Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta	4.479.680.000,00	4.532.400.000,00	8.238.080.000,00	13.315.348.000,00	12.757.560.000,00	13.416.400.000,00
Biaya pemungutan pajak daerah	969.899.614,00	-	-	-	-	-
Insentif pemungutan pajak daerah	1.080.940.031,00	1.067.669.296,00	1.453.258.489,00	1.380.954.070,00	2.550.821.897,00	1.269.220.432,84
Insentif pemungutan retribusi daerah	188.603.951,00	114.114.844,00	219.489.048,00	168.280.000,00	91.516.863,00	95.028.735,00
Belanja penerimaan lainnya bagi pengelola keuangan	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	113.285.351.703,00	113.986.022.805,00	136.326.865.074,63	141.236.677.371,00	149.466.105.694,00	158.008.001.461,00
Belanja honorarium PNS	38.748.310.350,00	36.941.346.780,00	35.460.998.000,00	36.775.297.700,00	31.413.346.500,00	29.478.083.400,00
Belanja Honorarium Non PNS	14.335.918.000,00	14.672.195.000,00	14.672.195.000,00	22.545.813.500,00	21.822.664.630,00	30.370.447.500,00
Belanja uang lembur	2.630.340.500,00	2.034.974.700,00	2.611.274.556,00	1.536.125.800,00	1.190.026.350,00	11.072.000,00
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	-	-	14.389.883.000,00	12.009.420.800,00	10.749.924.000,00	29.030.728.400,00
Belanja tunjangan kesejahteraan	1.111.180.000,00	1.528.180.000,00	1.397.980.000,00	-	-	-
Belanja pegawai BLUD	3.277.935.667,00	5.855.576.808,00	8.171.924.246,00	6.205.992.888,00	9.609.882.330,00	15.699.165.165,00
Belanja premi asuransi	3.309.396.410,00	3.794.365.656,00	2.254.950.600,00	3.132.399.976,00	7.916.060.705,00	12.062.991.548,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.096.747.544,00	10.229.735.199,00	8.696.378.139,63	11.171.436.253,00	12.934.354.469,00	10.539.305.448,00
Belanja Perjalanan Dinas	30.889.291.232,00	33.961.137.514,00	43.002.827.374,00	45.077.027.325,00	47.855.266.417,00	30.047.221.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	369.760.000,00	251.760.000,00	211.760.000,00	57.025.000,00	119.120.000,00	42.610.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS/Non PNS	7.516.472.000,00	4.716.751.148,00	5.456.694.159,00	2.726.138.129,00	5.855.460.293,00	726.377.000,00
TOTAL	982.700.883.833,00	895.178.247.853,00	815.649.891.260,00	840.753.460.205,00	858.136.886.212,00	818.228.594.498,00

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.40
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan	Belanja
	Realisasi	Realisasi
2015	1.673.230.554.391,56	1.733.408.499.651,80
2016	1.916.378.911.952,30	1.922.657.369.455,99
2017	2.017.656.162.813,36	1.947.368.023.837,90
2018	2.051.436.200.614,82	2.002.789.116.451,75
2019	2.132.688.979.133,90	2.086.664.488.096,44
2020	2.070.599.236.920,02	2.129.428.929.847,88
Jumlah	9.791.390.808.905,94	9.692.887.497.493,88

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020 terus meningkat, walaupun dengan belanja yang mengalami peningkatan juga. Sebagai catatan pada Tahun Anggaran 2015 hingga 2020 realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Untuk mengetahui defisit riil Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.41
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Timur

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	1.673.230.554.391,56	1.916.378.911.952,30	2.017.656.162.813,36	2.051.436.200.614,82	2.132.688.979.133,90	2.070.599.236.920,02
Dikurangi Realisasi :						
Belanja Daerah	1.733.408.499.651,80	1.922.657.369.455,99	1.947.368.023.837,90	2.002.789.116.451,75	2.086.664.488.096,44	2.129.428.929.847,88
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.010.821.016,00	-	-	-	-	-
Defisit Riil	(61.188.766.276,24)	(6.278.457.503,69)	70.288.138.975,46	48.647.084.163,07	46.024.491.037,46	(58.829.692.927,86)

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel di atas selama kurun waktu 2015-2020, APBD Kabupaten Lampung Timur pada Tahun Anggaran 2017-2018, dan 2019 mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah. Namun demikian, pada Tahun 2015, 2016, dan 2020 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.



Tabel 3.42
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Uraian	Proporsi dari Defisit Riil					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	98.436.116.904,00	37.231.762.609,43	30.913.875.169,33	101.202.014.144,73	149.844.298.307,80	195.868.789.345,26
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Tabel 3.43
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Timur

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi Realisasi :	1.673.230.554.391,56	1.916.378.911.952,30	2.017.656.162.813,36	2.051.436.200.614,82	2.132.688.979.133,90	2.070.599.236.920,02
Belanja Daerah	1.733.408.499.651,80	1.922.657.369.455,99	1.947.368.023.837,90	2.002.789.116.451,75	2.086.664.488.096,44	2.129.428.929.847,88
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.010.821.016,00	-	-	-	-	-
Defisit Riil	(61.188.766.276,24)	(6.278.457.503,69)	70.288.138.975,46	48.647.084.163,07	46.024.491.037,46	(58.829.692.927,86)
Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan						
SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	98.436.116.904,00	37.231.762.609,43	30.913.875.169,33	101.202.014.144,73	149.844.298.307,80	195.868.789.345,26
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	98.436.116.904,00	37.231.762.609,43	30.913.875.169,33	101.202.014.144,73	149.844.298.307,80	195.868.789.345,26
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	37.247.350.627,76	30.953.305.105,74	101.202.014.144,79	149.849.098.307,80	195.868.789.345,26	137.039.096.417,40

Sumber : BPKAD Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2015-2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar, sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil.

Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Lampung Timur sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SILPA Kabupaten Lampung Timur dapat diperkecil.



3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan daerah dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini memperhatikan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 serta berpedoman pada proyeksi pendapatan negara dan Provinsi Lampung. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.44
Proyeksi Pendapatan Daerah

Kode Rekening	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI 2020	PROYEKSI					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	2.070.599.236.920,02	2.127.805.243.427,00	2.131.936.515.986,21	2.135.179.931.112,21	2.142.938.026.865,26	2.150.097.014.043,79	2.161.248.545.949,71
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	157.429.128.814,97	242.683.222.427,00	167.460.682.256,21	171.035.306.156,21	174.098.487.396,21	176.790.535.210,21	183.080.977.405,21
4.1.01	Pajak Daerah	60.205.717.890,60	63.223.488.840,00	67.180.000.000,00	70.680.000.000,00	73.620.000.000,00	76.170.000.000,00	82.400.000.000,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	3.361.926.570,00	5.222.908.250,00	4.724.624.250,00	4.799.248.150,00	4.872.429.390,00	5.014.477.204,00	5.099.919.399,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.460.827.024,59	2.750.000.000,00	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.400.657.329,78	171.486.825.337,00	92.095.230.981,62	92.095.230.981,62	92.145.230.981,62	92.145.230.981,62	92.120.230.981,62
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.803.603.918.105,05	1.775.301.321.000,00	1.849.365.123.730,00	1.849.033.914.956,00	1.853.728.829.469,05	1.858.195.768.833,58	1.863.056.858.544,50
4.2.01	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.690.193.726.851,00	1.710.301.321.000,00	1.719.365.123.730,00	1.739.853.382.754,06	1.744.005.427.281,14	1.747.926.782.309,77	1.752.239.559.763,11
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.371.023.450.851,00	1.397.953.089.000,00	1.407.016.891.730,00	1.419.087.255.374,06	1.421.635.469.264,23	1.423.944.974.502,79	1.426.637.842.917,09
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	45.068.143.431,00	25.000.000.000,00	28.433.749.000,00	36.372.327.615,53	36.955.810.680,28	37.473.047.842,82	37.998.410.958,13
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.007.072.973.000,00	996.513.649.000,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	318.882.334.420,00	376.439.440.000,00	361.439.440.000,00	365.571.225.028,53	367.535.955.853,95	369.328.223.929,97	371.495.729.228,96
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	40.653.243.000,00	31.277.579.000,00	31.277.579.000,00	40.856.509.215,00	41.060.791.761,08	41.266.095.719,88	41.472.426.198,48
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	278.517.033.000,00	281.070.653.000,00	281.070.653.000,00	279.909.618.165,00	281.309.166.255,83	282.715.712.087,10	284.129.290.647,54
4.2.02	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	113.410.191.254,05	65.000.000.000,00	130.000.000.000,00	109.180.532.201,94	109.723.402.187,91	110.268.986.523,81	110.817.298.781,39
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	113.410.191.254,05	65.000.000.000,00	130.000.000.000,00	109.180.532.201,94	109.723.402.187,91	110.268.986.523,81	110.817.298.781,39
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.566.190.000,00	109.820.700.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	109.566.190.000,00	109.820.700.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BAPENDA Kab. Lam Tim, 2021



Setelah dilakukan penyesuaian dengan APBD 2021, proyeksi pendapatan untuk Tahun 2022 menjadi sebesar Rp.2,146 trilyun, dan diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2022-2026 sebesar Rp.2,161 trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Transfer.

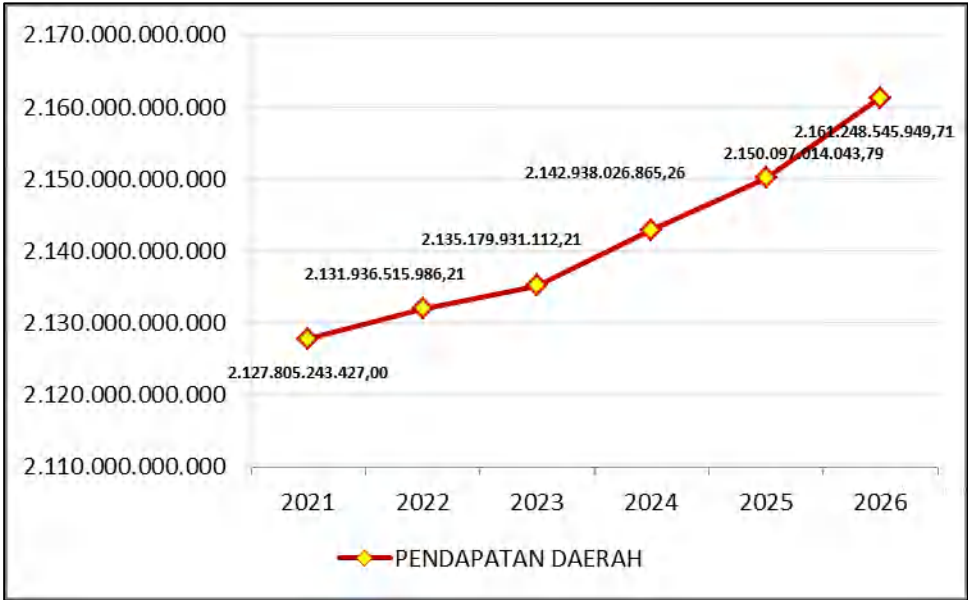
Tabel 3.45
Proyeksi Pendapatan setelah disesuaikan dengan APBD T.A. 2021

Kode Rekening	URAIAN PENDAPATAN	TARGET 2021	PROYEKSI					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	2.422.319.096.000,00	2.305.392.560.098,00	2.131.936.515.986,21	2.135.179.931.112,21	2.142.938.026.865,26	2.150.097.014.043,79	2.161.248.545.949,71
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	329.225.385.000,00	242.683.222.427,00	167.460.682.256,21	171.035.306.156,21	174.098.487.396,21	176.790.535.210,21	183.080.977.405,21
4.1.01	Pajak Daerah	68.671.500.000,00	63.223.488.840,00	67.180.000.000,00	70.680.000.000,00	73.620.000.000,00	76.170.000.000,00	82.400.000.000,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	6.703.885.000,00	5.222.908.250,00	4.724.624.250,00	4.799.248.150,00	4.872.429.390,00	5.014.477.204,00	5.099.919.399,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	251.100.000.000,00	171.486.825.337,00	92.095.230.981,62	92.095.230.981,62	92.145.230.981,62	92.145.230.981,62	92.120.230.981,62
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.983.273.011.000,00	1.952.888.637.671,00	1.849.365.123.730,00	1.849.033.914.956,00	1.853.728.829.469,05	1.858.195.768.833,58	1.863.056.858.544,50
4.2.01	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.813.273.011.000,00	1.780.301.321.000,00	1.719.365.123.730,00	1.739.853.382.754,06	1.744.005.427.281,14	1.747.926.782.309,77	1.752.239.559.763,11
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.500.924.779.000,00	1.467.953.089.000,00	1.407.016.891.730,00	1.419.087.255.374,06	1.421.635.469.264,23	1.423.944.974.502,79	1.426.637.842.917,09
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	28.433.749.000,00	36.372.327.615,53	36.955.810.680,28	37.473.047.842,82	37.998.410.958,13
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.029.485.339.000,00	996.513.649.000,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	376.439.440.000,00	376.439.440.000,00	361.439.440.000,00	365.571.225.028,53	367.535.955.853,95	369.328.223.929,97	371.495.729.228,96
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	31.277.579.000,00	31.277.579.000,00	31.277.579.000,00	40.856.509.215,00	41.060.791.761,08	41.266.095.719,88	41.472.426.198,48
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	281.070.653.000,00	281.070.653.000,00	281.070.653.000,00	279.909.618.165,00	281.309.166.255,83	282.715.712.087,10	284.129.290.647,54
4.2.02	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	170.000.000.000,00	172.587.316.671,00	130.000.000.000,00	109.180.532.201,94	109.723.402.187,91	110.268.986.523,81	110.817.298.781,39
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	170.000.000.000,00	172.587.316.671,00	130.000.000.000,00	109.180.532.201,94	109.723.402.187,91	110.268.986.523,81	110.817.298.781,39
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.820.700.000,00	109.820.700.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	109.820.700.000,00	109.820.700.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BAPENDA Kab. Lam Tim, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, diproyeksikan pendapatan daerah berada pada skenario optimis, dimana pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan akan mencapai lebih dari Rp.2,131 trilyun.

Grafik 3.26
Proyeksi Pendapatan Daerah



Sumber : BAPENDA Kab. Lam Tim, 2021

Berpedoman pada proyeksi pendapatan daerah tersebut, proyeksi belanja dan pembiayaan berpedoman pada kinerja keuangan masa lalu, disajikan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 3.46
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026
Kabupaten Lampung Timur

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	4,51	2.131.936.515.986,21	2.135.179.931.112,21	2.142.938.026.865,26	2.150.097.014.043,79	2.161.248.545.949,71
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,99	167.460.682.256,21	171.035.306.156,21	174.098.487.396,21	176.790.535.210,21	183.080.977.405,21
4.1.01	Pajak Daerah	25,81	67.180.000.000,00	70.680.000.000,00	73.620.000.000,00	76.170.000.000,00	82.400.000.000,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	(1,14)	4.724.624.250,00	4.799.248.150,00	4.872.429.390,00	5.014.477.204,00	5.099.919.399,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,13	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59	3.460.827.024,59
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,65	92.095.230.981,62	92.095.230.981,62	92.145.230.981,62	92.145.230.981,62	92.120.230.981,62
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,30	1.849.365.123.730,00	1.849.033.914.956,00	1.853.728.829.469,05	1.858.195.768.833,58	1.863.056.858.544,50
4.2.01	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	3,63	1.719.365.123.730,00	1.739.853.382.754,06	1.744.005.427.281,14	1.747.926.782.309,77	1.752.239.559.763,11
4.2.01.01	Dana Perimbangan	7,08	1.407.016.891.730,00	1.419.087.255.374,06	1.421.635.469.264,23	1.423.944.974.502,79	1.426.637.842.917,09
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	(13,79)	28.433.749.000,00	36.372.327.615,53	36.955.810.680,28	37.473.047.842,82	37.998.410.958,13
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	3,33	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00	1.017.143.702.730,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	73,86	361.439.440.000,00	365.571.225.028,53	367.535.955.853,95	369.328.223.929,97	371.495.729.228,96
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	31.277.579.000,00	40.856.509.215,00	41.060.791.761,08	41.266.095.719,88	41.472.426.198,48
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	(0,18)	281.070.653.000,00	279.909.618.165,00	281.309.166.255,83	282.715.712.087,10	284.129.290.647,54
4.2.02	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	18,57	130.000.000.000,00	109.180.532.201,94	109.723.402.187,91	110.268.986.523,81	110.817.298.781,39
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	18,57	130.000.000.000,00	109.180.532.201,94	109.723.402.187,91	110.268.986.523,81	110.817.298.781,39
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11,44	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	11,44	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00	115.110.710.000,00
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	4,26	2.226.873.659.205,59	2.230.263.028.012,25	2.238.370.238.074,19	2.245.851.379.675,76	2.257.504.730.517,45
5.1	BELANJA OPERASI	2,67	1.530.616.193.087,96	1.532.944.791.371,98	1.535.276.932.261,90	1.537.612.621.147,27	1.539.951.863.425,81
5.1.01	Belanja Pegawai	(1,09)	899.237.998.018,90	900.606.051.008,65	901.976.185.281,65	903.348.404.004,25	904.722.710.347,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,92	495.961.121.632,27	496.715.650.574,27	497.471.327.416,57	498.228.153.905,54	498.986.131.790,18
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	16,96	133.348.184.515,56	133.551.053.369,97	133.754.230.858,30	133.957.717.450,08	134.161.513.615,57
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	(24,13)	2.068.888.921,23	2.072.036.419,09	2.075.188.705,39	2.078.345.787,40	2.081.507.672,44
5.2	BELANJA MODAL	3,31	264.212.807.912,99	264.616.288.610,63	269.733.067.991,75	274.219.229.429,90	282.873.043.704,21
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	114,76	4.791.003.135,85	4.798.291.913,88	4.805.591.780,67	4.812.902.753,09	4.820.224.848,04
5.4	BELANJA TRANSFER	16,98	427.253.655.068,79	427.903.656.115,78	428.554.646.039,87	429.206.626.345,50	429.859.598.539,39
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,88	6.464.198.903,31	6.474.033.192,63	6.483.882.443,31	6.493.746.678,12	6.503.625.919,85
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	16,66	420.789.456.165,48	421.429.622.923,15	422.070.763.596,56	422.712.879.667,38	423.355.972.619,54
6	PEMBIAYAAN DAERAH	170,96	94.937.143.219,38	95.083.096.900,05	95.432.211.208,94	95.754.365.631,97	96.256.184.567,74
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	170,96	95.937.143.219,38	96.083.096.900,05	96.432.211.208,94	96.754.365.631,97	97.256.184.567,74
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	170,96	95.937.143.219,38	96.083.096.900,05	96.432.211.208,94	96.754.365.631,97	97.256.184.567,74
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	0,35	94.937.143.219,38	95.083.096.900,05	95.432.211.208,94	95.754.365.631,97	96.256.184.567,74
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BAPENDA Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 daya serap anggaran pada belanja daerah rata-rata hanya mampu menyerap 90,08% anggaran. Hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya efisiensi, yaitu sebesar 9,92%. Beberapa data diantaranya adalah sebagai berikut :

- pada jenis belanja operasi rata-rata daya serap 89,19%
- pada jenis belanja modal rata-rata daya serap 85,45%
- pada jenis belanja tidak terduga rata-rata daya serap 32,35%
- pada jenis belanja transfer rata-rata daya serap 98,66%

Berdasarkan data tersebut di atas, SILPA akan terjadi dan diskenariokan secara moderat rata-rata sebesar 4,5% pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasi di atas 4,5%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial. Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, selengkapnya secara indikatif tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.47
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur

Uraian	Proyeksi				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	2.131.936.515.986,21	2.135.179.931.112,21	2.142.938.026.865,26	2.150.097.014.043,79	2.161.248.545.949,71
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	95.937.143.219,38	96.083.096.900,05	96.432.211.208,94	96.754.365.631,97	97.256.184.567,74
Total Penerimaan	2.227.873.659.205,59	2.231.263.028.012,26	2.239.370.238.074,20	2.246.851.379.675,76	2.258.504.730.517,45
Dikurangi :					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Total kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	2.226.873.659.205,59	2.230.263.028.012,26	2.238.370.238.074,20	2.245.851.379.675,76	2.257.504.730.517,45

Sumber : BAPENDA Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Grafik 3.27
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur



Sumber : BAPENDA Kab. Lam Tim dan Data diolah, 2021

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ke dalam berbagai Kelompok Prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai:



- a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2021-2026, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja: dana pendamping DAK, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, serta Belanja Bantuan Keuangan. Pengalokasian Prioritas III harus memperhatikan atau mendahulukan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berdasarkan hal tersebut, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.48
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Timur

Uraian	Proyeksi				
	2022	2023	2024	2025	2026
Prioritas I	1.095.199.119.651,17	1.097.321.701.582,92	1.099.447.512.698,22	1.101.576.557.909,79	1.103.708.842.137,80
Belanja Pegawai	799.237.998.018,90	800.606.051.008,65	801.976.185.281,65	803.348.404.004,25	804.722.710.347,63
Belanja Barang dan Jasa	295.961.121.632,27	296.715.650.574,27	297.471.327.416,57	298.228.153.905,54	298.986.131.790,18
Prioritas II	664.212.807.912,99	664.616.288.610,62	669.733.067.991,75	674.219.229.429,90	682.873.043.704,21
Prioritas III	467.461.731.641,43	468.325.037.818,71	469.189.657.384,22	470.055.592.336,08	470.922.844.675,43
Belanja Hibah	33.348.184.515,55	33.551.053.369,97	33.754.230.858,30	33.957.717.450,08	34.161.513.615,57
Belanja Bantuan Sosial	2.068.888.921,23	2.072.036.419,09	2.075.188.705,39	2.078.345.787,40	2.081.507.672,44
Belanja Tidak Terduga	4.791.003.135,85	4.798.291.913,88	4.805.591.780,67	4.812.902.753,09	4.820.224.848,04
Belanja Bagi Hasil	6.464.198.903,31	6.474.033.192,63	6.483.882.443,31	6.493.746.678,12	6.503.625.919,85
Belanja Bantuan Keuangan	420.789.456.165,48	421.429.622.923,15	422.070.763.596,56	422.712.879.667,38	423.355.972.619,54
Total	2.226.873.659.205,59	2.230.263.028.012,25	2.238.370.238.074,19	2.245.851.379.675,76	2.257.504.730.517,44

Sumber : Data diolah, 2021

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

1. Pertanian dan Perikanan

Nilai Tukar Petani pada Tahun 2020 sebesar 98,93%, yang mengindikasikan belum sejahteranya petani di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, produksi padi pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan produksi, pada Tahun 2020 produksi padi menurun 5,4% dibandingkan Tahun 2019 dan menurun 13,5% dibandingkan Tahun 2016.

2. Kemantapan Infrastruktur Konektivitas

Pada Tahun 2020, tingkat kemantapan jalan kabupaten masih dibawah 65% dari target 75% di akhir periode RPJMD Tahun 2021.

3. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Berpedoman pada arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Timur terkait dengan perwujudan kawasan strategis, dimanatkan untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten. Pengembangan kawasan strategis sesuai dengan *Urban Design Process* difokuskan pada pengembangan elemen pembentuk sebuah kota disesuaikan dengan fungsi utama perkotaan.

4. Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Layak

Persentase rumah tangga pengguna sumber air minum bersih pada Tahun 2019 baru mencapai 73,55%. Rumah tangga berfasilitas tempat buang air besar belum mencapai 100%.

5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Lampung Timur terbesar ketiga di Provinsi Lampung, dengan jumlah penduduk miskin terbesar se-Provinsi Lampung.

6. Kualitas Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 sebesar 69,37 masih dibawah IPM rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar 69,69.

7. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Lampung Timur Tahun 2020 sebesar -2,29%. Laju pertumbuhan ekonomi Lampung Timur kurun waktu tiga tahun terakhir terendah di antara kab/kota se-provinsi Lampung.

8. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 sebesar Rp.38,70 juta, dibawah pendapatan perkapita Provinsi Lampung yang sebesar Rp.41,61 juta.

9. Keamanan Wilayah

Kasus kriminalitas pada Tahun 2019 mencapai 536 kasus, meningkat 12,13% dari Tahun 2018.

10. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur masih berpredikat C.

4.1.2 Permasalahan per Urusan Pemerintahan Daerah

Terkait dengan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselaraskan dengan isu dan masalah pembangunan di tingkat nasional maupun Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa standar pelayanan minimal dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

1. Pendidikan.

1. Masih adanya masyarakat Lampung Timur yang buta huruf.
2. Belum tercapainya program wajib belajar 12 tahun.
3. APM PAUD dan pendidikan dasar belum mencapai 100%.
4. Belum seluruh guru PNS memiliki sertifikat pendidik.
5. Belum seluruh sekolah jenjang PAUD dan pendidikan dasar memiliki akreditasi

2. Kesehatan.

Peningkatan jenis pelayanan dasar kesehatan yang meliputi:

1. Prevalensi stunting tertinggi mencapai 42,5%
2. Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan

3. Angka Kematian Bayi mencapai 71 kasus, atau meningkat dibandingkan Tahun 2019.
4. Kasus gizi buruk mengalami peningkatan
5. Insiden Rate DBD mengalami peningkatan di Tahun 2019, mencapai 43,38
6. Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan baru mencapai 68,3%, atau dibawah rata-rata nasional.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi jalan mantap kewenangan kabupaten masih di bawah 65%.
2. Jembatan dalam kondisi kritis sebesar 2,27% dan rusak berat 1,94% yang perlu ditangani segera.
3. 45% jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak.
Dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan daerah, perlu dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi pola pemberdayaan P3A, pemutakhiran tahunan rencana pengelolaan dan pengembangan irigasi, peningkatan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi jaringan irigasi di beberapa lokasi, disesuaikan dengan usulan masyarakat dan hasil pengamatan perangkat daerah.
4. Masih terdapat rumah tangga yang belum berfasilitas tempat buang air besar yaitu sekitar 3,53%
5. Perlunya penataan ruang perkotaan di kawasan strategis kabupaten, guna mendorong pusat-pusat ekonomi baru kawasan strategis, daya tarik, dan peningkatan citra daerah (*city branding*).

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki sumber air minum bersih yaitu sekitar 26,45%.
2. Masih terdapat lingkungan kumuh di 5 kecamatan, Labuhan Maringgai, Bandar Sribhawono, Way Jepara, Sukadana, dan Pekalongan yang perlu ditangani.
3. Perlunya penanganan rumah tidak layak huni.
4. Ketersediaan penerangan jalan umum masih per desa masih sangat terbatas

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Jumlah kejadian kriminalitas meningkat di Tahun 2019, perlu ditingkatkan peran serta aktif masyarakat dan Sat Pol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
2. Indeks risiko bencana daerah masuk dalam kategori tinggi
3. Berdasarkan data Tahun 2019, terjadi 11 kejadian kebakaran, perlu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pemadam kebakaran daerah (*time response*).

6. Sosial

1. Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada Tahun 2019 baru mencapai 2,36% dari total 5.661 orang yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun.

2. Kemiskinan di Tahun 2019 masih mencapai 15,24 persen, dan berada di nomor 3 terbesar se-Provinsi Lampung.
3. Belum seluruh keluarga pra sejahtera mendapat bantuan sosial bersyarat.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

1. Pengangguran di Tahun 2019 mencapai 2,89 persen dengan jumlah mencapai 15.291 orang, dan berpotensi bertambah di pandemi COVID-19 ini.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di bawah 75%
3. Jumlah pencari kerja yang dapat ditempatkan bekerja baru mencapai 10,8%.
4. Belum adanya Balai Latihan Kerja Daerah

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender baru mencapai 88,78 dibawah Provinsi Lampung.
2. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi

3. Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan jauh dibawah rata-rata nasional

4. Pertanahan

1. Belum seluruh tanah milik masyarakat bersertifikat.
2. Belum seluruh tanah milik pemda bersertifikat.

5. Lingkungan Hidup

1. Belum diketahuinya indeks kualitas lingkungan hidup di daerah
2. Perlunya peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah
3. Perlunya peningkatan ketaatan pelaksanaan izin lingkungan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum seluruh masyarakat memiliki Kartu Tanda Penduduk.
2. Belum seluruh masyarakat memiliki akta kelahiran.
3. Belum seluruh anak memiliki Kartu Identitas Anak.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih terdapat 22 desa tertinggal yang tersebar di beberapa kecamatan.
2. Desa berpredikat desa maju masih berada di bawah 20 persen.
3. Belum ada desa yang masuk dalam kategori desa mandiri.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk lebih dari 1%, atau di atas laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung.

9. Perhubungan

1. Kecelakaan lalu lintas meningkat di Tahun 2019 dan mengalami penurunan di Tahun 2020. Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kecamatan dengan jumlah kecelakaan tertinggi di Tahun 2020.
2. Moda angkutan umum darat sangat terbatas dan alat uji KIR kendaraan angkutan darat belum beroperasi.

10. Komunikasi dan Informatika

1. Perlu peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi berpredikat Baik.
2. Masih terdapat wilayah *blank spot* di beberapa wilayah kecamatan, khususnya Kecamatan Marga Sekampung.

11. Koperasi dan Usaha Mikro

1. Jumlah usaha mikro dan kecil relatif masih terbatas jumlahnya di Kabupaten Lampung Timur.
2. Koperasi yang aktif hanya mencapai 32,57%.

12. Penanaman Modal

1. Peningkatan nilai dan jumlah investasi daerah belum optimal, masih di bawah 10%.
2. Pertumbuhan PMTB di Tahun 2020 mengalami penurunan

13. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Peningkatan prestasi di bidang olah raga.
Capaian medali pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2017, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-9, menurun dari perhelatan Porprov sebelumnya yang berada di posisi 8, meskipun secara perolehan medali mengalami peningkatan.
2. Persentase kelompok umur pemuda mencapai 25,21%, yang memerlukan dukungan dan perhatian para pihak.

14. Kebudayaan

1. Masih kurangnya pembinaan kebudayaan dan penyelenggaraan even kesenian dan kebudayaan daerah.
2. Belum seluruh kelompok kesenian dan kebudayaan memiliki nomor register dan terfasilitasi.

15. Perpustakaan

1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di bawah 50%
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan baru mencapai 75
3. Rasio minat baca baru mencapai 0,25

16. Kearsipan

1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di bawah 50%

C. Urusan Pemerintahan Pilihan**1. Perikanan**

1. Produksi perikanan budidaya dan tangkap menurun.
Berdasarkan data, pada Tahun 2020 produksi perikanan tangkap dan budidaya mengalami penurunan produksi.

2. Pariwisata

1. Sektor pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum) mengalami kontraksi di Tahun 2020

2. Jumlah pengunjung even dan destinasi wisata mengalami penurunan dua tahun terakhir.
3. Tantangan pemulihan pariwisata di Tahun 2021 pasca pandemi COVID-19.

3. Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Pangan

1. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perlambatan di Tahun 2020
2. Kesejahteraan petani belum tercapai.
3. Jumlah petani peserta Program Kartu Petani Berjaya belum optimal
4. Produksi padi tiga tahun terakhir mengalami penurunan produksi.
5. Komoditas ubi kayu dan kedelai mengalami penurunan produksi.
6. Produksi lada, kakao dan kelapa berkecenderungan menurun 5 tahun terakhir

4. Perdagangan

1. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kontraksi di Tahun 2020.
2. Jumlah pedagang kecil baru mencapai 523 pedagang di Tahun 2020.

5. Perindustrian

Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi di Tahun 2020.

C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

1. Target IPM tidak tercapai.
2. Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.
3. Perlunya peningkatan nilai indeks inovasi daerah

2. Keuangan

1. Porsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur terhadap APBD masih di bawah 10 persen.
Berdasarkan data, porsi PAD dalam APBD Kabupaten Lampung Timur masih di bawah 10 persen, selain itu rata-rata pertumbuhan PAD kurun waktu tiga tahun terakhir masih dibawah 15%, atau dibawah rata-rata nasional yang telah mencapai 15,73%.
2. Pertumbuhan PAD minus di Tahun 2020.
3. Pengelolaan aset daerah belum optimal.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Persentase pejabat struktural eselon II, III, dan IV yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan masih di bawah 50%.

4. Pengawasan

1. Kapabilitas APIP perlu ditingkatkan
2. Tingkat capaian *Monitoring Center of Prevention* (MCP) KPK RI Tahun 2020 terendah se-Provinsi Lampung

D. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Partisipasi masyarakat Lampung Timur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak mencapai target nasional partisipasi masyarakat sebesar 77,5%.
2. Kasus penyalahgunaan NAPZA mengalami peningkatan tiga tahun terakhir.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota sekitar yang berbatasan secara langsung, evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021, dan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai isu-isu nasional maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur.

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2015, era baru dalam kerjasama regional ASEAN yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dilaksanakan. Kesepakatan membentuk ASEAN yang stabil akan semakin mendorong kerjasama di bidang ekonomi yang pada gilirannya akan memperkuat struktur perekonomian di masing-masing negara. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, geliat ekonomi Kabupaten Lampung Timur khususnya perdagangan beberapa komoditi pertanian unggulan (buah-buahan) asal Lampung Timur dipasarkan kebeberapa negara ASEAN. Sebaliknya, masyarakat Lampung Timur saat ini sudah biasa mengkonsumsi produk dan berbagai barang industri asal negara ASEAN, Ini menunjukkan bahwa di lapangan Kabupaten Lampung Timur sudah berada dalam pusaran lingkungan MEA.

MEA berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing. Secara keseluruhan daya saing dan produktivitas Kabupaten Lampung Timur masih rendah. Kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas SDM akan sangat berguna bagi penguatan sektor tenaga kerja sebagai salah satu unsur penting bagi peningkatan produktivitas dan daya saing. Jika melihat kontribusi sektor terhadap PDRB, sebagai salah indikator produktivitas dan daya saing, maka fokus pembangunan pertanian dan perikanan masih menjadi isu krusial dan perlu dikembangkan di masa yang datang. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan mencetak lebih banyak tenaga kerja yang memiliki ketrampilan (*skilled labour*) serta introduksi teknologi guna mendukung industri pengolahan berbagai komoditi pertanian dan sektor lainnya menuju penciptaan nilai tambah (*added value creation*) serta penguatan iklim kemudahan berusaha daerah.

2. Sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, menyepakati kerangka pembangunan global yakni *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang disepakati oleh

- 192 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai *platform* pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Komitmen tersebut menjadi sebuah tantangan dimana pada tahun 2030 cita-cita *SDGs* yang tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus tercapai. Upaya percepatan pencapaian Target *SDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Tahun 2019.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD).
 4. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Tahun 2020 memberikan dampak negatif yang sangat besar pada sektor ekonomi masyarakat. Dampak negatif pertama adalah menurunnya konsumsi rumah tangga, ketidakpastian investasi dan berhentinya usaha, serta penurunan harga komoditas, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di minus 2,07 persen di Tahun 2020. Para pengamat ekonomi memperkirakan jika pandemi mereda pada semester kedua Tahun 2021 maka ekonomi global akan pulih. Diharapkan pemulihan ekonomi berada dalam bentuk kurva V, dimana resesi terjadi sangat dalam tapi cepat kembali seperti semula dan menguat, yang dipengaruhi oleh perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi dikarenakan peningkatan permintaan dan konsumsi. Namun juga perlu diperhatikan pemulihan ekonomi yang membentuk kurva U, dimana pemulihan ekonomi setelah pandemi membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak negatif terhadap sektor sosial masyarakat. Peningkatan jumlah kasus tertular dan meningkatnya jumlah korban jiwa, mengakibatkan perubahan perilaku sosial dan budaya di masyarakat. Kebijakan PSBB dan PPKM membatasi aktivitas dan interaksi masyarakat yang pada akhirnya berdampak negatif pada sektor lain.
 5. Penurunan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur saat ini terbesar di Provinsi Lampung.
 6. Peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, peternak, dan nelayan melalui berbagai program revitalisasi dan percepatan peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 7. Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan keanekaragaman pangan dan ketersediaan cadangan pangan.
 8. Hilirisasi hasil perikanan perlu ditingkatkan, dengan komoditas unggulan udang vaname, kepiting, rajungan, dan kerang, melalui pengembangan industri/pengolahan/sentra IKM/UMKM/Poklahsar/Miniplant.

9. Kawasan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 5.588 hektar memiliki potensi ekonomi, baik sektor perikanan, pariwisata, maupun perhubungan yang perlu dikelola bagi peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
10. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera, yang memperlancar distribusi barang dan orang, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Lampung Timur yang merupakan sentra padi dan ternak Provinsi Lampung, yang dapat dikembangkan sebagai penyangga pangan Ibukota DKI Jakarta.
11. Pembangunan bendungan Sukaraja III di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional pembangunan 13 bendungan baru, dengan total daya tampung air mencapai 894,2 juta meter kubik. Badan Bendungan Sukaraja III berlokasi di Desa Negeri Jemanten dan Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung, konstruksi Bendungan Sukaraja III terdiri dari tubuh bendungan/bangunan bendungan, bangunan pelimpah (*spillway*) corong dan berpintu, bangunan pengelak (*conduit*) dan bangunan pengambilan (*intake*). Pembangunan bendungan ini tentu saja akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur.
12. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, khususnya infrastruktur konektivitas, perhubungan, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman.
13. Pengembangan dan penataan ruang perkotaan ibukota kabupaten dan kecamatan strategis dan cepat tumbuh secara berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
14. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Berdasarkan data pada Tahun 2020 penduduk Lampung Timur tergolong struktur penduduk muda “transisi” karena proporsi penduduk dibawah 15 tahun masih tinggi, yakni mencapai 27 persen. Banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di suatu wilayah menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. kondisi ini harus disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan, agar bonus demografi tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran pada usia produktif maupun tingginya pekerja sektor informal.
15. Terdapat 59 desa yang persentase prevalensi stuntingnya lebih dari 10%.
16. Belum tersedianya laboratorium kesehatan daerah sebagai pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
17. Peningkatan pengarusutamaan gender dan daerah ramah perempuan dan anak merupakan tujuan Program Perempuan Berjaya dan Lampung Ramah Perempuan dan Anak yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sejalan dengan program tersebut, sebagai salah satu Kab/Kota yang telah menjadi Kabupaten Layak Anak, perlu sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak.

18. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang setiap tahun mengalami peningkatan disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, perempuan dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan bencana sosial dan penanganan PMKS.
19. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal. Perekonomian global diproyeksikan akan mulai meningkat di Tahun 2022, peluang ekspor Lampung Timur dapat bersumber dari komoditas olahan buah-buahan/sayuran, ikan dan udang, buah-buahan, dan kakao.
20. Meningkatkan daya tarik wisata lokal dan ekonomi kreatif masyarakat serta produk unggulan daerah.
21. Meningkatkan volume perdagangan daerah melalui pengembangan kerjasama perdagangan dengan jaringan pemasaran nasional dan *e-commerce* serta wilayah kabupaten/kota sekitar. Maraknya penggunaan teknologi informasi, meningkatkan *e-commerce* pada dunia perdagangan yang dapat berdampak pada meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk suatu produk baru dengan cara pemasaran yang lebih efektif dan efisien sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Perlu ditingkatkan upaya menciptakan iklim kemudahan berusaha di era digital.
22. Peningkatan investasi dan iklim berusaha di daerah berbasis digital.
23. Peningkatan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi masyarakat Lampung Timur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak mencapai target nasional partisipasi masyarakat sebesar 77,5%.
24. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi dan image negatif tentang keamanan wilayah perlu menjadi perhatian khusus seluruh stake holder dalam peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai kewenangan.
25. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, akuntabilitas dan kemandirian fiskal daerah.
26. Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi desa dalam rangka memajukan desa. Terdapat 63 desa tertinggal di Kabupaten Lampung Timur. Strategi percepatan pembangunan desa tertinggal melalui pengembangan kawasan strategis, fasilitasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana sistem logistik antar wilayah, peningkatan nilai tambah, promosi dan kemitraan, peningkatan tata kelola dan ekosistem usaha, serta peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial ekonomi.
27. Kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan luas kurang lebih 123.621 hektar yang merupakan kawasan strategis nasional dan *Asean Heritage Park*, perlu dikembangkan sebagai kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata di Provinsi Lampung. Pada tataran lokal, diupayakan keberadaan TNWK dapat memberikan manfaat positif bagi kawasan penyangga sekitarnya, serta mengurangi resiko dampak negatif yang timbul.



28. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau.
29. Peningkatan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba sesuai kewenangan dan mitigasi bencana.
30. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan, meliputi :

Tabel 4.1
Rekomendasi KLHS Terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Timur

No Indikator	Indikator	Arah Kebijakan	Arahan Program (Acuan Nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019)	Rekomendasi KLHS
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan				
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan meningkatkan penyelenggaraan ketahanan, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Program Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Program Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Program Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Diversifikasi Tanaman Pangan Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten Sosialisasi Peduli Kesehatan Penstabilan Harga Pangan Peningkatan Infrastruktur guna mendukung distribusi pangan
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial Kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam	Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Penduduk Miskin. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang,			
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan				
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan meningkatkan penyelenggaraan ketahanan, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Program Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Program Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Program Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Diversifikasi Tanaman Pangan Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten Sosialisasi Peduli Kesehatan Penstabilan Harga Pangan Peningkatan Infrastruktur guna mendukung distribusi pangan
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial Kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam	Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Penduduk Miskin. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang,			
	dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Mikro dan Kecil Mitigasi, Evaluasi, dan Adaptasi Bencana Alam Pengembangan Infrastruktur dasar terutama Kesehatan dan Pendidikan
1.5.2*	Jumlah korban meninggal/ Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB			
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah			



No Indikator	Indikator	Arah Kebijakan	Arahan Program (Acuan Nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019)	Rekomendasi KLHS
			Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua				
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UKM Pengembangan pariwisata daerah Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Penggunaan dan	Meningkatkan indikator ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan PDB per kapita Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Pemasaran Wisata Pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif Promosi dan Sosialisasi Protokol Kesehatan di Bidang Pariwisata
8.1.1.(a)	PDB per kapita			
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun			
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB			
			Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	
			Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	
Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak				
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Penataan Kawasan Tepian Sungai guna mendukung program pengijauan tepian sungai Penentuan daya tampung beban pencemaran Kota
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun			
Tujuan 3: Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat				
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan	Meningkatkan akses dan mutu	Program Pemenuhan Upaya	Peningkatan fasilitas pelayanan

No Indikator	Indikator	Arah Kebijakan	Arahan Program (Acuan Nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019)	Rekomendasi KLHS
	Kesehatan	pelayanan kesehatan	Kesehatan	kesehatan;
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan jangkauan ketersediaan obat di Kota Bandarlampung; Sosialisasi hidup sehat; Pemberian nutrisi dan vitamin (jika diperlukan) Dukungan anggaran dalam meningkatkan program SJSN

4.2.2 Isu Strategis Kewilayahan

4.2.2.1 Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Dalam matriks program utama Perda RTRW Kabupaten Lampung Timur, upaya pengembangan kawasan perkotaan khususnya di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Sekampung Udik, dan Kecamatan Bandar Sribhawono dilaksanakan melalui percepatan :
 - pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.
 - penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan yang menyediakan fasilitas dan utilitas perkotaan yang proporsional dan efektif terhadap kemampuan pelayanan, tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan kota serta sesuai dengan rencana pengembangannya.
 - Peningkatan aksesibilitas pergerakan antara kawasan perkotaan dengan wilayah pelayanan sekitarnya
2. Klaster pembangunan daerah Provinsi Lampung menetapkan wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagai kawasan mandatori penyangga ketahanan pangan dan kawasan industri. Sebagai wilayah yang mendapat mandatori sebagai penyangga ketahanan pangan daerah, pengembangan wilayah yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan lahan pertanian berkelanjutan merupakan kebijakan yang mutlak dilakukan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan kawasan industri perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keunggulan komparatif sumber daya alam dan mendorong diversifikasi ekonomi. Kebijakan perlu dilakukan dalam peningkatan iklim investasi, penyediaan infrastruktur, interkoneksi antar wilayah, penyediaan sumber daya manusia terampil, dan pendanaan. Tahapan pengembangannya juga perlu dimulai dengan mengorganisasi pelaku-pelaku industri mikro, kecil, dan menengah dalam sentra industri kecil dan menengah level desa maupun kecamatan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembangunan aktivitas dan kapasitas industri secara bertahap sesuai dengan potensi dan kemampuan. Hasil dari berbagai strategi tersebut diharapkan dapat mendukung peran industri dalam redistribusi kemajuan pembangunan daerah serta peningkatan daya saing secara keseluruhan.
3. Berdasarkan Perda RZWP3K Provinsi Lampung Pasal 17 ayat (4), mengamanatkan bahwa pengembangan zona perikanan tangkap yaitu penguatan penetapan lokasi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di

perairan Lampung Timur. Potensi pengembangan perikanan ini sangat besar, dimana 10% produksi rajungan nasional berasal dari perairan pesisir timur Lampung, yang melingkupi lebih dari 4000 nelayan, 34 mini plant dan 4 pabrik yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang dan Lampung Tengah.

4. Berdasarkan draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, konsep kawasan penyangga Tol Trans Sumatera di wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi :
 - Gerbang Tol Sidomulyo : Desa Sido Rahayu Kecamatan Waway Karya
 - Gerbang Tol Lematang : Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik
 - Gerbang Tol Itera : Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang

Pengembangan kawasan penyangga jalan tol tersebut diarahkan untuk menumbuhkan pusat distribusi barang dan jasa berbasis komoditas unggulan, salah satunya melalui pengembangan sub terminal agribisnis.

5. Berdasarkan draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, usulan lokasi kawasan industri meliputi Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Bandar Sribhawono, dan Kecamatan Pasir Sakti, dengan Jalan Nasional Lintas Pantai Timur sebagai *backbone* kawasan industri dan kawasan peruntukan industri.

4.2.2.2 Wilayah Rawan Bencana

Isu strategis dan penanganan pada wilayah rawan bencana adalah melakukan mitigasi bencana dengan fokus pada daerah-daerah dengan potensi bencana, antara lain:

1. Kawasan rawan tanah longsor dengan luas kurang lebih 7.333 hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Sekampung Udik,
 - b. Kecamatan Marga Sekampung,
 - c. Kecamatan Waway Karya,
 - d. Kecamatan Jabung, dan
 - e. Kecamatan Pasir Sakti.
2. Kawasan rawan abrasi dengan luas kurang lebih 1.949 hektar terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai.
3. Kawasan rawan banjir dengan luas kurang lebih 15.983 hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Bandar Sribhawono;
 - b. Kecamatan Braja Seleh;
 - c. Kecamatan Sekampung;
 - d. Kecamatan Mataram Baru;
 - e. Kecamatan Melinting;
 - f. Kecamatan Sekampung Udik;
 - g. Kecamatan Waway Karya;
 - h. Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - i. Kecamatan Raman Utara.

4. Kawasan rawan kebakaran hutan dengan luas kurang lebih 123.621 hektar terdapat di Taman Nasional Way Kambas.
5. Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di:
 - a. Kecamatan Sukadana;
 - b. Kecamatan Pasir Sakti;
 - c. Kecamatan Pekalongan;
 - d. Kecamatan Sekampung; dan
 - e. Kecamatan Purbolinggo.
6. Kawasan rawan gelombang tinggi dengan luas kurang lebih 7.879 hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - b. pulau-pulau kecil meliputi Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, Pulau Gosong Sekopong, Pulau Batang Besar, Pulau Batang Kecil.

4.2.2.3 Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Lampung Timur

Komoditas unggulan Kabupaten Lampung Timur terdiri dari berbagai produk pertanian dan non pertanian yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan tersebut dilaksanakan dengan berbasis pengembangan kawasan yang meliputi:

1. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi:
 - a. tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 58.321 hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan sentra produksi di Kecamatan Purbolinggo, Batanghari, dan Way Jepara.
 - b. tanaman pangan lahan kering dengan luas kurang lebih 189.430 hektar terdapat di Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Marga Tiga, Sekampung Udik, Jabung, dan Labuhan Maringgai, dengan sentra produksi di Kecamatan Sukadana.
 - c. kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 50.553 hektar meliputi:
 1. Kecamatan Batanghari seluas kurang lebih 4.262 hektar;
 2. Kecamatan Sekampung seluas kurang lebih 3.789 hektar;
 3. Kecamatan Sekampung Udik seluas kurang lebih 2.695 hektar;
 4. Kecamatan Jabung seluas kurang lebih 6.006 hektar;
 5. Kecamatan Pasir Sakti seluas kurang lebih 4.100 hektar;
 6. Kecamatan Waway Karya seluas kurang lebih 2.825 hektar;
 7. Kecamatan Labuhan Maringgai seluas kurang lebih 2.886 hektar;
 8. Kecamatan Way Jepara seluas kurang lebih 3.115 hektar;
 9. Kecamatan Braja Sebah seluas kurang lebih 2.741 hektar;
 10. Kecamatan Mataram Baru seluas kurang lebih 1.738 hektar;
 11. Kecamatan Pekalongan seluas kurang lebih 2.642 hektar;
 12. Kecamatan Batanghari Nuban seluas kurang lebih 3.155 hektar;
 13. Kecamatan Raman Utara seluas kurang lebih 5.213 hektar;
 14. Kecamatan Purbolinggo seluas kurang lebih 3.026 hektar; dan
 15. Kecamatan Way Bungur seluas kurang lebih 2.360 hektar.

2. Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 2.225 hektar meliputi :
 - a. komoditas unggulan cabai tersebar di Kecamatan Metro Kibang;
 - b. komoditas unggulan terung tersebar di Kecamatan Marga Tiga;
 - c. komoditas unggulan tomat tersebar di Kecamatan Batanghari;
 - d. komoditas unggulan buncis tersebar di Kecamatan Pekalongan;
 - e. komoditas unggulan mentimun tersebar di Kecamatan Batanghari;
 - f. komoditas unggulan kangkung tersebar di Kecamatan Batanghari;
 - g. komoditas unggulan bayam tersebar di kecamatan Labuhan Ratu;
 - h. komoditas unggulan durian tersebar di Kecamatan Melinting, Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Marga Sekampung;
 - i. komoditas unggulan lengkung tersebar di Kecamatan Sekampung;
 - j. komoditas unggulan pepaya tersebar di Kecamatan Marga Sekampung;
 - k. komoditas unggulan pisang tersebar di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan
 - l. komoditas unggulan tanaman hias tersebar di Kecamatan Pekalongan.
3. Kawasan perkebunan memiliki luas kurang lebih 40.599 hektar meliputi:
 1. komoditas unggulan kakao tersebar di Kecamatan Way Jepara, Labuhan Ratu, Bandar Sribhawono dan Mataram Baru;
 2. komoditas unggulan kelapa tersebar di Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Marga Tiga;
 3. komoditas unggulan kelapa sawit tersebar di Kecamatan Waway Karya;
 4. komoditas unggulan karet tersebar di Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Marga Sekampung; dan
 5. komoditas unggulan lada tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Melinting dan Kecamatan Gunung Pelindung.
4. Pengembangan kawasan peternakan meliputi:
 - a. Ternak besar meliputi:
 - 1) komoditas peternakan sapi terdapat di Kecamatan Way Jepara; dan
 - 2) komoditas peternakan kerbau terdapat di Kecamatan Batanghari.
 - b. Ternak kecil meliputi:
 - 1) komoditas unggulan peternakan kambing terdapat di Kecamatan Batanghari Nuban;
 - 2) komoditas unggulan peternakan domba terdapat di Kecamatan Pekalongan;
 - 3) komoditas unggulan peternakan babi terdapat di Kecamatan Raman Utara;
 - 4) komoditas unggulan peternakan ayam buras terdapat di Kecamatan Batanghari;
 - 5) komoditas unggulan peternakan ayam ras pedaging terdapat di Kecamatan Metro Kibang;
 - 6) komoditas unggulan peternakan ayam ras petelor terdapat di Kecamatan Purbolinggo; dan
 - 7) komoditas unggulan peternakan itik terdapat di Kecamatan Way Jepara.

5. Kawasan peruntukan perikanan tangkap berupa:
 - a. Kawasan perikanan budidaya air payau meliputi komoditas ikan bandeng di Kecamatan Pasir Sakti;
 - b. Kawasan perikanan budidaya air laut dengan komoditas unggulan udang di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
 - c. Kawasan perikanan budidaya air tawar berada di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.
6. Kawasan peruntukan pengolahan perikanan berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 - a. Pelabuhan Labuhan Maringgai;
 - b. Pelabuhan Way Penet;
 - c. Pelabuhan Way Sekampung; dan
 - d. Pelabuhan Kuala Seputih.
7. Kawasan peruntukan Minapolitan meliputi:
 - a. potensi udang dan bandeng yang terdapat di:
 1. Kawasan Labuhan Maringgai;
 2. Kawasan Way Penet; dan
 3. Kawasan Kuala Seputih.
 - b. potensi ikan layang dan ikan kembung terdapat di Kawasan Kuala Seputih.
 - c. potensi teri nasi yang terdapat di kawasan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti.
6. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur yang memiliki potensi bahan tambang batuan, bahan mineral bukan logam, mineral logam, batubara, minyak bumi dan gas.

4.2.3 Kajian Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah, maka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen rancangan RPJMD masing-masing kabupaten/kota.



Tabel 4.2
Identifikasi Isu Strategis/Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

Kota Metro	Keterkaitan	Kabupaten Lampung Tengah	Keterkaitan	Kabupaten Lampung Selatan	Keterkaitan
Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas/ aksesibilitas pendidikan dan kesehatan Lampung Timur.	Peningkatan perekonomian berbasis agribisnis	Peningkatan hilirisasi sektor pertanian daerah bersinergi dengan keberadaan agroindustri di wilayah Lampung Tengah	Dampak Jalan Tol Trans Sumatera, Bakauheni Harbour City dan Terminal Agribisnis	Kerjasama dan pengembangan wilayah/ kawasan/ kecamatan yang berdekatan dengan pembangunan kawasan strategis nasional dan daerah
Pengembangan literasi pangan (keamanan dan keragaman pangan).	Kota Metro dapat menjadi pangsa pasar potensial bagi produk pertanian dan perikanan Lampung Timur				

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Visi juga merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan atau keinginan yang telah disepakati untuk diwujudkan oleh seluruh *stake holders* dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* agar dapat turut berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan yang dipunyai oleh *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Kabupaten Lampung Timur berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan dapat digunakan sebagai inspirasi, peta jalan atau langkah strategis, pengumpulan energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas diri masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif.

RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010, merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam persepektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas (*human welfare*), yang mengamanatkan visi daerah yaitu:


“Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan”


Visi pembangunan jangka panjang tersebut memiliki penjelasan arti yang meliputi beberapa kata kunci, yaitu:

1. Sejahtera

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dilihat dari perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan dan *civilization* (politik dan hukum) yang maju dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Kesejahteraan masyarakat umumnya ditandai dengan : jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi, serta memiliki kualitas pelayanan sosial baik.

Masyarakat sejahtera terjamin haknya dan memiliki kesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial, memiliki kesetaraan gender, serta terlayani kebutuhan dasar yang lain. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan terhadap sumber dari luar negeri. Keswasembadaan dapat dicapai sejatinya dengan memanfaatkan keunggulan secara optimal. Swasembada harus menjadi fokus perhatian untuk mengurangi ketergantungan dan kerawanan serta menciptakan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Selain swasembada, kemakmuran akan terwujud ditentukan oleh kepastian hukum, etika politik luhur yang menjunjung tinggi budaya demokrasi, ketentraman dan ketertiban, budaya kerja keras masyarakat. Perekonomian di Lampung Timur didukung oleh sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis ekonomi yang merupakan sektor ekonomi unggulan di Lampung Timur adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan merata, yang tercermin dari tingkat partisipasi pendidikan, tingkat pendidikan terendah, dan jumlah tenaga ahli atau profesional yang dihasilkan. Tingkat kesehatan tinggi dan merata dilihat dari derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi. Masyarakat Lampung Timur yang sejahtera adalah masyarakat yang *civilized*, yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, bebas berpendapat, beretika, disiplin, tertib, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM).

2. Berdaya Saing

Unsur kedua dalam Visi Lampung Timur adalah Berdaya Saing. Daya artinya “kemampuan, dan atau kekuatan”. Jadi berdaya saing adalah suatu kemampuan yang dimiliki berdasarkan kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Daya saing ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung berkualitas tinggi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, kualitas SDM, serta jajaran birokrasi yang visioner.

Infrastruktur yang baik akan memangkas biaya operasional usaha sehingga usaha menjadi lebih efisien dan kompetitif. Sedangkan pemanfaatan teknologi akan mempermudah proses produksi, sehingga akan mampu dihasilkan produk berkualitas baik dengan harga kompetitif, sehingga dapat dengan mudah diserap oleh pasar. Sementara itu SDM akan sangat menentukan daya saing daerah melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas dengan *skill* tinggi. Sedangkan kualitas birokrasi visioner akan berindikasi pada kemampuan manajemen pemerintahan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan daerah yang baik akan mampu menyediakan pembiayaan pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

3. Religius

Unsur ketiga yang terkandung dalam Visi Lampung Timur adalah Religius. Religius memiliki kata dasar religi, religi berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Dasar atau landasan kehidupan religius adalah iman dan takwa. Negara kesatuan yang berbentuk republik ini telah cukup dikenal sebagai masyarakat relegius walaupun seiring itu moralnya masih perlu dibangun dalam kesadaran tinggi kaitannya sebagai makhluk beragama (*Human relegious*). Sebab masih dijumpai kemerosotan moral dalam beberapa aspek kehidupan yang berakibat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam segala aspek kehidupan di Lampung Timur secara tegas berazaskan Pancasila terutama sila pertama yang merupakan soal terpenting dalam kehidupan manusia; yakni rasa Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai dari sila ini begitu jelas menggambarkan adanya hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan. Artinya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lampung Timur seyogyanya selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Inilah maksud dan kandungan dari sila pertama Pancasila yang secara verbal menerangkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lampung Timur itu pasti beragama dalam arti Berketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya segala tindakan-tindakan masyarakat Lampung Timur seyogyanya mengindahkan nilai etika relegiusitas yang terkandung dalam agama masing-masing yang telah dijembatani oleh sila pertama itu, apakah masyarakat itu beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Aliran kepercayaan dan lain-lain karena semua agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan.

4. Berkelanjutan

Unsur keempat dari Visi Lampung Timur adalah Berkelanjutan. Berkelanjutan di sini dimaksudkan bahwa pembangunan Lampung Timur bersifat pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pada KTT Dunia tahun 2005 menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Tetapi perlu diingat bahwa konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya alam itu sendiri terbatas yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya.

Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukannya pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan (2005-2025), sesuai dengan potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta didukung oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen, maka misi yang akan dilaksanakan beserta arah pembangunan, sasaran pembangunan, dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan daerah dengan mengurangi kesenjangan sosial antarmasyarakat. Pengurangan kesenjangan sosial diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan distribusi pendapatan yang merata serta kesempatan kerja yang sama sehingga dapat mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian akses yang adil kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan upaya membangun, mengembangkan dan memperkuat perekonomian Lampung Timur dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global.

Ekonomi berbasis agro terus dipertahankan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi yang berdaya saing.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

Misi ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam jangka panjang melalui transparansi pemerintahan yang didukung oleh akuntabilitas dan profesionalitas personil serta efesiensi dan efektifitas kelembagaan. Melalui dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang sinergis, terpadu, dan harmonis sehingga berdampak pada peningkatan fungsi pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur secara otonom.

3. Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan prasarana dan sarana daerah melingkupi transportasi, pengairan, energi listrik, dan telekomunikasi. Perwujudan misi ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi upaya perwujudan daya saing Kabupaten Lampung Timur khususnya dan serta daya saing Provinsi Lampung dan nasional pada umumnya melalui pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

4. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

Misi ini adalah upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan pendidikan berkualitas disemua jalur, jenis, dan jenjang. Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEKS diprioritaskan pada semua sektor pembangunan. Pengembangan SDM berkualitas harus didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan keolahragaan.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang dimotori oleh aparat penegak hukum yang adil, bersih dan berwibawa serta didukung oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan misi ini akan memberikan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat dan sebagai bagian dari perwujudan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.

6. Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Misi ini merupakan upaya dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama disemua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan keagamaan secara luas untuk meningkatkan kualitas pribadi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama perlu diperkuat karakter atau jati diri masyarakat yang mengaktualisasikan budi pekerti luhur dan nilai-nilai luhur budaya daerah serta mampu berinteraksi antar budaya.

7. Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam (lahan, air, hutan, dan mineral) secara keberlanjutan sehingga seluruh aktivitas pembangunan tidak berdampak negatif pada kelestarian dan keasrian lingkungan hidup. Destruktivitas lingkungan pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas lingkungan yang tidak sehat dan dapat menurunkan daya dukung lingkungan yang menopang hajat hidup seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan misi ini akan sangat tergantung dari komitmen politik yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang mengikat serta peranserta seluruh masyarakat yang ada sehingga keterpaduan seluruh sektor merupakan prasyarat bagi lingkungan yang asri dan lestari.

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 bertujuan mewujudkan masyarakat Lampung Timur sejahtera, berke-Tuhanan, dan berwawasan lingkungan, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur sampai Tahun 2025 pada setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Arah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera

1. Menyediakan berbagai fasilitas kebutuhan dasar penduduk, menciptakan penyebaran dan pemerataan penduduk ke berbagai sentra ekonomi, integrasi budaya dari berbagai suku, memfasilitasi pengembangan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (KPSAE), dan mencegah kerusakan lingkungan pendukung kehidupan.
2. Menyebarkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai di tingkat desa, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, mencegah penyebaran penyakit menular.
3. Penghapusan buta huruf; peningkatan kualitas, fasilitas, dan pelayanan pendidikan; meningkatkan pendidikan minimal penduduk sampai pada tingkat SLTA.
4. Menciptakan kesetaraan gender, pembinaan pendidikan anak sejak usia dini, peningkatan partisipasi pemuda dalam budaya, olahraga, politik, serta pelayanan dan perlindungan sosial.
5. Membangun ekonomi makro berbasis pertanian dan agribisnis dengan melibatkan aspek kerakyatan sebagai konsep dasar; serta mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor lain.
6. Mengkondisikan munculnya investasi langsung yang bertumpu pada kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat, melalui sistem dan pengaturan investasi yang kondusif dan menarik.
7. Mengembangkan sumber komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru untuk mendukung sumber pendapatan konvensional, sehingga secara bertahap mampu menciptakan kemandirian daerah.
8. Menekan angka kemiskinan, mengembangkan jaminan sosial untuk orang miskin, dan mengembangkan program pemberdayaan melalui usaha ekonomi produktif.
9. Mengembangkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama yang berbasis wisata alam, wisata agro, wisata budaya, dan wisata kuliner; peningkatan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan; serta penerapan prinsip “*Nemui Nyimah*” dan “*Nengah Nyappur*” untuk pengembangan ekonomi di bidang kepariwisataan.
10. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian guna menjamin sektor pertanian sebagai komponen penyusun PDRB yang mantap, menjamin ketahanan pangan daerah, serta memasarkan produk pertanian ke luar daerah.
11. Mengembangkan industri agribisnis skala kecil dan menengah yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; dengan mengembangkan dan menggunakan teknologi menengah dan teknologi tinggi.

2. Arah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

1. Mendorong dan menjaga partisipasi politik masyarakat, meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu melalui proses yang semakin dewasa, santun, elegan, serta penggunaan teknologi informasi.

2. Menumbuhkembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta mendorong tumbuhnya LSM yang *self support* dan mandiri.
3. Menyediakan Aparatur Pemerintah Daerah yang efisien, bersifat *enterpreneurship*, dinamis, tanggap terhadap situasi dan perkembangan lingkungan, mempunyai *skill* tinggi, didukung dengan peralatan berbasis teknologi informasi, terbebas dari konflik kepentingan dalam ranah politik, serta mempunyai mekanisme pengawasan, remunerasi, *reward and punishment* yang terukur dan terbuka.
4. Menyusun kebijakan umum yang mengarah ke *good and clean goverment*, serta penggunaan mekanisme *fit and proper test* sebagai proses standar dalam penetapan dan pengangkatan pejabat publik.
5. Mengembangkan administrasi pemerintahan secara proporsional sesuai dengan potensi, kemampuan wilayah, serta sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Arah untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

1. Mengembangkan infrastruktur yang mampu tumbuh menjadi tulang punggung dan daya dorong bagi pembangunan sektor riil, sehingga dapat mendukung pengembangan ketahanan pangan daerah, pengembangan sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah secara keseluruhan.
2. Menyediakan kebutuhan air untuk lahan pertanian melalui sistem pengelolaan dan distribusi yang efisien, menjaga kelestarian sumber air, serta melibatkan peran aktif masyarakat melalui konteks budaya.
3. Menyediakan pelayanan dan fasilitas jalan yang berkualitas serta membuka semua akses jalan sampai di tingkat pedesaan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.
4. Tersedianya perumahan bagi rakyat dengan lingkungan yang sehat dan tertata sesuai dengan tata ruang wilayah, mempergunakan bahan lokal, serta memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan fungsi perumahan dengan ekosistem, lingkungan hidup, budaya, dan seni.
5. Menyediakan sarana dan prasara perhubungan darat yang menjangkau semua desa, serta tersedianya moda transportasi darat yang memungkinkan masyarakat memilih sesuai dengan kemampuan.
6. Mengembangkan pelabuhan Labuhan Meringgai sebagai pelabuhan internasional, mengembangkan pelabuhan Way Penet, Kuala Seputih, dan Way Sekampung sebagai *feeder* dan pendukung.
7. Mengembangkan sungai sebagai sarana angkutan sungai berteknologi masa depan, dan mengembangkan sungai sebagai sumber penyediaan air bersih, pariwisata, serta pemeliharaan ekosistem.
8. Mengembangkan fasilitas komunikasi melalui jaringan kabel dan nirkabel yang mampu menjangkau seluruh desa; serta menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan sampai di tingkat kecamatan dan desa.

9. Menyediakan listrik yang mampu menjangkau seluruh desa melalui pengelolaan yang efisien; untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik rumah tangga dan industri.
10. Menyediakan air bersih dan sehat yang mampu menjangkau seluruh desa dengan pengelolaan yang efisien, menjaga kelestarian sumber air melalui pengelolaan sungai dengan bijaksana serta memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.

4. Arah untuk mewujudkan pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

1. Meningkatkan Kualitas tenaga kerja kompetitif dalam persaingan nasional dan global, serta hak memperoleh perlindungan dan tingkat kesejahteraan tinggi.
2. Meningkatkan Kualitas SDM masyarakat Lampung Timur, ditandai oleh IPM dan IPG yang tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata tinggi dan merata.
3. Mengembangkan Budaya dan prestasi olahraga masyarakat Lampung Timur agar lebih meningkat meningkat.
4. Meningkatkan peran serta dan pengurusutamaan gender dalam pembangunan, baik kuantitas maupun kualitas.
5. Memanfaatkan hasil riset dan pengembangan dari berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi, mengembangkan dan memodifikasi IPTEKS yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan melalui penyediaan anggaran yang memadai.
6. Mendorong dan mengembangkan Penguasaan IPTEKS semakin tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatkan dan mengembangkan Instrumen jaminan pangan untuk tiap rumah tangga yang aman dan kualitas gizi yang memadai.
8. Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat rata-rata tinggi, ditandai oleh angka harapan hidup yang tinggi.
9. Meningkatkan Instrumen jaminan kesehatan untuk keluarga miskin tersedia memadai.

5. Arah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum

1. Mendorong pendewasaan cara berpikir masyarakat, serta mengelola pertanahan dengan baik, bijak, berkeadilan, serta mempunyai kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ekses di masa depan.
2. Mengantisipasi perkembangan kriminal masa depan, dan mengimbangi arah dan kemajuan kejahatan melalui peningkatan kemampuan serta kapasitas kepolisian, baik secara individu maupun secara institusional.
3. Mengantisipasi perkembangan dan penyebaran kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.
4. Menghasilkan produk hukum yang mempunyai kepastian tetap dan dapat menjadi pegangan bagi semua *stakeholder* dalam kegiatan keseharian; akses dan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau; berkeadilan, serta *fair*.

6. Arah untuk mewujudkan masyarakat yang religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta mampu melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

1. Membangun masyarakat yang bermoral tinggi, yang dicirikan oleh sifat dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, harmonis dan dinamis.
2. Membina kehidupan keagamaan masyarakat yang kondusif untuk mengembangkan masyarakat yang mampu menatap masa depan dengan tetap berpegang pada masyarakat yang religius.
3. Mengembangkan seni dengan mengadopsi dan mengadaptasi karya seni masa lalu untuk dapat dikembangkan menjadi karya seni berorientasi masa depan, dengan mengakomodasi berbagai jenis karya seni dari berbagai daerah, sehingga mewujudkan budaya Kabupaten Lampung Timur yang kreatif dan dinamis.
4. Mengembangkan budaya daerah yang mampu mengadopsi dan mengadaptasi budaya masa lalu menjadi budaya berorientasi masa depan, dengan mengakomodasi berbagai jenis dan asal budaya daerah, guna mewujudkan budaya daerah yang dinamis, beragam, dan multi kultur, serta membangun ketahanan budaya daerah.
5. Melestarikan tradisi, tata nilai, dan seni daerah terinventarisasi sebagai cagar budaya daerah.

7. Arah untuk mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasis pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

1. Menciptakan kondisi kepemilikan dan status lahan yang jelas, penerapan *land reform*, penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang, menjamin keberlangsungan proses produksi, ketahanan air, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Mengantisipasi perubahan iklim, mencegah alih fungsi lahan, menjaga ketahanan air dan ketahanan pangan, serta kondisi lingkungan hidup dan ekosistem secara keseluruhan.
3. Pembentukan "*Green belt*" yang mampu menyangga kawasan Danau way jepara, sehingga terjadi keseimbangan dinamis antara aspek ekonomi dengan aspek lingkungan hidup.
4. Implementasi secara konsisten regulasi tata ruang yang telah terbentuk melalui penciptaan mekanisme *reward and punishment*.
5. Pengaturan agar tidak terjadi sentralisasi penguasaan lahan pada suatu pihak tertentu, namun terdistribusi melalui proses *land reform* yang lebih berkeadilan dan lebih mempunyai kepastian hukum.
6. Mengelola, melindungi, dan melestarikan berbagai kawasan lindung untuk peresapan air; melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam; melestarikan kegiatan budidaya, serta memberikan perlindungan terhadap cagar budaya.
7. Mempertahankan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang berasal dari hutan kemasyarakatan dan hasil hutan non kayu.

8. Mempertahankan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai kawasan lindung, resapan air, taman keanekaragaman hayati, namun pada sisi lain juga berperan sebagai kawasan wisata alam.
9. Menjaga tingkat sedimentasi Satuan Wilayah Sungai (SWS) mulai dari daerah hulu sampai hilir dengan mempertahankan fungsi hidroorologis kawasan hutan lindung; mengupayakan pengelolaan sungai secara optimal, serta meningkatkan peran sungai sebagai kawasan wisata.
10. Tumbuh dan berkembangnya kawasan vegetasi mangrove di Pantai Timur sebagai "green belt" yang mampu berperan sebagai penyangga kawasan produksi belakangnya; menjaga keanekaragaman hayati, dan biota pantai; serta memberikan peran ekonomis bagi kehidupan masyarakat pesisir.
11. Penggalan informasi akurat mengenai endapan geologi agar dapat dipetakan potensi dan kapasitas produksi setiap jenis endapan; serta mengelolanya dengan bijaksana dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan ekosistem dan lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen RPJPD, sasaran pembangunan jangka panjang daerah tahap keempat dirancang untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai pada pembangunan daerah tahap sebelumnya, dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tercermin pada tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang baik, serta terwujudnya rasa nyaman. Sasaran pembangunan jangka panjang tahap keempat adalah sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

- 1) Pemantapan pembangunan wilayah berdasarkan Perda tentang Tata Ruang
- 2) Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan
- 3) Pemantapan kualitas pelayanan pendidikan
- 4) Pemantapan pengembangan UMKM
- 5) Pemantapan berbagai sumber PAD
- 6) Pemantapan kualitas pelayanan pariwisata
- 7) Pemantapan Jaminan Sosial Kemiskinan
- 8) Pemantapan perlindungan wanita dan anak
- 9) Pemantapan pengembangan pemuda dan olahraga
- 10) Pemantapan perluasan kualitas permukiman
- 11) Pemantapan kualitas produk pertanian
- 12) Pemantapan Program Pendanaan Agribisnis
- 13) Pemantapan infrastruktur pertanian
- 14) Pemantapan kualitas Terminal Agribisnis
- 15) Pemantapan kualitas sentra perdagangan dan jasa
- 16) Pemantapan perkreditan rakyat
- 17) Pemantapan industri hasil pertanian

Misi II : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

- 1) Memantapkan kualitas partisipasi politik masyarakat,
- 2) Mempertahankan kualitas Pemilu.
- 3) Akselerasi peningkatan kualitas Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri.
- 4) Mempertahankan kualitas mekanisme pengawasan, remunerasi, *reward and punishment* yang terukur dan terbuka.
- 5) Memantapkan kualitas kebijakan *good and clean government*, serta penggunaan mekanisme *fit and proper test* sebagai proses standar dalam penetapan dan pengangkatan pejabat publik.
- 6) Memantapkan kualitas administrasi pemerintahan.

Misi III : Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

- 1) Pemantapan kualitas sarana dan infrastruktur perhubungan darat, sungai, dan laut.
- 2) Pemantapan kualitas sarana dan infrastruktur sosial kemasyarakatan.
- 3) Pemantapan kualitas perumahan rakyat yang terjangkau.
- 4) Pemantapan kualitas sarana pelabuhan sungai dan laut.
- 5) Pemantapan kualitas fasilitas komunikasi.
- 6) Pemantapan kualitas fasilitas listrik untuk pengembangan listrik rumah tangga dan industri.
- 7) Pemantapan kualitas pelayanan sarana air bersih.

Misi IV : Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

- 1) Pemantapan pembangunan sarana pendidikan.
- 2) Pemantapan Peningkatan kualitas sarana pendidikan yang direhabilitasi dan direkonstruksi.
- 3) Pemantapan pengembangan pelatihan dan studi banding tenaga pengajar yang berkualitas.
- 4) Pemantapan hasil pengembangan produk riset dan dari berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
- 5) Pemantapan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu.
- 6) Pemantapan peningkatan dan pengembangan derajat kesehatan masyarakat.

Misi V : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum

- 1) Pemantapan peraturan daerah bidang pertanahan.
- 2) Pemantapan kualitas pencegahan dan penanganan kriminal masa depan., penanganan penyebaran narkoba, dan obat-obatan terlarang.
- 3) Pemantapan masyarakat yang taat hukum.

Misi VI : Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

- 1) Pemantapan pengembangan kuantitas rehabilitasi sarana-sarana peribadatan umat beragama.

- 2) Pemantapan kualitas pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
- 3) Pemantapan pembinaan karakter dan jati diri masyarakat.
- 4) Internasionalisasi berbagai ragam budaya dan seni daerah dari berbagai sub etnis.
- 5) Pemantapan kualitas pembinaan kehidupan sosial masyarakat yang multi etnis.

Misi VII : Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

- 1) Pemantapan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukan dan rencana tata ruang.
- 2) Pemantapan ketahanan air, ketahanan pangan, dan kondisi lingkungan hidup.
- 3) Pemantapan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan berbagai kawasan lindung dan cagar budaya.
- 4) Pemantapan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang berasal dari hasil hutan non kayu dan hutan kemasyarakatan.
- 5) Pemantapan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber air dan sungai.
- 6) Pemantapan kualitas perekonomian kawasan pesisir.
- 7) Pengelolaan dan pemanfaatan informasi endapan geologi.

Lebih lanjut, tahapan Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 meliputi:

1. RPJMD Kesatu, Pembangunan Kerangka Dasar (2005-2010)

Tahap pertama pembangunan jangka panjang dimaksudkan untuk membangun kerangka dasar bagi kemajuan daerah dalam rangka menopang akselerasi kemajuan untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. Kerangka dasar kemajuan daerah dibangun melalui pendayagunaan potensi sumber daya alam, daya dukung infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Pada tahap ini pembangunan diutamakan pada perkuatan infrastruktur, baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan. Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumberdaya manusia.

Tahap pertama pembangunan jangka panjang diarahkan pada pemulihan kondisi yang ada sehingga kemajuan lebih cepat dicapai. Penurunan kemampuan ekonomi untuk tumbuh mengindikasikan adanya infrastruktur yang melemah, sehingga harus ada mekanisme pemulihan dan penambahan infrastruktur sehingga mampu meningkatkan kinerja ekonomi.

Mekanisme pemulihan ekonomi dilakukan melalui revitalisasi berbagai sektor ekonomi, terutama sektor pertanian dan industri. Revitalisasi pertanian dilakukan terutama dengan pengaturan input sarana produksi, optimalisasi fungsi infrastruktur pertanian, optimalisasi kelembagaan petani, peremajaan tanaman, pengembangan pasar, dan penerapan teknologi pertanian. Revitalisasi industri dilakukan dengan

mengembangkan energi alternatif, menciptakan keterkaitan serta keterpaduan usaha dan iklim usaha yang sehat.

Pada tahap ini juga diupayakan pemulihan kerusakan lingkungan. Kondisi lingkungan yang baik merupakan kerangka dasar yang menjadi landasan bagi kemajuan. Dengan demikian, kerusakan hutan, pencemaran sungai, laut, serta penelantaran lahan harus mendapat prioritas penanganan.

Pada sisi sosial diupayakan peletakan dasar hubungan sosial yang lebih harmonis melalui pembangunan rasa aman dan saling percaya dan penegakan hukum. Budaya demokrasi juga dibangun mulai dari tingkat yang paling bawah, sedangkan birokrasi ditata dengan menyiapkan kerangka kerja yang baik dan pemerintahan yang bersih, bebas KKN.

2. RPJMD Kedua, Pengembangan Kemajuan Daerah (2010-2015)

Tahap kedua dimaksudkan untuk mengembangkan kemajuan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tahap ini merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari tahapan sebelumnya. Pada prinsipnya, tahap ini merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahapan sebelumnya. Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi.

Pembangunan jangka panjang tahap kedua dilakukan dengan optimalisasi sumber daya melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial terpadu, dan tegaknya hukum. Optimalisasi sumber daya dilakukan melalui peningkatan daya dukung infrastruktur, dimana infrastruktur tersebut telah ditingkatkan dalam skala tinggi melalui sistem pengelolaan yang efisien dan berkesinambungan. Sedangkan mekanisme ekonomi yang sehat dibangun melalui peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi diperluas dengan diversifikasi dan peningkatan mutu.

Sementara sistem sosial yang terpadu tercermin pada perkembangan lembaga sosial, tumbuhnya kepedulian sosial, serta meningkatnya pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kehidupan demokrasi makin matang dengan dinamika sosial kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan seni budaya. Birokrasi makin meningkat kinerjanya dan penegakan hukum makin meluas dengan tingkat kesadaran hukum dan politik yang makin baik.

3. RPJMD Ketiga, Pemantapan Kemajuan Daerah (2015-2020)

Pembangunan jangka panjang tahap ketiga ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dalam rangka mengembangkan kesejahteraan. Tahap ketiga dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada dua tahap sebelumnya. Dinamika sektor ekonomi pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala daerah, namun juga nasional dan internasional.

Ciri khas pada tahap ketiga adalah semakin dominannya peran IPTEKS dalam setiap pengambilan keputusan. Pengembangan IPTEKS diarahkan pada upaya optimalisasi potensi sumber daya. Berbagai kemajuan yang telah dicapai menjadikan daerah

memiliki daya saing, yang tercermin pada produk komoditas, infrastruktur, pendidikan, dan IPTEKS. Sedangkan pencapaian kesejahteraan tercermin pada indeks pembangunan manusia dan sosial kapital.

4. RPJMD Keempat, Mempertahankan Momentum Kemajuan (2020-2025)

Tahap keempat dirancang untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tercermin pada tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang baik, serta terwujudnya rasa nyaman.

Sekolah tersebar dengan merata dan berklasifikasi nasional, dengan beberapa sekolah berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan akses yang mudah. Kehidupan sosial dinamis dan stabil, yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas, dan seni budaya. Perekonomian daerah semakin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang, serta produktivitas yang tinggi dan berdaya saing di tingkat nasional dan global. Infrastruktur semakin mantap dengan daya dukung yang tinggi, serta kualitas sumberdaya manusia yang tinggi.

Keanekaragaman hayati dan ekosistem dapat dilestarikan dan berkembang menjadi keunikan daerah, ikon pariwisata, dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya air dikelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi.

Pemerintahan daerah semakin dapat dipercaya oleh masyarakat karena memiliki kinerja baik dan bersih. Birokrasi dikembangkan untuk tujuan pelayanan publik secara prima, serta didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik,

aparatur yang berkualitas, dan disiplin tinggi. Penegakan hukum semakin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam menjaga momentum kemajuan yang telah diperoleh, maka hal yang sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya harus juga disempurnakan sejalan dengan kemajuan yang dicapai, agar kemajuan yang telah dicapai dapat dijaga kelangsungannya. Penyegaran metode dan pendekatan pembangunan merupakan semangat yang harus dikedepankan dalam rangka menjaga momentum pembangunan pada jangka panjang berikutnya.

5.1 Visi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses pemilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

Interprestasi makna visi pada kebijakan pemerintah mengandung arti bahwa kebijakan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, difokuskan untuk mewujudkan kejayaan masyarakat Lampung Timur. Masyarakat adalah subyek utama dalam pembangunan daerah.

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang religius

Kehidupan masyarakat yang memiliki tata hubungan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Lampung Timur. Hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan, artinya masyarakat Lampung Timur selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, senantiasa memegang teguh kebhinekaan dalam suasana yang agamis. Kondisi masyarakat Lampung Timur yang kental sekali dengan nilai-nilai agama akan menjadi modal dasar dalam membangun Lampung Timur kedepan.

2. Kehidupan masyarakat yang berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Aset utama daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya masyarakatnya. Satu juta lebih penduduk Kabupaten Lampung Timur kedepan diharapkan unggul, berkualitas, mampu berkompetisi, bisa berinovasi dan juga kreatif dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan nilai tambah (*added value*) yang tinggi, guna meningkatkan kualitas hidupnya.

3. Kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Kehidupan masyarakat yang berkeadilan mengandung makna suatu keadaan tatanan dasar kehidupan masyarakat Lampung Timur yang dapat terlayani secara adil dan merata diberbagai bidang kehidupan, dengan cukupnya ketersediaan fasilitas dan pelayanan dasar masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman tenteram dan damai. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional, jujur, pedulim dan merakyat.

4. Kehidupan masyarakat yang sejahtera

Kehidupan masyarakat yang sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan keamanan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Disamping itu pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

5.2 Misi

Misi atau langkah-langkah umum yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi “Rakyat Lampung Timur Berjaya” Tahun 2021-2026, disebut dengan **SIWAO MISEI**, terdiri dari :

1. Misi-1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Misi-2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan.
3. Misi-3 : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Misi-4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Misi-5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Misi-6 : Meningkatkan *good governance* (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab).
7. Misi-7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal.
8. Misi-8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.
9. Misi-9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

5.2.1 Misi 1



Meningkatkan Program Petani Berjaya



Misi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian melalui Program Petani Berjaya. Dalam rangka percepatan implementasi dan perluasan cakupan, program tersebut akan terintegrasi dengan Program Kartu Petani

Berjaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yang telah mengintegrasikan seluruh kepentingan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan seluruh *stake holder* secara bersama-sama.

Para pihak yang terlibat dalam program ini direncanakan meliputi petani, distributor benih/pupuk/obat, kelompok tani, penyuluh, kios saprota, lembaga keuangan, buyer/pembeli, dan pemerintah daerah, yang memiliki peran sesuai kewenangannya. Terkait dengan peran perangkat daerah, meliputi fasilitasi kebijakan strategis dan teknis yang berkaitan dengan proses jalannya sistem, fasilitasi teknis yang berkaitan dengan registrasi akun operator masing-masing satuan kerja, dan fasilitasi teknis sosialisasi dan operasional untuk seluruh *stake holder* dibawahnya.

Implementasi Program Petani Berjaya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan dilakukan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui jaminan kepastian ketersediaan sarana produksi dalam usaha budidaya pertanian yang terintegrasi.
2. Peningkatan tata kelola budidaya, penanganan panen dan pasca panen sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.
3. Peningkatan peran lembaga keuangan dalam meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk menunjang produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Peningkatan pemasaran hasil usaha pertanian.

5.2.2 Misi 2



Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan



Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah. Infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan adalah infrastruktur yang meliputi kebutuhan dasar berbasis perdesaan yang dapat berfungsi sebagai pendorong ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Kemajuan infrastruktur fisik perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan hidup, dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

1. Membangun/memelihara jaringan jalan dan jembatan, irigasi yang berkualitas dan merata untuk melayani pergerakan orang dan barang
2. Membangun/memelihara infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, kesenian dan budaya yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

3. Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih dan sanitasi
4. Membangun/memelihara infrastruktur pemerintahan dan publik yang mencerminkan identitas masyarakat Kabupaten Lampung Timur
5. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten dan berkelanjutan

5.2.3 Misi 3

Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas adalah aset utama pembangunan daerah dalam arti yang luas, oleh karenanya pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Lampung Timur.

Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas adalah aset utama pembangunan daerah dalam arti yang luas, oleh karenanya pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih berkualitas
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang merata dan berdaya saing
3. Mewujudkan sistem pendidikan yang berkarakter dengan memadukan pendidikan agama dan umum
4. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang sekolah formal dan non formal
5. Peningkatan pelestarian seni dan budaya
6. Membangun sarana Balai Latihan Kerja Daerah
7. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan
8. Peningkatan perlindungan tenaga kerja jaminan sosial tenaga kerja
9. Peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga
10. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat
11. Membangun/memelihara sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang lebih berkualitas
12. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat
13. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar kompetensi
14. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan kualitas kehidupan beragama di masyarakat

15. Memelihara hubungan harmonis antar dan intern umat beragama, antar suku, dan antar ras yang harmonis
16. Pemberian subsidi listrik untuk masjid, pondok pesantren, dan tempat ibadah lainnya
17. Pemberian uang duka bagi masyarakat Lampung Timur yang keluarganya meninggal dunia
18. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum marginal dan rentan
19. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
20. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

5.2.4 Misi 4



Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal



Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal, khususnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor basis daerah, dengan meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya.

Peningkatan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal didukung dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan primer dan sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW.
2. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana kegiatan perekonomian masyarakat dengan mengedepankan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan
3. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Membangun/memelihara pasar daerah, pasar rakyat dan sarana serta prasarana perekonomian masyarakat lainnya secara berkualitas
5. Pengembangan sentra industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, serta kawasan industri menengah dan besar.

5.2.5 Misi 5



Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat



Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik daerah maupun nasional. Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Upaya meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

1. Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat, kemitraan masyarakat dan Polri/TNI
2. Menciptakan wilayah yang aman dari tindak kejahatan dengan mengaktifkan program ronda malam dan kamtibmas yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa sampai dengan kabupaten, Polri dan TNI
3. Peningkatan sistem komunikasi dan informasi serta kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram.

5.2.6 Misi 6



Meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)



Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Peningkatan *good governance* akan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan penataan aparatur sipil negara. Peningkatan *good governance* dilaksanakan dengan program kerja prioritas sebagai berikut:

1. Penataan ASN yang profesional, jujur, peduli dan merakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan
3. Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah
4. Pengintegrasian sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan basis data yang terkini dan akurat
5. Implementasi program perencanaan daerah yang partisipatif
6. Membangun data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
7. Peningkatan inovasi dan kerjasama pemerintah dan dunia usaha

8. Meningkatkan sistem pengawasan dan penyelesaian masalah atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan
9. Peningkatan kualitas pelayanan sistem dan terintegrasi melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
10. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem administrasi kependudukan yang berkualitas Peningkatan pelayanan perizinan mudah, cepat, berkualitas

5.2.7 Misi 7

Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan investasi daerah seluas-luasnya bagi dunia usaha pada bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal. Peningkatan peluang usaha dan investasi dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan investasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
2. Peningkatan investasi sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral
3. Peningkatan investasi sektor kepariwisataan
4. Membuka dan meningkatkan kerjasama BUMD dan BUMDes

5.2.8 Misi 8

Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana. Peningkatan penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program penanganan pandemi penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah
2. Menyelenggarakan program mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan pemerintah
3. Menyelenggarakan program pencegahan dan pemberantasan narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

5.2.9 Misi 9

Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dilaksanakan melalui program kerja prioritas sebagai berikut:

- 1. Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup
- 2. Penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- 3. Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup
- 4. Peningkatan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup
- 5. Peningkatan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Tabel 5.1
Keterkaitan Misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur

URAIAN	RPJPD	RPJMD
VISI	LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA, BERDAYA SAING, RELIGIUS, DAN BERKELANJUTAN	RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA
MISI	1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku 3. Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional 4. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan 5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum 6. Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah 7. Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatkan Program Petani Berjaya 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan 4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal 5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat 6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab) 7. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal 8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam 9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas



Dalam upaya menciptakan sinergitas perencanaan jangka menengah, keterkaitan RPJMN Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5.2
Sinergitas RPJMN dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

URAIAN	RPJMN	RPJMD
VISI	<i>Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i>	<i>RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA</i>
MISI	1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
	2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan
	3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan	3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan
	4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal
	5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat
	6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)
	7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	7. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal
	8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam
	9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Selanjutnya, terkait dengan sinergitas perencanaan jangka menengah dengan pemerintah Provinsi Lampung, keterkaitan misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.3
Sinergitas RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2021-2026

URAIAN	RPJMD PROVINSI LAMPUNG	RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
VISI	RAKYAT LAMPUNG BERJAYA	RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA
MISI	1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai 2. Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas 4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah 5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan 6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama	1. Meningkatkan Program Petani Berjaya 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan 3. Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan 4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal 5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat 6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab) 7. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal 8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam 9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

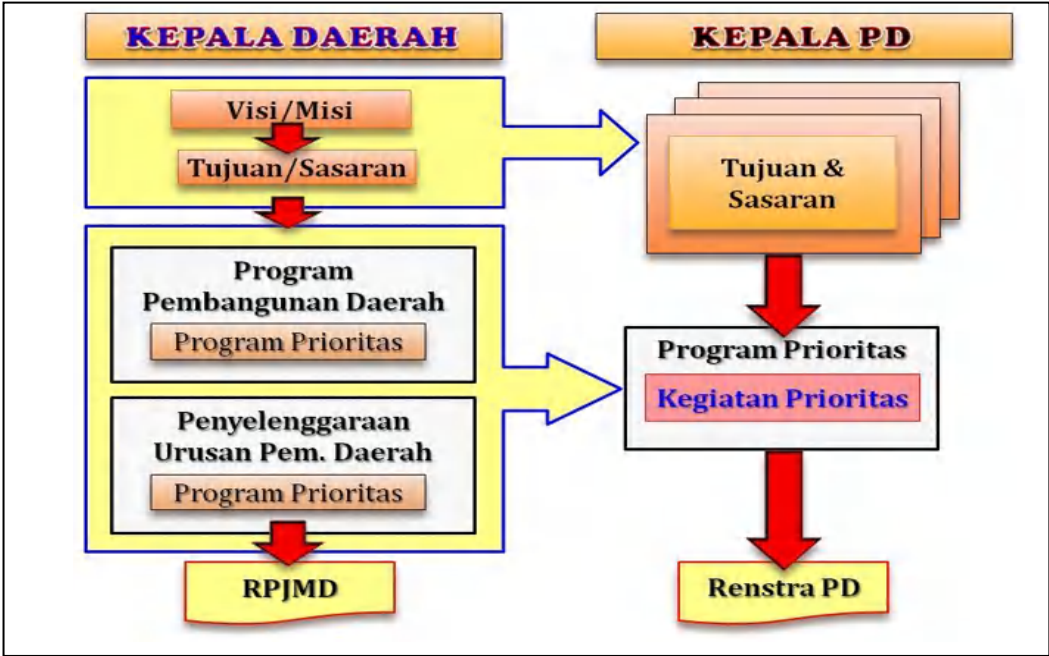
5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, dan *money follow priority*, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Rencana pembangunan daerah lebih ditekankan program-program prioritas daerah yang berorientasi pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan PD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 5.1
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 terdiri dari :

Tabel 5.4
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL 2020	KONDISI AKHIR 2026	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA												
MISI 1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya												
Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (%)	98,93	> 100	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	0,32	0,32	1	2	3	4	4
	Nilai Tukar Nelayan	N/A	> 100	Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	84,70	84,70	84,71	84,72	84,73	84,74	84,75
MISI 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan												
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah berbasis perdesaan	Capaian rata-rata kinerja pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan (%)	N/A	75	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	61,17	63	65	70	72	73	75
	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	61,17	75		Penurunan kecelakaan lalu lintas (%)	1,1	1,1	1,2	1,5	2	3	3
	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	0	5	Peningkatan ketersediaan sumber daya air yang mantap	Persentase luas sawah beririgasi (%)	46,76	46,76	50	51	52	53	54
				Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (%)	73,55	73,55	73,8	74	74,5	74,8	75
					Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	3,53	3,45	3,1	2,5	1,5	0,5	0
					Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa	N/A	N/A	2	2,5	3	4	5
					Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%)	N/A	2	2	2	2	2	2
				Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	54,84	54,84	55	56	58	60	65



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI	KONDISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET					
		AWAL 2020	AKHIR 2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA												
				pengembangan wilayah dan infrastruktur ruang publik	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan)	0	1	1	1	1	1	1
MISI 3 : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan												
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,37	69,9 - 70,10	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	12,85	12,86	12,87	12,88	12,89	12,9
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,64	2,5 - 2,6		Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,6	7,6	7,65	7,66	7,67	7,68	7,7
				Meningkatkan pelestarian seni dan budaya	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)	10	10	10	15	20	25	30
					Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)	10	10	10	15	20	25	30
				Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (T PAK)	72,32	72,32	72,42	72,52	72,6	72,65	72,70
				Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	N/A	35	36	37	38	40
					Peringkat pada even olahraga PORPROV	9	-	8	-	8	-	8
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,73	70,74	70,75	70,76	70,77	70,78
				Pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,03	1,03	1,02	1,01	1	0,99	0,95
				Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%)	N/A	2	3	5	7	10	15
				Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,78	88,78	88,78	88,79	88,8	88,85	88,9
					Persentase Desa Layak Anak (%)	20	30	35	40	50	60	70
MISI 4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal												
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,29	4,2 - 4,5	Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%)	2,91	2	2	3	3	4	4
	Persentase penduduk miskin (%)	14,62	13,6 - 13,3	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-1,87	1	2	3,5	3,6	4	4
	Indeks Gini	0,35	0,34 - 0,33		Inflasi Pangan bergejolak (%)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	Laju inflasi (%)	2,01	2		Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	-5,23	1	3	3,5	3,6	4	4,1
	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun)	38,7	45,8		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)	7,96	7,96	8	8,3	8,5	8,7	8,9
				Meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (%)	-3,42	4	5	6	7	8	10
MISI 5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat												
Meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban masyarakat dan partisipasi politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	72,5 - 73,0	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	0,38	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35
	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	0,38	0,35	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi	N/A	70	70	70,5	71	71,5	72
	Indeks Demokrasi	N/A	72									
MISI 6 : Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)												
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu)	C	B	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82	84	86	87	88	88,31
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	N/A	80		Indeks Profesionalitas ASN	N/A	71	71	72	72	73	75



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI	KONDISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI	TARGET					
		AWAL 2020	AKHIR 2026			AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA												
	Nilai SAKIP	C	B		Nilai SAKIP	C	C	CC	CC	B	B	B
	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP		Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100	100
					Indeks Inovasi Daerah	1.201	1.206	1.215	1.220	1.225	1.230	1.235
					Zona Pelayanan Ombudsman	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
					Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
					Persentase capaian target propemperda (%) (TPB)	46	>65	70	70	70	80	80
					Persentase kepemilikan KTP-el (%)	94	95	96	97	98	99	100
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	10	11	12	13	14	15
				Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
				Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%)	6,71	5	>10	>10	>10	>10	>10
				Memajukan desa	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa)	38	38	39	40	41	42	43
					Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%)	N/A	5	6	7	8	9	10
MISI 7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal												
Meningkatkan investasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah (%)	7,8	10 - 20	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	3,27	3,5	4	4	4	4,5	4,5
MISI 8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana												
Meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	183,2	179	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan narkoba	Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%)	3	5	5	5	5	5	5
					Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100
				Meningkatkan upaya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	183,2	183,2	183	182	181	180	179
					Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	3	3	2	1	1	0,5	0,5
MISI 9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas												
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	64,99	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	50	52,6	52,7	52,8	52,9	53	53,1
					Indeks Kualitas Udara	81,99	82,17	82,27	82,37	82,46	82,55	82,65
					Indeks Kualitas Lahan	41,17	45,28	46,78	48,29	49,79	51,29	52,78

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

6.1 Strategi

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 merupakan tahapan pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur, tahapan pembangunan periode 2020-2025 adalah untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026.

Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA		
MISI 1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya		
Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Revitalisasi dan percepatan peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan
	Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Mengembangkan keanekaragaman pangan dan ketersediaan cadangan pangan
MISI 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan		
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas dan transportasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata
	Peningkatan ketersediaan sumber daya air yang mantap	Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air
	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman
	Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang	Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang
	Penataan kota dan pengembangan infrastruktur ruang publik	Menyediakan ruang kota kawasan strategis yang berkualitas dan berkelanjutan
MISI 3 : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar	penyelenggaraan pendidikan dasar dan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau
	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya	mengembangkan seni dan budaya masyarakat
	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja
	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	meningkatkan pemberdayaan dan peran pemuda dalam pembangunan
		meningkatkan prestasi olahraga
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau
	Pengendalian penduduk	meningkatkan upaya pengendalian penduduk
	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	meningkatkan upaya penanggulangan masalah sosial wilayah
Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
MISI 4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	penumbuhan dan penguatan koperasi dan UMKM
		pengembangan industri daerah
	Meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif	mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat yang berakar pada alam dan budaya daerah
		mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat dan produk unggulan daerah
MISI 5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat		
Meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban masyarakat dan partisipasi politik masyarakat	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	peningkatan upaya pencegahan tindak kriminal
	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	meningkatkan pengetahuan dan kesadaran berpolitik masyarakat
MISI 6 : Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab	Meningkatkan kualitas layanan publik	meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan merata
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	mewujudkan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan yang berkualitas dan akuntabel
		meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah
	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
	Memajukan desa	meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi desa



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA		
MISI 7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal		
Meningkatkan investasi daerah	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan	peningkatan daya saing investasi daerah
MISI 8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana		
Meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan narkoba	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan penyakit menular dan narkoba
	Meningkatkan upaya mitigasi bencana	peningkatan upaya kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bencana
MISI 9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas		
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	pengendalian pencemaran air, udara dan lahan

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026 meliputi:

Tabel 6.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA			
MISI 1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya			
Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Revitalisasi dan percepatan peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan	Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
	Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Mengembangkan keanekaragaman pangan dan ketersediaan cadangan pangan	meningkatkan penyelenggaraan ketahanan, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan
MISI 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan			
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas dan transportasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas dan perhubungan
	Peningkatan ketersediaan sumber daya air yang mantap	Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air
	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana umum dasar perumahan dan kawasan permukiman
	Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang	Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah
	Penataan kota dan pengembangan infrastruktur ruang publik	Menyediakan ruang kota kawasan strategis yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ruang publik yang estetik, berciri khas dan berkelanjutan
MISI 3 : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar	penyelenggaraan pendidikan dasar dan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau	Peningkatan tata kelola pendidikan dasar dan non formal
	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya	mengembangkan seni dan budaya masyarakat	Meningkatkan upaya pengelolaan, pelestarian dan pembinaan seni dan budaya masyarakat
	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan, penempatan dan pengawasan tenaga kerja dan hubungan industrial



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA			
	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	meningkatkan pemberdayaan dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan
		meningkatkan prestasi olahraga	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
	Pengendalian penduduk	meningkatkan upaya pengendalian penduduk	meningkatkan jumlah akseptor KB dan keluarga sejahtera
	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	meningkatkan upaya penanggulangan masalah sosial wilayah	Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial
	Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan kualitas hidup, gender dan perlindungan perempuan dan anak
MISI 4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	penumbuhan dan penguatan koperasi dan UMKM	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi
		pengembangan industri daerah	Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UKM
	Meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif	mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat yang berakar pada alam dan budaya daerah	Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial
		mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat dan produk unggulan daerah	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat
			Pengembangan pariwisata daerah
MISI 5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat			
Meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban masyarakat dan partisipasi politik masyarakat	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	peningkatan upaya pencegahan tindak kriminal	Meningkatkan kemitraan TNI/Polri, peran serta dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	meningkatkan pengetahuan dan kesadaran berpolitik masyarakat	Meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat
MISI 6 : Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab	Meningkatkan kualitas layanan publik	meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan merata	Meningkatkan standar kualitas pelayanan perangkat daerah
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	mewujudkan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan yang berkualitas dan akuntabel	meningkatkan akuntabilitas sesuai prinsip perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
		meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah	meningkatkan pengawasan internal pemerintah daerah
	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah
	Memajukan desa	meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi desa	Peningkatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
MISI 7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal			
Meningkatkan investasi daerah	Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan	peningkatan daya saing investasi daerah	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif
MISI 8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana			
Meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan narkoba	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan penyakit menular dan narkoba	Meningkatkan kecukupan obat dan sarana penunjang kesehatan sesuai standar nasional
	Meningkatkan upaya mitigasi bencana	peningkatan upaya kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bencana	Kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana
MISI 9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas			
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	pengendalian pencemaran air, udara dan lahan	Peningkatan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup



Untuk mewujudkan arah pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur, maka arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022-2026 akan difokuskan pada :

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

Arah Kebijakan				
2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan	Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas	Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing	Pemantapan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Daerah	Pemerataan Kemajuan Ekonomi, Infrastruktur, dan Daya Saing Daerah untuk Kemandirian Daerah

6.3 Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka mengimplementasikan misi daerah secara nyata, upaya pencapaian misi tersebut akan dibarengi dengan komitmen melaksanakan 62 Agenda Kerja Utama yang akan dituangkan dalam program kerja prioritas daerah. Agenda Kerja Utama adalah susunan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kurun waktu Tahun 2021-2026. Agenda Kerja Utama disusun dengan memperhatikan capaian kinerja kurun waktu lima tahun terakhir, isu strategis daerah, dan mensinergikan dengan program kerja unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang dirumuskan dalam nomenklatur program unggulan daerah jangka menengah daerah Tahun 2021-2026.

Agenda Kerja Utama tersebut diurutkan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan dan sektor prioritas daerah yang disesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, yang secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6.4
Agenda Kerja Utama Tahun 2022 – 2026

Misi	Sektor Prioritas	Uraian	Agenda Kerja Utama	Program Prioritas Perangkat Daerah Pengampu
MISI 1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pangan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Program Petani Berjaya : peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan berbasis pemanfaatan Sistem Aplikasi Petani Berjaya	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Peningkatan tata kelola budidaya sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3. Peningkatan peran lembaga keuangan dalam menunjang produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		4. Revitalisasi pertanian melalui penerapan teknologi budidaya dan pengelolaan pasca panen		4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		5. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan sistem pengairan lainnya dalam rangka meningkatkan produksi sektor pertanian dan ketahanan pangan		5. Program Perizinan Usaha Pertanian
		6. Peningkatan kualitas penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.		6. Program Penyuluhan Pertanian
				7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				9. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
				10. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan



Misi	Sektor Prioritas	Uraian	Agenda Kerja Utama	Program Prioritas Perangkat Daerah Pengampu
MISI 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan	Infrastruktur	1. Membangun/memelihara jaringan jalan dan jembatan, irigasi yang berkualitas dan merata untuk melayani pergerakan orang dan barang 2. Membangun/memelihara infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, kesenian dan budaya yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. 3. Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih dan sanitasi 4. Membangun/memelihara infrastruktur pemerintahan dan publik yang mencerminkan identitas masyarakat Kabupaten Lampung Timur 5. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten dan berkelanjutan	2. Infrastruktur Lampung Timur Berjaya : pemantapan infrastruktur konektivitas, permukiman, dan pengelolaan sumber daya air pertanian 3. Lampung Timur Jaya: Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengembangan Permukiman 7. Program Penataan Bangunan Gedung 8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 9. Program Pengembangan Perumahan 10. Program Kawasan Permukiman 11. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 13. Program Pengembangan Permukiman 14. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 15. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 16. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih berkualitas 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang merata dan berdaya saing 3. Mewujudkan sistem pendidikan yang berkarakter dengan memadukan pendidikan agama dan umum 4. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang sekolah formal dan non formal 5. Peningkatan pelestarian seni dan budaya 6. Membangun sarana Balai Latihan Kerja Daerah 7. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan 8. Peningkatan perlindungan tenaga kerja jaminan sosial tenaga kerja 9. Peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga 10. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat 11. Membangun/memelihara sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang lebih berkualitas 12. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	4. Rakyat Lampung Timur Berdaya Saing 5. Pemuda Lampung Timur Berjaya 6. Rakyat Lampung Timur Sehat	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 5. Program Pengembangan Kebudayaan 6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 7. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja 9. Program Hubungan Industrial 10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 13. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 14. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 16. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 17. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 18. Program Rehabilitasi Sosial 19. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 20. Program Pemberdayaan Sosial 21. Program Penanganan Bencana 22. Program Penanggulangan Bencana 23. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan



Misi	Sektor Prioritas	Uraian	Agenda Kerja Utama	Program Prioritas Perangkat Daerah Pengampu
		yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat 13. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar kompetensi 14. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan kualitas kehidupan beragama di masyarakat 15. Memelihara hubungan harmonis antar dan intern umat beragama, antar suku, dan antar ras yang harmonis 16. Pemberian subsidi listrik untuk masjid, pondok pesantren, dan tempat ibadah lainnya 17. Pemberian uang duka bagi masyarakat Lampung Timur yang keluarganya meninggal dunia 18. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum marginal dan rentan 19. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial 20. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	7. Lampung Timur dan Religius dan Berakhlak Mulia 8. Lampung Timur Ramah Anak	Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 24. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
MISI 4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal	1. Perdagangan dan Jasa 2. Perindustrian dan Ekonomi Kreatif	1. Pengembangan aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan primer dan sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW 2. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana kegiatan perekonomian masyarakat dengan mengedepankan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan 3. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. 4. Membangun/memelihara pasar daerah, pasar rakyat dan sarana serta prasarana perekonomian masyarakat lainnya secara berkualitas 5. Pengembangan sentra industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM	9. Ekonomi Lampung Timur Berjaya	1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 4. Program Pengembangan Ekspor 5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 10. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 11. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 12. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 13. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 14. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 15. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 16. Program Pengembangan UMKM 17. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 18. Program Pemasaran Pariwisata 19. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan



Misi	Sektor Prioritas	Uraian	Agenda Kerja Utama	Program Prioritas Perangkat Daerah Pengampu
				Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 20. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
MISI 5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1. Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat, kemitraan masyarakat dan Polri/TNI 2. Menciptakan wilayah yang aman dari tindak kejahatan dengan mengaktifkan program ronda malam dan kamtibmas yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa sampai dengan kabupaten, Polri dan TNI 3. Peningkatan sistem komunikasi dan informasi serta kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram.	10. Lampung Timur Aman	1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
MISI 6 : Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	1. Penataan ASN yang profesional, jujur, peduli dan merakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah 4. Pengintegrasian sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan basis data yang terkini dan akurat 5. Implementasi program perencanaan daerah yang partisipatif 6. Membangun data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah 7. Peningkatan inovasi dan kerjasama pemerintah dan dunia usaha 8. Meningkatkan sistem pengawasan dan penyelesaian masalah atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan 9. Peningkatan kualitas pelayanan sistem dan terintegrasi melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat 10. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem administrasi kependudukan yang berkualitas 11. Peningkatan pelayanan perizinan mudah, cepat, berkualitas 12. Optimalisasi potensi dan pelayanan publik desa	11. Aparatur Profesional 12. APBD Lampung Timur Tepat 13. Pelayanan Publik Berjaya (Mall Pelayanan Publik, LENGKAP, Gaji Berkala Otomatis, dll) 14. Desa Lampung Timur Berjaya (Smart Village)	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 8. Program Penyelenggaraan Pengawasan 9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 11. Program Pelayanan Penanaman Modal 12. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 13. Program Pendaftaran Penduduk 14. Program Pencatatan Sipil 15. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 16. Program Penataan Desa 17. Program Peningkatan Kerjasama Desa 18. Program Administrasi Pemerintahan Desa
MISI 7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan	Penanaman Modal	1. Peningkatan investasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan 2. Peningkatan investasi sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral 3. Peningkatan investasi sektor	15. Lampung Timur Ramah Investasi	Program Promosi Penanaman Modal



Misi	Sektor Prioritas	Uraian	Agenda Kerja Utama	Program Prioritas Perangkat Daerah Pengampu
sumber daya kearifan lokal		kepariwisataan 4. Membuka dan meningkatkan kerjasama BUMD dan BUMDes		
MISI 8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana	Kesehatan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1. Menyelenggarakan program penanganan pandemi penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah 2. Menyelenggarakan program mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan pemerintah 3. Menyelenggarakan program pencegahan dan pemberantasan narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah	16. Lampung Timur Siaga 17. Lampung Menuju Timur Bebas Narkoba	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Penanggulangan Bencana 3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
MISI 9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas	Lingkungan Hidup	1. Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup 2. Penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 3. Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup 4. Peningkatan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	18. Lampung Timur Berkelanjutan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 10. Program Pengelolaan Persampahan

Mencermati Agenda Kerja Utama dan Program Kerja Prioritas serta Sektor Prioritas yang telah disusun sebelumnya, maka terdapat 15 (lima belas) Prioritas Pembangunan Jangka Menengah, yaitu:

1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pangan
2. Infrastruktur
3. Pendidikan & Kebudayaan
4. Ketenagakerjaan
5. Pemuda dan Olahraga
6. Kesehatan
7. Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Perdagangan dan Jasa
10. Perindustrian dan Ekonomi Kreatif
11. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
12. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi



- 13. Penanaman Modal
- 14. Lingkungan Hidup

Di bawah ini ditampilkan persandingan antara sektor prioritas pembangunan daerah dengan bidang urusan pemerintahan dan program perangkat daerah.

Tabel 6.5
Prioritas Pembangunan Jangka Menengah

No.	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pangan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
		PERTANIAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		PANGAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2	Infrastruktur	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



No.	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		PERHUBUNGAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
		Sasaran 2.4 : Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
3	Pendidikan & Kebudayaan	PENDIDIKAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		KEBUDAYAAN	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	Ketenagakerjaan	TENAGA KERJA	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
5	Pemuda dan Olahraga	PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6	Kesehatan	KESEHATAN	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB



No.	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
7	Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial	SOSIAL	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		PENDUKUNG URUSAN PEMDA : SEKDA	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9	Perdagangan dan Jasa	PERDAGANGAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
10	Perindustrian dan Ekonomi Kreatif	PERINDUSTRIAN	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		PARIWISATA	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
11	Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sat Pol PP
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Sat Pol PP
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



No.	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		KEWILAYAHAN	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
		KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
12	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
		PERENCANAAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BAPPEDA
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
		KEUANGAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		PENGAWASAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		PENDUKUNG URUSAN PEMDA : SEKDA	
		Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		PENDUKUNG URUSAN PEMDA : SEKRETARIAT DPRD	
		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		PERPUSTAKAAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



No.	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		KEARSIPAN	
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		STATISTIK	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		PERSANDIAN	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		KEWILAYAHAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
13	Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Kesehatan	KESEHATAN	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



No.	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
15	Ketentraman, Ketersiban dan Perlindungan Masyarakat	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Lingkungan Hidup	LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya, setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan, maka untuk pelaksanaannya disusun Program Pembangunan berdasarkan nomenklatur yang ada seperti Tabel dibawah ini :

Tabel 6.6
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lampung Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
MISI 1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya															
Tujuan :Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani	98,93	98,94		98,95		98,97		99,2		99,5		> 100		
	Nilai Tukar Nelayan	N/A	98,94		98,95		98,97		99,2		99,5		> 100		
Sasaran 1.1 : Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	0,32	0,32		1		2		3		4		4		
KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	5.009.550	65	5.009.550	76	5.009.550	77	5.009.550	78	5.009.550	79	5.009.550	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perikanan dan Peternakan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	-23,57	1 - 5	600.000	2	600.000	3	600.000	4	600.000	5	600.000	6	600.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	-48,05	1 - 5	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	3	1.000.000	4	1.000.000	5	1.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Kepatuhan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	N/A	65	100.000	65	100.000	70	100.000	75	100.000	75	100.000	80	100.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	cakupan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil yang memiliki tanda daftar usaha (%)	N/A	50	300.000	60	300.000	70	300.000	80	300.000	90	300.000	100	300.000	Dinas Perikanan dan Peternakan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
PERTANIAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	8.323.560	65	8.323.560	76	8.323.560	77	8.323.560	78	8.323.560	79	8.323.560	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi) (%)	1,4	1	32.000.000	1,5	22.000.000	1,6	32.048.000	1,7	32.164.975	1,8	32.272.727	2	32.389.659	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (jagung) (%)	-0,12	1		1,2		1,3		1,4		1,5		1,6		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (%)	10	10		10		10		10		10		10		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (%)	0,56	0,5		0,6		0,6		0,7		0,7		0,8		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	N/A	1		1		1		1,2		1,2		1,2		Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Ideks Pertanaman (IP)	2	2	15.100.000	2	15.100.000	2	15.122.650	2	15.122.650	2	15.228.693	2	15.307.578	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak (%)	2,17	2		3		4		5		6		7		Dinas Perikanan dan Peternakan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	N/A	60	300.000	63	300.000	65	300.000	70	300.000	70	300.000	80	300.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman pangan (%)	N/A	70	500.000	75	500.000	77	500.000	80	500.000	83	500.000	85	500.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman hortikultura (%)	N/A	70		75		77		80		83		85		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman perkebunan (%)	N/A	60		65		68		70		75		80		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Perizinan Usaha Pertanian	cakupan usaha pertanian berizin (%)	N/A	80	400.000	85	400.000	90	400.600	95	402.063	100	403.409	100	405.499	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	cakupan usaha peternakan berizin (%)	N/A	80		85		90		95		100		100		Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Penyuluhan Pertanian	persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)	N/A	5	1.000.000	6	1.000.000	7	1.000.000	8	1.000.000	9	1.000.000	10	1.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	persentase peningkatan kelas kelompok ternak (%)	N/A	5		6		7		8		9		10		Dinas Perikanan dan Peternakan
Sasaran 1.2 : Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	84,70	84,70		84,71		84,72		84,73		84,74		84,75		
PANGAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.007.640											Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100												Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80												Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat (%)	N/A	5	800.000	5	800.000	5	800.000	5	800.000	5	800.000	5	800.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilitas harga pangan (%)	<10	<10	900.000	<10	900.000	<10	900.000	<10	900.000	<10	900.000	<10	900.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan (%)	N/A	10	100.000	9	100.000	8	100.000	7	100.000	6	100.000	5	100.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	N/A	30	300.000	40	300.000	50	300.000	60	300.000	70	300.000	80	300.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
MISI 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan															
Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Capaian rata-rata kinerja pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan (%)	N/A	60		62		65		68		70		75		
	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	61,17	63		65		68		70		73		75		
	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh (kecamatan)	0	0		1		1		1		1		1		
Sasaran 2.1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dan perhubungan yang mantap dan merata	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	61,17	63		65		70		72		73		75		



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Penurunan kecelakaan lalu lintas (%)	1,1	1,1		1,2		1,5		2		3		3		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	11.868.780	65	11.868.780	76	11.868.780	77	11.868.780	78	11.868.780	79	11.868.780	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) (TPB)	61,17	63	192.098.982	65	212.585.158	68	214.566.526	70	214.562.876	73	215.559.526	75	215.554.346	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%) (TPB)	79,29	80		82		84		86		89		92		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase cakupan jasa konstruksi terfasilitasi (%)	30	35	200.000	40	200.000	45	200.000	50	200.000	55	200.000	60	200.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PERHUBUNGAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	6.859.230	65	6.859.230	76	6.859.230	77	6.859.230	78	6.859.230	79	6.859.230	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase cakupan ketersediaan perlengkapan jalan raya kewenangan kabupaten (%) (TPB)	N/A	40	3.000.000	50	3.000.000	60	3.000.000	70	3.000.000	80	3.000.000	85	3.000.000	Dinas Perhubungan
	Persentase pelanggaran lalu lintas (%) (TPB)	N/A	30		25		20		15		10		10		Dinas Perhubungan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan raya yang berfungsi dengan baik (%) (TPB)	N/A	40		50		60		70		80		85		Dinas Perhubungan
	Persentase kendaraan wajib uji yang lulus uji (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
	Persentase sarana dan prasarana pengujian yang layak (%) (TPB)	0	0		100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
Sasaran 2.2 : Peningkatan ketersediaan sumber daya air yang mantap	Persentase luas sawah beririgasi (%)	46,76	46,76		50		51		52		53		54		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi permukaan kondisi baik (%) (TPB)	0	1	15.000.000	3	15.000.000	5	15.000.000	10	15.000.000	12	15.000.000	15	15.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase luas sawah beririgasi (%) (TPB)	46,76	46,76		50		51		52		53		54		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun (ha) (TPB)	N/A	50		100		100		150		150		200		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi (ha) (TPB)	N/A	50		100		100		150		150		200		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sasaran 2.3 : Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (%)	73,55	73,55		73,8		74		74,5		74,8		75		
	Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	3,53	3,45		3,1		2,5		1,5		0,5		0		
	Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa	N/A	N/A		2		2,5		3		4		5		
	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%)	N/A	2		2		2		2		2		2		



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) (SPM) (TPB)	78,39	78,4	30.000.000	78,6	30.000.000	78,8	30.000.000	78,9	30.000.000	79	30.000.000	79,2	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (SPM) (TPB)	N/A	2		3		4		6		8		10		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%) (SPM) (TPB) aman	98,76	98,77		98,8		98,84		98,86		98,88		99		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Indeks kategori kinerja PDAM (%)	N/A	2,2		2,5		2,7		2,8		2,9		2,95		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) (SPM) (TPB)	41,42	41,5	10.000.000	42	10.000.000	43	10.000.000	48	10.000.000	50	10.000.000	75	10.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang jalan kabupaten berdrainase (%) (TPB)	N/A	20	5.000.000	23	5.000.000	25	5.000.000	27	5.000.000	30	5.000.000	33	5.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Permukiman	Persentase desa yang ditangani (%)	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan rumah ber-IMB/PBG (%)	N/A	20	100.200	25	100.200	30	100.200	35	100.200	40	100.200	45	100.200	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Cakupan kawasan yang ditangani (ha)	1	10	15.100.000	10	15.100.000	10	15.100.000	10	15.100.000	10	15.100.000	10	15.100.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni (%)	N/A	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%) (SPM)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%) (SPM)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) (unit)	N/A	20	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (ha) (TPB)	N/A	0	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	N/A	80	2.000.000	80	2.000.000	82	2.000.000	83	2.000.000	85	2.000.000	87	2.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan pengembang perumahan memiliki sertifikasi dan registrasi (%)	N/A	70	100.000	75	100.000	80	100.000	85	100.000	90	100.000	95	100.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Sasaran 2.4 : Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	54,84	54,84		55		56		58		60		65		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW (%)	54,84	54,84	621.240	55	621.240	56	621.240	58	621.240	60	621.240	65	621.240	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
MISI 3 : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan															
Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,37	69,39		69,4		69,5		69,6		69,8	69,9 - 70,10			
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,64	2,64		2,64		2,6		2,6		2,6		2,5		



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Sasaran 3.1 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	12,85		12,86		12,87		12,88		12,89		12,9		
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,6	7,6		7,65		7,66		7,67		7,68		7,7		
PENDIDIKAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	381.014.042	65	381.014.042	76	381.014.042	77	381.014.042	78	381.014.042	79	381.014.042	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkanbran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf (%)	96,87	96,88	150.000.000	96,89	150.000.000	96,9	150.000.000	96,91	150.000.000	96,92	150.000.000	96,93	150.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	APK PAUD (SPM)	N/A	80		82		83		84		85		87		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	APK SD/MI (SPM)	103,87	103,85		103,75		103,2		102,8		102,3		102		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	APK SMP/MTs (SPM)	96,95	96,95		97		97,3		97,5		97,8		98		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	APM PAUD (SPM) (TPB)	N/A	80		82		83		84		85		87		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	APM SD/MI (SPM) (TPB)	99,16	99,18		99,2		99,24		99,26		99,3		99,34		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	APM SMP/MTs (SPM) (TPB)	90,12	90,15		91		92		92,5		93		93,8		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	PAUD terakreditasi (%) (TPB)	36,2	37		40		45		50		55		60		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	SD terakreditasi (%) (TPB)	97,9	98		98,3		98,7		99		99,5		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	SMP terakreditasi (%) (TPB)	96,4	96,5		96,8		97		98		99		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum (%)	N/A	25		30		40		50		55		60		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum (%)	N/A	25		25		30		35		40		45		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kurikulum	Kurikulum muatan lokal terimplementasi pada jenjang pendidikan dasar (%)	N/A	55	200.000	65	200.000	80	200.000	90	200.000	95	200.000	100	200.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	pendidik ASN bersertifikat (%)	90,6	90,7	20.000.000	90	20.000.000	92	20.000.000	94	20.000.000	96	20.000.000	98	20.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin (%)	N/A	65	100.000	70	101.000	80	101.000	90	101.000	95	101.000	100	101.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan (%)	N/A	60	100.000	70	105.000	80	105.000	90	105.000	95	105.000	100	105.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sasaran 3.2 : Meningkatkan pelestarian seni dan budaya	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)	10	10		10		15		20		25		30		
	Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)	10	10		10		15		20		25		30		
KEBUDAYAAN															
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	7	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat (%)	N/A	60		62		63		65		66		67		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%)	N/A	20	200.000	25	200.000	30	200.000	33	200.000	35	200.000	37	200.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni (%)	N/A	50		55		60		65		70		75		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (%)	N/A	10		12		15		17		18		19		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (%)	N/A	50	100.000	55	100.000	60	100.000	65	100.000	70	100.000	75	100.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	7	7	100.000	7	100.000	7	100.000	7	100.000	7	100.000	7	100.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeriksaan, penghapusan)	7	7		7		7		7		7		7		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Cakupan museum kabupaten yang dikelola (%)	N/A	50	150.000	50	155.000	50	155.000	100	155.000	100	155.000	100	155.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sasaran 3.3 : Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,32	72,32		72,42		72,52		72,6		72,65		72,70		
TENAGA KERJA															
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian kinerja urusan tenaga kerja (%)	N/A	60	50.000	80	60.000	90	60.000	95	60.000	97	60.000	100	60.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya (orang)	N/A	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri (orang) (TPB)	N/A	100		100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (orang) (TPB)	N/A	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan tenaga kerja (%) (TPB)	70	80	200.000	90	200.000	95	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
	Cakupan peserta jaminan sosial tenaga kerja (%) (TPB)	N/A	80		85		90		93		95		97		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Sasaran 3.4 : Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	N/A		35		36		37		38		40		
	Peringkat pada even olahraga PORPROV	9	-		8		-		8		-		8		
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	3.832.691											Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100												Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80												Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	N/A	5	1.200.000	5	1.200.000	6	1.200.000	6	1.200.000	7	1.200.000	7	1.200.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	N/A	0,1		0,2		0,3		0,4		0,5		0,6		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (orang)	N/A	10	2.000.000	15	2.000.000	20	2.000.000	25	2.000.000	30	2.000.000	35	2.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Perolehan medali emas dalam Porprov (medali emas)	18	-		20		0		22		0		24		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sasaran 3.5 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,73		70,74		70,75		70,76		70,77		70,78		
KESEHATAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	137.936.803	65	137.936.803	76	137.936.803	77	137.936.803	78	137.936.803	79	137.936.803	Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantbran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin (%)	100	100	87.711.072	100	87.711.072	100	87.711.072	100	87.711.072	100	87.711.072	100	87.711.072	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	93,5	94		95		96		97		98		100		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM) (TPB)	91,5	92		93		95		98		100		100		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	96,1	97		97,5		98		99		100		100		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	73,7	75		77		79		83		85		88		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	62,51	63		65		66		67		68		69		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	15,91	16		20		30		40		45		50		Dinas Kesehatan
	Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	71,15	72		73		75		77		79		80		Dinas Kesehatan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	12,21	13		15		17		20		22		25		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	49,5	50		55		60		65		70		75		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	80,4	81		82		84		86		88		90		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis (%) (SPM) (TPB)	96	97		97,5		98		98,5		99		100		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	60,56	61		62		63		64		65		66		Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (TPB)	19	18		17		16		15		14		13		Dinas Kesehatan
	Penurunan jumlah kematian Ibu (AKI) per tahun (%)	N/A	15		15		15		15		15		15		Dinas Kesehatan
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%) (TPB)	91,5	91,5		92		93		94		95		96		Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (TPB)	5,7	5,6		5,5		5,4		5,3		5,2		5,1		Dinas Kesehatan
	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	83,26	84		85		86		87		88		89		Dinas Kesehatan
	Persentase Ketersediaan obat dan vaksin (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Insidensi TB per 100.000 penduduk	N/A	235		231		231		231		231		231		Dinas Kesehatan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	N/A	0,19		0,19		0,19		0,19		0,19		0,19		Dinas Kesehatan
	Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	N/A	90		90		91		92		93		94		Dinas Kesehatan
	Treatment coverage pada pasien TB (SPM) (TPB)	N/A	90		91		92		93		94		95		Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100	100	200.000	100	210.000	100	210.420	100	210.841	100	211.263	100	211.685	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	80	100	8.871.708	100	8.871.708	100	8.871.708	100	8.871.708	100	8.871.708	100	8.871.708	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	N/A	40		42		46		50		55		59		Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	80	90	257.514	90	257.514	90	257.514	90	257.514	95	257.514	98	257.514	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	N/A	50		55		60		80		90		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	N/A	20		30		40		50		55		60		Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	N/A	50	516.030	55	516.030	60	516.030	80	516.030	90	516.030	100	516.030	Dinas Kesehatan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	N/A	20		30		40		50		55		60		Dinas Kesehatan
Sasaran 3.6 : Pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,03	1,03		1,02		1,01		1		0,99		0,95		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	3.327.883	65	3.327.883	76	3.327.883	77	3.327.883	78	3.327.883	79	3.327.883	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,03	1,03	1.000.000	1,02	1.000.000	1,01	1.000.000	1	1.000.000	0,99	1.000.000	0,95	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB Aktif (%) (TPB)	14,23	15	5.000.000	20	5.000.000	25	5.000.000	30	5.000.000	35	5.000.000	40	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (%) (TPB)	14,23	15		20		25		30		35		40		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera terfasilitasi (%)	N/A	90	1.500.000	95	1.500.000	97	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran 3.7 : Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%)	N/A	2		3		5		7		10		15		
SOSIAL															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	3.798.010	65	3.798.010	76	3.798.010	77	3.798.010	78	3.798.010	79	3.798.010	Dinas Sosial
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	80	100	288.576	100	288.576	100	288.576	100	288.576	100	288.576	100	288.576	Dinas Sosial
	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100	100	203.406	100	203.406	100	203.406	100	203.406	100	203.406	100	203.406	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) (SPM) (TPB)	N/A	2	850.000	3	850.000	5	850.000	6	850.000	7	850.000	8	850.000	Dinas Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) (SPM)	N/A	5		10		15		20		25		30		Dinas Sosial
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) (SPM)	N/A	2		3		5		10		15		20		Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	80	100	870.000	100	870.000	100	870.000	100	870.000	100	870.000	100	870.000	Dinas Sosial
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) (SPM)	N/A	5		10		15		20		25		30		Dinas Sosial
	Persentase desa yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	N/A	10		15		20		40		60		80		Dinas Sosial
	Persentase bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin (%) (TPB)	N/A	2		3		5		7		10		15		Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemeruahan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)	N/A	10	1.000.000	15	1.000.000	20	1.000.000	40	1.000.000	60	1.000.000	80	1.000.000	Dinas Sosial
	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa)	N/A	10		20		50		100		200		300		Dinas Sosial



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial (kelompok)	N/A	10		20		50		100		200		300		Dinas Sosial
	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial (orang) (SPM)	N/A	10		15		20		40		60		80		Dinas Sosial
	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan (orang) (TPB)	N/A	5		10		20		30		40		50		Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan berfungsi dengan baik (%)	100	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	Dinas Sosial
Sasaran 3.8 : Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,78	88,78		88,78		88,79		88,8		88,85		88,9		
	Persentase Desa Layak Anak (%)	20	30		35		40		50		60		70		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	3.699.360											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja APBD (%) (TPB)	N/A	20	500.000	21	500.000	22	500.000	23	500.000	24	500.000	25	500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (%) (TPB)	N/A	50	300.000	60	310.000	70	310.000	80	310.000	85	310.000	90	310.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang terfasilitasi (%)	80	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Sistem data gender dan anak berfungsi baik (%)	90	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak (%)	20	30	500.000	35	500.000	40	500.000	50	500.000	60	500.000	70	500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%) (TPB)	N/A	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
MISI 4 : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal															
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,29	1,0		3,5		3,5		3,6		3,8		4		



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase penduduk miskin (%)	14,62	14,62		14,62		14,55		14,4		14,2		14		
	Indeks Gini	0,35	0,34		0,34		0,34		0,34		0,34		0,33		
	Laju inflasi	2,01	2		2		2		2		2		2		
	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun)	38,7	36,5		36,8		38,9		40,3		41,8		42,2		
Sasaran 4.1 : Meningkatkan peran koperasi, BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan (%)	2,91	2		2		3		3		4		4		
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.624.200	65	4.624.200	76	4.624.200	77	4.624.200	78	4.624.200	79	4.624.200	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (%)	N/A	100	140.000	100	140.000	100	140.000	100	140.000	100	140.000	100	140.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi menyelenggarakan RAT tepat waktu (%)	32,57	35 - 40	100.000	40	100.000	50	100.000	60	100.000	70	100.000	80	100.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas (%)	N/A	10		15		20		20		20		20		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat (%)	0	1	95.000	3	95.000	5	95.000	7	95.000	8	95.000	9	95.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan pengurus koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan koperasi (%)	N/A	10	150.000	20	160.000	30	160.000	40	160.000	50	160.000	60	160.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi aktif (%) (TPB)	32,57	33	200.000	40	200.000	50	200.000	70	200.000	72	200.000	75	200.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM (%) (TPB)	-0,24	0,05	100.000	0,39	100.000	0,5	100.000	0,5	100.000	0,5	100.000	0,5	100.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
	Persentase peningkatan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha (%) (TPB)	N/A	10		15		20		20		20		20		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil (%) (TPB)	N/A	2	500.000	5	500.000	10	500.000	15	500.000	18	500.000	25	500.000	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
Sasaran 4.2 : Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-1,87	1		2		3,5		3,6		4		4		
	Inflasi Pangan bergejolak (%)	<10	<10		<10		<10		<10		<10		<10		
	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	-5,23	1		3		3,5		3,6		4		4,1		
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)	7,96	7,96		8		8,3		8,5		8,7		8,9		
PERDAGANGAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	>65	5.626.110	65	5.626.110	76	5.626.110	77	5.626.110	78	5.626.110	79	5.626.110	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha memiliki izin (tertib usaha) (%)	60	65	200.000	65	200.000	70	200.000	73	200.000	75	200.000	76	200.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar (%)	-18,53	5	2.200.000	10	2.200.000	10	2.200.000	10	2.200.000	15	2.200.000	15	2.200.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok (%)	<10	<10	300.000	<10	300.000	<10	300.000	<10	300.000	<10	300.000	<10	300.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	70	72		74		78		80		83		86		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (%)	60	65		67		71		74		78		80		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	60	65		67		71		74		78		80		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	N/A	5		5,2		5,3		5,6		5,8		5,9		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	-12,4	4	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) bertanda tera sah (%)	N/A	75	250.000	76	250.000	80	250.000	85	250.000	90	250.000	100	250.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang memasarkan produknya melalui aplikasi sistem elektronik (%)	N/A	0,25	100.000	1	100.000	5	100.000	10	100.000	20	100.000	30	100.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase UMKM yang memasarkan produknya melalui jaringan retail nasional (%)	N/A	0,25		0,5		1		2		3		4		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
PERINDUSTRIAN							-								
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan jumlah industri (%)	1,15	1	400.000	2	400.000	5	400.000	5	400.000	8	400.000	10	400.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (%)	46.456	46.460		46.650		47.000		47.300		47.700		48.000		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Miliar)	225	225		240		250		260		280		300		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri berizin (%)	70	100	100.000	80	100.000	85	100.000	90	100.000	95	100.000	100	100.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase industri terdaftar di SIINas (%)	N/A	10	100.000	50	100.000	75	100.000	80	100.000	90	100.000	100	100.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sasaran 4.3 : Meningkatkan daya tarik wisata daerah dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) (%)	-3,42	4		5		6		7		8		10		
PARIWISATA															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.007.640	65	4.007.640	76	4.007.640	77	4.007.640	78	4.007.640	79	4.007.640	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah usaha pariwisata (%)	N/A	10	2.000.000	10	2.000.000	15	2.000.000	20	2.000.000	20	2.000.000	20	2.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%) (TPB)	-8,46	2 - 5	1.000.000	10	1.000.000	20	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kecamatan yang ditangani (kecamatan)	0	0	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif (%)	N/A	10	900.000	10	900.000	15	900.000	20	900.000	20	900.000	30	900.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
MISI 5 : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat															
Tujuan : Meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban masyarakat dan partisipasi politik masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	70		70		70,5		71,5		72		72,5		



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	0,38	0,38		0,38		0,37		0,36		0,35		0,35		
	Indeks Demokrasi	N/A	70		70		70		70,5		71		71,5		
Sasaran 5.1 : Meningkatkan kondisi ketentrman dan keteriban masyarakat	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk	0,38	0,38		0,37		0,36		0,355		0,35		0,35		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	11.850.284	65	11.841.284	76	11.868.059	77	11.911.377	78	11.951.280	79	11.990.123	Sat Pol PP/Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Sat Pol PP/Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Sat Pol PP/Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan (%)	75	75	800.000	75	800.000	75	800.000	76	800.000	77	800.000	80	800.000	Sat Pol PP
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100		100		100		100		100		100		Sat Pol PP
	Warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada (%) (SPM)	100	100		100		100		100		100		100		Sat Pol PP
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas terdaftar (%)	N/A	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARAYang terjadi (%) (TPB)	N/A	<50	600.000	<50	600.000	<50	600.750	<50	602.578	<50	604.261	<50	606.873	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi (%) (TPB)	N/A	<50	400.000	<50	400.000	<50	400.000	<50	400.000	<50	400.000	<50	423.066	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Sasaran 5.2 : Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi	N/A	70		70		70,5		71		71,5		72		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	3.545.220	65	3.545.220	76	3.545.220	77	3.545.220	78	3.545.220	79	3.545.220	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkanbran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah desa berkarakter Pancasila (desa) (TPB)	0	0	200.000	1	200.000	2	200.000	3	200.000	4	200.000	5	200.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi (%) (TPB)	N/A	<50	100.000	<50	100.000	<50	100.000	<50	100.000	<50	100.000	<50	100.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pendidikan politik (%)	N/A	5		10		15		20		25		30		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
MISI 6 : Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)															
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu)	C	C		C		CC		CC		B		B		
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	N/A	70		75		76		78		80		80		
	Nilai SAKIP (Huruf Mutu)	C	C		C		CC		B		B		B		
	Opini BPK (opini)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
Sasaran 6.1 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82		84		86		87		88		88,31		
	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	71		71		72		72		73		75		
	Nilai SAKIP	C	C		CC		CC		B		B		B		
	Indeks Inovasi Daerah	1.201	1.206		1.215		1.220		1.225		1.230		1.235		



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Zona Pelayanan Ombudsman	Hijau	Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		
	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Cukup		Cukup		Cukup		Baik		Baik		Baik		
	Persentase capaian target propemperda (%) (TPB)	46	>65		70		70		70		80		80		
	Persentase kepemilikan KTP-el (%)	94	95		96		97		98		99		100		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	10		11		12		13		14		15		
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.624.200	65	4.624.200	76	4.624.200	77	4.624.200	78	4.624.200	79	4.624.200	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el (%)	94	95	3.500.000	96	3.500.000	97	3.500.000	98	3.500.000	99	3.500.000	100	3.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	100	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%) (TPB)	99	99,2		99,3		99,5		99,7		99,9		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	N/A	25		30		33		35		37		40		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan (%)	N/A	80		85		90		95		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase keakuratan informasi administrasi kependudukan (%)	N/A	90	1.000.000	90	1.000.000	95	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Pemanfaatan data kependudukan (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusun nya profil kependudukan (%)	100	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PERENCANAAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	9.864.960	65	9.864.960	76	9.864.960	77	9.864.960	78	9.864.960	79	9.864.960	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercapai (%)	57,14	71	1.590.000	71	1.560.000	73	1.560.000	75	1.560.000	80	1.560.000	85	1.560.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai (%)	44,52	45	2.900.000	50	2.900.000	60	2.900.000	70	2.900.000	80	2.900.000	85	2.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEPEGAWAIAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	5.163.690	65	5.163.690	76	5.163.690	77	5.163.690	78	5.163.690	79	5.163.690	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantbran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Instansi/ASN terhadap pelayanan kepegawaian	N/A	70	3.700.000	70	3.700.000	75	3.700.000	76	3.700.000	77	3.700.000	78	3.700.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	Tingkat kualitas pengadaan ASN	N/A	14		15		16		17		18		19		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	Persentase kinerja ASN (%)	76	78		80		85		88		90		93		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	Persentase disiplin ASN (%)	70	75		80		83		85		88		90		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	Implementasi aplikasi wajib ASN (%)	80	90		100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														-	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	N/A	>30	2.500.000	>30	2.500.000	>30	2.500.000	>30	2.500.000	>30	2.500.000	>30	2.500.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran dalam satu tahun (%)	N/A	5		6		8		10		12		15		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan daerah (%)	N/A	0	680.000	25	680.000	30	680.000	50	680.000	75	680.000	80	680.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SEKRETARIAT DAERAH														-	
Program Administrasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	31.675.770	65	31.675.770	76	31.675.770	77	31.675.770	78	31.675.770	79	31.675.770	Sekretariat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga (%)	76	78		80		90		90		94		95		Sekretariat Daerah
	Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah (%)	65	66		70		73		75		80		83		Sekretariat Daerah
	Tingkat kepuasan kada/wakada terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan (%)	76	78		80		90		90		94		95		Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu (%)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Sekretariat Daerah
	Persentase penanganan permasalahan bidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	N/A	90		95		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah (%)	46	65		70		75		80		80		80		Sekretariat Daerah
	Persentase kerjasama yang aktif (%) (TPB)	N/A	60		70		75		80		83		85		Sekretariat Daerah
	Persentase rumah ibadah/lembaga keagamaan yang difasilitasi (%)	20	22		25		28		30		40		45		Sekretariat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian (%)	N/A	90	4.000.000	95	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	Sekretariat Daerah
	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan (%)	N/A	90		95		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang sumber daya alam (%)	N/A	90		95		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD															
Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	26.007.787	65	26.007.787	76	26.007.787	77	26.007.787	78	26.007.787	79	26.007.787	Sekretariat DPRD
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	N/A	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	N/A	80		90		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase capaian target propemperda (%)	46	65	30.000.000	70	30.000.000	75	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	Sekretariat DPRD
	Persentase pengambilan keputusan APBD yang terselesaikan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
	Persentase pengawasan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan (%)	80	80		83		85		90		90		95		Sekretariat DPRD



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitas layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi (%)	75	76		78		80		82		85		90		Sekretariat DPRD
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.315.920	65	4.315.920	76	4.315.920	76	4.315.920	76	4.315.920	76	4.315.920	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemda terhadap isu yang berkembang di media massa dan perlu dilakukan klarifikasi (%)	100	100	2.400.000	100	2.400.000	100	2.400.000	100	2.400.000	100	2.400.000	100	2.400.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi (%)	N/A	40		50		60		75		75		80		Dinas Komunikasi Dan Informatika



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah (%)	N/A	60		65		70		78		78		80		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh perangkat daerah sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 ttg KIP (%) (TPB)	N/A	60		65		70		78		78		80		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah (%)	N/A	50		55		60		80		80		85		Dinas Komunikasi Dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase cakupan layanan SPBE perangkat daerah (%) (TPB)	40	45	3.300.000	50	3.300.000	75	3.300.000	80	3.300.000	85	3.300.000	90	3.300.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan (%) (TPB)	50	55		60		70		80		90		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan (%) (TPB)	50	55		60		70		80		90		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital (%)	0	10		20		30		40		50		60		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi i inovasi yang mendukung <i>smart city</i> sesuai dengan Masterplan (%)	50	55		60		70		80		90		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)	N/A	30		40		50		50		50		50		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)	N/A	30		40		50		50		50		50		Dinas Komunikasi Dan Informatika
STATISTIK															
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan dokumen perencanaan (%)	75	75	50.000	80	51.000	90	52.000	90	53.000	95	54.000	95	55.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
PERSANDIAN															
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	N/A	100	50.000	100	51.000	100	52.000	100	53.000	100	54.000	100	55.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
PERTANAHAN															
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase penetapan izin lokasi sesuai aturan (%)	N/A	80	50.000	80	52.000	85	52.000	90	52.000	90	52.000	95	52.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan secara mediasi (%)	N/A	80	300.000	80	300.000	80	300.000	85	300.000	85	300.000	85	300.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	N/A	90	100.000	90	500.000	95	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian yang terselesaikan (%)	N/A	100	100.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penetapan tanah ulayat sesuai aturan (%)	N/A	100	50.000	100	52.000	100	52.000	100	52.000	100	52.000	100	52.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong (%)	N/A	80	100.000	80	150.000	85	150.000	85	150.000	90	150.000	100	150.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase penerbitan izin membuka tanah (%)	100	100	900.000	100	900.000	100	900.000	100	900.000	100	900.000	100	900.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Penatagunaan Tanah	Persentase lahan pemda bersertifikat (%)	80	82	300.000	90	300.000	95	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
PERPUSTAKAAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.778.340	65	4.778.340	76	4.778.340	77	4.778.340	78	4.778.340	79	4.778.340	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pembinaan Perpustakaan	pengunjung perpustakaan/minat baca (rasio minat baca)	0,25	0,3	500.000	0,31	500.000	0,32	500.000	0,33	500.000	0,34	500.000	0,35	500.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	cakupan digitalisasi pelestarian naskah kuno kabupaten (%)	N/A	60	100.000	70	100.000	80	100.000	90	100.000	100	100.000	100	100.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
KEARSIPAN															
Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	80	85	125.000	90	125.000	90	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti sah (%)	N/A	70		72		73		74		75		76		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Jumlah pengguna pelayanan arsip (orang)	N/A	100		150		200		250		280		300		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip terjaga (%)	N/A	50	50.000	65	50.000	65	50.000	70	50.000	70	50.000	70	50.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah (%)	N/A	70	50.000	80	50.000	80	50.000	80	50.000	90	50.000	90	50.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
TRANSMIGRASI															
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Ketersediaan dokumen perencanaan transmigrasi (%)	N/A	0	-	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Perangkat Daerah Terkait
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi kabupaten terfasilitasi (%)	N/A	0	-	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Perangkat Daerah Terkait
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase permukiman transmigrasi terfasilitasi (%)	N/A	0	-	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Perangkat Daerah Terkait
KEWILAYAHAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	18.496.800	65	18.496.800	76	18.496.800	77	18.496.800	78	18.496.800	79	18.496.800	Kecamatan
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Kecamatan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terfasilitasi (%)	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan terkait isu SARA (%)	100	100	25.000	100	28.000	100	28.000	100	28.000	100	28.000	100	28.000	Kecamatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu (%)	100	100	35.000	100	37.000	100	37.000	100	37.000	100	37.000	100	37.000	Kecamatan
Sasaran 6.2 : Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (opini)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		
KEUANGAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	79.597.159	65	79.371.586	76	79.482.380	77	79.772.491	78	80.039.729	79	80.961.208	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah/Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah/Badan Pendapatan Daerah
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah/Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	NA	B	630.033.833	B	641.033.833	B	630.027.942	B	632.297.944	B	633.402.093	B	636.708.137	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat (%)	NA	80	300.000	>80	300.000	>80	300.000	>80	300.000	>80	300.000	>80	300.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
PENGAWASAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	12.331.200	65	12.331.200	76	12.331.200	77	12.331.200	78	12.331.200	79	12.331.200	Inspektorat



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Inspektorat
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.300.000	100	3.300.000	100	3.300.000	100	3.300.000	100	3.300.000	100	3.300.000	Inspektorat
	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	80	80		85		85		90		95		100		Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP Level 3 (%)	60	62	390.000	65	390.000	70	390.000	73	390.000	75	390.000	78	390.000	Inspektorat
	Persentase tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten (%)	67	75		82		84		85		86		88		Inspektorat
Sasaran 6.3 : Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%)	6,71	>10		>10		>10		>10		>10		>10		
KEUANGAN															
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD (%)	6,71	5	7.000.000	10	7.000.000	11	7.000.000	12	7.000.000	13	7.000.000	15	7.000.000	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran 6.4 : Memajukan desa	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa)	38	38		39		40		41		42		43		
	Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%)	N/A	5		6		7		8		9		10		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	6.029.186	65	6.029.186	76	6.029.186	77	6.029.186	78	6.029.186	79	6.029.186	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Penataan Desa	Persentase desa terfasilitasi dalam penataan desa (%)	100	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa terfasilitasi dalam kerjasama antar desa (%)	100	100	100.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000	100	125.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa berpredikat Desa Maju (desa) (TPB)	38	38	2.000.000	39	2.000.000	40	2.000.000	41	2.000.000	42	2.000.000	43	2.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Jumlah desa berpredikat Desa Berkembang (desa)	204	204		205		206		207		208		209		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Jumlah desa berpredikat Desa Tertinggal (desa)	22	22		20		18		16		14		12		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase BUMDES level berkembang (%)	N/A	10		15		18		20		22		24		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase aparaturn dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes (%)	N/A	60	800.000	70	800.000	75	800.000	80	800.000	85	800.000	90	800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MISI 7 : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal															
Tujuan : Meningkatkan investasi daerah	Pertumbuhan investasi daerah (%)	2 - 3	2		3		4		4		5		5		



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Sasaran 7.1 : Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	3,27	3,5		4		4		4		4,5		4,5		
PENANAMAN MODAL															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.457.729	65	4.466.644	76	4.466.644	77	4.466.644	78	4.466.644	79	4.466.644	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti (%)	N/A	10	300.000	10	300.000	15	300.000	20	300.000	25	300.000	25	300.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor (%)	7,8	>10	300.000	>10	300.000	>10	300.000	>10	300.000	>10	300.000	>10	300.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah permohonan izin yang dilayani (%)	10	10	930.000	20	930.000	20	930.000	30	930.000	30	930.000	30	930.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	75	80		80		95		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah tentang perizinan dan non perizinan (%)	50	60		90		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan menyampaikan LKPM (%)	100	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan (%)	N/A	80		90		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik (%)	70	80	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kelepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan (%)	70	70		75		80		90		95		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KEWILAYAHAN															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu (%)	N/A	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	Kecamatan
MISI 8 : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana															
Tujuan : Meningkatkan upaya penanganan penyakit menular, penanggulangan narkoba dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	183,2	183,2		183,1		183		182,9		182,8		182,7		
Sasaran 8.1 : Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan narkoba	Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%)	Meningkat	3		5		5		5		5		5		
	Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%)	100	100		100		100		100		100		100		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%) (TPB)	N/A	3		5	500.000	5	500.750	5	502.578	5	504.261	5		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
KESEHATAN															
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100	100	200.000	100	210.000	100	210.420	100	210.841	100	211.263	100	211.685	Dinas Kesehatan
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penanggulangan bencana (%) (TPB)	NA	50	3.000.000	65	3.000.000	70	3.000.000	75	3.000.000	75	3.000.000	80	3.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase penanganan pra bencana (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penanganan pasca bencana (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) (SPM) (TPB)	N/A	50		60		70		80		90		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) (SPM) (TPB)	N/A	50		60		70		80		90		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%) (SPM) (TPB)	N/A	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran (%) (TPB)	100	100	3.800.000	100	3.800.000	100	3.800.000	100	3.800.000	100	3.800.000	100	3.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa (%) (TPB)	N/A	20		30		50		60		70		80		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan (%) (TPB)	0	0		1		1		1		1		1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%) (SPM) (TPB)	N/A	50		60		70		80		90		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 9 : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas															
Tujuan : Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	62,97		63,38		63,79		64,19		64,59		64,99		
Sasaran 9.1 : Meningkatkan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	63,33	52,6		52,7		52,8		52,9		53		53,1		
	Indeks Kualitas Udara	86,64	82,17		82,27		82,37		82,46		82,55		82,65		
	Indeks Kualitas Lahan	N/A	45,28		46,78		48,29		49,79		51,29		52,78		
LINGKUNGAN HIDUP															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	6.165.600	65	6.165.600	76	6.165.600	77	6.165.600	78	6.165.600	79	6.165.600	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (%)	100	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kasus lingkungan hidup yang terlangani (%) (TPB)	100	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kabupaten (%) (TPB)	30	>30	1.000.000	>30	1.000.000	>30	1.000.000	>30	1.000.000	>30	1.000.000	>30	1.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pemenuhan komitmen penyimpanan sementara limbah B3 (%) (TPB)	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
	Persentase pemenuhan komitmen pengumpulan limbah B3 dalam kabupaten (%) (TPB)														Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan (%) (TPB)	N/A	70	400.000	75	400.000	80	400.000	85	400.000	90	400.000	100	400.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang terfasilitasi (%)	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan (%)	100	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah yang dilaksanakan (%)	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	51.901	100	53.336	100	107.954	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (%)	N/A	50		55		58		60		63		65		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA															
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani (%) (TPB)	100	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah (%) (TPB)	N/A	3	1.900.000	5	1.900.000	5	1.900.000	6	1.900.000	7	1.900.000	8	1.900.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan
	Persentase penanganan sampah (%) (TPB)	N/A	20		25		30		32		35		40		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur untuk periode Tahun 2022 sampai dengan 2026 berjumlah 168 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Anggaran tersebut disajikan pada Tabel dibawah ini:



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022-2026

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	2.131.936.515.986,21	2.135.179.931.112,21	2.142.938.026.865,26	2.150.097.014.043,79	2.161.248.545.949,71
BELANJA	2.226.873.659.205,59	2.230.263.028.012,25	2.238.370.238.074,19	2.245.851.379.675,76	2.257.504.730.517,45
BELANJA OPERASI	1.530.616.193.087,96	1.532.944.791.371,98	1.535.276.932.261,90	1.537.612.621.147,27	1.539.951.863.425,81
- Belanja Pegawai	899.237.998.018,90	900.606.051.008,65	901.976.185.281,65	903.348.404.004,25	904.722.710.347,63
- Belanja Barang dan Jasa	495.961.121.632,27	496.715.650.574,27	497.471.327.416,57	498.228.153.905,54	498.986.131.790,18
- Belanja Hibah	133.348.184.515,56	133.551.053.369,97	133.754.230.858,30	133.957.717.450,08	134.161.513.615,57
- Belanja Bantuan Sosial	2.068.888.921,23	2.072.036.419,09	2.075.188.705,39	2.078.345.787,40	2.081.507.672,44
BELANJA MODAL	264.212.807.912,99	264.616.288.610,63	269.733.067.991,75	274.219.229.429,90	282.873.043.704,21
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.791.003.135,85	4.798.291.913,88	4.805.591.780,67	4.812.902.753,09	4.820.224.848,04
BELANJA TRANSFER	427.253.655.068,79	427.903.656.115,78	428.554.646.039,87	429.206.626.345,50	429.859.598.539,39
- Belanja Bagi Hasil	6.464.198.903,31	6.474.033.192,63	6.483.882.443,31	6.493.746.678,12	6.503.625.919,85
- Belanja Bantuan Keuangan	420.789.456.165,48	421.429.622.923,15	422.070.763.596,56	422.712.879.667,38	423.355.972.619,54
PEMBIAYAAN	94.937.143.219,38	95.083.096.900,05	95.432.211.208,94	95.754.365.631,97	96.256.184.567,74
- Penerimaan Pembiayaan	95.937.143.219,38	96.083.096.900,05	96.432.211.208,94	96.754.365.631,97	97.256.184.567,74
- Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022-2026 di atas, disusun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022-2026, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
MISI 1 : Meningkatkan Program Petani Berjaya																	
Tujuan : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01	PENDIDIKAN																
1 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	381.014.042	65	381.014.042	76	381.585.563	77	382.978.350	78	384.261.328	79	386.251.801	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf (%)	96,87	96,88	150.000.000	96,89	150.000.000	96,9	150.225.000	96,91	150.773.321	96,92	151.278.412	96,93	152.062.034	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		APK PAUD (SPM)	N/A	80		82		83		84		85		87		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		APK SD/MI (SPM)	103,87	103,85		103,75		103,2		102,8		102,3		102		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		APK SMP/MT s (SPM)	96,95	96,95		97		97,3		97,5		97,8		98		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		APM PAUD (SPM) (TPB)	N/A	80		82		83		84		85		87		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		APM SD/MI (SPM) (TPB)	99,16	99,18		99,2		99,24		99,26		99,3		99,34		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		APM SMP/MT s (SPM) (TPB)	90,12	90,15		91		92		92,5		93		93,8		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		PAUD terakreditasi (%) (TPB)	36,2	37		40		45		50		55		60		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		SD terakreditasi (%) (TPB)	97,9	98		98,3		98,7		99		99,5		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		SMP terakreditasi (%) (TPB)	96,4	96,5		96,8		97		98		99		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum (%)	N/A	25		30		40		50		55		60		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum (%)	N/A	25		25		30		35		40		45		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum	Kurikulum muatan lokal terimplementasi pada jenjang pendidikan dasar (%)	N/A	55	200.000	65	200.000	80	200.300	90	201.031	95	201.705	100	202.749	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1 01 04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	pendidik ASN bersertifikat (%)	90,6	90,7	20.000.000	90	20.000.000	92	20.030.000	94	20.103.110	96	20.170.455	98	20.274.938	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1 01 05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin (%)	N/A	65	100.000	70	101.000	80	101.152	90	101.521	95	101.861	100	102.388	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1 01 06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan (%)	N/A	60	100.000	70	105.000	80	105.158	90	105.541	95	105.895	100	106.443	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1 02	KESEHATAN																
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	137.936.803	65	137.936.803	76	138.143.708	77	138.647.933	78	139.112.404	79	139.833.006	Dinas Kesehatan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin (%)	100	100	87.711.072	100	87.711.072	100	87.842.639	100	88.163.264	100	88.458.611	100	88.916.827	Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	93,5	94		95		96		97		98		100		Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM) (T PB)	91,5	92		93		95		98		100		100		Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (T PB)	96,1	97		97,5		98		99		100		100		Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	73,7	75		77		79		83		85		88		Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	62,51	63		65		66		67		68		69		Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	15,91	16		20		30		40		45		50		Dinas Kesehatan	
		Peayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	71,15	72		73		75		77		79		80		Dinas Kesehatan	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (T PB)	12,21	13		15		17		20		22		25		Dinas Kesehatan	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	49,5	50		55		60		65		70		75		Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	80,4	81		82		84		86		88		90		Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga T uberkolosis (%) (SPM) (T PB)	96	97		97,5		98		98,5		99		100		Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (T PB)	60,56	61		62		63		64		65		66		Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (TPB)	19	18		17		16		15		14		13		Dinas Kesehatan
		Penurunan jumlah kematian Ibu (AKI) per tahun (%)	N/A	15		15		15		15		15		15		Dinas Kesehatan
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%) (TPB)	91,5	91,5		92		93		94		95		96		Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (TPB)	5,7	5,6		5,5		5,4		5,3		5,2		5,1		Dinas Kesehatan
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	83,26	84		85		86		87		88		89		Dinas Kesehatan
		Persentase Ketersediaan obat dan vaksin (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	N/A	235		231		231		231		231		231		Dinas Kesehatan
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	N/A	0,19		0,19		0,19		0,19		0,19		0,19		Dinas Kesehatan
		Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	N/A	90		90		91		92		93		94		Dinas Kesehatan
		Treatment coverage pada pasien TB (SPM) (TPB)	N/A	90		91		92		93		94		95		Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100	100	200.000	100	210.000	100	210.420	100	210.841	100	211.263	100	211.685	Dinas Kesehatan
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	80	100	8.871.708	100	8.871.708	100	8.885.016	100	8.917.446	100	8.947.319	100	8.993.666	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	N/A	40		42		46		50		55		59		Dinas Kesehatan



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	80	90	257.514	90	257.514	90	257.900	90	258.842	95	259.709	98	261.054	Dinas Kesehatan
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan (%)	N/A	50		55		60		80		90		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	N/A	20		30		40		50		55		60		Dinas Kesehatan
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	N/A	50	516.030	55	516.030	60	516.804	80	518.690	90	520.428	100	523.124	Dinas Kesehatan
		Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	N/A	20		30		40		50		55		60		Dinas Kesehatan
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	11.868.780	65	11.868.780	76	11.886.583	77	11.929.969	78	11.969.935	79	12.031.939	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi permukaan kondisi baik (%)	0	1	15.000.000	3	15.000.000	5	15.022.500	10	15.077.332	12	15.127.841	15	15.206.203	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase luas sawah beririgasi (%) (TPB)	46,76	46,76		50		51		52		53		54		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun (ha) (T PB)	N/A	50		100		100		150		150		200		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi (ha) (T PB)	N/A	50		100		100		150		150		200		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) (SPM)	78,39	78,4	30.000.000	78,6	30.000.000	78,8	30.045.000	78,9	30.154.664	79	30.255.682	79,2	30.412.407	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (SPM)	N/A	2		3		4		6		8		10		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%) (SPM) (TPB)	98,76	98,77		98,8		98,84		98,86		98,88		99		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Indeks kategori kinerja PDAM (%)	N/A	2,2		2,5		2,7		2,8		2,9		2,95		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) (SPM) (TPB)	41,42	41,5	10.000.000	42	10.000.000	43	10.015.000	48	10.051.555	50	10.085.227	75	10.137.469	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang jalan kabupaten berdrainase (%)	N/A	20	5.000.000	23	5.000.000	25	5.007.500	27	5.025.777	30	5.042.614	33	5.068.734	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase desa yang ditangani (%)	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.075.000	10	50.257.774	10	50.426.137	10	50.687.345	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan rumah ber-IMB/PBG (%)	N/A	20	100.200	25	100.200	30	100.350	35	100.717	40	101.054	45	101.577	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Cakupan kawasan yang ditangani (ha)	1	10	15.100.000	10	15.100.000	10	15.122.650	10	15.177.848	10	15.228.693	10	15.307.578	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) (TPB)	61,17	63	192.098.982	65	212.585.158	68	214.903.404	70	215.684.152	73	217.403.343	75	218.524.313	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		Persentase jembatan dalam kondisi baik (%) (TPB)	79,29	80		82		84		86		89		92		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase cakupan jasa konstruksi terfasilitasi (%)	30	35	200.000	40	200.000	45	200.300	50	201.031	55	201.705	60	202.749	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW (%)	54,84	54,84	621.240	55	621.240	56	622.172	58	624.443	60	626.535	65	629.780	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1 04 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.778.340											Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100												Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80												Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni (%)	N/A	100	300.000	100	300.000	100	300.450	100	301.547	100	302.557	100	304.124	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%) (SPM)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%) (SPM)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) (unit)	N/A	20	1.000.000	50	1.000.000	50	1.001.500	50	1.005.155	50	1.008.523	50	1.013.747	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian
1 04 04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (ha) (TPB)	N/A	0	1.000.000	1	1.000.000	1	1.001.500	1	1.003.002	1	1.004.507	1	1.006.014	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	N/A	80	2.000.000	80	2.000.000	82	2.003.000	83	2.010.311	85	2.017.045	87	2.027.494	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian
1 04 06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan pengembang perumahan memiliki sertifikasi dan registrasi (%)	N/A	70	100.000	75	100.000	80	100.000	85	100.000	90	100.000	95	100.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian
1 05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	11.850.284	65	11.841.284	76	11.868.059	77	11.911.377	78	11.951.280	79	11.990.123	Sat Pol PP/Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Sat Pol PP/Badan Penanggulangan Bencana
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Sat Pol PP/Badan Penanggulangan Bencana
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Keteritban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan (%)	75	75	800.000	75	800.000	75	801.200	76	804.124	77	806.818	80	810.998	Sat Pol PP
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100		100		100		100		100		100		Sat Pol PP
		Warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan	100	100		100		100		100		100		100		Sat Pol PP
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penanggulangan bencana (%) (TPB)	NA	50	3.000.000	65	3.000.000	70	3.004.500	75	3.015.466	75	3.025.568	80	3.041.241	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan pra bencana (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
		Persentase penanganan pasca bencana (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) (SPM) (TPB)	N/A	50		60		70		80		90		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) (SPM) (TPB)	N/A	50		60		70		80		90		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%) (SPM) (TPB)	N/A	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran (%) (TPB)	100	100	3.800.000	100	3.800.000	100	3.805.700	100	3.819.591	100	3.832.386	100	3.852.238	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa (%) (TPB)	N/A	20		30		50		60		70		80		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan (%) (TPB)	0	0		1		1		1		1		1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%) (SPM)	N/A	50		60		70		80		90		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 06	SOSIAL															
1 06 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	3.798.010	65	3.798.010	76	3.803.707	77	3.817.590	78	3.830.379	79	3.850.220	Dinas Sosial
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Sosial
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	80	100	288.576	100	288.576	100	289.009	100	290.064	100	291.035	100	292.543	Dinas Sosial



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100	100	203.406	100	203.406	100	203.711	100	204.455	100	205.140	100	206.202	Dinas Sosial
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) (SPM) (TPB)	N/A	2	850.000	3	850.000	5	851.275	6	854.382	7	857.244	8	861.685	Dinas Sosial
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) (SPM) (TPB)	N/A	5		10		15		20		25		30		Dinas Sosial
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) (SPM)	N/A	2		3		5		10		15		20		Dinas Sosial
1 06 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	80	100	870.000	100	870.000	100	871.305	100	874.485	100	877.415	100	881.960	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) (SPM)	N/A	5		10		15		20		25		30		Dinas Sosial
		Persentase desa yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	N/A	10		15		20		40		60		80		Dinas Sosial
		Persentase bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin (%) (TPB)	N/A	2		3		5		7		10		15		Dinas Sosial
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)	N/A	10	1.000.000	15	1.000.000	20	1.001.500	40	1.005.155	60	1.008.523	80	1.013.747	Dinas Sosial
		Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dasar (jiwa)	N/A	10		20		50		100		200		300		Dinas Sosial



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
		Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial (kelompok)	N/A	10		20		50		100		200		300		Dinas Sosial
		Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial (orang)	N/A	10		15		20		40		60		80		Dinas Sosial
		Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan (orang) (TPB)	N/A	5		10		20		30		40		50		Dinas Sosial
1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan berfungsi dengan baik (%)	100	100	150.000	100	150.000	100	150.225	100	150.773	100	151.278	100	152.062	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 07	TENAGA KERJA															
2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian kinerja urusan tenaga kerja (%)	N/A	60	50.000	80	60.000	90	60.090	95	60.309	97	60.511	100	60.825	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 07 03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya (orang)	N/A	100	400.000	100	400.000	100	400.600	100	402.062	100	403.409	100	405.499	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri (orang) (TPB)	N/A	100		100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (orang) (TPB)	N/A	100	200.000	100	200.000	100	200.300	100	201.031	100	201.705	100	202.749	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan tenaga kerja (%) (TPB)	70	80	200.000	90	200.000	95	200.300	100	201.031	100	201.705	100	202.749	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
		Cakupan peserta jaminan sosial tenaga kerja (%) (TPB)	N/A	80		85		90		93		95		97		
2 08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2 08 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	3.699.360											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	
2 08 02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja APBD (%) (TPB)	N/A	20	500.000	21	500.000	22	500.750	23	502.578	24	504.261	25	506.873	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (%) (TPB)	N/A	50	300.000	60	310.000	70	310.465	80	311.598	85	312.642	90	314.262	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang terfasilitasi (%)	80	100	100.000	100	100.000	100	100.150	100	100.516	100	100.852	100	101.375	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Sistem data gender dan anak berfungsi baik (%)	90	100	100.000	100	100.000	100	100.150	100	100.516	100	100.852	100	101.375	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak (%)	20	30	500.000	35	500.000	40	500.750	50	502.578	60	504.261	70	506.873	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%) (TPB)	N/A	100	300.000	100	300.000	100	300.450	100	301.547	100	302.557	100	304.124	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2 09	PANGAN																
2 09 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.007.640											Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100												Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80												Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat (%)	N/A	5	800.000	5	800.000	5	801.200	5	804.124	5	806.818	5	810.998	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilitas harga pangan (%)	<10	<10	900.000	<10	900.000	<10	901.350	<10	904.640	<10	907.670	<10	912.372	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan (%)	N/A	10	100.000	9	100.000	8	100.150	7	100.516	6	100.852	5	101.375	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	N/A	30	300.000	40	300.000	50	300.450	60	301.547	70	302.557	80	304.124	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
2 10	PERTANAHAN																
2 10 02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase penetapan izin lokasi sesuai aturan (%)	N/A	80	50.000	80	52.000	85	52.078	90	52.268	90	52.443	95	52.715	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 10 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan secara mediasi (%)	N/A	80	300.000	80	300.000	80	300.450	85	301.547	85	302.557	85	304.124	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	N/A	90	100.000	90	500.000	95	500.750	100	502.578	100	504.261	100	506.873	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 10 06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian yang terselesaikan (%)	N/A	100	100.000	100	120.000	100	120.180	100	120.619	100	121.023	100	121.650	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 10 07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penetapan tanah ulayat sesuai aturan (%)	N/A	100	50.000	100	52.000	100	52.078	100	52.268	100	52.443	100	52.715	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 10 08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong (%)	N/A	80	100.000	80	150.000	85	150.225	85	150.773	90	151.278	100	152.062	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 10 09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase penerbitan izin membuka tanah (%)	100	100	900.000	100	900.000	100	901.350	100	904.640	100	907.670	100	912.372	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 10 10	Program Penatagunaan T tanah	Persentase lahan pemda bersertifikat (%)	80	82	300.000	90	300.000	95	300.450	100	301.547	100	302.557	100	304.124	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 11	LINGKUNGAN HIDUP																
2 11 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	6.165.600	65	6.165.600	76	6.174.848	77	6.197.387	78	6.218.148	79	6.250.358	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (%)	100	100	400.000	100	400.000	100	400.600	100	402.062	100	403.409	100	405.499	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani (%) (TPB)	100	100	300.000	100	300.000	100	300.450	100	301.547	100	302.557	100	304.124	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kabupaten (%) (TPB)	30	>30	1.000.000	>30	1.000.000	>30	1.001.500	>30	1.005.155	>30	1.008.523	>30	1.013.747	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanian	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pemenuhan komitmen penyimpanan sementara limbah B3 (%) (TPB)	100	100	50.000	100	50.000	100	50.075	100	50.258	100	50.426	100	50.687	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase pemenuhan komitmen pengumpulan limbah B3 dalam kabupaten (%) (TPB)													Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan		
2 11 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan (%) (TPB)	N/A	70	400.000	75	400.000	80	400.600	85	402.062	90	403.409	100	405.499	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
2 11 07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang terfasilitasi (%)	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	100	100	75.000	100	75.000	100	75.113	100	75.387	100	75.639	100	76.031	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah yang dilaksanakan (%)	100	100	50.000	100	50.000	100	50.075	100	52.159	100	53.769	100	108.665	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (%)	N/A	50		55		58		60		63		65		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
2 11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani (%) (TPB)	100	100	200.000	100	200.000	100	200.300	100	201.031	100	201.705	100	202.749	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah (%) (TPB)	N/A	3	1.900.000	5	1.900.000	5	1.902.850	6	1.909.795	7	1.916.193	8	1.926.119	Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase penanganan sampah (%) (TPB)	N/A	20		25		30		32		35		40		Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan	
2 12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.624.200	65	4.624.200	76	4.631.136	77	4.648.040	78	4.663.611	79	4.687.768	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el (%)	94	95	3.500.000	96	3.500.000	97	3.505.250	98	3.518.044	99	3.529.830	100	3.548.114	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	100	100	600.000	100	600.000	100	600.900	100	603.093	100	605.114	100	608.248	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%) (TPB)	99	99,2		99,3		99,5		99,7		99,9		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang	N/A	25		30		33		35		37		40		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	N/A	80		85		90		95		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan (%)	N/A	80		85		90		95		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase keakuratan informasi administrasi kependudukan (%)	N/A	90	1.000.000	90	1.000.000	95	1.001.500	100	1.005.155	100	1.008.523	100	1.013.747	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Pemanfaatan data kependudukan (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan (%)	100	100	200.000	100	200.000	100	200.300	100	201.031	100	201.705	100	202.749	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2 13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
2 13 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	N/A	>65	6.029.186	65	6.029.186	76	6.038.230	77	6.060.269	78	6.080.571	79	6.112.069	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Persentase pemenuhan layanan	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2 13 02	Program Penataan Desa	Persentase desa terfasilitasi dalam penataan desa (%)	100	100	150.000	100	150.000	100	150.225	100	150.773	100	151.278	100	152.062	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2 13 03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa terfasilitasi dalam kerjasama antar desa (%)	100	100	100.000	100	125.000	100	125.188	100	125.644	100	126.065	100	126.718	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2 13 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa berpredikat Desa Maju (desa) (TPB)	38	38	2.000.000	39	2.000.000	40	2.003.000	41	2.010.311	42	2.017.045	43	2.027.494	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
		Jumlah desa berpredikat Desa Berkembang (desa)	204	204		205		206		207		208		209		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah desa berpredikat Desa Tertinggal (desa)	22	22		20		18		16		14		12		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase BUMDES level berkembang (%)	N/A	10		15		18		20		22		24		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 13 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes (%)	N/A	60	800.000	70	800.000	75	801.200	80	804.124	85	806.818	90	810.998	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2 14 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	3.327.883	65	3.327.883	76	3.332.874	77	3.345.039	78	3.356.245	79	3.373.631	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,03	1,03	1.000.000	1,02	1.000.000	1,01	1.001.500	1	1.005.155	0,99	1.008.523	0,95	1.013.747	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB Aktif (%) (TPB)	14,23	15	5.000.000	20	5.000.000	25	5.007.500	30	5.025.777	35	5.042.614	40	5.068.734	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (%) (TPB)	14,23	15		20		25		30		35		40		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
2 14 04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera terfasilitasi (%)	N/A	90	1.500.000	95	1.500.000	97	1.502.250	100	1.507.733	100	1.512.784	100	1.520.620	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 15	PERHUBUNGAN																
2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	6.859.230	65	6.859.230	76	6.869.519	77	6.894.593	78	6.917.689	79	6.953.523	Dinas Perhubungan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Perhubungan	
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase cakupan ketersediaan perlengkapan jalan raya kewenangan kabupaten (%) (TPB)	N/A	40	3.000.000	50	3.000.000	60	3.004.500	70	3.015.466	80	3.025.568	85	3.041.241	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelanggaran lalu lintas (%) (TPB)	N/A	30		25		20		15		10		10		Dinas Perhubungan	
		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan raya yang berfungsi dengan baik (%) (TPB)	N/A	40		50		60		70		80		85		Dinas Perhubungan	
		Persentase kendaraan wajib uji yang lulus uji (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan	
		Persentase sarana dan prasarana pengujian yang layak	0	0		100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan	
2 16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.315.920	65	4.315.920	76	4.322.394	76	4.338.171	76	4.352.703	76	4.375.250	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2 16 02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemda terhadap isu yang berkembang di media massa dan media elektronik klasifikasi	100	100	2.400.000	100	2.400.000	100	2.403.600	100	2.412.373	100	2.420.455	100	2.432.993	Dinas Komunikasi Dan Informatika	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
		Persentase konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan	N/A	40		50		60		75		75		80		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah (%)	N/A	60		65		70		78		78		80		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh perangkat daerah sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 ttg KIP (%) (TPB)	N/A	60		65		70		78		78		80		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah (%)	N/A	50		55		60		80		80		85		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2 16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase cakupan layanan SPBE perangkat daerah (%) (TPB)	40	45	3.300.000	50	3.300.000	75	3.304.950	80	3.317.013	85	3.328.125	90	3.345.365	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah (%) (TPB)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Persentase layanan publik (G2b) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan (%) (TPB)	50	55		60		70		80		90		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan (%) (TPB)	50	55		60		70		80		90		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
		Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital (%)	0	10		20		30		40		50		60		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i> sesuai dengan Masterplan	50	55		60		70		80		90		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)	N/A	30		40		50		50		50		50		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)	N/A	30		40		50		50		50		50		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2 17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
2 17 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.624.200	65	4.624.200	76	4.631.136	77	4.648.040	78	4.663.611	79	4.687.768	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 17 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (%)	N/A	100	140.000	100	140.000	100	140.210	100	140.722	100	141.193	100	141.925	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 17 03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi menyelenggarakan RAT tepat waktu (%)	32,57	35 - 40	100.000	40	100.000	50	100.150	60	100.516	70	100.852	80	101.375	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
		Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas (%)	N/A	10		15		20		20		20		20		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat (%)	0	1	95.000	3	95.000	5	95.143	7	95.490	8	95.810	9	96.306	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 17 05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan pengurus koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan koperasi (%)	N/A	10	150.000	20	160.000	30	160.240	40	160.825	50	161.364	60	162.200	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
2 17 06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi aktif (%) (TPB)	32,57	33	200.000	40	200.000	50	200.300	70	201.031	72	201.705	75	202.749	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 17 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM (%) (TPB)	-0,24	0,05	100.000	0,39	100.000	0,5	100.150	0,5	100.516	0,5	100.852	0,5	101.375	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
		Persentase peningkatan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha (%) (TPB)	N/A	10		15		20		20		20		20		Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 17 08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil (%) (TPB)	N/A	2	500.000	5	500.000	10	500.750	15	502.578	18	504.261	25	506.873	Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja
2 18	PENANAMAN MODAL															
2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.457.729	65	3.435.572	76	3.440.725	77	3.453.284	78	3.464.852	79	3.482.800	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan T erpadu Satu Pintu
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan T erpadu Satu Pintu
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti (%)	N/A	10	300.000	10	300.000	15	300.450	20	301.547	25	302.557	25	304.124	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor (%)	7,8	>10	300.000	>10	300.000	>10	300.450	>10	301.547	>10	302.557	>10	304.124	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah permohonan izin yang dilayani (%)	10	10	930.000	20	930.000	20	931.395	30	934.795	30	937.926	30	942.785	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	75	80		80		95		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah tentang perizinan dan non perizinan (%)	50	60		90		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan menyampaikan LKPM (%)	100	100	200.000	100	200.000	100	200.300	100	201.031	100	201.705	100	202.749	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan (%)	N/A	80		90		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik (%)	70	80	300.000	100	300.000	100	300.450	100	301.547	100	302.557	100	304.124	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan (%)	70	70		75		80		90		95		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																
2 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	N/A	>65	3.832.691											Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100												Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80												Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	N/A	5	1.200.000	5	1.200.000	6	1.201.800	6	1.206.187	7	1.210.227	7	1.216.496	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	0,1		0,2		0,3		0,4		0,5		0,6		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Athlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (orang)	N/A	10	2.000.000	15	2.000.000	20	2.003.000	25	2.010.311	30	2.017.045	35	2.027.494	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Perolehan medali emas dalam Porprov (medali emas)	18	-		20		0		22		0		24		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 20	STATISTIK																
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan dokumen perencanaan (%)	75	75	50.000	80	51.000	90	52.000	90	53.000	95	54.000	95	55.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 21	PERSANDIAN																
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	N/A	100	50.000	100	51.000	100	52.000	100	53.000	100	54.000	100	55.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 22	KEBUDAYAAN																
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	7	7	1.000.000	7	1.000.000	7	1.001.500	7	1.005.155	7	1.008.523	7	1.013.747	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat (%)	N/A	60		62		63		65		66		67		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2 22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%)	N/A	20	200.000	25	200.000	30	200.300	33	201.031	35	201.705	37	202.749	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni (%)	N/A	50		55		60		65		70		75		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	N/A	10		12		15		17		18		19		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (%)	N/A	50	100.000	55	100.000	60	100.150	65	100.516	70	100.852	75	101.375	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2 22 05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	7	7	100.000	7	100.000	7	100.150	7	100.516	7	100.852	7	101.375	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	7	7		7		7		7		7		7		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2 22 06	Program Pengelolaan Permuseuman	Cakupan museum kabupaten yang dikelola (%)	N/A	50	150.000	50	155.000	50	155.233	100	155.799	100	156.321	100	157.131	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
2 23	PERPUSTAKAAN																
2 23 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.778.340	65	4.778.340	76	4.785.508	77	4.802.975	78	4.819.065	79	4.844.027	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2 23 02	Program Pembinaan Perpustakaan	pengunjung perpustakaan/minat baca (rasio minat baca)	0,25	0,3	500.000	0,31	500.000	0,32	500.750	0,33	502.578	0,34	504.261	0,35	506.873	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2 23 03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	cakupan digitalisasi pelestarian naskah kuno kabupaten (%)	N/A	60	100.000	70	100.000	80	100.150	90	100.516	100	100.852	100	101.375	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
2 24	KEARSIPAN																
2 24 02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara	50	52	125.000	55	125.000	57	125.188	60	125.644	65	126.065	75	126.718	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti sah (%)	N/A	70		72		73		74		75		76		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		Jumlah pengguna pelayanan arsip (orang)	N/A	100		150		200		250		280		300		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
2 24 03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip terjaga (%)	N/A	50	50.000	65	50.000	65	50.075	70	50.258	70	50.426	70	50.687	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2 24 04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah (%)	N/A	70	50.000	80	50.000	80	50.075	80	50.258	90	50.426	90	50.687	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 25	KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3 25 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	5.009.550	65	5.009.550	76	5.017.064	77	5.035.377	78	5.052.245	79	5.078.416	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	-23,57	1 - 5	600.000	2	600.000	3	600.900	4	603.093	5	605.114	6	608.248	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	-48,05	1 - 5	1.000.000	2	1.000.000	2	1.001.500	3	1.005.155	4	1.008.523	5	1.013.747	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Kepatuhan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	N/A	65	100.000	65	100.000	70	100.150	75	100.516	75	100.852	80	101.375	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 25 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	cakupan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil yang memiliki tanda daftar usaha (%)	N/A	50	300.000	60	300.000	70	300.450	80	301.547	90	302.557	100	304.124	Dinas Perikanan dan Peternakan
3 26	PARIWISATA															
3 26 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	4.007.640	65	4.007.640	76	4.013.651	77	4.028.301	78	4.041.796	79	4.062.733	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah usaha pariwisata (%)	N/A	10	2.000.000	10	2.000.000	15	2.003.000	20	2.010.311	20	2.017.045	20	2.027.494	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%) (TPB)	-8,46	2 - 5	1.000.000	10	1.000.000	20	1.001.500	25	1.005.155	25	1.008.523	25	1.013.747	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kecamatan yang ditangani (kecamatan)	0	0	-	1	100.000	1	100.000	1	100.365	1	100.701	1	101.223	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif (%)	N/A	10	900.000	10	900.000	15	901.350	20	904.640	20	907.670	30	912.372	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3 27	PERTANIAN																
3 27 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	8.323.560	65	8.323.560	76	8.336.045	77	8.366.472	78	8.394.500	79	8.437.983	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
3 27 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi) (%)	1,4	1	32.000.000	1,5	22.000.000	1,6	32.048.000	1,7	32.164.975	1,8	32.272.727	2	32.389.659	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (jagung) (%)	-0,12	1		1,2		1,3		1,4		1,5		1,6		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (%)	10	10		10		10		10		10		10		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (%)	0,56	0,5		0,6		0,6		0,7		0,7		0,8		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	N/A	1		1		1		1,2		1,2		1,2		Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Ideks Pertanaman (IP)	2	2	15.100.000	2	15.100.000	2	15.122.650	2	15.177.848	2	15.228.693	2	15.307.578	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak (%)	2,17	2		3		4		5		6		7		Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	N/A	60	300.000	63	300.000	65	300.450	70	301.547	70	302.557	80	304.124	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman pangan (%)	N/A	70	500.000	75	500.000	77	500.750	80	502.578	83	504.261	85	506.873	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman hortikultura (%)	N/A	70		75		77		80		83		85		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman perkebunan (%)	N/A	60		65		68		70		75		80		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
3 27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	cakupan usaha pertanian berizin (%)	N/A	80	400.000	85	400.000	90	400.600	95	402.063	100	403.409	100	405.499	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		cakupan usaha peternakan berizin (%)	N/A	80		85		90		95		100		100		Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)	N/A	5	1.000.000	6	1.000.000	7	1.001.500	8	1.005.155	9	1.008.523	10	1.013.747	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		persentase peningkatan kelas kelompok ternak (%)	N/A	5		6		7		8		9		10		Dinas Perikanan dan Peternakan	
3 30	PERDAGANGAN																
3 30 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	>65	5.626.110	65	5.626.110	76	5.634.549	77	5.655.115	78	5.674.060	79	5.703.452	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 30 02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha memiliki izin (tertib usaha) (%)	60	65	200.000	65	200.000	70	200.300	73	201.031	75	201.705	76	202.749	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar (%)	-18,53	5	2.200.000	10	2.200.000	10	2.203.300	10	2.211.342	15	2.218.750	15	2.230.243	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 30 04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok (%)	<10	<10	300.000	<10	300.000	<10	300.450	<10	301.547	<10	302.557	<10	304.124	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	70	72		74		78		80		83		86		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	60	65		67		71		74		78		80		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	60	65		67		71		74		78		80		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	N/A	5		5,2		5,3		5,6		5,8		5,9		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 30 05	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	-12,4	4	500.000	10	500.000	10	500.750	10	502.578	10	504.261	10	506.873	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 30 06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) bertanda tera sah (%)	N/A	75	250.000	76	250.000	80	250.375	85	251.289	90	252.131	100	253.437	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 30 07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang memasarkan produknya melalui aplikasi sistem elektronik (%)	N/A	0,25	100.000	1	100.000	5	100.150	10	100.516	20	100.852	30	101.375	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Persentase UMKM yang memasarkan produknya melalui jaringan retail nasional (%)	N/A	0,25		0,5		1		2		3		4		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 31	PERINDUSTRIAN								-								
3 31 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan jumlah industri (%)	1,15	1	400.000	2	400.000	5	400.600	5	402.062	8	403.409	10	405.499	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (%)	46.456	46.460		46.650		47.000		47.300		47.700		48.000		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
		Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Miliar)	225	225		240		250		260		280		300		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 31 03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri berizin (%)	70	100	100.000	80	100.000	85	100.150	90	100.516	95	100.852	100	101.375	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 31 04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase industri terdaftar di SIINas (%)	N/A	10	100.000	50	100.000	75	100.150	80	100.516	90	100.852	100	101.375	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3 32	TRANSMIGRASI																
3 32 02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Ketersediaan dokumen perencanaan transmigrasi (%)	N/A	0	-	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Perangkat Daerah Terkait	
3 32 03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi kabupaten	N/A	0	-	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Perangkat Daerah Terkait	
3 32 04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase permukiman transmigrasi terfasilitasi (%)	N/A	0	-	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	Perangkat Daerah Terkait	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH													-		
4 01 01	Program Administrasi Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	31.675.770	65	31.675.770	76	31.723.284	77	31.839.074	78	31.945.735	79	32.111.213	Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga (%)	76	78		80		90		90		94		95		Sekretariat Daerah
		Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah (%)	65	66		70		73		75		80		83		Sekretariat Daerah
		Tingkat kepuasan kada/wakada terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan (%)	76	78		80		90		90		94		95		Sekretariat Daerah
4 01 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu (%)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.015.000	100	10.051.555	100	10.085.227	100	10.137.469	Sekretariat Daerah
		Persentase penanganan permasalahan bidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	N/A	90		95		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah (%)	46	65		70		75		80		80		80		Sekretariat Daerah
		Persentase kerjasama yang aktif (%) (TPB)	N/A	60		70		75		80		83		85		Sekretariat Daerah
		Persentase rumah ibadah/lembaga keagamaan yang difasilitasi (%)	20	22		25		28		30		40		45		Sekretariat Daerah
4 01 03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian (%)	N/A	90	4.000.000	95	4.000.000	100	4.006.000	100	4.020.622	100	4.034.091	100	4.054.988	Sekretariat Daerah
		Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan (%)	N/A	90		95		100		100		100		100		Sekretariat Daerah



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
		Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (%) (T/PB)	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah	
		Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang sumber daya alam (%)	N/A	90		95		100		100		100		100		Sekretariat Daerah	
4 02	SEKRETARIAT DPRD																
4 02 01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	26.007.787	65	26.007.787	76	26.046.799	77	26.141.870	78	26.229.445	79	26.365.314	Sekretariat DPRD	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	N/A	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	N/A	80		90		100		100		100		100		Sekretariat DPRD	
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase capaian target propemperda (%)	46	65	30.000.000	70	30.000.000	75	30.045.000	80	30.154.664	80	30.255.682	80	30.412.407	Sekretariat DPRD	
		Persentase pengambilan keputusan APBD yang terselesaikan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD	
		Persentase pengawasan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan (%)	80	80		83		85		90		90		95		Sekretariat DPRD	
		Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi (%)	75	76		78		80		82		85		90		Sekretariat DPRD	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5 01	PERENCANAAN																
5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	9.864.960	65	9.864.960	76	9.879.757	77	9.915.819	78	9.949.037	79	10.000.573	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercapai (%)	57,14	71	1.590.000	71	1.560.000	73	1.562.340	75	1.568.043	80	1.573.295	85	1.581.445	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai (%)	44,52	45	2.900.000	50	2.900.000	60	2.904.350	70	2.914.951	80	2.924.716	85	2.939.866	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
5 02	KEUANGAN															
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	79.597.159	65	79.371.586	76	79.482.380	77	79.772.491	78	80.039.729	79	80.961.208	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah/Badan Pendapatan Daerah
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah/Badan
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah/Badan
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	NA	B	630.033.833	B	641.033.833	B	630.027.942	B	632.297.944	B	633.402.093	B	636.708.137	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat (%)	NA	80	300.000	>80	300.000	>80	300.450	>80	301.547	>80	302.557	>80	304.124	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD (%)	6,71	5	7.000.000	10	7.000.000	11	7.010.500	12	7.036.088	13	7.059.659	15	7.096.228	Badan Pendapatan Daerah
5 03	KEPEGAWAIAN															
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	5.163.690	65	5.163.690	76	5.171.436	77	5.190.311	78	5.207.699	79	5.234.675	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Instansi/ASN terhadap pelayanan	N/A	70	3.700.000	70	3.700.000	75	3.705.550	76	3.719.075	77	3.731.534	78	3.750.864	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
		Tingkat kualitas pengadaan ASN	N/A	14		15		16		17		18		19		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
		Persentase kinerja ASN (%)	76	78		80		85		88		90		93		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
		Persentase disiplin ASN (%)	70	75		80		83		85		88		90		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
		Implementasi aplikasi wajib ASN (%)	80	90		100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	N/A	>30	2.500.000	>30	2.500.000	>30	2.503.750	>30	2.512.889	>30	2.521.307	>30	2.534.367	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran dalam satu tahun (%)	N/A	5		6		8		10		12		15		Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5 05 02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan daerah (%)	N/A	0	680.000	25	680.000	30	681.020	50	683.506	75	685.795	80	689.348	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6 01	PENGAWASAN																
6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	12.331.200	65	12.331.200	76	12.349.697	77	12.394.773	78	12.436.296	79	12.500.716	Inspektorat	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Inspektorat	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Inspektorat	
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase hasil rewiu dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.300.000	100	3.300.000	100	3.304.950	100	3.317.013	100	3.328.125	100	3.345.365	Inspektorat	
		Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	80	80		85		85		90		95		100		Inspektorat	
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP Level 3 (%)	60	62	390.000	65	390.000	70	390.585	73	392.011	75	393.324	78	395.361	Inspektorat	
		Persentase tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten (%)	67	78		82		84		85		86		88		Inspektorat	
6	UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01	KEWILAYAHAN																
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	18.496.800	65	18.496.800	76	18.524.545	77	18.592.160	78	18.654.444	79	18.751.074	Kecamatan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan	
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Kecamatan	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu (%)	N/A	100	500.000	100	500.000	100	500.750	100	502.578	100	504.261	100	506.873	Kecamatan	
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terfasilitasi (%)	100	100	30.000	100	30.000	100	30.045	100	30.155	100	30.256	100	30.412	Kecamatan	



Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	
RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA																
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	400.000	100	400.000	100	400.600	100	402.062	100	403.409	100	405.499	Kecamatan
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan terkait isu SARA (%)	100	100	25.000	100	28.000	100	28.042	100	28.144	100	28.239	100	28.385	Kecamatan
7 01 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu (%)	100	100	35.000	100	37.000	100	37.056	100	37.191	100	37.315	100	37.509	Kecamatan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	>65	3.545.220	65	3.545.220	76	3.550.538	77	3.563.497	78	3.575.435	79	3.593.956	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100	100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	80	80		90		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah desa berkarakter Pancasila (desa) (TPB)	0	0	200.000	1	200.000	2	200.300	3	201.031	4	201.705	5	202.749	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase potensi gangguan stabilitas politik dengan gangguan stabilitas politik yang terjadi (%) (TPB)	N/A	<50	100.000	<50	100.000	<50	100.150	<50	100.516	<50	100.852	<50	101.375	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pendidikan politik (%)	N/A	5		10		15		20		25		30		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas terdaftar (%)	N/A	100	100.000	100	100.000	100	100.150	100	100.516	100	100.852	100	101.375	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase potensi konflik SARA dengan konflik SARAYang terjadi (%) (TPB)	N/A	<50	600.000	<50	600.000	<50	600.750	<50	602.578	<50	604.261	<50	606.873	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%) (TPB)	Meningkat	3		5	500.000	5	500.750	5	502.578	5	504.261	5		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial dengan konflik sosial yang terjadi (%) (TPB)	N/A	<50	400.000	<50	400.000	<50	400.600	<50	402.062	<50	403.409	<50	428.565	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL					2.221.805.243		2.226.873.659		2.230.263.028		2.238.370.238		2.245.851.379		2.257.504.730	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan dokumen RPJMD dimanatkan untuk menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah tersebut bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan menyesuaikan dengan evaluasi kinerja daerah jangka menengah lalu, serta sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021-2026, ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada sasaran pokok pembangunan daerah yang meliputi :



Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Timur

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUNAN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Tukar Petani (TPB)	98,93	98,94	98,95	98,97	99,2	99,5	> 100
2	Nilai Tukar Nelayan (TPB)	N/A	98,94	98,95	98,97	99,2	99,5	> 100
3	Capaian rata-rata kinerja pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan (%)	N/A	60	62	65	68	70	75
4	Tingkat Kemantapan Jalan (%) (TPB)	61,17	63	65	68	70	73	75
5	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	0	0	1	1	1	1	1
6	Indeks Pembangunan Manusia (TPB)	69,37	69,39	69,4	69,5	69,6	69,8	69,9
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (TPB)	2,64	2,64	2,64	2,6	2,6	2,6	2,5
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) (TPB)	-2,29	1,0	3,5	3,5	3,6	3,8	4
9	Persentase penduduk miskin (%) (TPB)	14,62	14,62	14,62	14,55	14,4	14,2	14
10	Indeks Gini (TPB)	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33
11	Laju inflasi (TPB)	2,01	2	2	2	2	2	2
12	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun) (TPB)	38,7	36,5	36,8	38,9	40,3	41,8	42,2
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (TPB)	N/A	70	70	70,5	71,5	72	72,5
14	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk (TPB)	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35
15	Indeks Demokrasi (TPB)	N/A	70	70	70	70,5	71	71,5
16	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu) (TPB)	C	C	C	CC	CC	B	B
17	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) (TPB)	N/A	70	75	76	78	80	80
18	Nilai SAKIP (Huruf Mutu) (TPB)	C	C	C	CC	B	B	B
19	Opini BPK (opini) (TPB)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Pertumbuhan investasi daerah (%)	2	2	3	4	4	5	5
21	Indeks Risiko Bencana Daerah (TPB)	183,2	183,2	183,1	183	182,9	182,8	182,7
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	N/A	62,97	63,38	63,79	64,19	64,59	64,99



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) (TPB)	-2,29	1,0	3,5	3,6	3,8	4	4,2	4,2
2	Laju inflasi (%) (TPB)	2,01	2	2	2	2	2	2	2
3	Indeks Gini (TPB)	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
4	Persentase penduduk miskin (%) (TPB)	14,62	14,62	14,55	14,4	14,2	14	13,6	13,6
5	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun) (TPB)	38,7	36,5	36,8	38,9	40,3	41,8	42,2	42,2
6	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	9.983	9.983	9.988	10.000	10.500	11.000	11.500	11500
7	Skor Pola Pangan Harapan (TPB)	84,70	84,70	84,71	84,72	84,73	84,74	84,75	84,75
8	Indeks Pembangunan Manusia (TPB)	69,37	69,39	69,4	69,5	69,6	69,8	69,9	69,9
9	Harapan Lama Sekolah (tahun) (TPB)	12,85	12,85	12,86	12,87	12,88	12,89	12,9	12,9
10	Rata-rata lama sekolah (tahun) (TPB)	7,6	7,6	7,65	7,66	7,67	7,68	7,7	7,7
11	Angka Harapan Hidup (tahun) (TPB)	70,73	70,73	70,74	70,75	70,76	70,77	70,78	70,78
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (TPB)	72,32	72,32	72,42	72,52	72,6	72,65	72,70	72,7
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (TPB)	2,64	2,64	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (TPB)	8,1	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6
15	Opini BPK (TPB)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Indeks Demokrasi (TPB)	N/A	N/A	70	70.5	71	71,5	72	72
17	Nilai Reformasi Birokrasi (TPB)	C	C	C	CC	CC	B	B	B
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (TPB)	88,78	88,78	88,78	88,79	88,8	88,85	88,9	88,9
B. ASPEK PELAYANAN UMUM									
I Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
a. PENDIDIKAN									
1	Harapan Lama Sekolah (tahun) (TPB)	12,85	12,85	12,86	12,87	12,88	12,89	12,9	12,9
2	Rata-rata lama sekolah (tahun) (TPB)	7,6	7,6	7,65	7,66	7,67	7,68	7,7	7,7
3	Angka Melek Huruf (%) (TPB)	96,87	96,88	96,89	96,9	96,91	96,92	96,93	96,93
4	Angka Partisipasi PAUD (SPM) (TPB)	N/A	80	82	85	88	90	95	95
5	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (SPM) (TPB)	99,7	99,72	99,75	99,78	99,8	99,84	99,86	99,86
6	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (SPM) (TPB)	95,98	95,99	96	96,35	96,39	96,44	96,49	96,49
b. KESEHATAN									
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,73	70,74	70,75	70,76	70,77	70,78	70,78
2	Peningkatan rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk (%)	N/A	2	2	2	3	3	3	3
3	Bed Occupancy Ratio (BOR)	N/A	85	85	85	85	85	85	85
4	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00



No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Prevalensi <i>Stunting</i> (%) (TPB)	26,79	25	24	23	22	21	20	20
6	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (TPB)	N/A	10	9	9	7,5	7,5	7,5	7,5
7	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%) (TPB)	N/A	30	25	20	15	10	8,9	8,9
8	Persentase Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	N/A	10	40	60	80	90	100	100
9	Persentase Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	N/A	20	30	50	75	80	90	90
10	Persentase peningkatan pendapatan BLUD (%)	24,7	15	15	20	20	20	20	20
11	Cakupan pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) (TPB)	75	75	78	80	85	90	100	100
12	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan (%) (TPB)	68	69	72	74	75	77	79	79
13	Cakupan pelayanan korban NAPZA (%) (TPB)	80	83	85	90	92	95	100	100
c. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%) (TPB)	61,17	63	65	68	70	73	75	75
2	Persentase luas sawah beringasi (%) (TPB)	46,76	46,76	50	51	52	53	54	54
3	Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun (km) (TPB)	N/A	0,1	05	1	1	2	2	2
4	Persentase angka BABS di tempat terbuka (%) (TPB)	3,53	3,45	3,1	2,5	1,5	0,5	0	0
5	Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	N/A	1	1	1	1	1	1	5
d. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni (%) (TPB)	N/A	2	2	2	2	2	2	2
2	Rasio ketersediaan penerangan jalan umum per desa (TPB)	N/A	N/A	2	2,5	3	4	5	5
e. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk (TPB)	0,38	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,35
2	Indeks Risiko Bencana Daerah (TPB)	183,2	183,2	183,1	183	182,9	182,8	182,7	182,7
3	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (jam) (TPB)	3	3	2	1	1	0,5	0,5	0,5
f. SOSIAL									
1	Persentase keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat (%) (TPB)	N/A	2	3	5	7	10	15	15
2	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan (orang) (TPB)	N/A	5	10	20	30	40	50	50
3	Taman Makam Pahlawan berfungsi dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
II Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
a. TENAGA KERJA									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (TPB)	72,32	72,32	72,42	72,52	72,6	72,65	72,70	72,7



No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	N/A	5	8	10	15	20	25	25
3	Balai Latihan Kerja (BLK)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
b. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (TPB)	63,13	63,12	62	61	60	59	58	58
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (TPB)	88,78	88,78	88,78	88,79	88,8	88,85	88,9	88,9
c. PANGAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan (TPB)	84,70	84,70	84,71	84,72	84,73	84,74	84,75	84,75
d. PERTANAHAN									
	Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria (KK) (TPB)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20000
3	Persentase lahan pemda bersertifikat (%)	80	82	90	95	100	100	100	100
e. LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (TPB)	N/A	62,97	63,38	63,79	64,19	64,59	64,99	64,99
2	Indeks Kualitas Air (TPB)	63,33	52,6	52,7	52,8	52,9	53	53,1	53,1
3	Indeks Kualitas Udara (TPB)	86,64	82,17	82,27	82,37	82,46	82,55	82,65	82,65
4	Indeks Kualitas Lahan (TPB)	N/A	45,28	46,78	48,29	49,79	51,29	52,78	52,78
5	Persentase pengurangan sampah (%) (TPB)	N/A	3	5	5	6	7	8	8
6	Persentase penanganan sampah (%) (TPB)	N/A	20	25	30	32	35	40	40
7	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan (%)	N/A	70	75	80	85	90	100	100
f. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
1	Jumlah Desa berpredikat Desa Maju (desa) (TPB)	38	38	39	40	41	42	43	43
2	Persentase rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (%)	N/A	5	6	7	8	9	10	10
g. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	N/A	45	47	50	52	55	57	57
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%) (TPB)	16,33	16,2	15	14	12	10	8	8
h. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase kepemilikan KTP-el (%)	94	95	96	97	98	99	100	100
2	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
i. PERHUBUNGAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (TPB)	N/A	65	65	76	77	80	85	85



No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Penurunan kecelakaan lalu lintas (%) (TPB)	1,1	1,1	1,2	1,5	2	3	3	3
3	On Time Performance Layanan Transportasi (%) (TPB)	N/A	60	65	70	75	78	80	80
j. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (TPB)	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
k. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan	2,91	2	2	3	3	4	4	4
2	Persentase koperasi sehat (%)	0	1	3	5	7	8	9	9
l. PENANAMAN MODAL									
2	Pertumbuhan investasi daerah (%)	2 - 3	2	3	4	4	5	5	5
3	Pertumbuhan kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	3,27	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5
m. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
1	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	N/A	35	36	37	38	40	40
2	Peringkat pada even olahraga PORPROV	9	-	8	-	8	-	8	8
n. STATISTIK									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	70	70	73	75	78	80	90	90
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	70	70	73	75	78	80	90	90
o. PERSANDIAN									
1	Jumlah (Computer Security Incident Response Team) CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	0	0	0	1	1	1	1	1
2	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	0	2	3	4	5	8	8
p. KEBUDAYAAN									
1	Persentase organisasi kebudayaan yang terfasilitasi (%)	N/A	10	10	10	10	13	14	14
2	Cakupan kelompok kesenian yang difasilitasi (%)	10	10	10	15	20	25	30	30
3	Cakupan kelompok budaya yang difasilitasi (%)	10	10	10	15	20	25	30	30
4	Persentase peningkatan jumlah kesenian tradisional masyarakat (%)	N/A	10	10	10	10	10	10	10
q. PERPUSTAKAAN									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	10	11	12	13	14	15	15
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	N/A	30	34	35	36	37	38	38
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	75	76	77	78	79	80	81	81
r. KEARSIPAN									
1	Retrieval arsip (menit)	30	20	20	20	20	10	10	10



No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
III	Urusan Pilihan								
a.	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Nilai Tukar Nelayan (TPB)	N/A	98,93	98,95	98,97	99,2	99,5	> 100	> 100
2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	0,32	0,32	1	2	3	4	4	4
b.	PARIWISATA								
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	N/A	65	65	76	77	78	79	79
2	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) (%) (TPB)	-3,42	4	5	6	7	8	10	10
3	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi & makan minum terhadap PDRB (%) (TPB)	1,23	1,23	1,24	1,4	1,6	1,9	2	2
c.	PERTANIAN								
1	Nilai Tukar Petani (TPB)	98,93	98,93	98,95	98,97	99,2	99,5	> 100	> 100
2	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan & perikanan (%)	0,32	0,32	1	2	3	4	4	4
3	Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	N/A	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Jumlah petani peserta Program Kartu Petani Berjaya (%)	16.470	16.498	17.470	18.500	19.600	20.500	21.400	21.400
d.	PERDAGANGAN								
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-1,87	1	2	3,5	3,6	4	4	4
2	Laju inflasi (%)	2,01	2	2	2	2	2	2	2
3	Inflasi Pangan bergejolak (%)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	60	65	68	70	74	78	80	80
e.	PERINDUSTRIAN								
1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	-5,23	1	3	3,5	3,6	4	4,1	4,1
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (%)	7,96	7,96	8	8,3	8,5	8,7	8,9	8,9
IV	Penunjang Urusan								
a.	PERENCANAAN								
1	Persentase indikator kinerja daerah yang tercapai (%)	44,52	50	55	60	70	80	90	90
2	Persentase konsistensi program RKPD dengan program RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase konsistensi kegiatan Renja dengan kegiatan RKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Penetapan RKPD Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
b.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Indeks Inovasi Daerah (TPB)	1.201	1.206	1.215	1.220	1.225	1.230	1.235	1235
c.	KEUANGAN								
1	Opini BPK (opini) (TPB)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks pengelolaan keuangan daerah (TPB)	N/A	B	B	B	B	B	B	B
3	Penetapan APBD tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100



No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan (%) (TPB)	6,71	5	10	10	10	10	10	10
5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak daerah (%)	N/A	65	65	76	77	78	79	79
d. KEPEGAWAIAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN (TPB)	N/A	71	71	72	72	73	75	75
e. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan (%)	32,8	33	40	45	50	55	60	60
2	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat teknis umum dan fungsional (%)	N/A	2	3	5	7	8	10	10
V Unsur Pengawasan									
PENGAWASAN									
1	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
VI Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
a. SEKRETARIAT DAERAH									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (TPB)	N/A	65	65	76	77	78	79	79
2	Nilai SAKIP (TPB)	C	C	CC	CC	B	B	B	B
3	Nilai Reformasi Birokrasi (Huruf Mutu) (TPB)	C	C	C	CC	CC	B	B	B
4	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) (TPB)	N/A	75	75	76	78	80	80	80
b. SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase capaian target propemperda (%) (TPB)	46	>65	70	70	70	80	80	80
VII Kewilayahan									
1	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu (%)	N/A	100	100	100	100	100	100	100
VIII Unsur Pemerintahan Umum									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (TPB)	N/A	70	70	70,5	71,5	72	72,5	72,5
2	Indeks Demokrasi (TPB)	N/A	70	70	70,5	71	71,5	72	72
3	Penurunan penyalahgunaan NAPZA (%) (TPB)	Meningkat	3	5	5	5	5	5	5
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
I Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Pengeluaran per kapita	9.983	9.983	9.988	10.000	10.500	11.000	11.500	11500
2	Nilai Tukar Petani (TPB)	98,93	98,93	98,95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
3	Nilai Tukar Nelayan (TPB)	98,93	98,93	98,95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
II Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	54,84	54,84	55	56	58	60	65	65
III Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (TPB)	N/A	N/A	70	71,5	72,3	72,5	73	73
2	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk (TPB)	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35

BAB IX PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam penyusunan penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam menjamin pencapaian visi dan misi tersebut, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh *stake holder* pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Upaya pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh guna mewujudkan visi **“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”**

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RKPD Tahun 2021-2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota sekitar, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengerahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 sampai dengan 2026.
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2027 yang dilaksanakan pada tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026-2046, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2027.



Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan Tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

M. DAWAM SAHARDJO